



LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BONTANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2020 ini dapat tersusun sebagai implementasi amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sistematika penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi salah satu media yang mampu memberikan informasi secara transparan dan komprehensif terkait pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 kepada DPRD Kota Bontang. Berbagai informasi tentang pencapaian keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dan positif untuk penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bontang untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan bagian dari pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Bontang yang kita cintai ini menuju terwujudnya Bontang yang Smart, Green dan Creative.

Bontang, 9 Maret 2020

Wali Kota Bontang,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

**Daftar Isi**

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	I – 1
1.1. Dasar Hukum	I – 1
1.2. Visi dan Misi	I – 1
1.3. Data Umum Daerah	I – 5
1. Data Geografis Wilayah.....	I -18
2. Jumlah Penduduk.....	I -18
3. Pertumbuhan penduduk.....	I -18
4. Jumlah PNS.....	I -18
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 22
Bab II. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...	II – 1
2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	II – 1
2.2. Pengelolaan Belanja Daerah	II – 16
2.3. Pembiayaan Daerah	II – 32
2.4. Permasalahan dan Solusi	II - 36
Bab III. Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	III – 1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III - 1
3.2. Kebijakan strategi yang ditetapkan	III – 11
3.3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya ...	III – 85
Bab IV. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan	IV – 1
4.1. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan	IV – 3
4.2. Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	IV – 4
Bab V. Penutup	V – 1
Lampiran	

**Daftar Tabel**

	Halaman
Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang	I-7
Tabel 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1	I-10
Tabel 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2	I-15
Tabel 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3	I-18
Tabel 1.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020.....	I-23
Tabel 1.6 Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)	I-27
Tabel 1.7 Penggunaan Tanah di Kota Bontang	I-33
Tabel 1.8 Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang	I-34
Tabel 1.9 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	I-35
Tabel 1.10 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017	I-35
Tabel 1.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	I-36
Tabel 1.12 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2016	I-40
Tabel 1.13 PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2020	I-42
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	II-9
Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020.....	II-13
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....	II-29
Tabel 2.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019	II-30
Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Daerah.....	III-1
Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2020	III-5
Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2020.	III-12
Tabel 3.4. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020.....	III-19
Tabel 3.5. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.....	III-22
Tabel 3.6. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatTahun 2020.....	III-25
Tabel 3.7. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2020	III-29
Tabel 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja	



	Tahun 2020	III-31
Tabel 3.9.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020	III-33
Tabel 3.10.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2020.....	III-37
Tabel 3.11.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2020	III-39
Tabel 3.12.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020	III-41
Tabel 3.13.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	III-44
Tabel 3.14.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.....	III-47
Tabel 3.15.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020	III-50
Tabel 3.16.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2020	III-53
Tabel 3.17.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020.....	III-56
Tabel 3.18.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020.....	III-59
Tabel 3.19.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Tahun 2020	III-61
Tabel 3.20.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020.....	III-64
Tabel 3.21.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2020	III-67
Tabel 3.22.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2020	III-69
Tabel 3.23.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2020	III-72
Tabel 3.24.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2020	III-74
Tabel 3.25.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2020	III-75
Tabel 3.26.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2020	III-78
Tabel 3.27.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2020	IV-80
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan,	



	Penelitian dan pengembangan Tahun 2020.....	III-83
Tabel 3.28	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020	III-84
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2020	III-88
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Kinerja Utama Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 Tahun 2020	III-90
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Kinerja Utama Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2020	III-92
Tabel 3.32	Realisasi Indikator Kinerja Utama Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Fungsi Pendukung Tahun 2020.....	III-96
Tabel 3.33	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2019.....	III-102
Tabel 4.1.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT.PT. Kaltim Industrial Estate.....	IV-18
Tabel 4.3.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas	IV-21
Tabel 4.4	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia	IV-126
Tabel 4.5	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Parna Industri	IV-129
Tabel 4.8.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL	IV-136
Tabel 4.9.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim	IV-141
Tabel 4.10.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pamapersada Nusantara	IV-148
Tabel 4.11.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri	IV-152
Tabel 4.15.	Pelaksanaan kegiatan program Baznas	IV-156



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang.....	I-23
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang	I-24
Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.....	I-26
Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang	I-28
Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang	I-30
Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang	I-31
Gambar 1.7. Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2020.....	I-38
Gambar 1.8. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2020.....	I-38
Gambar 1.9. Perkembangan IPM Kota Bontang	I-40
Gambar 1.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2011-2020.....	I-42
Gambar 2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.	II-8
Gambar 2.2. Komposisi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2019 dan 2020 (%)	II-10
Gambar 2.3. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 dan 2020.....	II-31
Gambar 2.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2019 dan 2020.....	II-32



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh rangkaian proses, dari perencanaan sampai pelaporan atas kinerja pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab III pasal 14 tentang penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Walikota bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 sebagai sebuah laporan tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat laporan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020.

a. Undang-undang pembentukan daerah

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2020;
22. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2020.



1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah **“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Rumusan Visi tersebut mengandung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai **Kota Maritim Berkebudayaan Industri** yang Bertumpu pada **Kualitas Sumber Daya Manusia** dan **Lingkungan Hidup** untuk **Kesejahteraan Masyarakat**. Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Mewujudkan Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan



RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.

b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan



peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.

d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan



tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

1.2.1. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

**Misi I : *Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia***

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
		2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3.	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama
		4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Misi II: *Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup*

Tujuan		Sasaran	
1.	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1.	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
		2.	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
		3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
		4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman



		5.	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6.	Meningkatnya akses pelayanan air minum
		7.	Terlaksananya konservasi sumber daya air
3.	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
		9.	Terselesaikannya permasalahan banjir
Misi III : <i>Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime</i>			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkat-kan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		2.	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
		3.	Meningkatnya Perdagangan dan industry
2.	Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4.	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
		5.	Meningkatnya usaha mikro kecil



1.2.3 Prioritas Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2020 yakni: "Penguatan sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk perekonomian daerah yang berdaya saing". Berdasarkan arah kebijakan di atas maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan
	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat
	Angka putus sekolah menurun
Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat
	Angka kesakitan (Morbiditas) menurun
	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat
Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin
	Menurunkan angka pengangguran
	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama
	Angka kriminalitas menurun
	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni



Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh
	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat
Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun
Penghijauan	Kawasan RTH meningkat
Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat
Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan	Mengkatnya masyarakat nelayan yang ramah terhadap ekosistem laut dan pesisir
	Jumlah objek wisata laut dan pesisir bertambah
Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun
	Kualitas air sungai dan danau meningkat
Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air
Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara
Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang
Daya saing ekonomi	Meningkatnya nilai investasi
- Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif



Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritime
Perdagangan dan industry	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat.

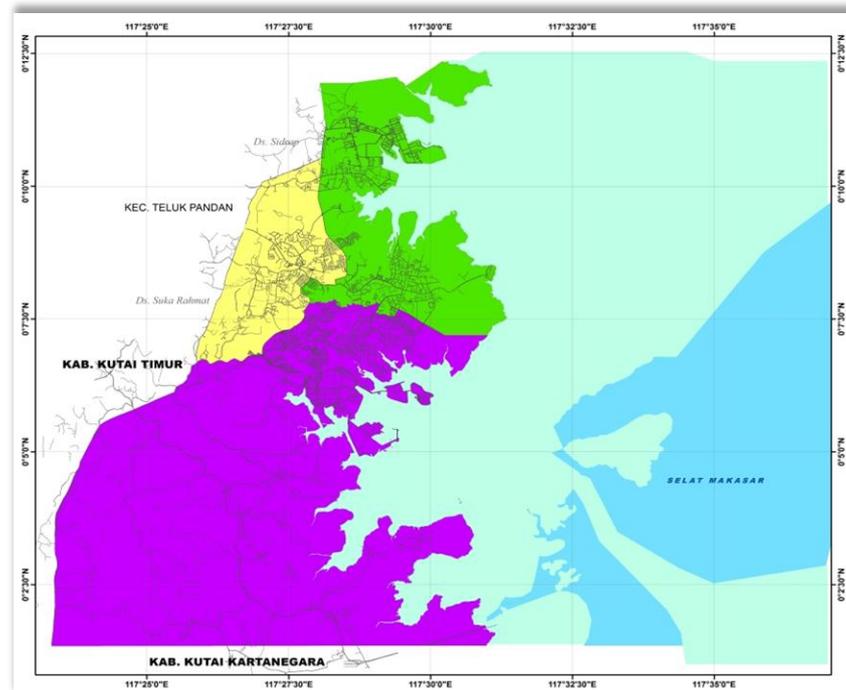
Penetapan prioritas pembangunan tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program-program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020. Implementasi program-program pembangunan secara operasional dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah melalui belanja langsung.

1.3 Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

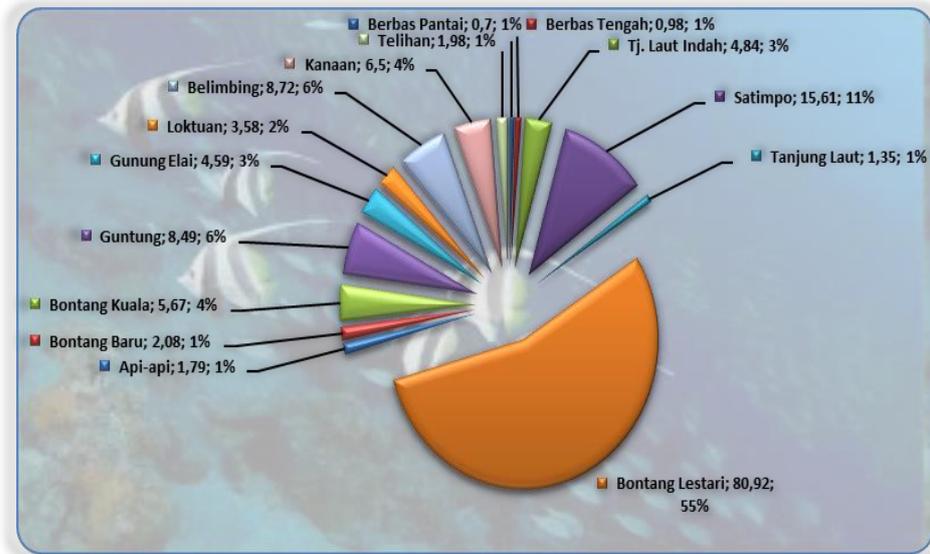
Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999, bersama-sama dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan luas wilayah sekitar 497,57 km², Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang

Luas wilayah Kota Bontang adalah 497,57 km² terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km².

Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan dapat disajikan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang

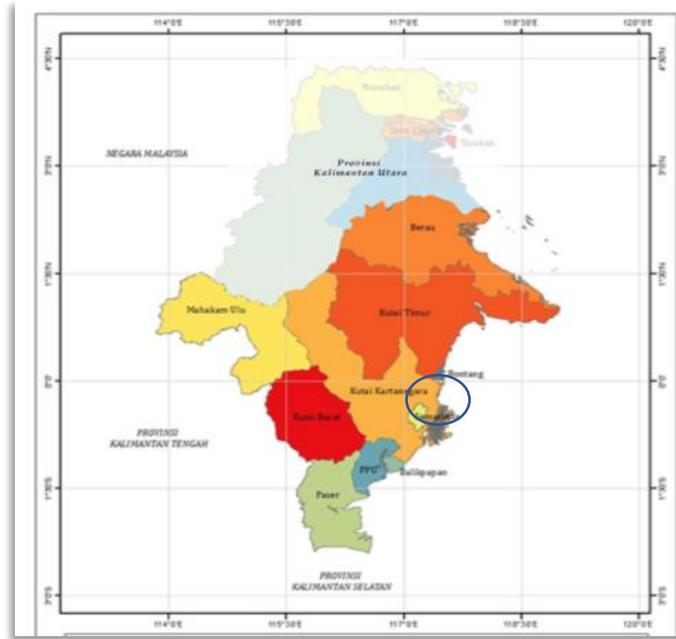
2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomi terletak di antara $117^{\circ}23'$ – $117^{\circ}38'$ Bujur Timur dan antara $0^{\circ}01'$ – $0^{\circ}12'$ Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makassar yang dengan panjang pantai $\pm 24,4$ km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangun pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar

berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.



Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

3. Topografi

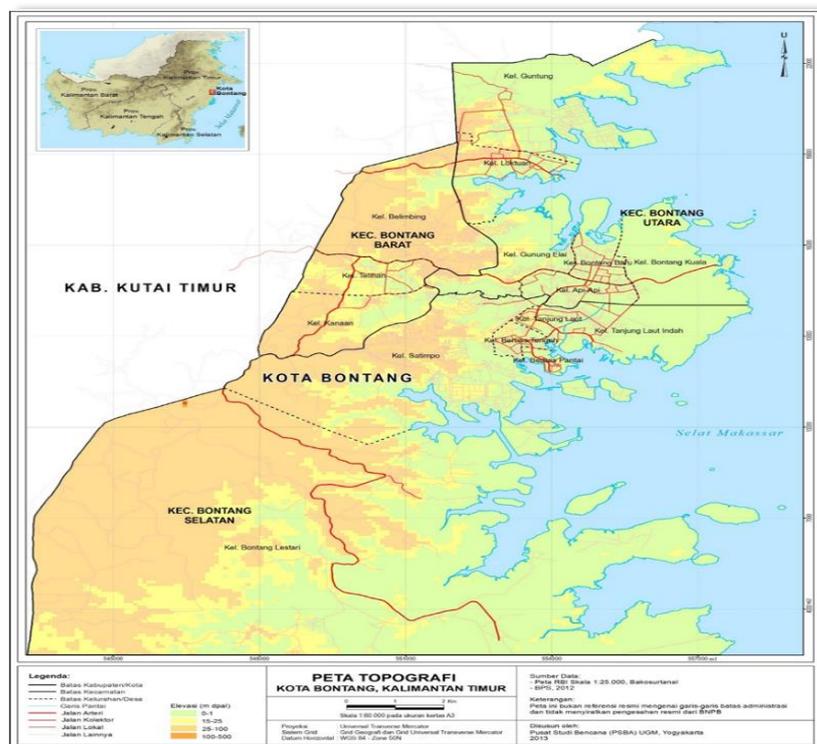
Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.6

Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)
1.	0 – 15	5.415
2.	15 – 25	3.622
3.	25 – 100	5.723
4.	Diatas 100	20
Jumlah		14.780

Sumber: BPS Kota Bontang, 2015



Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang

4. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

1. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.



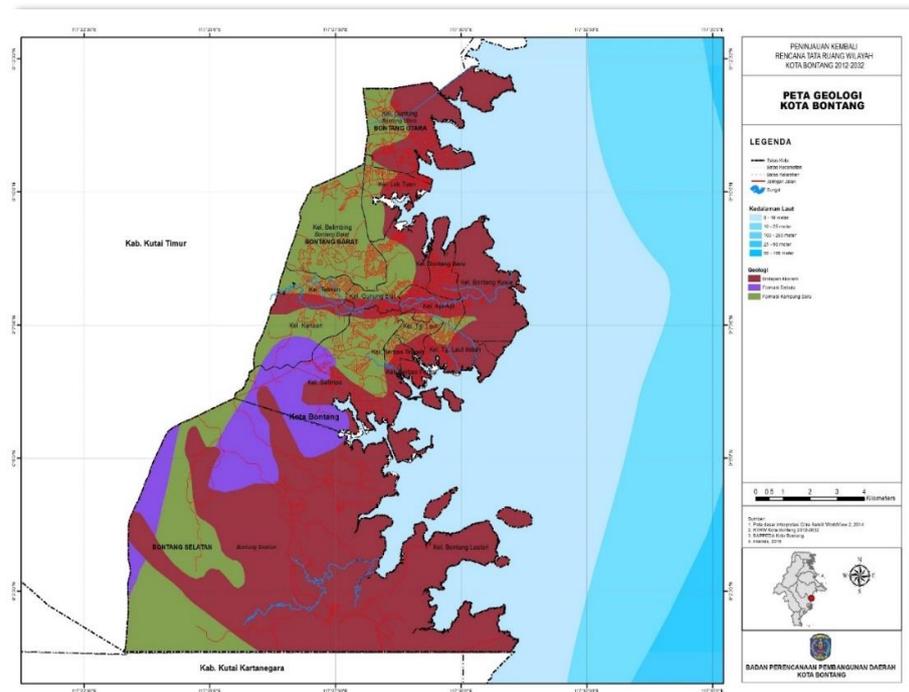
2. Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung.
3. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
4. Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
5. Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
6. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

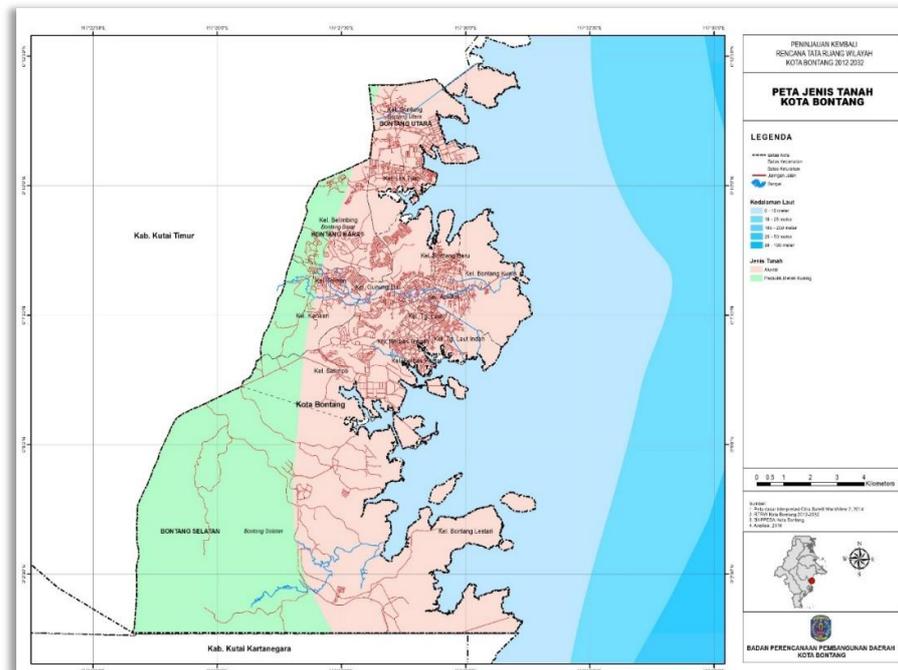
Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang perlapisannya.

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan

mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di bagian barat berarah barat daya-timur laut melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin.



Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang



Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang

Formasi batuan bagian barat relatif naik terhadap formasi batuan bagian timur sehingga formasi batuan tua naik terhadap yang muda. Pada beberapa tempat, terdapat formasi batuan tergeserkan oleh patahan geser (sesar mendatar), patahan ini memotong antiklin, salah satu bukti dapat dilihat adanya pergeseran dari batu gamping dengan bidang geser yang nyata di dekat S. Santan (tepi Jalan Bontang-Samarinda). Zona kelurusan patahan dapat menjadi idang lemah yang mengarahkan aliran air tanah. Strike (jurus) sesar geser jurus umumnya berarah utara-selatan atau hampir berarah barat laut-tenggara, dengan posisi memotong struktur antiklin dan sinklin dengan arah barat laut-tenggara, utara-selatan dan timur laut-barat daya.

Sesar geser diduga terjadi setelah perlipatan struktur kekar terutama dijumpai pada batu gamping dari formasi bebulu dengan arah tidak beraturan. Struktur geologi ini aktif setelah semua formasi batuan diendapkan. kegiatan tektonik diperkirakan dimulai pada Umur Pleistosen, dengan Wilayah Bontang mengalami perlipatan dengan arah gaya lipatan dari barat dan timur, ditandai dengan adanya punggung antiklin Api-api yang letaknya memanjang dari utara



ke selatan. Pada puncak antiklin tersingkap formasi batuan tertua, yang berturut-turut ke arah yang lebih muda, dimulai dari Formasi pamaluan (Tomp), Formasi Bebulu (Tmb), Formasi Pulubalang (Tmpb), Formasi Balikpapan (Tmbp), dan Formasi Kampungbaru adalah formasi batuan Tersier termuda, juga mengalami pengangkatan pada saat terbentuk antiklin, lapisan relatif miring ke arah timur. Dengan adanya kemiringan yang paralel dari formasi diatas, secara hidrogeologi aliran air tanah mengikuti arah kemiringan lapisan. Setelah terjadi pengangkatan, terjadi pengendapan hasil proses geologi seperti pelapukan, erosi dan transportasi. Hal ini ditandai oleh adanya endapan kolovium disebelah barat daya Bontang dan aluvium di daerah datarannya.

5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian barat wilayah Kota Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hilir). DAS Bontang memiliki luas 59,710 Km² dan panjang sungai utama 41,173 Km dengan alur berkelok-kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi Kota Bontang memiliki luas kurang lebih 300 Km² dan panjang sungai utama 17 Km.

6. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau



biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00°C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th. sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas 1.355,56 ha (9,170%) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7
Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
1	Permukiman		
	a. Rumah/Bangunan Gedung	1.355,56	9,17
	b. Pekarangan	972,87	6,58
	c. Fasilitas Sosial	29,76	0,20
	d. Fasilitas Umum	462,43	3,13
	e. Permukiman Atas Air	53,94	0,36
	f. Jasa	69,52	0,47
2	Tambak	323,18	2,19
3	Kawasan Industri/Pabrik		
	a. PT. Pupuk Kaltim	192,46	1,30



No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
	b. PT. Badak NGL	278,07	1,88
	c. Industri terbatas	7,77	0,05
4	Rawa	53,54	0,36
5	Danau/Waduk/Situ	15,11	0,10
6	Hutan Kota	196,98	1,33
7	Hutan Sejenis	2.764,48	18,70
8	Bakau	1.115,51	7,55
9	Belukar	6.870,98	46,49
10	Tanah Terbuka	17,83	0,12
Jumlah		14.780,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8
Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No	Penggunaan	Luas (Ha)	%
A	Flat		
	- Gosong karang	940	2,69
	- Pasir	158	0,45
	- Pasir lumpur	100	0,29
B	Terumbu karang	2.799	8,00
C	Alur pelayaran		
	- PT. Badak NGL	1.311	3,75
	- PT.PKT	3.464	9,90
D	Area efektif untuk kegiatan perikanan	9.384	26,83
E	Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung	16.821,0	48,092
	Luas Total Wilayah Laut	34.977,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010



b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 sebanyak 170.611 jiwa, terdiri dari 89.280 jiwa penduduk laki-laki dan 81.331 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,82% atau berkurang 3.159 jiwa jika dibandingkan penduduk tahun 2017. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 76.358 jiwa atau sebesar 45% dari jumlah penduduk Kota Bontang, sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.9

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontang Utara	40.000	36.358	76.358	45	110
2	Bontang Selatan	34.430	31.333	65.763	39	110
3	Bontang Barat	14.850	13.639	28.489	17	109
	Total	89.280	81.331	170.611	100	110

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018

c. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Bontang tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebagai akibat kelahiran alami dan migrasi. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07% dengan kepadatan penduduk tahun 2018 yaitu 1.154 jiwa/km². Adapun penyebaran penduduk secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.10

Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Bontang Utara	26,20	71.106	73.284	77.772	76.358	2.714	2.797	2.968	2.914
2	Bontang Selatan	104,40	62.990	63.542	66.981	65.764	603	609	642	630
3	Bontang Barat	17,20	27.317	27.432	29.017	28.489	1.588	1.595	1.687	1.656
	Jumlah	147,80	161.413	164.258	173.770	170.611	1.092	1.111	1.176	1.154

Sumber: BPS Kota Bontang, 2018



Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2017 masih berada di Kecamatan Bontang Utara yakni sebesar 2.914 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan yaitu 630 jiwa/km².

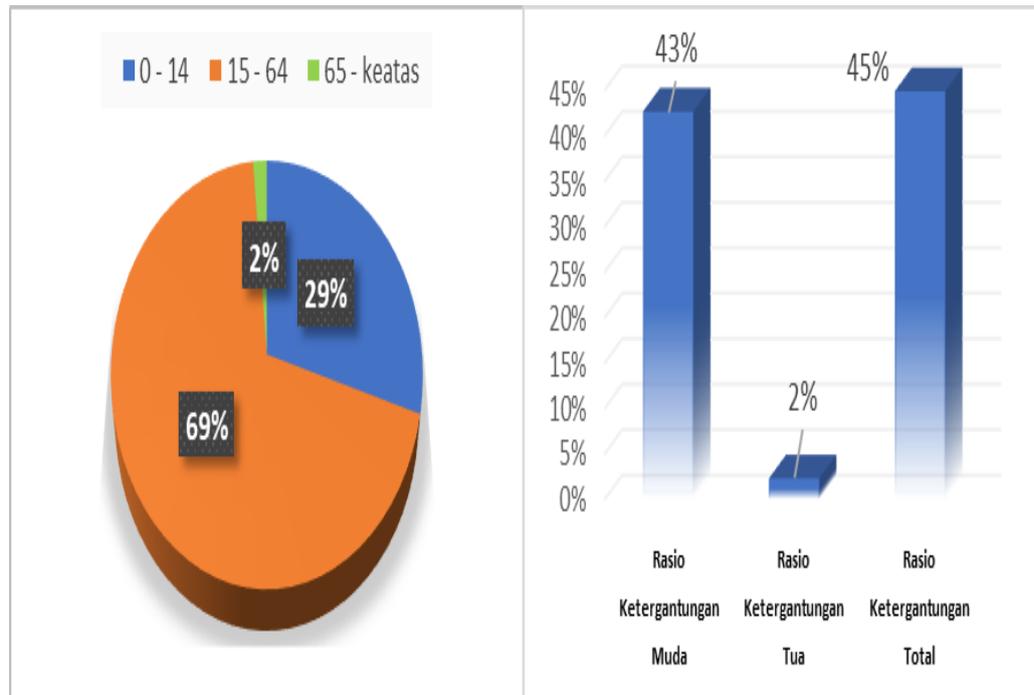
d. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur terbanyak pada umur 0-4 tahun sebanyak 17.537 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada umur 75 tahun keatas sebanyak 609 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut umur sesuai Tabel 1.6.

Tabel 1.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Kelompok Umur	2017
0 - 4	17.537
5 - 9	16.866
10 - 14	15.770
15 - 19	14.886
20 - 24	13.782
25 - 29	15.002
30 - 34	15.022
35 - 39	14.650
40 - 44	14.770
45 - 49	13.167
50 - 54	8.922
55 - 59	5.014
60 - 64	2.576
65 - 69	1.346
Sumber : BPS Kota Bontang, 2018	692
75+	609
Jumlah	170.611

Dari tabel 1.6 terlihat bahwa kondisi struktur umur penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, penduduk Kota Bontang tergolong penduduk transisi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69% (Gambar 1.7). Besarnya penduduk usia produktif ini perlu diantisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah pro-job. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 1.7
Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2018

Gambar 1.8
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2018

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Bontang dapat diukur dengan rasio ketergantungan, yakni membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) (Gambar 1.8). Rasio ketergantungan penduduk tahun 2018 sebesar 45%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 43% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 2%. Dari gambaran tersebut juga terlihat bahwa pada tahun 2018 penduduk usia kerja di Kota Bontang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.

e. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2020 jumlah PNS kota Bontang yang aktif sebesar 2.853 orang terdiri dari laki-laki 1.246 orang dan perempuan 1.607 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan PNS kota Bontang sebesar 71 orang. Sementara jumlah Non PNS tahun 2020 sebesar 2.244 orang.

f. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Secara administratif Kota Bontang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan yang terbagimenjadi 15 (lima belas) kelurahan.

Tabel 1.1
Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Bontang

1. Kecamatan Bontang Selatan (104,40 Km²)	<ul style="list-style-type: none">- Kelurahan Tanjung Laut- Kelurahan Tanjung Laut Indah- Kelurahan Satimpo- Kelurahan Berbas Tengah- Kelurahan Berbas Pantai- Kelurahan Bontang Lestari
2. Kecamatan Bontang Utara (26,20 Km²)	<ul style="list-style-type: none">- Kelurahan Bontang Baru- Kelurahan Bontang Kuala- Kelurahan Api – api- Kelurahan Gunung Elai- Kelurahan Loktuan- Kelurahan Guntung
3. Kecamatan Bontang Barat (17,20 Km²)	<ul style="list-style-type: none">- Kelurahan Belimbing- Kelurahan Kanaan- Kelurahan Telihan

g. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Struktur organisasi perangkat daerah, termasuk organisasi kecamatan dan kelurahan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9, 10, 11 dan



12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015. Adapun organisasi perangkat daerah Kota Bontang dimaksud meliputi :

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang

Sekretariat	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
Inspektorat	Inspektorat Daerah
Dinas Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2. Dinas Kesehatan3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat4. Dinas Lingkungan Hidup5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan9. Dinas Perhubungan10. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana13. Dinas Pemadam, Kebakaran dan Penyelamatan14. Dinas Ketenagakerjaan15. Dinas Komunikasi dan Informatika16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan17. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Badan	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia3. Badan Pendapatan Daerah4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



	Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
--	--

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Bantuan Dan Penugasan

Bab V : Penutup



BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro Merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja makro	Tahun 2019	Tahun 2020	(%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,09%	80,02	
2	Angka Kemiskinan	4,22%	4,22%**	
3	Angka Pengangguran	9,19%	9,19%**	
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,18%	-2,18%**	
5	Pendapatan Perkapita	NA	NA	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.25%	0.25%**	

*Ket. ** data masih dalam proses perhitungan*

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa pada lingkup regional Asia maupun internasional

Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat dengan upaya pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.



Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dan salah satu mesin pendorong yang digunakan Pemerintah Kota Bontang dalam menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bontang terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sedangkan kemampuan daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.



Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah



yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

- 5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- 7) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 dan perubahannya



serta memperhatikan realisasi pendapatan DBH-Pajak 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 serta memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2020 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
- c. Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.



2.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2010 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2020.
- 5) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.



- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan-penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
3. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

2.2.1.4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain:

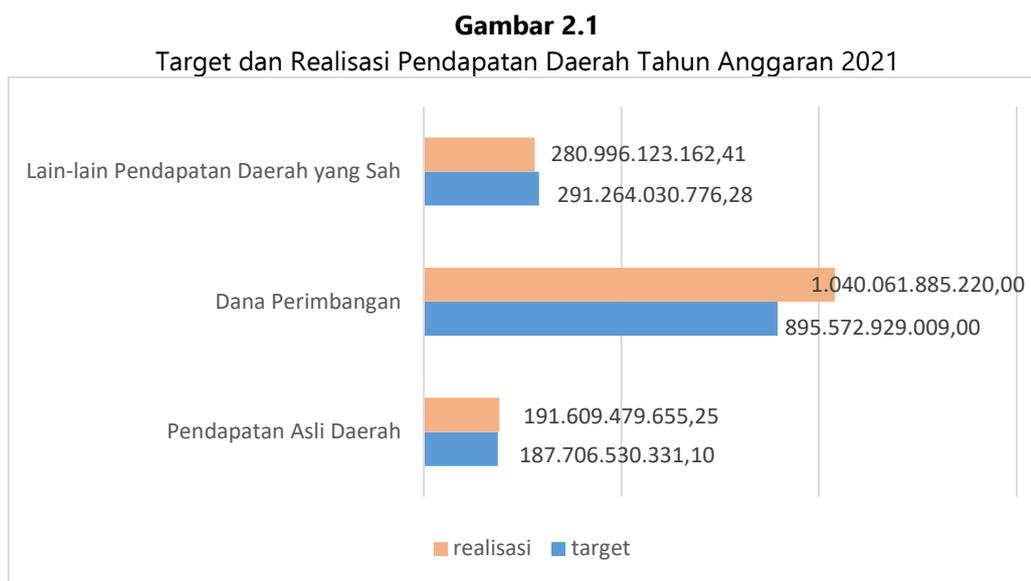


1. Melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara penyederhanaan administrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah;
 - c. Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan agar proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, validasi dan updating data, serta melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
 - e. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi;
 - g. Pengawasan penyetoran untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan.

2.2.1.5. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.374.543.490.116,38 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 187.706.530.331,10 Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 895.572.929.009,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 291.264.030.776,28. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.512.667.488.037,66 atau 110,05 persen dari target yang ditetapkan, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp. 191.609.479.655,25 atau 102,08 persen dari target. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.040.061.885.220,00 atau 116,13 persen dari target, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 280.996.123.162,41 atau 96,47 persen dari target.



Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019. Perkembangan realisasi pendapatan Kota Bontang Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Uraian Pendapatan		2019	2020	%
PENDAPATAN DAERAH		1.471.433.660.345,66	1.512.667.488.037,66	102,80
1.	Pendapatan Asli Daerah	218.743.530.945,38	191.609.479.655,25	87,60
	Hasil Pajak Daerah	116.864.297.801,00	91.840.604.035,85	78,59
	Hasil Retribusi Daerah	6.331.946.328,25	4.648.143.497,25	73,41
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dimiliki	4.504.282.490,23	2.561.257.068,55	56,86
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.043.004.325,90	92.559.475.053,60	101,67
2.	Dana Perimbangan	996.123.411.211,00	1.040.061.885.220,00	104,41
	Dana Bagi Hasil Pajak	698.202.723.351,00	749.843.978.824,00	107,40



Uraian Pendapatan		2019	2020	%
	Dana Alokasi Umum	233.360.408.000,00	229.778.988.000,00	98,47
	Dana Alokasi Khusus	64.560.279.860,00	60.438.918.396,00	93,62
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	262.859.798.189,28	280.996.123.162,41	106,90
	Pendapatan Hibah	41.523.080.000,00	6.665.983.874,62	16,05
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	186.353.421.578,00	113.827.001.248,00	61,08
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31.973.282.000,00	85.731.300.000,00	268,13
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		70.200.000.000,00	
	Penerimaan Lain-lain	3.010.014.611,28	4.571.838.039,79	151,89

Sumber: BPKD Kota Bontang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara umum realisasi pendapatan Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dari Rp. 996.123.411.211,00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.040.061.885.220 pada tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah, namun karena masih besarnya proporsi komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan Kota Bontang, mengakibatkan perkembangan pendapatan daerah mengalami tren peningkatan dari tahun 2019. Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan kontribusi komponen pendapatan pada pendapatan agregat Kota Bontang. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Bontang tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai berikut:

2.2.1.6. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 187.706.530.331,10, dengan realisasi mencapai Rp. 191.609.479.655,25 atau 102,08 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan



Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 95.978.011.625,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 91.840.604.035,85 atau 95,69 persen dari target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.083.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.648.143.497,25 atau 113,83 persen dari target yang direncanakan.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2020 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp. 2.561.257.068,55 dengan realisasi mencapai Rp. 2.561.257.068,55 atau 100 persen dari target yang direncanakan. PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Kaltimara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Dana BOS.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 85.083.761.637,55 dengan realisasi mencapai Rp. 92.559.475.053,60 atau 108,79 persen dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota



Bontang selaku BLUD sebesar Rp. 76.674.331.513,63 yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Bontang.

2.2.1.7. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 895.572.929.009,00, dengan realisasi mencapai Rp. 1.040.061.885.220,00 atau 116,13 persen dari target yang direncanakan, terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp. 600.109.514.009,00 dengan realisasi sebesar Rp. 749.843.978.824,00 atau 124,95 persen dari target yang direncanakan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 231.143.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 229.778.988.000,00 atau 99,41 persen dari target yang direncanakan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 64.320.171.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 60.438.918.396,00 atau 93,97 persen dari target yang direncanakan.

2.2.1.8. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi serta Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 280.996.123.162,41 atau 96,47 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 291.264.030.776,28 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp. 15.623.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 6.665.983.874,62 atau 42,67 persen dari target yang dianggarkan.

b. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi



Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 117.808.551.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 113.827.001.248,00 atau 96,62 persen dari target yang direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

c. Dana Penyesuaian

Realisasi Pendapatan dari Dana Penyesuaian pada tahun 2020 merupakan pendapatan dana insentif daerah sebesar Rp. 85.731.300.000,00 atau 100 persen dari yang dianggarkan.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Bantuan keuangan (BANKEU) pada tahun 2020 sebesar Rp. 70.200.000.000,00 atau 100 persen dari yang dianggarkan.

e. Penerimaan Lain-Lain

Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.571.838.039,79 atau 240,47 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.901.179.776,28

Pada tabel dibawah ini diuraikan besaran target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2020

Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	1.374.543.490.116,38	1.512.667.488.037,66	110,05
Pendapatan Asli Daerah	187.706.530.331,10	191.609.479.655,25	102,08
Hasil Pajak Daerah	95.978.011.625,00	91.840.604.035,85	95,69
Pajak Hotel	978.150.000,00	900.981.202,20	92,11
Pajak Restoran	6.827.500.000,00	7.044.053.284,00	103,17
Pajak Hiburan	452.500.000,00	369.199.004,20	81,59
Pajak Reklame	593.875.000,00	586.830.695,30	98,81
Pajak Penerangan Jalan	33.600.000.000,00	32.237.772.928,00	95,95
Pajak Parkir	150.000.000,00	68.866.580,00	45,91
Pajak Air Tanah	7.350.000.000,00	6.787.256.616,20	92,34
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.159.972,00	0,00



Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.986.625,00	25.986.625,00	100,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	37.430.755.044,00	93,58
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.000.000.000,00	6.387.742.084,95	106,46
Hasil Retribusi Daerah	4.083.500.000,00	4.648.143.497,25	113,83
Retribusi Jasa Umum	1.778.000.000,00	1.869.815.693,00	105,16
Retribusi Jasa Usaha	799.000.000,00	1.073.585.873,00	134,37
Retribusi Perijinan Tertentu	1.506.500.000,00	1.704.741.931,25	113,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.561.257.068,55	2.561.257.068,55	100,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.561.257.068,55	2.561.257.068,55	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.083.761.637,55	92.559.475.053,60	108,79
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	270.191.908,00	271.291.908,00	100,41
Penerimaan Jasa Giro	2.880.000.000,00	4.142.231.323,17	143,83
Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	234.354.742,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	210.238.979,00	299.583.939,80	142,50
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	45.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.812.108.470,55	358.094.265,00	12,73
Pendapatan dari BLUD	68.000.000.000,00	76.674.331.513,63	112,76
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.656.000.000,00	7.251.341.243,00	94,71
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	3.088.693.380,00	3.122.623.380,00	101,10
Dana Non Kapitasi dan Promotif Preventif BPJS Kesehatan	121.528.900,00	205.622.739,00	169,20
Dana Perimbangan	895.572.929.009,00	1.040.061.885.220,00	116,13
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	600.109.514.009,00	749.843.978.824,00	124,95
Bagi Hasil Pajak	139.995.620.279,00	147.435.529.217,00	105,31
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	460.113.893.730,00	602.408.449.607,00	130,93
Dana Alokasi Umum	231.143.244.000,00	229.778.988.000,00	99,41
Dana Alokasi Umum	231.143.244.000,00	229.778.988.000,00	99,41
Dana Alokasi Khusus	64.320.171.000,00	60.438.918.396,00	93,97
Dana Alokasi Khusus Fisik	28.942.564.000,00	23.498.415.926,00	81,19
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	35.377.607.000,00	36.940.502.470,00	104,42
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	291.264.030.776,28	280.996.123.162,41	96,47
Pendapatan Hibah	15.623.000.000,00	6.665.983.874,62	42,67



Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan	0,00	188.673.874,62	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	15.623.000.000,00	6.477.310.000,00	41,46
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.808.551.000,00	113.827.001.248,00	96,62
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.808.551.000,00	113.827.001.248,00	96,62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.731.300.000,00	85.731.300.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	85.731.300.000,00	85.731.300.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	70.200.000.000,00	70.200.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	70.200.000.000,00	70.200.000.000,00	100,00
Penerimaan Lain-Lain	1.901.179.776,28	4.571.838.039,79	240,47
Penerimaan Lain-Lain	1.901.179.776,28	4.571.838.039,79	240,47

Sumber: Bapenda Kota Bontang, 2020

2.2.1.9. Permasalahan dan Solusi

Tantangan Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan otonomi daerah dan implementasi desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan fiskal khususnya terkait dengan masih tingginya tergantung penerimaan pendapatan daerah dari dana transfer (pendapatan dana perimbangan). Pada tahun 2020 pendapatan dana transfer sebesar 68,75% dari total pendapatan daerah. Hal ini menjadi tantangan prioritas pemerintah kota Bontang dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah, khususnya mendorong peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ekonomi daerah.

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan dan aset daerah antara lain :

- 1) Realisasi PAD terhadap target 2020 mencapai sampai dengan 102,08%. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi yang cukup tinggi atau target yang ditetapkan terlalu rendah;
- 2) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil hanya 12,67%, dengan yang relatif kecil akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa



didukung oleh sumber pembiayaan lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah;
- 4) Upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Propinsi belum dapat diproyeksikan secara tepat, karena alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi disesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- 5) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak hotel maupun restoran, untuk menerapkan system billing dikarenakan tidak tegasnya sanksi yang ada.
- 6) Masih relative tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran .

b) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- 1) Pemantauan secara berkala serta penyusunan data potensi pajak dan retribusi yang baru, sebagai dasar penentuan target pendapatan asli daerah, untuk mengatasi penentuan target pendapatan asli daerah yang cenderung ditetapkan rendah;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan PAD dengan melakukan inventarisasi aset daerah;
- 4) Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak serta penegakan peraturan perundang-undangan pajak melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian kemudahan bagi wajib pajak;
- 5) Merumuskan sanksi yang tepat dan efektif untuk wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak kooperatif dengan tidak mengganggu iklim usaha;



- 6) Melakukan Perhitungan Anggaran harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran tahun sebelumnya dan Melakukan inventarisasi sumber-sumber pendapatan yang lebih rinci

2. 3. Pengelolaan Belanja Daerah

2.3.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2020 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2020 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2020.



3. Kebijakan pembiayaan tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2020 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2020.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah.
3. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.



Belanja daerah tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1.556.121.460.870,00 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 594.829.607.740,00 atau sebesar 38,23 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 961.291.853.130,00 atau sebesar 61,77 persen. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

2.3.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40



Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.



- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- f) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- g) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- h) Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.



i) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan kedua dan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada



Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.3.3. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga, RKBU serta RKPBU.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Penganggaran Honorarium PNSD pada prinsipnya tidak dianggarkan dalam RKA SKPD, kecuali untuk yang diperbolehkan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan performance kinerja.

Penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap



efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang memperhatikan:
 1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
 2. Untuk belanja hadiah/souvenir/piala dalam bentuk barang menggunakan rekening belanja hadiah/souvenir/piala.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden



Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.
- h) Penganggaran belanja bahan bakar kendaraan bermotor hanya dianggarkan untuk kendaraan operasional sebanyak unit kendaraan operasional yang ada dan rencana pengadaan kendaraan yang baru.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak



ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j) Penganggaran belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- k) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran belanja ini hanya dialokasikan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rekening transport akomodasi untuk narasumber/tenaga ahli menggunakan rekening perjalanan dinas untuk non PNSD.

- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang



akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan daerah, mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,



- standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk Pengadaan belanja modal yang berbeda rekening rincian objeknya dan tidak dapat disatukan paket pengadaannya maka belanja terkait pengadaan dianggarkan dalam masing-masing rekening rincian objek.

2.3.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang untuk tahun 2020 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian Belanja		Target	Realisasi	%
Belanja Daerah		1.556.121.460.870,00	1.438.249.346.693,79	92,43
1.	Belanja Tidak Langsung	594.829.607.740,00	551.137.863.314,00	92,65
	Belanja Pegawai	480.781.867.338,00	449.938.148.937,00	93,58
	Belanja Hibah	48.374.148.000,00	44.227.697.894,00	91,43
	Belanja Bantuan Sosial	1.576.081.542,00	234.946.274,00	14,91
	Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	880.000.000,00	670.979.350,00	76,25
	Belanja Tidak Terduga	63.217.510.860,00	56.080.902.759,00	88,71
2.	Belanja Langsung	961.291.853.130,00	887.111.483.379,79	92,28
	Belanja Pegawai	52.708.877.456,00	50.755.565.425,00	96,29
	Belanja Barang dan Jasa	547.480.022.872,00	502.356.596.406,79	91,76
	Belanja Modal	361.102.952.802,00	333.999.321.548,00	92,49

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2020

Dari tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat serapan belanja APBD Tahun 2020 sebesar 92,43 persen dari total anggaran. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 551.137.863.314,00 atau 92,65% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 887.111.483.379,79 atau 92,28%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, secara umum realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020



No.	Uraian Belanja	Realisasi		%
		2019	2020	
	Belanja Daerah	1.553.770.272.150	1.438.249.346.694	92,57
1	Belanja Tidak Langsung	471.131.196.673	551.137.863.314	116,98
	Belanja Pegawai	446.614.560.880	449.923.337.037	100,74
	Belanja Hibah	17.999.916.155	44.227.697.894	245,71
	Belanja Bantuan Sosial	619.935.699	234.946.274	37,90
	Belanja Bantuan Keuangan	5.726.793.289	670.979.350	11,72
	Belanja Tidak Terduga	169.990.650	56.080.902.759	32.990,58
2	Belanja Langsung	1.082.639.075.477	887.111.483.380	81,94
	Belanja Pegawai	43.665.807.915	50.755.565.425	116,24
	Belanja Barang dan Jasa	555.764.359.145	502.356.596.407	90,39
	Belanja Modal	483.208.908.417	333.999.321.548	69,12

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2020

2.3.4.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 594.829.607.740,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 551.137.863.314,00 dengan persentase pencapaian sebesar 92,65 persen dari target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai; Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp. 449.938.148.937,00 atau 93,58 persen dari target anggaran sebesar Rp. 480.781.867.338,00
- b) Belanja Hibah; Rencana belanja pada pos belanja hibah dialokasikan sebesar Rp. 48.374.148.000,00 dan sampai Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 44.227.697.894,00 dengan persentase pencapaian sebesar 91,43 persen dari anggaran yang ditetapkan.
- c) Belanja Bantuan Sosial; Rencana belanja pada pos belanja bantuan sosial ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 1.576.081.542,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 234.946.274,00 atau 14,91 persen.



- d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.000.000,00, pada tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 670.979.350,00 atau 76,25 persen.
- e) Belanja Tak Terduga; Alokasi anggaran belanja pada pos belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp. 63.217.510.860,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 56.080.902.759,00 dengan persentase pencapaian sebesar 88,71 persen dari anggaran yang ditetapkan.

2.3.4.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 961.291.853.130,00 Hingga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 887.111.483.379,79 atau sebesar 92,28% yang meliputi:

- a. Belanja Pegawai; rencana belanja pegawai ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 52.708.877.456,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 50.755.565.425,00 atau sebesar 96,29 persen.
- b. Belanja Barang dan Jasa; rencana belanja barang dan jasa ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 547.480.022.872,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 502.356.596.406,79 atau sebesar 91,76 persen.
- c. Belanja Modal; rencana belanja modal ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 361.102.952.802,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 333.999.321.548,00 atau sebesar 92,49 persen.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Langsung pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2019 dan 2020

2.3.5. Surplus/Defisit APBD

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester tahun anggaran berjalan.

Pada Tahun Anggaran 2020, APBD Kota Bontang mengalami surplus sebesar Rp. 264.441.346.474,51 yang merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Kondisi ini disebabkan antara lain karena capaian realisasi beberapa



komponen pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan dan adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemic covid 19.

2.4. Pembiayaan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2020.
- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.



2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - f) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol.



- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.4.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2020 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SiLPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 181.577.970.753,62 atau sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2019.

2.4.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.

2.4.1.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 181.577.970.753,62 dengan realisasi sebesar Rp. 181.577.970.753,62 atau seluruhnya merupakan penerimaan SiLPA tahun 2019 dengan realisasinya mencapai 100% dari anggaran. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan, alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta belanja program/kegiatan pada tahun 2020.



2.4.1.3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp. 264.441.346.474,51. SiLPA tersebut terdiri dari surplus APBD yang disebabkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 111,457,933,321.21 dan adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 152,983,413,153.30

2.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
2. Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atas, beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi Vertikal dan pihak swasta dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.





BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang diklasifikasikan ke dalam 6 urusan wajib Dasar, 18 urusan wajib non dasar, 4 urusan pilihan dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi misi pembangunan daerah.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah	
		Prog	Keg
1	2	3	4
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.01	URUSAN PENDIDIKAN	11	142
1.02	URUSAN KESEHATAN	30	161
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17	97
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	9	34
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23	104
1.06	URUSAN SOSIAL	9	33
	Jumlah	99	571
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1.07	URUSAN TENAGA KERJA	7	23
1.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	25
1.09	URUSAN PANGAN	1	4
1.1	URUSAN PERTANAHAN	1	3
1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	11	36
1.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	24
1.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4
1.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	21
1.15	URUSAN PERHUBUNGAN	9	31
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9	34
1.17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	17



1.18	URUSAN PENANAMAN MODAL	6	21
1.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7	30
1.2	URUSAN STATISTIK	1	1
1.21	URUSAN PERSANDIAN	2	3
1.22	URUSAN KEBUDAYAAN	2	3
1.23	URUSAN PERPUSTAKAAN	4	23
1.24	URUSAN KEARSIPAN	4	8
	Jumlah	91	311
3	Urusan Pilihan		
2.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	28
2.02	URUSAN PARIWISATA	2	5
2.03	URUSAN PERTANIAN	6	13
2.06	URUSAN PERDAGANGAN	6	8
	Jumlah	20	54
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan		
3.01	PERENCANAAN	11	45
3.02	KEUANGAN	12	79
3.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5	31
3.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3
3.05	PENGAWASAN	8	25
3.06	PENDUKUNG	24	126
3.07	KEWILAYAHAN	28	731
	Jumlah	89	1,040
J U M L A H		299	1,976

3.1 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 23 urusan sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan antara lain: meningkatkan akses pemerataan pendidikan sehingga kemudahan akses memperoleh pendidikan dan kesenjangan mutu antar sekolah dan antar wilayah kecamatan dapat diseimbangkan secara proporsional, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif,



berkarakter serta mempunyai daya saing yang dilandasi dengan akhlak mulia dan meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD; Pengadaan Buku Koleksi PAUD; Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas PAUD Beserta Perabotnya.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir; Pengadaan Meubeler Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Sekolah;Pelatihan Kompetensi siswa Berprestasi;Penyelenggaraan Paket A Setara SD; Pembinaan Minat , Bakat dan Kreativitas Siswa; Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah; Penyediaan Bnatuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 29 Sekolah Dasar ; Penyediaan Bnatuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 9 SMP; Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer; Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang SD dan SMP;Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 004 Bontang Utara; Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 003 BU beserta sanitasinya; Pengadaan Sarana Media Pendidikan; Pembangunan Laboratorium beserta Perabotnya SMP Negeri 9.
- 3) Program Pendidikan Non Formal, dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal; Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB; Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Publik); Pengadaan Media dan Peralatan Pendidikan dan beberapa kegiatan lainnya; Penyediaan dana penunjang DAK Fisik Reguler Bidang PAUD dan sanggar Kegiatan Belajar; Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan (DAK Fisik Reguler SKB); Rehabilitasi Toilet (Jamban) SKB beserta Sanitasinya;Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB.



- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik dan Penilaian Angka Kredit.
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan; Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan; Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) (Dana APBN).
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) pada TK Pembina I, TK Pembina II, TK Satu Atap Bontang dan beberapa SD, SMP Negeri Bontang dan Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I, II dan TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan P`AUD).
- 7) Program Pendidikan Inklusif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 5 program penunjang serta 142 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp 87,819,038,708 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 66,008,971,213.00 atau 75,16 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi fisik sebesar 86,66 %.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,89	12,78	12.98
2 Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,72	10,40	10.79
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)				
- SD/MI/Paket A (%)	Persentase	102.99	109,50	103.41
- SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	106.93	108,79	102.26
4 Angka Pendidikan yang ditamatkan				



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	1.80	1,86	1.72
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	1.79	1,75	1.67
5 Angka Partisipasi Murni (APM)				
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	91.04	98,82	93.02
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	75.68	82,14	80.27
6 Pendidikan Sekolah Dasar				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	910.38	1040,16	977.21
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	Rasio	30.78	33,89	28.2
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	505.45	554.36	522
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	50.54	52,95	49.2
7 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	756.76	805.69	826.63
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	38,49	30.76	34.35
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	630.74	813.28	680.66
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	63.07	71,47	64.44
8 Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	Persentase	99.92	99.768	99.36
9 Fasilitas Pendidikan				
a. Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persentase	91.80	95.6	91.80
b. Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	Persentase	82.35	95.6	84,85
10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	78.65	93.23	49.69
11 Angka Putus Sekolah				
a) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0	0,02	0
b) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Persentase	0	0,03	0
12 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Persentase	10.72	10.72	10.79

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 antara lain; indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2020 adalah 12,98, mengalami peningkatan



sebesar 0,09; Angka Rata-Rata Lama Bersekolah di tahun 2020 adalah 10,79 juga mengalami peningkatan sebesar 0,07; Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020 pada jenjang SD mengalami kenaikan 0,42 demikian pula pada jenjang SMP mengalami penurunan 4,67 dari tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi karena menurunnya angka jumlah penduduk usia sekolah, namun karena APK melebihi 100% itu artinya tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Untuk Angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020 dari jenjang SD mengalami penurunan 0,08 hal ini dikarenakan angka pendidikan yang ditamatkan dipengaruhi jumlah penduduk (tahun 2019: 170611, tahun 2020: 182484) padahal jumlah lulusan hanya mengalami perubahan kecil (tahun 2017: 3319, tahun 2019: 3246, tahun 2010 : 3137), untuk jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 0,08% dari target yang ditentukan.

Angka Partisipasi Murni jenjang SD tahun 2020 mengalami peningkatan 1,98 % dibandingkan dengan tahun 2019 namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 98,82%. Untuk Jenjang SMP tahun 2020 juga mengalami peningkatan 4,59% namun dibawah target sebesar 1,87%.

Indikator pendidikan Sekolah Dasar (SD) berupa angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan 67,17 dibanding dengan tahun 2019 sebesar 910,38, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SD 7-12 tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya (2019 sebesar 18.539; 2020 sebesar 20.795) dan jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2019 sebesar 20.042; 2020 sebesar 21.280); Rasio guru dan murid mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 16.55% namun dibawah target yang ditetapkan sebesar 554,36%. Rasio guru/murid per kelas rata-rata mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 49,2% dibanding tahun 2019 sebesar 50,54% atau sebesar 1,34%.

Indikator pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SMP (13-15) tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah mengalami penurunan sebesar 4,14. Sedangkan Rasio guru dan murid mengalami peningkatan 49,92 dari tahun 2019 dan diatas target



yang ditetapkan, hal ini dikarenakan jumlah siswa usia SMP (13-15) tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2019 sebesar 7423; 2020 sebesar 9388).

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya dan dibawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami permasalahan namun pelaksanaan program dan kegiatannya dalam bidang pendidikan non formal tetap efektif dan berjalan sesuai dengan harapan hingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bontang.

Pada indikator fasilitas pendidikan, Bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebesar 91,80% sedangkan Bangunan SMP/MTS dalam kondisi baik sebesar 84,85 artinya mengalami peningkatan sebesar 2,5%, namun lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 95,6%, dikarenakan dari 61 sekolah jenjang SD/MI di Bontang terdapat 5 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan (19 kelas rusak ringan dan 10 kelas rusak berat), sedangkan dari 33 Sekolah SMP/MTs masih terdapat 5 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan.

Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Angka Partisipasi Kasar mengalami penurunan sebesar 28,96 % dibandingkan tahun 2019

Dari total siswa SD/ MI dan SMP/ MTs kota Bontang, tidak terdapat anak putus sekolah tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Kota Bontang seperti pemberian bantuan alat sekolah berupa seragam, tas dan sepatu tentu sangat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para orang tua siswa. Selain itu, pemberian dana BOSTK bagi seluruh sekolah di Kota Bontang juga membuat sekolah negeri tidak lagi memungut bayaran, hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua.

Pada indikator kinerja utama rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2020 sebesar 10,79% artinya mengalami peningkatan sebesar 0,07 dari tahun 2019 sebesar 10,72%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

Urusan 1	Permasalahan 2	Solusi 3
1. Pendidikan Dasar	Tahun 2020 proses belajar mengajar tidak maksimal karena masa pandemi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda reda, sehingga tidak memungkinkan melakukan proses belajar mengajar tatap muka	Melakukan proses belajar mengajar dan mengajar jarak jauh dengan memberikan paket data terhadap siswa
2. Bidang Kebudayaan	Belum tersedianya data lembaga adat dan kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pembina seni dan budaya	1 Melakukan pendataan secara berkala terhadap lembaga adat.
		2 Meningkatkan kemampuan SDM dibidang seni dan budaya dengan melakukan pelatihan kepada tenaga pembina seni dan budaya,

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan Tahun 2020	Sekolah/Lembaga	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kearsipan Juara 1			Tingkat Kota Bontang
2	Tata Naskah Dinas Peringkat 5 oleh Balai Bahasa			Tingkat Provinsi
3	Presiasi Bunda PAUD Peringkat 3			Tingkat Propinsi
4	Juara 1 Vidio Best Practise Program Pendidikan Kecakapan Kerja	LPK Suvi Training		Tingkat Nasional
5	Lomba Menyanyi Solo SMP Peringkat 1			Tingkat Propinsi
6	Lomba Gitar Duet SMP Peringkat 1			Tingkat Propinsi
7	Lomba Gitar Duet SMP Peringkat 1			Tingkat Nasional



8	Lomba Pantomin SD Peringkat 1	Tingkat Propinsi
9	Lomba Musik Tradisional SMP Peringkat 6	Tingkat Propinsi
10	Lomba Menyanyi Solo SMP Peringkat 1	Tingkat Propinsi
11	Lomba Kreativitas Tari SMP Peringkat 3	Tingkat Propinsi
12	Lomba Gitar Duet SMP Peringkat 2	Tingkat Propinsi
13	Lomba Desain Poster Peringkat 5	Tingkat Propinsi
14	Lomba Gambar Bercerita Peringkat 6	Tingkat Propinsi
15	Lomba Gambar Bercerita Peringkat 8	Tingkat Propinsi
16	Lomba Kriya Anyam Peringkat 2	Tingkat Propinsi
17	Lomba Kriya Anyam Peringkat 5	Tingkat Propinsi
18	Lomba Solo Vokal Peringkat 3	Tingkat Propinsi
19	Lomba SoloVocal Peringkat 6	Tingkat Propinsi
20	Lomba Pantomin SD Peringkat 4	Tingkat Propinsi
21	Lomba Mendongeng Virtual bagi Guru PAUD Juara 1	Tingkat Propinsi
22	Lomba Mendongeng Virtual bagi Guru PAUD Juara 2	Tingkat Propinsi
23	Lomba Mendongeng Virtual bagi Guru PAUD Juara 4	Tingkat Propinsi
24	Lomba Mendongeng Virtual bagi Guru PAUD Juara 5	Tingkat Propinsi
25	Lomba Penulisan Esai Juara 3	Tingkat Propinsi
26	Lomba Memitivasi Siswa Juara 2	Tingkat Propinsi
27	Lomba Memitivasi Siswa Juara 5	Tingkat Propinsi
28	Lomba Vlog Juara 1	Tingkat Propinsi



B. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Bontang dan pencapaian sasaran strategis Urusan Kesehatan yaitu Peningkatan Kualitas Kesehatan untuk semua. Pelaksanaan urusan kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 19 (sembilan belas) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan; Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian); Penyediaan Obat Gizi Penurunan Stunting (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB); dan Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan).
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan; Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1, (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan), Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan); Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan); Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan); Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Kesehatan Masyarakat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional



- Kesehatan); dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian).
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat; Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat; Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Pembinaan Keluarga Sehat; Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok); dan Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar).
 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya; Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat
 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Penyehatan Lingkungan Pemukiman; Pengawasan Sarana Air Bersih; Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan; Pembinaan Tempat-Tempat Umum; Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; dan Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat.
 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dilaksanakan melalui kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Pencegahan Penyakit (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan);



- dan Insentif Tenaga Kesehatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 (DAK Non Fisik BOK Tambahan Bidang Kesehatan)Kesehatan)
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Posyandu; Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS, Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat; Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Dasar); Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penugasan); Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas; dan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar).
 9. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Rumah Sakit; Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain); Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit; dan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan).
 10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS; Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker; dan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC.
 11. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi; Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga; dan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1, Bontang Selatan 2, Bontang Lestari, Bontang Utara 1, Bontang Utara 2, Bontang Barat.



12. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan; Penyusunan Regulasi Kesehatan; Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan; dan Penyusunan Profil Kesehatan.
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda; Penyediaan Dana Operasional Labkesda; Penyediaan Alat Kesehatan Labkesda (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar); dan Pengadaan IPAL Labkesda (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar).
14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Masalah, Kejiwaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam; Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat; Pembinaan Kesehatan Khusus; Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL; dan Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
16. Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Penanggulangan Wabah; Pelayanan Penanggulangan Bencana; Peningkatan Imunisasi; Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; dan Pelayanan Penanggulangan Kejadian; dan Pelayanan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular di Rumah Sakit (Dana Insentif Daerah Tambahan).
17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan Tenaga Kesehatan.
18. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru/Rumah Sakit Mata, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.



19. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang melalui 22 program pokok dan 8 program penunjang serta 161 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.199.216.822.181,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 186,501,368,908.79 atau 93,62% dan realisasi fisik sebesar 97,62%.

Tabel 3.3.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	Prosentase	77,3	80	76,9
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Prosentase	97	90	92
Presentase TTU yang memenuhi syarat	Prosentase	94,65	90	96,8
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)	Prosentase	46	51	38,3
Angka Harapan Hidup	Prosentase	73,94	73,94	74,18
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	79	80	103
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	11	3,1	13
Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U)	Prosentase	12,89	<5	10,56
Insiden Rate DBD	Rasio	385,9	70	148,46

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat mengalami peningkatan 6,8 % dari target yang ditetapkan yaitu 90% dan terealisasi sebesar 96,8%. Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan



pada tahun 2020 terdapat 335 TTU yang memenuhi syarat dari jumlah TTU seluruhnya yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan yaitu 346 TTU. Hal tersebut disebabkan pemantauan TTU telah dilakukan oleh Puskesmas di awal tahun sebelum adanya pembatasan kegiatan luar gedung selama masa Pandemi *Covid-19*.

Capaian indikator Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat/memiliki sertifikat mengalami penurunan yang signifikan dari target menjadi 38,3%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 166 TPM yang memenuhi syarat dan bersertifikat dari jumlah 433 TPM yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Covid-19* yang mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas di luar gedung yaitu visitasi TPM oleh tim Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Sedangkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Bontang tahun 2020 adalah sebesar 74,18% melebihi target yang ditetapkan. AHH merupakan salah satu dimensi dasar pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan yang diharapkan dapat mencerminkan "lama hidup" sekaligus "hidup sehat" dalam masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan Angka Harapan Hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Angka Harapan Hidup yang digunakan untuk menghitung bersumber dari data Sensus Penduduk dan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan Angka Harapan Hidup mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang khususnya pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi penduduk, derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari target menjadi 103 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 4 kasus kematian ibu dari jumlah 3.886 kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit tidak menular sebanyak 3 kasus kematian) dan



penyebab langsung (*hemorrhagic post partum* sebanyak 1 kasus kematian). Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam menekan kasus kematian ibu adalah pemberdayaan masyarakat secara dini bagi Wanita Usia Subur (WUS) termasuk calon Pasangan Usia Subur (PUS) melalui pemberian edukasi kesehatan reproduksi pada PUS, calon pengantin dan remaja putri, penyetaraan standar pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas di fasilitas kesehatan, dan pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal. Kondisi saat ini hanya terdapat 2 rumah sakit dari total 5 rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Selain itu, perlu penggerakan peningkatan kelas ibu hamil di kelurahan/ Puskesmas serta melakukan edukasi suami siaga.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 53 kasus kematian bayi yang dilaporkan, terdiri dari kematian neonatal (berumur 0-28 hari) sebanyak 44 kasus dan kematian post natal (berumur 29 hari – 11 bulan) sebanyak 9 kasus dari jumlah 3.886 kelahiran hidup yang disebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, penyakit bawaan (kelainan kongenital), pneumonia, kelainan saluran cerna dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi serta pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal yang sampai saat ini hanya terdapat di RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang memiliki ruang perawatan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU).

Capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang/*Underweight* (BB/U) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 10,56% dari target yang ditetapkan. dan belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 774 balita gizi kurang dari total 7.328 balita seluruhnya yang ditimbang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kemiskinan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, praktik pengasuhan anak yang kurang tepat dan/atau konsumsi makanan bergizi yang rendah. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), edukasi bagi



ibu hamil terkait manfaat zat besi (FE) selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC pada fasilitas kesehatan sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, memaksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin serta edukasi tentang pola asuh dan pola makan yang sesuai dengan usia balita.

Capaian indikator Insiden Rate (IR) DBD mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 78,46 dan terealisasi sebesar 148,46 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020 terdapat 269 kasus DBD dari total penduduk sebanyak 181.182 jiwa. Kota Bontang merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah, dimana angka IR DBD cenderung meningkat yang dapat disebabkan adanya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan vektor, faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk yang diiringi oleh peningkatan sarana transportasi yang menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas. Berdasarkan Analisis Iklim dan Kasus DBD di Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, diketahui bahwa iklim tidak berpengaruh terhadap kasus DBD akan tetapi dipengaruhi oleh faktor lain misalnya kebersihan lingkungan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk penurunan kasus DBD yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3M (Menguras dan Menutup penampungan air dan Mengubur barang bekas tempat perkembangbiakan nyamuk DBD), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menyebarkan bakteri *thuringensis israelensis* (bio larvasida) yang rencana akan dilaksanakan pada tahun 2021.

c) Permasalahan dan Solusi

Dinas Kesehatan

Permasalahan	Solusi
1. Adanya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan baik kegiatan layanan dalam gedung maupun luar Gedung	1. Menyusun SOP Pelayanan Selama Pandemi termasuk alur rujukan, merubah SOP alur pelayanan, pemenuhan standar Pedoman Pengendalian Infeksi (PPI), Pemenuhan sarana dan prasarana



	ruang tindakan pasien, Penerapan PPI, melakukan kegiatan rapat / pertemuan menggunakan media online / daring.
2. Peran RT belum maksimal dalam pemberian informasi Jaminan Kesehatan, masih terdapat kartu JKN yang belum diambil di Kantor Dinkes oleh peserta yang didaftarkan	2. Membuat surat pemberitahuan kepada kelurahan terkait kartu JKN yang belum diambil oleh Peserta beserta rekapitulasi datanya
3. a. Keterbatasan ruang isolasi pasien Covid-19	3. a. Penambahan kapasitas tenaga, sarana prasarana termasuk tempat tidur isolasi dan fasilitas karantina.
b. Peninjauan ulang pelayanan 24 jam Puskesmas Bontang Lestari	b. Menyusun kajian terkait kelayakan pelayanan 24 jam Puskesmas Bontang Lestari oleh Bidang Yankes dan SDK.
c. Peninjauan ulang pelayanan 2 shift di Puskesmas	c. Menyusun kajian terkait kelayakan pelayanan 24 jam Puskesmas Bontang Lestari oleh Bidang Yankes dan SDK
4. Pemenuhan tenaga belum sesuai standar	4. Disusun analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga secara berkala
5. Prevalensi HIV/AIDS masih belum memenuhi dikarenakan belum maksimal skринing pada populasi kunci dan yang mempunyai faktor resiko	5. Meningkatkan skrining pada populasi dan mempunyai faktor resiko dengan kegiatan VCT Mobile dan Peningkatan Skrining pada layanan faskes
6. Data hipertensi secara aplikasi belum tarik data untuk bulan november dan desember, data kunjungan berbeda dari data tahun sebelumnya usia produktif ke sekolah tdk dilakukan, posbindu bulanan tdk dilakukan dikarenakan pandemi	6. Perlu kesepakatan untuk pengumpulan data maksimal tanggal 10 setiap bulan, maksimalkan kegiatan sekolah, OPD dan Lapas bila pandemi berakhir
7. Kesadaran masyarakat untuk PHBS (3M) belum maksimal	7. Menyebar bakteri <i>thuringensis israelensis</i> (bio larvasida) yang rencana akan dilaksanakan pada Februari 2021
8. Kemampuan mencapai SPM berdasarkan data penemuan di tahun sebelumnya, perhitungan	8. Tetap menentukan target indikator sama tetapi target layanan akan menyesuaikan temuan orang



angka kesembuhan tahun 2020 akan dihitung di tahun 2021 dikarenakan pengobatan tb masih berjalan selama 6-8 bulan pengobatan	terduga TB di tahun 2020, angka kesembuhan TB menggunakan data N-1 (2019)
9. Peningkatan jumlah kematian ibu disebabkan penyebab tidak langsung (penyakit tidak menular sebesar 75% sebesar 3 kematian), penyebab langsung (hemorrhagic post partum 25% sebesar 1 kematian), peningkatan jumlah kematian bayi dan balita disebabkan karena penyakit bawaan (kelainan kongenital)	9. Peningkatan kegiatan informasi dan promosi kesehatan untuk kesehatan reproduksi pada WUS dan PUS, penyetaraan standar pelayanan kesehatan pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal (baru 2 RS yang ada NICU, Ponsek sebesar 2 RS (RSUD dan PKT)
10. Prevalensi stunting, gizi kurang dan gizi kurus disebabkan pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak bumil KEK dan anemia, pemantauan pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar	10. Pemberian PMT bagi Bumil KEK, edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat FE selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, maksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin
11. a. Kegiatan pengumpulan data (kunjungan rumah) di beberapa kelurahan terhenti di masa pandemi, kelurahan yang diasumsikan dapat mendongkrak IKS Kota Bontang	11. a. Optimalisasi intervensi pada keluarga yang sudah dilakukan pengumpulan data
b. Data intervensi belum terupdate, tenaga banyak terlibat di Tim COVID	b. Update data IKS
12. Indikator PHBS yang relatif lama perubahannya yaitu perilaku merokok, makan sayur dan buah serta aktivitas fisik	12. Peningkatan regulasi KTR, edukasi dan pembudayaan GERMAS untuk perubahan perilaku
13. Untuk indikator prevalensi baduta pendek, balita gizi kurang, balita gizi kurus tidak tercapai dikarenakan data belum tervalidasi ulang dalam sistem, data yang	13. Bekerjasama dengan kader menginput data secara online dan offline, tetap dilakukan turun lapangan secara rutin untuk memvalidasi data sasaran,



tercatat sebagai sasaran di awal tahun pada saat dilakukan penelusuran ke lapangan sudah pindah ke luar daerah, penanganan kesehatan bagi balita bermasalah terkendala dengan jaminan kesehatannya dikarenakan anak dari pernikahan siri yang tidak dapat diurus idenditas kependudukannya	bekerjasama dengan pihak-pihak terkait atau swadaya masyarakat dalam penanganan balita bermasalah
--	---

RSUD Taman Husada

Permasalahan	Solusi
1. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tidak terlaksana 100% karena Angka Kunjungan Praktek Dokter Spesialis (WKDS), sehingga realisasi kegiatan dan serapan Anggaran Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Dokter Kunjungan ke RSUD Taman Husada Bontang berkurang sejak PANDEMIC COVID 19. Salah satunya Jadwal Praktek Dokter Jiwa dan Bedah Tulang sebagai Dokter WKDS di lingkungan RSUD Taman Husada Bontang.	1. Bila Pandemic Covid-19 dapat diatasi/ terkendali dan menurun serta kondisi yang memungkinkan di lapangan, maka kegiatan kunjungan Dokter Praktek Spesialis/ WKDS ke RSUD Taman Husada Bontang dalam rangka memenuhi Pelayanan Kesehatan yang belum tersedia di RSUD Taman Husada Bontang hingga saat ini dapat kembali dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (2 Paket Kegiatan) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan Akses dan Waktu yang cukup lama dalam hal penanganan Limbah B3 (Penanganan Khusus karena sifat dan karakteristik limbah B3) yg seyogyanya dilakukan oleh Mitra dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Pelaksana Kegiatan Penanganan Limbah B3 Di RSUD Bontang yg berbasis di Jakarta.	2. Anggaran tersedia di Penganggaran Murni setiap tahun berjalan dan tidak muncul pada saat Perubahan Anggaran APBD, dengan alasan Keterbatasan Waktu Pengerjaan yang kira-kira membutuhkan waktu 2-3 bulan mulai dari Proses Pengepakan, pengangkutan / proses pengangkutan hingga terbitnya Surat Keterangan Penanganan Limbah B3 selesai dilaksanakan.



3. Tidak terlaksana 100% karena Keterbatasan Waktu dan SDM Pelaksana di RSUD Taman Husada khususnya terkait SDM Pejabat Pengadaan dan juga Waktu pelaksanaan yang cukup singkat serta ketidak Kesanggupan Pihak ke-3 atau Penyedia dalam menyediakan beberapa Alkes dan perlengkapan lain yang dibutuhkan.	3. Dana Insentif Daerah Tambahan seyogyanya bisa lebih cepat dalam pemberian alokasinya sehingga memberikan waktu bagi Tim Pelaksana dan Penyedia untuk menyiapkan dokumen Kontrak-kontrak dan Barang sesuai dengan Perencanaan Kebutuhan yg telah direncanakan.
--	--

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2020	Keterangan
1	Nominasi INDOHCF "POKPIR BABE"	2020	Puskesmas BS2
2	Panji-Panji Pembangunan Kalimantan Timur Bidang Kesehatan	2020	Juara Terbaik 1
3	Terakreditasi Paripurna	2020	RSUD Taman Husada Bontang

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu tersedianya infrastruktur kota yang memadai, meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanggulangan bencana serta terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Satya Lencana, Pembangunan Jembatan Jalan Atletik 19 Kelurahan Api-Api, Penggantian Jembatan Jalan Pontianak, Peningkatan Jalan



- Gotong Royong Utama, Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Kelurahan Guntung, Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT 01 Kelurahan Kanaan, dan Peningkatan Jalan Asmawarman;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Box Culvert Jl. Kemakmuran, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo, dan Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Elai;
 3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dilaksanakan melalui kegiatan Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan, Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Satimpo, Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung, Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta, Penurapan Sungai di Kota Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi), dan Penurapan Sungai di Kota Bontang (Pengembalian) (Bantuan Keuangan Provinsi);
 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Urip Soemoharjo, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Letjen Urip Soemoharjo (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. S. Parman, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Bhayangkara dan Jl. MT. Haryono (Bantuan Keuangan Provinsi);
 5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan;
 6. Program Pengendalian Banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi



- Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat, Normalisasi Danau Kanaan (Bantuan Keuangan Provinsi).
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan, Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan, Pembangunan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara.
 8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan), dan Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ.
 9. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Jalan Otto Iskandardinata, dan Peningkatan Jalan Damai;
 10. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang



Baru, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan, Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan, Rehabilitasi Turap RT. 21 Jl. Selat Malaka Kel. Tanjung Laut;

11. Program Perencanaan Tata Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036;

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 11 program pokok dan 5 program penunjang melalui 97 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 171.965.351.925,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 164.261.017.154,00,- atau 95,52% dan realisasi fisik sebesar 98,73%. Terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan *refocusing* anggaran termasuk pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terdapat tiga kegiatan yang diberikan perpanjangan waktu yaitu Penurapan Sungai di Kota Bontang (bantuan keuangan provinsi), Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan, dan Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan).

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019	2020	
			Target	Realisasi
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	98,69	82,16	97,15
Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	%	99,67	74,74	98,40
Luas wilayah banjir / tergenang	Ha	34,28	31,78	33,78
Jalan dalam kondisi baik	%	98,76	91,15	98,89
Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	%	48,00	54,00	48,00
Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan	%	52	52	52
Jumlah gedung/kantor yang terbangun	Unit	7	3	3

Pelayanan air bersih dan sanitasi di Kota Bontang dapat dikatakan cukup berhasil dimana persentase pelayanannya relatif tinggi yaitu 98,40% dan 97,15%. Begitu pula dengan kondisi jalan, sekitar 98,40% berada pada kondisi yang baik. Hal tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah Kota Bontang terhadap infrastruktur dasar permukiman.

Berdasarkan indikator luas wilayah banjir/tergenang dapat kita lihat bahwa banjir masih menjadi permasalahan utama di Kota Bontang. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi di hulu DAS Bontang dan DAS Guntung yang menyebabkan terjadinya banjir kiriman, untuk itu Pemerintah Kota Bontang selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan penyelesaian permasalahan di hulu. Adapun APBD Kota Bontang semaksimal mungkin digunakan untuk penyelesaian permasalahan di dalam kota.

Indikator kinerja Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi memang relatif rendah hanya 48%, tetapi hal ini bukan menunjukkan tingginya pelanggaran atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, justru menunjukkan masih banyaknya ruang pengembangan yang belum dimanfaatkan. Secara umum kita juga melihat prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan



bangunan pada tahun 2020 relatif masih rendah, hanya 52% tetapi sudah jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Beberapa kegiatan tidak selesai tepat waktu	Mempercepat proses lelang pada awal tahun dan mengoptimalkan pengawasan pekerjaan di lapangan
2 Program pengendalian banjir yang belum optimal karena alokasi anggaran yang terbatas	Alokasi anggaran harus ditambah karena ini merupakan program prioritas yang harus ditangani
3 Masih rendahnya rasio bangunan yang mempunyai IMB di Kota Bontang	Perlu sosialisasi agar masyarakat mau mendaftarkan bangunannya agar mempunyai IMB, dan perlunya membuat peraturan tambahan berupa insentif dan disinsentif untuk pengurusan penataan ruang

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya jumlah rumah tidak layak huni, menurunnya luas kawasan permukiman kumuh, meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi, dan meningkatnya akses pelayanan air minum. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa, dan Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa.



2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Program Penataan Permukiman Kumuh, dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, dilaksanakan melalui kegiatan Optimalisasi Sistem IPAL Bontang Kuala, Optimalisasi Sistem IPAL Guntung, Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan, Pembuatan Sumur Dalam, Operasional dan Pemeliharaan Sistem IPAL Domestik Kota Bontang, Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi), Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi), dan Penambahan Jaringan Pipa Air Minum Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 34 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp.12.642.897.999,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.982.191.913,00 atau 94,77% dan realisasi fisik sebesar 99,99%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Persentase rumah tidak layak huni	%	3,37	1,30	2,85
Berkurangnya luas kawasan kumuh	ha	16,33	20	13,47
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	99,50	82,16	94,45
Persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum	%	91,45	74,74	95,31



Indikator kinerja persentase jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan sebesar 0,63% dari kondisi tahun 2019 sebesar 3,37% menjadi 2,74% di tahun 2020. Namun capaian 2,74% di tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,30% dikarenakan pembangunan untuk rumah tidak layak huni masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah Kota Bontang belum dapat melaksanakan dikarenakan regulasi atau payung hukumnya baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2020 pemerintah pusat melaksanakan pembangunan untuk rumah tidak layak huni di Kota Bontang sebanyak 100 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pemerintah provinsi melaksanakan pembangunan sebanyak 60 unit melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPKRS).

Indikator berkurangnya luas kawasan kumuh mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 luas kawasan kumuh sebesar 16,33 ha berkurang sebesar 2,86 ha menjadi 13,47 ha di tahun 2020. Capaian ini juga melebihi target luas kawasan kumuh yang direncanakan sebesar 20 ha. Keberhasilan pencapaian ini tak lepas dari peran para stakeholder (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Bontang) yang telah melakukan kolaborasi pendanaan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Bontang.

Persentase jumlah penduduk yang terlayani air minum mengalami peningkatan sebesar 3,86% dari tahun 2019 sebesar 91,45% meningkat menjadi 95,31% pada tahun 2020. Capaian ini juga melebihi target dari yang direncanakan sebesar 74,74%. Sedangkan persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 sebesar 94,45% juga melebihi target yang direncanakan sebesar 82,16%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum dimilikinya <i>database</i> perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap.	1. Penganggaran untuk penyusunan <i>database</i> perumahan dan kawasan permukiman.
2. Masih adanya kawasan kumuh dan backlog perumahan.	2. Peningkatan kualitas permukiman pada kawasan kumuh.



Permasalahan	Solusi
	3. Penyediaan hunian yang layak khususnya bagi MBR.
3. Keterbatasan air baku untuk air minum dimana selama ini hanya mengandalkan sumber air tanah.	4. Mendorong pemerintah provinsi untuk dilakukan SPAM Regional
4. Belum optimalnya penanganan pelayanan air minum dan sanitasi didaerah pesisir / pulau-pulau kecil.	5. Penyediaan fasilitas penyediaan air minum untuk penduduk daerah pesisir/ pulau-pulau kecil, seperti : bak penampungan air bersih, pembangunan <i>Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)</i> . 6. Penyediaan fasilitas pengolah air limbah domestik untuk penduduk daerah pesisir/ pulau-pulau kecil, seperti: MCK komunal, septitank komunal, atau IPAL komunal.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis antara lain :

1. Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat dan terlaksananya penegakan peraturan dan produk hukum daerah yang berlaku;
2. Optimalisasi pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan industri, kawasan hutan dan lahan yang rawan terhadap bahaya kebakaran di Kota Bontang;
3. Meningkatnya responsifitas dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana;
5. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
6. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi; dan
7. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan Kota Bontang.



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
4. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 8 program pokok dan 15 program penunjang serta 104 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 25,616,182,761,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24,453,428,367.00,00 atau 95,46% dan realisasi fisik sebesar 99,86%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketentraman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2019	Target	2020
Presentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (BPBD)	Persen	91,36	100	93,77
Presentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (BPBD)	Persen	37,2	100	22,23
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (BPBD)	Persen	2,80	100	2,40



Persentase Response Time Rate Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (DPKP)	Persen	100	100	100
Persentase Capaian Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)	Persen	12,5	100	37,50
Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan (Bakesbangpol)	Persen	66,18	68,79	68,45
Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah (Bakesbangpol)	Persen	40	80	92

Pada sub Urusan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada Indikator Pembinaan Terhadap Masyarakat Tentang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan meningkat menjadi 68,45%. Dan indikator Pembinaan Politik terhadap aparatur dan Masyarakat di Daerah meningkat menjadi 92% tahun 2020.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Data-data daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban di Kota Bontang belum valid;	1. Melakukan kegiatan rutin patrol wilayah dengan melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan secara aktif;
2. Ketersediaan SDM kurang memadai secara kualitas dan kuantitas;	2. Menambah personil dengan mengacu pada Permendagri terkait dan berdasarkan analisis beban kerja, dan meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan khusus;
3. Keterbatasan sarana & prasarana untuk kegiatan operasional di lapangan;	3. Pengadaan sarana transportasi dan kantor untuk mendukung kegiatan operasional;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang belum memadai untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama;	4. Perlu pengadaan lahan dan bangunan pos-pos pemadam kebakaran beserta sarana dan prasarannya di beberapa titik pada daerah wilayah manajemen kebakaran (WBK) Kota Bontang, antara lain : Pos



Permasalahan	Solusi
	Bebas Pantai, Pos Telihan/Kanaan;
5. Ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran belum memadai.	5. Perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemilik/pengelola sumber air (PDAM, Kenari Water Park, Surya Raya, PT Badak, PT Pupuk Kaltim, dll) dan atau pengadaan sumber air sendiri dengan pengadaan sumur bor dan kolam air di beberapa titik pada WMK.

F. Urusan Sosial

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara bermartabat dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS, Operasional Rumah Singgah, Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang, Rehabilitasi Sosial Anak dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

- 3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang.
- 4) Program Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat, Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif, dan Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Sosial pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 31 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan sosial pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp.7.911.181.120,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.664.242.134,00 atau 96,88% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	Target	2020
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	99,08	85,21	99,37

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama urusan Sosial telah cukup baik. Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2020, jumlah PMKS sebanyak 12.932 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori.

Dari total jumlah PMKS, sebanyak 12.851 (99,37) telah ditangani dan sejumlah 10.594 (81,92) telah mendapatkan bantuan. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitas (ADK).

Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

c) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Urusan Wajib Sosial pada tahun 2020 ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan		Solusi
1.	Adanya hutang dalam pemberian santunan kematian.	Perlunya pematangan dalam tahap <i>forecasting</i> kebutuhan dana tahunan.
2.	Tingginya angka PMKS akibat semakin kompleksnya dinamika permasalahan sosial	Penanganan PMKS secara berkelanjutan hingga permasalahan yang ada tuntas ditangani
3.	Kurang aktifnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap permasalahan sosial di Kota Bontang	Pembinaan lebih lanjut terkait kesadaran, tanggung jawab, dan kapabilitas bagi PSKS
4.	Belum adanya SOP Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Membuat SOP dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan
5.	Masih ditemukannya data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dengan segera Ketika ditemukan data yang tidak tepat sasaran.

d) Penghargaan

Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial juga memperoleh penghargaan yang dipaparkan pada tabel berikut:

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	LK3 LANDAK (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Langsung Bertindak)	<i>Best Innovation</i> tingkat Nasional
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Juara 1 tingkat Provinsi



3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

G. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan Persentase jumlah pencari kerja yang terlatih terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui penempatan pencari kerja, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama, partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha dengan pekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan kesempatan kerja, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, 'Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru, Penyuluhan Informasi Jabatan;
- 2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan, Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/SB, Lembaga Kerjasama Tripartit, Dewan Pengupahan Kota Bontang, Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 'Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 4 program penunjang serta 23 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Sosial pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 6,581,800,900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6,315,530,344.00,00 atau 95,95% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.



Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1 Prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan	%	62,94	70	67,586
2 Nilai Mutu Pelayanan	Predikat	-	B	B
3 Prosentase jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	%	51,72	75	73,08

Tahun 2019 Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang tidak ada realisasi dikarenakan Dinas Ketenagakerjaan baru terbentuk tahun 2020 sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah No. 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang. Pada tahun 2019 urusan ketenagakerjaan masih menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.

Realisasi tahun 2020 prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar sebesar 64,73 %, melebihi 4,73 poin dari target yang ditetapkan. Prosentase ini sangat dipengaruhi oleh pembagiannya yaitu jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang mendaftar lebih banyak dibanding jumlah pencari kerja yang dilatih seperti yang disajikan pada table 11, dimana data pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 224 orang dan pencari kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak 145 orang, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Namun jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan yang ditargetkan adalah sebanyak 145 orang sesuai yang ada di Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2020, sehingga dapat dikatakan presentase realisasinya 100%.

Realisasi tahun 2020 Prosentase pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan 3,81 dari target yang sebesar 20%, penurunan ini disebabkan adanya penurunan lowongan kerja yang terdaftar sebesar



29,44% dari tahun 2019. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi kepada pencari dan pemberi kerja serta job canvassing / pencarian informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Realisasi tahun 2020 Presentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama mengalami penurunan 18,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Dari data Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang pada tahun 2020 jumlah perselisihan hubungan industrial sebanyak 29 kasus dan yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian Bersama sebanyak 15 kasus, hal ini disebabkan karena tidak terjadinya kesepakatan antara pihak yang berselisih untuk melakukan perjanjian bersama. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui perundingan mediasi dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya bermusyawarah dalam penyelesaian perselisihan industrial. Namun walaupun perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama, para mediator sesuai kewenangannya memberikan anjuran kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya perlindungan anak dan perempuan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak, dan Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).



3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang.
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender, dan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 3 program pokok, 5 program penunjang serta 25 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 4,951,347,768,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4,724,873,829.00,00 atau 95,43% dan realisasi fisik sebesar 99,97%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Capaian
1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	54,88	50	56,34
2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	orang	1756	-	1756
3. Ratio KDRT	%	0,37	0,08	0,04
4. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	orang	28.763	-	28.763
5. Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	%	100	100	100
6. Capaian Kota Layak Anak	nilai	678,5	700	679



Pada tabel di atas diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat Perubahan IKU pada tahun 2020, yaitu Meningkatkan Penanganan Tindak Kekerasan dan Evaluasi Capaian KLA.

Pada tahun 2020, Capaian Indikator Meningkatkan Penanganan Tindak Kekerasan adalah sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan indikator Evaluasi Capaian Kota Layak Anak (KLA) adalah sebesar 679 poin tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 700 poin. Hal ini disebabkan beberapa poin indikator Kota Layak Anak belum bisa teralisasi di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Handphone android sebagai sarana komunikasi dengan klien sekaligus dokumentasi saat penanganan klien	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Kendaraan operasional berupa mobil sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan khususnya penjangkauan dan home visit klien korban kekerasan	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Laptop beserta printer sebagai sarana pendukung terutama pengisian data-data online di tingkat provinsi terkait identitas klien dan penanganan kasus	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Nomor handphone prabayar sebagai hotline layanan pengaduan khusus penanganan klien perempuan	Pengadaan sangat dibutuhkan secepatnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Support anggaran kegiatan untuk peningkatan program dan peningkatan SDM di seksi perlindungan perempuan	Anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
Kurangnya tenaga SDM khususnya PNS di seksi perlindungan perempuan	Penambahan tenaga SDM (PNS)
SDM yang berada di seksi perlindungan perempuan belum mendapatkan pelatihan khusus penanganan kasus perlindungan perempuan	Mengikuti sertakan pelatihan bagi petugas yang menangani kasus di seksi tersebut
Belum terbentuknya UPTD PPPA sehingga penanganan kasus masih ditangani oleh Tim Pelayanan PPPA (P2TP2A)	Menyegerakan pembentukan UPTD PPPA
Gedung UPTD PPPA sudah tersedia tetapi tenaga SDM, meubelair, sarana dan prasarana (ATK) belum ada (kosong)	Menyegerakan pengadaan yang dibutuhkan gedung UPTD PPPA



	tersebut karena merupakan salah satu indikator penilaian APE
Belum adanya arah yang jelas dalam penyusunan program dan kegiatan	Program dan Kegiatan yang terdapat di dalam Renstra disampaikan ke bidang dan seksi untuk penyusunan yang lebih terarah
Dukungan sarana dan prasarana kerja tidak memadai : tidak ada komputer, printer dan scanner sebagai penunjang kerja utama serta kendara roda 2 kasi	Segera diadakan peralatan kantor sesuai kebutuhan
SDM yang kurang dr sisi jumlah dan pemahaman di IT dan laporan data online	Penambahan SDM dan pelatihan data laporan
Jaringan internet Kantor yang up and down, sementara ada 6 aplikasi online yang harus di input setiap bulannya di tanggal yang berbeda	Penambahan Paket Internet agar jaringan saat input laporan online tetap stabil
Terlambatnya data yang diminta untuk di input pada saat laporan online	memberikan penegasan
Belum tersedianya aplikasi khusus untuk memisahkan data korban kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum	Dibuatkan Aplikasi berbasis online
Belum tersedianya mobil operasional khusus pedampingan kasus anak	Pengadaan mobil operasional khusus anak
Belum tersedianya rumah kegiatan untuk seksi perlindungan khusus anak, dan masih bergabung dengan seksi perlindungan perempuan	Dibuatkan Rumah kegiatan tersendiri untuk seksi perlindungan khusus anak agar mandiri
Jumlah forum anak baru hanya terdapat pada dua kelurahan	Walikota memerintahkan lurah dan camat untuk membentuk forum anak kelurahan dan kecamatan
Forum anak belum dilibatkan dalam musrembang tingkat kelurahan maupun musrenbang tingkat kecamatan	Walikota memerintahkan lurah dan camat untuk melibatkan forum anak dalam kegiatan musrembang kelurahan dan kecamatan, sehingga di tahun 2020 beberapa kelurahan sudah melibatkan forum anak untuk ikut musrembang
Belum ada sekolah PAUD yang dinyatakan sebagai sekolah ramah anak	Mensosialisasikan sekolah ramah anak ke PAUD, sekolah SD-SMP serta sekolah berbasis kementerian agama, untuk menciptakan sekolah ramah anak di tingkat PAUD dan



	kementrian agama, serta penambahan sekolah umum
Belum ada profil anak	Membuat profil gender dan anak tahun 2019 di tahun 2020

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2020	Keterangan
1	Kota Layak Anak	Kategori Kota Madya	
2	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (SIPEENA) Kategori Inovasi Perangkat Daerah	Juara Harapan I	
3	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	UPPKS LKP di Kelurahan Gunung Elai

I. Urusan Pangan

Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pangan antara lain: meningkatkannya ketersediaan pangan, distribusi, akses, diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat serta Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH).

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan serta Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pangan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pangan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya



sebesar Rp. 520,688,025,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 514,046,341,00 atau 98,72% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	Target	2020
PPH Ketersediaan	Skor	94,2	88	88,5
Cadangan Pangan Pemerintah	%	0	40	0
Penanganan Rawan Pangan	%	0	60	100
Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	88	100
Persentase Ketersediaan informasi harga pangan pokok	%	100	90	100
Persentase Pangan Aman di konsumsi	%	92,85	77	92,85
Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor (0-100)	88,5	86	92,9
Persentase penangan daerah rawan pangan		100	100	100

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020, Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di tahun 2020 adalah 88,5% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 94,2, Ketersediaan informasi harga pangan pokok mencapai 100 %.

Indikator yang digunakan pada urusan pangan berupa skor angka pada Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,9 meningkat dari tahun sebelumnya dan Pangan Aman di Konsumsi tidak mengalami perubahan tahun 2019 sebesar 92,85% tetap pada tahun 2020 sebesar 92,85%, karena pada pengujian sampel pangan sayuran di 3 (tiga) Pasar, terdapat Bakteri Salmonela yang belum ada penanganannya.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
--------------	--------



1	Realisasi IKU pada Cadangan Pangan Pemerintah 0% karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan CPP	Perlu adanya Kajian Perda sebagai payung hukum dalam penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2	Berdasarkan surat dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nomor 063/K.N.030/i.2/01/2019 bahwa perlu dilaporkan kondisi stok cadangan pangan pemerintah setiap minggu	Perlu adanya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota minimal 100 Ton per tahun, hal tersebut berdasarkan pada PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3	Realisasi IKU pada Penanganan Rawan Pangan dengan realisasi 0% karena tidak tersedianya dana untuk penyediaan Penanganan Rawan Pangan yang didalamnya termasuk kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Perlu adanya penyediaan bahan untuk pelaksanaan SKPG serta pembuatan Peta Kerawanan Pangan

J. Urusan Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yakni Terwujudnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan, dengan indikator kinerja utama berupa persentase tanah milik Pemerintah Kota Bontang yang bersertifikat dan persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota, Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang, Monitoring dan Penataan Batas Wilayah Kota Bontang, Pemetaan Masalah Sengketa Tanah, Fasilitasi Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik serta Pendampingan Program Verifikasi PTSL.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanahan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 3 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2020



seluruhnya sebesar Rp. 929,124,224,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 768,609,612.00 atau 82,72% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bontang yang bersertifikat	%	30,62	39,7	29,56
Persentase Luas Kawasan APL Yang Terinventarisasi	%	36,88	61,77	36,88

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 persentase tanah milik Pemerintah Kota Bontang yang sudah bersertifikat sebesar 29,56%. Sedangkan persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi masih tetap sama dari tahun 2019 sebesar 36,88% di sebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Pemasangan patok batas lokasi APL dan eks TNK Kota Bontang terkendala karena harus melibatkan peran serta dari BPN, BPKH, dan TNK	Perlu penyusunan jadwal khusus untuk pemasangan patok batas yang melibatkan instansi terkait

K. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana



pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Bimbingan Teknis Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih, Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium.
3. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam melalui kegiatan Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air serta Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan serta Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi



- Masyarakat di Bidang Lingkungan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup.
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan Penataan RTH dan Pemeliharaan RTH serta Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau di beberapa Lokasi/wilayah khususnya di Kelurahan Satimpo, Belimbing dan Bontang Lestari .
 7. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum.
 8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman melalui kegiatan Penataan Areal Pemakaman dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan lingkungan hidup pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 8 program pokok dan 3 program penunjang serta 36 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 52,643,251,284,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45,082,137,292.00 atau 85,64% dan realisasi fisik sebesar 89,73%. (konfirmasi) Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Indeks Pencemaran Air	-	80,00	84,44	83.33
Indeks Pencemaran Udara	-	87,62	85,32	86.3
Persentase pelayanan persampahan	Persen	95,05	95	96.62
Persentase RTH Kota Bontang	Persen	21,5	-	20.88
Persentase TPU yang memenuhi standar	Persen	-	-	9
Persentase sarana dan prasarana PJU dalam kondisi baik	Persen	52,72	-	1701

Indeks Pencemaran Air (IPA) adalah indeks yang digunakan menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Obyek pengukuran IPA adalah kualitas air sungai. Untuk menghitung IPA maka harus diketahui dulu indeks pencemaran di beberapa lokasi pemantauan . Jumlah titik



sampling adalah 9 titik, yaitu S. Bontang 4 titik, S. Guntung 3 titik dan S. Nyerakat 2 titik. Penentuan titik pantau sungai tahun 2020 berdasarkan data dari Bapelitbang bahwa sungai pada Kota Bontang adalah: Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat dari hasil perhitungan tidak ada sampel yang masuk kategori sedang dan berat.

Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development. Data diperoleh dari hasil pengukuran parameter gas NO₂ dan SO₂ dengan menggunakan alat Passive Sampler selama 3 periode di 4 lokasi sampling yang berbeda yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran.

Persentase pelayanan persampahan, meskipun tidak signifikan tetapi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa sampah di Kota Bontang sudah dilayani dan ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 ini telah dilakukan pengadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk menambah kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat semakin baik, walaupun hal ini masih dirasa kurang dan masih dibutuhkan lebih banyak lagi ruang terbuka hijau.

Disamping itu telah dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum sehingga mengurangi rawan kecelakaan bagi pengguna jalan serta terhindar dari rawan kejahatan di jalan walaupun prosentase masih kurang dari yang diharapkan hanya sebesar 52,72 persen.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kondisi armada pengangkut sampah yang kurang memadai	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada pengangkut sampah yang baru
Masyarakat membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan	Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kondisi sungai yang tercemar oleh sampah	Melakukan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih) secara berkala dan memberikan kesadaran bagi masyarakat



	untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
Kondisi armada truk hidrolik yang tidak optimal	Melakukan peremajaan atau pengadaan armada truk hidrolik
Kondisi parit dan drainase yang mengalami pendangkalan	Perlu adanya pengerukan di parit drainase yang ada sehingga aliran air dapat lancar kembali
Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan sehingga sering terjadi luapan air (banjir)	Perlu dilakukan normalisasi sungai dan penurapan sehingga aliran sungai dapat lancar
Masih kurangnya ruang publik (RTH)	Perlu adanya penambahan ruang publik dan ruang terbuka hijau sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
Masih kurangnya lahan pemakaman baik yang muslim maupun non muslim	Perlu adanya penambahan berupa pengadaan lahan pemakaman yang semakin terbatas baik untuk umat muslim dan non muslim.
Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya yang kurang memadai	LPJU tenaga surya yang biaya pemeliharaannya tinggi dan rawan akan tindak pencurian sehingga perlu dilakukannya migrasi dari tenaga surya ke listrik PLN serta melakukan penggantian lampu yang hemat energi

d) Penghargaan

No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Adipura Tahun 2020	Diberikan pada tahun 2020
2.	Adiyawita Mandiri Tingkat Provinsi	1. SDN 006 Bontang Selatan 2. SDN 011 Bontang Selatan 3. SDN 002 Bontang Selatan
3.	Adiyawita Mandiri Tingkat Kota	1. MI Jamiyyatul Qurra 2. Madrasah Arriyadh 3. SLB YPK
4.	PROPER Nasional	1. PT.Badak 2. PT. Pupuk Kalimantan Timur
5.	Lomba Inovasi dan Penelitian (SI PEENA) BAPELITBANG	Juara 3 Kategori Inovasi Perangkat Daerah



No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
6	Panji, Teropi dan Piagam Keberhasilan Pembangunan dalam rangka HUT ke 63 Provinsi Kaltim	Terbaik II Kategori Keberhasilan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan) serta Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 program penunjang serta 24 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2,942,515,919,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,681,967,146.00,00 realisasi keuangan 91,15% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,97	1	3.24
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Rasio	0,69	1	0.95
Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,47	0.65	0.62
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99	98%	100%
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	63	80%	66%

Pada tahun 2020 seluruh capaian indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan. Untuk capaian cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020 masyarakat Kota Bontang sudah 100% ber KTP dan untuk capaian cakupan penerbitan akta kelahiran juga mengalami peningkatan sebesar 66% meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Pelayanan publik di masa Pandemi COVID-19	Mengurangi kegiatan pelayanan secara tatap muka dan di arahkan kepada pelayanan secara online selama masa pandemi COVID-19 Bekerjasama dengan pihak pos indonesia untuk proses pengiriman berkas kepada masyarakat, untuk mempermudah urusan kependudukan dan pencatatan sipil di masa pandemi COVID-19

d) Penghargaan

Adapun penghargaan yang diraih dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



No	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Good Archival Governance Awards (GAGAS)	Juara II / Juara Harapan II
2	Kaltim Award 2020	Juara

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).

a) Program dan Kegiatan

Peyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK).
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT).
3. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemasarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
4. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 program pokok yang terdiri dari 4 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 403,462,697,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 372,997,087.00,00 atau 92,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.



Realisasi indikator kinerja utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	Target	2020
LPM aktif (%)	%	100	100	100
PKK Aktif (%)	%	100	100	100
Posyandu Aktif (%)	%	100	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	1,28	1,1	3,77

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif tidak mengalami penurunan dari yang berarti bahwa tingginya komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menggandeng masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. Sedangkan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat melampaui target yang telah ditentukan. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Secara persentase pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 3,77% dan diatas target tahun 2020 sebesar 1,1%

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Rendahnya pemahaman/peran aktif masyarakat terhadap pembangunan wilayah	Perlunya program/kegiatan pembangunan wilayah yang berbasis padat karya

d) Penghargaan

No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	Juara I (Tk.Provinsi)
2.	Penyuluhan Bina Keluarga Balita	Juara I (Tk.Provinsi)
3.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Juara II (Tk.Provinsi)



No.	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
4.	Rancang Busana Santai Khas Daerah	Juara II (Tk.Provinsi)
5.	Penyuluhan Tertib Administrasi Keuangan dan Data	Juara II (Tk.Provinsi)
6.	Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur Bidang PKK Tahun 2020	Juara II (Tk.Provinsi)
7.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Juara III (Tk.Provinsi)
8.	Penyuluhan Kader PKK Dalam Penanggulangan Masalah Stunting menuju Kaltim Sehat 2020	Juara III (Tk.Provinsi)
9.	Cipta Menu/Festival Pangan Lokal B2SA Kategori Lunchbox	Juara III (Tk.Provinsi)
10.	Merias wajah Untuk Make-up Sehari- hari	Juara IV (Tk.Provinsi)
11.	Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kategori Kelurahan	Juara II (Tk.Provinsi)
12.	Pelaksanaan Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kategori Kota	Pakarti Madya 1 (tk. Nasional)
13.	Pelaksanaan Posyandu Terbaik	Pakarti Madya 1 (tk. Nasional)

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diarahkan sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 8 (enam) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana. Peningkatan program keluarga berencana Dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Pelayanan Khiba, Penghargaan Kepada Pengelola KB Teladan, Harganas Tingkat Kota, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS, Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan



- Anak, Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB), dan Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)
2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Konseling KB, Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Pelayanan KB Medis Operasi, Workshop Pelayanan KB, Penyediaan Pelayanan KB Mobile, Pelayanan KB di Daerah Pesisir, Pelayanan Manunggal KB KES, Pelayanan Momentum PKK KB KES, dan Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB.
 3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana, Pengelolaan Data dan Informasi Program KB, Penyampaian Informasi Program KB & PP, dan Pengembangan Program SIDUGA.
 4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KKR dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah, Jambore PIK Remaja/Mahasiswa, Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa, Pemilihan Duta Mahasiswa Genre, Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dan Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja
 6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah.
 7. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
 8. Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU dilaksanakan melalui kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU dan Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana.

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 6 program pokok dan 21 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 3,104,662,384,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,864,728,727.00,00 atau 92,27% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15.

Indikator Kinerja Utama
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	Target	2020
Rasio Akseptor KB	%	77,11	70	77,49
Cakupan Peserta KB Aktif	%	68,82	78,2	71,75

Capaian Indikator Kinerja Utama untuk indikator rasio anggota masyarakat yang mengikuti gerakan keluarga berencana dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi (akseptor KB) pada tahun 2020 yaitu 77,49%, realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Kurangnya SDM sebanyak dua orang yaitu : Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana. Dan Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	Merekrut tenaga
Tidak ada panjar kegiatan besar terkait honor narasumber dan transport lokal peserta	Memfasilitasi adanya panjar untuk honor narasumber dan transport lokal peserta
Kurangnya SDM Penyuluh KB	Merekrut SDM Penyuluh KB. (PNS/NON PNS)



Belum adanya anggaran ayoman kegagalan dan komplikasi paska pemasangan kontrasepsi	Perlu adanya anggaran ayoman kegagalan dan komplikasi paska pemasangan kontrasepsi
Belum adanya AC dan APAR untuk gudang alokon	Pengadaan AC dan APAR

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2020	Keterangan
1	Bidan Praktek Mandiri Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara Harapan I	a.n Suryani, Amd.Keb di Kelurahan Loktuan
2	Lomba Kelompok KB Pria Semangat Berkaya Tingkat Provinsi	Juara I	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke XXVI
3	Juara Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara I	a.n Eva Dwipanglipur di Kelurahan Api-Api
4	Lomba Vocal Grup Festival KIE Kreatif Kampung KB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke XXVI
5	Lomba Kemah Saka Kencana Provinsi Kalimantan Timur	Ranking I	Kegiatan Promosi PUP Moment Hari Aids Sedunia Tahun 2020
6	Lomba Penyuluhan Saka Kencana Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	Kegiatan Promosi PUP Moment Hari Aids Sedunia Tahun 2020
7	Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKB WIJAYA KUSUMA di Kelurahan Gunung Elai
8	Lomba Motivator KB Pria Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara I	a.n Agus Sainoto di Kelurahan Gunung Telihan
9	Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKL LESTARI II di Kelurahan Bontang Baru



10	Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	BKR MUTIARA LAUT di Kelurahan Loktuan
11	Lomba Kampung Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Juara II	KAMPUNG KB PAGUNG LESTARI di Kelurahan Bontang Lestari

O. Urusan Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, dan tersedianya fasilitas sarana prasarana perhubungan yang memadai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se-Kalimantan Timur, Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan, DED Pelabuhan/Dermaga Lokal Kota Bontang, Study Evaluasi dan Penataan Parkir, Penyusunan Perda LLAJ, dan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Kota Bontang.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross, Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan, Pemeliharaan Ruang Henti Khusus (RHK), Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), dan Pengadaan Paku Jalan.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas, Pekan

Keselamatan Transportasi Darat, Pengamanan dan Pengendalian Embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan, Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran, dan Pendataan Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus Kota Bontang dan DUK's.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dilaksanakan melalui Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perhubungan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 4 program penunjang serta 31 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan perhubungan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 8,087,133,860,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7,783,504,143.00,00 atau 96,25% dan realisasi fisik 100%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib dinas perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Indikator Kinerja Utama
Urusan Perhubungan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Prosentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	99	99	86
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	%	90	90	96
Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	%	90	90	61
Prosentase angkutan kota yang memiliki ijin trayek	%	74	75	18

Indikator kinerja prosentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan mengalami penurunan sebesar 13% dari kondisi tahun 2019 sebesar 99% menjadi 86% di tahun 2020. Capaian 86% ditahun 2020 belum mencapai target yang tetapkan sebesar 99% dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik angkutan umum



untuk melakukan uji KIR kendaraannya. Dari jumlah angkutan umum sebanyak 57 unit hanya 49 unit yang melakukan uji KIR.

Kepuasan Masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Dinas Perhubungan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat Kota Bontang. Realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi tahun 2020 sebesar 96% dan mengalami kenaikan sebesar 6% dibanding tahun 2019 sebesar 90%, dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan ditahun 2020 sebesar 90%.

Untuk indikator prosentase sarana dan prasarana perhubungan capaian realisasi ditahun 2020 sebesar 61% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Karena keterbatasan anggaran yang ada, dari total kebutuhan rambu sebanyak 2.133 unit sampai dengan tahun 2020 jumlah rambu yang terpenuhi baru 1.291 unit.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Belum tersedianya sarana dan prasarana perhubungan khususnya pengujian kendaraan bermotor dan fasilitas pendukungnya.	Pembangunan gedung uji serta pembaharuan fasilitas pengujian kendaraan bermotor
Banyaknya APILL dan fasilitas pendukung yang sudah tua (<i>out of date</i>).	Revitalisasi kembali APILL dan fasilitas lainnya sesuai dengan tuntutan zaman (<i>up to date</i>).

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok sebagai berikut:



- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui kegiatan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sistem keamanan Informasi.
- 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa melalui kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi , pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM), Pengelola Media Center, Kemitraan dengan Media Massa, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Penguatan kapasitas PPID.
- 3) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan penyediaan jasa layanan internet, Pengembangan e-Government, pemeliharaan jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan domsain Pemerintah Kota Bontang, uji keamanan informasi (penetration test), pemeliharaan data center, pengembangan versi sistem, Implementasi Gerakan Smart City.
- 4) Program diseminasi informasi dan komunikasi publik melalui kegiatan diseminasi informasi melalui kesenian tradisional dan diseminasi informasi melalui media cetak.
- 5) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 4 program penunjang serta 34 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan komunikasi dan informatika tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp 9,251,899,594,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.160.182.193,00 atau 99,01% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Komunikasi dan Informatika 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019	2020	
			Target	Realisasi
Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi public	Skor	84,87	88,4	89,7



Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019	2020	
			Target	Realisasi
Indeks Pemantik	Skor	3,30	3,40	3,45

Indikator hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik dan Indeks Pemantik merupakan IKU baru pada tahun 2020. Indikator Indeks Pemantik mengalami penurunan dikarenakan Penilaiannya tidak memakai standard pemantik Provinsi Kalimantan Timur tetapi memakai standar Nasional SPBE sehingga mengalami penurunan nilai sebesar 0,01 dari target yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

Untuk indikator Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik target yang ditentukan adalah sebesar 88.4 sementara nilai ISQ pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diraih Kota Bontang adalah sebesar 89.7 dimana nilai tersebut tidak mencapai target yang telah dikarenakan belum optimalnya PPID Pembantu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam pengisian update data informasi wajib, informasi berkala dan informasi yang dikecualikan belum sesuai dengan yang diharapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

NO	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Kominfo	Belum optimalnya pengembangan layanan Informasi publik	- Peningkatan PPID - Peningkatan Kerjasama Dengan Media Massa
		Belum optimalnya diseminasi Informasi publik	- Peningkatan Edukasi Dan Literasi Digital Melalui Pemberdayaan KIM - Diseminasi Informasi Publik Melalui Tatap Muka, Media Elektronik, Cetak Dan Tradisional
		Belum optimalnya tata kelola Teknologi, Informatika, dan Komunikasi (TIK)	- Peningkatan Kapasitas SDM Teknologi, Informatika Dan Komunikasi (TIK) - Penguatan Regulasi TIK - Peningkatan Peran Dewan TIK
		Masih rendahnya infrastruktur teknologi dan Informatika	- Pengembangan Jaringan Dan Aplikasi TIK



2	Statistik	Masih rendahnya kualitas data statistik sektoral dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	- Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan, Identifikasi, Pemenuhan Data Dan Validasi - Peningkatan Sinergitas Forum Data/ Informatika Statistik Sektoral - Pembangunan Integrasi Data/ Informatika Statistik Sektoral
3	Persandian	Belum optimalnya tingkat keamanan Informatika	- Peningkatan Tata Kelola Dan Manajemen Resiko - Peningkatan Standarisasi Data Center Dan Pengelolaan Aset

d) Prestasi

NO	Nama Kejuaraan/Penghargaan/Kegiatan	Prestasi		Keterangan
		2019	2020	
1	Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website	Peringkat 1		Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Kaltim
2	Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Via Website	Peringkat 2		Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik		Terbaik I	Dalam Rangka Peningkatan HUT ke- 64 Provinsi Kalimantan Timur

Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok, sebagai berikut:



1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif; dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi IUMK dan pendataan direktori UMKM Kota Bontang;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan manajemen kewirausahaan baru bagi pemuda, fasilitasi sarana prasarana pelaku usaha mikro, dan penyusunan booklet profil usaha UMK;
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesehatan koperasi, revitalisasi koperasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi, pelatihan pengawasan dan pengurus koperasi dalam penyusunan laporan RAT, dan peningkatan kapasitas bagi SDM KUMKM;
4. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan, fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM, dan fasilitasi pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang;
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan industri rumput laut;
6. Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi sertifikat HACCP, dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 1 program pokok dan 3 program penunjang yang diimplementasikan dalam 17 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 8,374,433,356,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 8,188,627,072.00,00 atau 97.78% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,82%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2019	Target	2020
Persentase koperasi aktif	%	98,55	87,92	94,87
Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif	UKM	671	2.847	8.760
Persentase pertumbuhan IKM	%	1.83	1.83	1.83

Indikator kinerja utama presentasi koperasi aktif mengalami peningkatan dari target sebesar 87,92% tahun 2020 dapat tercapai sebesar 94,87%. Demikian halnya dengan Indikator kinerja utama Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif semula ditargetkan sebanyak 2.847 UMK tercapai tahun 2020 sebanyak 8.760 UMK.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Masih terdapat sejumlah koperasi yang tidak melaksanakan RAT	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan program pengawasan dan pembinaan pada koperasi yang tidak melaksanakan RAT• Mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif 3 tahun berturut-turut ke Kementerian KUKM RI
2.	Koperasi yang sedang dalam proses pembubaran adalah koperasi simpan pinjam, yang diakibatkan oleh macetnya usaha simpan pinjam	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan program revitalisasi koperasi dengan cara penggabungan koperasi yang tidak aktif tapi punya peluang usaha• Untuk Koperasi baru diarahkan untuk koperasi konsumen atau produsen.

R. Urusan Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Urusan Penanaman Modal dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perizinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dilaksanakan melalui kegiatan 'Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan.



2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Promosi Potensi Daerah Pengembangan Promosi Potensi Daerah, Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Melalui SPIPISE

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penanaman Modal ini terdiri dari 3 program pokok dan 3 program penunjang yang diimplementasikan dalam 21 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 4,304,040,484,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 4,194,358,142.00 atau 97,45% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Penanaman Modal Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2019	Target	2020
Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)	Rupiah	3.308.155,64	1.563.723	1.413.760,98
Jumlah Nilai berskala nasional (PMA) \$.x(000,-)	\$	454.787,70	206.902	80.474,25
Nilai IKM	%	85,92	85	86,30

Pada 2019 beberapa realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal mengalami penurunan seperti jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) serta Jumlah nilai berskala nasional (PMDN dan PMA). Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pusat tentang SPIPISE yang mengharuskan para investor untuk melakukan pelaporan setiap 3 bulan yang memberatkan pelaku investor. Sehingga, dengan adanya peraturan itu jumlah pelaporan semakin menurun.

Untuk indikator PAD dari retribusi perijinan mengalami penurunan sebesar Rp.380.000.00,00. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peraturan baru seperti Ijin Gangguan (HO) dicabut per bulan Maret, padahal retribusi dari ijin ini merupakan



salah satu penyumbang retribusi terbesar. Kemudian, adanya perubahan tariff ijin trayek yang semula Rp.750.000,00 per tahun menjadi Rp.250.000,00 per 5 tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 86,30% berkategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan dan selalu mengedepankan pelayanan yang prima.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1.	Penanam modal/investor yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Submission (OSS) belum semua melaporkan realisasi investasi	a.	Monitoring dan koordinasi dengan pihak penanam modal/investor
		b.	Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Perusahaan
2.	Pada Tahun 2019, Investasi di Kota Bontang mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya permasalahan lahan yang belum tersedia oleh Pemerintah Kota Bontang	c.	Melakukan pendampingan/fasilitasi investor baik yang baru ataupun yang masih mengalami kesulitan/kendala di lapangan
3.	Terbatasnya sarana prasarana untuk mengakses sistem online melalui SPIPISE bagi pelaku usaha / pengusaha	d.	Diberikan Alokasi Tambahan Anggaran APBD untuk menunjang kegiatan tersebut
4.	Kurangnya tenaga teknis dilapangan	e.	Penambahan tenaga teknis untuk monitoring realisasi investasi, analisis kebijakan penanaman modal, analisis pengembangan potensi daerah.
5.	LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode oleh pihak Investor	f.	Memberikan form LKPM kepada Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku
6.	Terjadinya pindah alamat kantor investor atau perubahan pihak pengelola LKPM, alamat e-mail dan nomor telepon tanda ada pemberitahuan	g.	Melakukan monitoring secara berkala
7.	Adanya keterlambatan dalam pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh pihak Investor kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat	h.	Memberikan surat konfirmasi berupa peringatan kepada pihak investor yang belum melaporkan LKPM - Nya
1.	Terkendalanya penerbitan perizinan terkait bangunan atau eksisting dengan aturan yang ada	a.	Perlu adanya kebijakan dan aturan terkait bangunan - bangunan yang telah lama terbangun sebelum terbit aturan yang ada saat ini
2.	Tidak dilibatkannya bidang perizinan pada rapat sidang komisi yang jadi kewenangan provinsi	b.	Melibatkan bidang perizinan dalam sidang komisi instansi yang terkait



S. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Paskibraka Kota Bontang.
2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, dilaksanakan melalui kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan, Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14, dan Pembinaan Atlit Prestasi Anggota KORPRI.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta, Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta.

b) Realisasi Pelaksanaan dan Program dan Kegiatan

Urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 4 program penunjang serta 30 kegiatan. Alokasi dana untuk

urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 8.509.234.767,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.320.707.402,00 atau 97,78% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019	2020	
			Target	Realisasi
Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi	155	25	11
Meningkatnya jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	1440	80	99

Sebagai mana Tabel diatas terjadi perbedaan indikator dengan tahun sebelumnya diakibatkan perubahan regulasi yakni Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Indikator Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi yang tidak mencapai target di tahun 2020 dikarenakan ada pengurangan anggaran Refocusing (rasionalisasi anggaran) sehingga kegiatan terkait dengan peningkatan kegiatan pemuda tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di tentukan, dari target jumlah pemuda berprestasi adalah sebanyak 25 orang yang terealisasi sebesar 11 orang.

Adapun Indikator Meningkatnya jumlah atlet berprestasi target 2020 sebanyak 80 atlet terealisasi sebanyak 99 orang atlet dan pegiat olah raga, hal ini disebabkan adanya peningkatan capaian jumlah atlet ber prestasi di karenakan cabang olahraga (cabor) mempertandingkan banyak kelas atau kategori seperti Bulutangkis (tunggal pra usia dini pa/pi, tunggal usia dini pa/pi, tunggal anak - anak pa/pi, tunggal pemula pa/pi, tunggal remaja pa/pi, tunggal pemula pi/pi, ganda taruna pa/pi, ganda non prestasi pa/pi, ganda veteran pa), Tenis lapangan (5 atlit), cabang Road race 21 kelas dengan atlit ber prestasi 30 atlit.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan		Solusi
1	Adanya Pandemi COVID Sehingga Sarana Prasarana Olahraga sementara tidak dapat di gunakan, Para Atlet Mengikuti Pertandingan dengan batasan dan peraturan covid (Tidak Semua cabang di laksanakan kompetisi)	Diusulkan Ke BPKD terkait Staf Tenaga Teknis pekerjaan fisik
2.	Adanya Edaran WFH Belajar dari Rumah Bagi Pelajar Sekolah Sehingga Seleksi Paskibraka Tidak Dapat di lanjutkan	Pengibaran Bendera Merah Putih Dilaksanakan secara Virtual dan Menggunakan Paskibraka I Tahun 2019

d) Prestasi

No.	Nama Kejuaran/ Kegiatan/Penghargaan	Prestasi		Keterangan
		2019	2020	
1.	Putri Pariwisata Intelegensia Kaltim	√		Juara Atribut
2.	Wakil II Duta Wisata	√		Juara II Provinsi
3.	Sajian Es Rumput Laut Terbanyak	√		Rekor Muri
4.	Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional	√		Juara III Poco Poco Nasional
5.	Jambore Pemuda Daerah	√		Juara I Stan Terbaik Pemuda
6.	Pokdarwis "Destinasi Berkembang" Bontang Kuala Abadi	√		Juara II Nasional Destinasi Berkembang
7.	Inovasi lilin extra Melati Pengusir Pyton Reticulatus		√	Juara 1
8.	Inovasi Pembuatan Masker Ampas The Pelindung Bencana Kebocoran Gas Amonia Di lingkungan Industri Kimia		√	Juara 1
9.	Duta Bontang Berprestasi Tk. Provinsi Kalimantan Timur		√	Duta Pemuda
10.	Duta Pemuda Tingkat Nasional		√	Duta Pemuda
11.	BIDANG Pariwisata panji - panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020		√	Juara 1 BIDANG Pariwisata panji - panji Keberhasilan



				Pembangunan Daerah Tahun 2020
12.	BIDANG Kepemudaan panji - panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020		√	Juara 1 BIDANG Kepemudaan panji - panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020
13.	Juara 1 BIDANG Keolahragaan panji - panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020		√	Juara 1 BIDANG Keolahragaan panji - panji Keberhasilan Pembangunan Daerah Tahun 2020

T. Urusan Statistik

Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok Pengembangan Data/Informasi dan Statistik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik terdiri dari 1 program pokok yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.70.817.150,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.70.758.851,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

c). Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya kualitas data statistik sektoral dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pelaksanaan Pemetaan, Identifikasi, Pemenuhan Data Dan Validasi2. Peningkatan Sinergitas Forum Data/ Informatika Statistik Sektoral



		3. Pembangunan Integrasi Data/ Informatika Statistik Sektoral
--	--	---

U. Urusan Persandian

Urusan Wajib Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Persandian dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Persandian dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
2. Program Pengamanan Informatika Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi dan Uji Keamanan Informasi (Penetration Test).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan persandian ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.634.675.297,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.434.639.695,00 atau 68,48% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 69,57%.

c). Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum optimalnya tingkat keamanan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Tata Kelola Dan Manajemen Resiko2. Peningkatan Standarisasi Data Center Dan Pengelolaan Aset"

V. Urusan Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.374.250.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 271,948,183,00 atau 72,66% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 73,20%.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	17	1	1
Jumlah Grup Kesenian	Group	3	2	3

Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya suatu daerah sehingga wajib dilestarikan dengan baik, melalui inventarisasi, dokumentasi dan pemeliharaan



yang konsisten dan baik. Dengan adanya peninggalan sejarah ini, maka peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di kota Bontang.

Dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya yang ada, Pemerintah melalui urusan Kebudayaan melaksanakan berbagai macam kegiatan kesenian baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Adapun ditahun 2020 dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan seni dan budaya. Ritual budaya yang merupakan kegiatan tahunan Kota Bontang terus diupayakan untuk dilaksanakan antara lain Bontang City Carnaval, Erau Pelas Benua Kutai Guntung dan Pesta Laut Bontang Kuala. Harapan dengan adanya kegiatan seni dan budaya ini selain pelestarian budaya juga dapat menjadi magnet untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bontang. Dengan demikian peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pendukung seni dan budaya yang ada di Kota Bontang harus terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Keberadaan grup kesenian daerah terus dibina dan dikembangkan, sehingga bisa tetap eksis dan dapat menjadi wahana yang melahirkan ide-ide kreatif dibidang seni dan budaya. Adapun sampai dengan tahun 2020 ini, di Kota Bontang terdapat 54 grup/kelompok kesenian yang sudah di data dan dibina dengan baik.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum tersedianya data lembaga adat dan kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pembina seni dan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang melakukan pendataan secara berkala terhadap lembaga adat dan Meningkatkan kemampuan SDM dibidang seni dan budaya dengan melakukan pelatihan kepada tenaga pembina seni dan budaya,

W. Urusan Perpustakaan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan perpustakaan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan jumlah perpustakaan umum daerah agar memudahkan akses membaca bagi masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, Pengembangan Minta dan Budaya Baca, Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan, Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, Publikasi dan Sosialisasi Minta dan Budaya Baca, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perpustakaan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 3 program penunjang serta 23 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp.4.249.310.977,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.073.763.520,00 atau 95,87% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1 Persentase jumlah pemustaka perpustakaan umum daerah	Persentase	35,30	21	20,87
2 Nilai survey kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan umum daerah	Nilai	91,17	82	81
3 Persentase perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar perpustakaan umum daerah	Persentase	17,6	18	17,6



Indikator Kinerja Utama tahun 2020 merupakan Indikator Kinerja Utama baru hasil dari perubahan Rencana Strategis tahun 2020. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 antara lain; indikator Presentase jumlah pemustaka perpustakaan umum daerah di tahun 2020 adalah 20,87, capaian belum mencapai target yang di tetapkan, Nilai survey kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan umum daerah di tahun 2020 adalah 81 , capaian belum mencukupi target yang ditetapkan, Presentase perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar perpustakaan umum daerah di tahun 2020 adalah 17,6, capaian belum mencapai target yang di tetapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Pengelolaan Perpustakaan di kelurahan belum optimal Tidak adanya anggaran APBD khusus untuk perpustakaan sehingga Minimnya support dari kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu adanya penambahan atau alokasi khusus anggaran untuk perpustakaan kelurahan.2. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait keberadaan perpustakaan kelurahan3. Sesuai UU 43/2007 tentang Perpustakaan (pasal 40 ayat 2b) disebutkan bahwa pendanaan perpustakaan bersumber dari sebagian anggaran penddikan



Permasalahan	Solusi
Sinkronisasi program literasi dengan sekolahan belum optimal karena Minimnya anggaran dan Kurangnya SDM	Anggaran untuk mendukung kegiatan perpustakaan agar sesuai dengan standar masih kurang, seharusnya sesuai UU 43/2007 tentang Perpustakaan (Psl 23 ayat 6) disebutkan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana plg sedikit 5 % dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan dan Perlu adanya tenaga khusus yang mengelola perpustakaan di sekolah
Belum optimalnya gerakan literasi pada generasi milenial khususnya dan masyarakat pada umumnya Literasi pada generasi milenial dan masyarakat belum digalakkan dengan maksimal	Perlu penambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan geliat literasi. Dan sosialisasi perlu ditingkatkan
Perlu ditingkatkannya layanan digitalisasi perpustakaan , agar semakin meningkatkan semangat masyarakat berkunjung ke perpustakaan	Perlu adanya dana/anggaran untuk peningkatan layanan digitalisasi baik penambahabn koleksi maupun penambahan kapasitas wifi
Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan dan pengorganisasian literasi di Perpustakaan Daerah Tenaga pustakawan di Perpustakaan masih minim (sesuai ABK adalah 31, namun sekarang baru terisi 1 orang)	Perlu adanya penambahan tenaga pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dan membuat usulan formasi untuk penerimaan tenaga pustakawan.
Kurang dan Terbatasnya Pelatihan bagi Tenaga Pengelola Perpustakaan	Perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan
Kerjasama dengan Pihak Ketiga masih kurang dikarenakan kurangnya respon dan kesepahaman Pihak ketiga masih kurang paham dengan pentingnya perpustakaan	Perlu adanya regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak ketiga agar memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap perpustakaan.

**d) Prestasi**

No	Nama Kejuaran/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2020	Keterangan
1	SAKIP Tahun 2019, penghargaan 2020	√	
2	Juara 1 Lomba Bercerita Tingkat Kalimantan Timur	√	
3	Juara 2 Panji Pembangunan Bidang Minat Baca Tahun 2020	√	
4	Juara 2 LKD Bidang Kearsipan Tahun 2020	√	

X. Urusan Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan Kearsipan yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan layanan arsip serta peningkatan pemahaman terkait tata cara penyusunan kearsipan agar memudahkan akses informasi dalam pencarian dokumen penting yang di butuhkan.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Data.
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, Pengadaan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah serta Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika.
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah serta Monitoring, Evakuasi dan pelaporan Kondisi Situasi Data.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip serta Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintahan/Swasta.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kearsipan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 program pokok serta 8 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp.1.152.234.450,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.109.644.330,00 atau 96,30% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1 Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan tata kelola arsip dengan baik	Persentase	35,48	32	48,39
2 persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis	Persentase	3,26	6	6,45

Indikator Kinerja Utama urusan kearsipan tahun 2020 merupakan Indikator Kinerja Utama baru hasil dari perubahan Rencana Strategis tahun 2020. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 antara lain; indikator Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan tata kelola arsip dengan baik di tahun 2020 adalah 48,39 capaian melebihi target yang ditetapkan, persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis di tahun 2020 adalah 6,45 capaian melebihi target yang ditetapkan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Masih belum terkelolanya arsip statis dan vital Pemerintah Kota Bontang secara optimal	Pembangunan depo arsip



Permasalahan		Solusi
2	Belum optimalnya tata kelola kearsipan pada semua OPD	Peningkatan SDM dalam bidang kearsipan dan meningkatkan sosialisasi di bidang kearsipan

d) Prestasi

No	Nama Kejuaran/Kegiatan/Penghargaan	Tahun 2020	Keterangan
1.	Juara 2 LKD Bidang Kearsipan Tahun 2020	Juara 2	Kota Bontang
2.	SAKIP Tahun 2019, penghargaan 2020		Kota Bontang

3.1.3 Urusan Pilihan

Y. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dengan Meningkatkan Produksi Perikanan, Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai, Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ;
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Pengoperasian PPI/TPI, Pendataan Statistik Perikanan Tangkap, Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan), Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan perikanan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 4 program penunjang yang dilaksanakan melalui 28 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar



Rp. 21,995,047,184,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20,473,763,022,00 atau 93,08% dan realisasi fisik sebesar 93,83%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
			2019	2020	
				Target	Realisasi
1	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.	Ton	26788,8	22.476,00	18811,9

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7976,9 ton.

Z. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata serta Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Pariwisata ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 804,716,500,00 Realisasi keuangan sebesar Rp. 776,121,415,00 atau 96,45% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.24.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2020		
		2019	Target	Realisasi
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Kunjungan pariwisata	472.205	408.100	177.177
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	Lokasi	4	1	10
Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Di Bina	Kelompok	12	12	12

Untuk realisasi Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020, Khususnya pada Indikator Kinerja Utama, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dari Target 408.100 jumlah kunjungan wisata, ternyata terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 bertambah menjadi 177.177 orang wisatawan nusantara sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah sebanyak 168 orang.

Sedangkan untuk Jumlah Destinasi Pariwisata kelompok sadar wisata sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai target yaitu 10 Kelompok. Namun Restribusi pariwisata belum bisa dipungut walaupun Destinasi dan Kunjungan meningkat dikarenakan belum ada Perwali serta belum ada peraturan yang mendasari dan masih dalam tahap proses pembahasan dengan Bagian Hukum, Bapenda dan Dewan Perwakilan Rakyat.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan		Solusi
1	Restribusi pariwisata belum bisa dipungut walaupun destinasi dan kunjungannya meningkat, karena belum ada perwali dan peraturan yang mendasari, masih dalam proses pembahasan dengan Bagian Hukum, Bapenda dan DRPD	Percepatan Proses pembahasan Perwali

d) Prestasi

Pada tahun 2020, terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata, Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional, sebagai berikut:

No	Nama Kejuaran/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1.	Putri Pariwisata Intelegensia Kaltim 2109	Juara Atribut
2.	Wakil II Duta Wisata 2020	Juara II Provinsi
3.	Sajian Es Rumput laut Terbanyak 2020	Rekor Muri
4.	Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Nasional 2020	Juara III Poco-Poco Nasional
5.	Jambore Pemuda Daerah 2020	Juara I Stan Terbaik Pemuda
6.	Pokdarwis "Destinasi Berkembang" Bontang Kuala Abadi 2020	Juara II Nasional Destinasi

AA.Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanian ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pertanian dengan meningkatnya produksi pertanian dan peternakan.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok sebagaimana berikut ini :



- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan;
- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
- 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan, Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian), Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
- 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, dan Pendistribusian Ternak kepada masyarakat;
- 6) Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan, Operasional Rumah Potong Hewan, Pembangunan/Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian), Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pertanian pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 6 program pokok dan 13 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanian pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 3,125,484,775,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,016,597,873,00 atau sekitar 96,52% dari pagu anggaran, realisasi fisik sebesar 97,73%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan pilihan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	Target	2020
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Ton	200*	289	200
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	Ekor	1.332*	1.055	1.450

Indikator Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5 ton, faktor penting penyebab penurunan indikator tersebut yaitu faktor cuaca dimana curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa titik yang mengakibatkan gagal panen. Adapun rincian indikator intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura untuk padi yaitu 200 ton, selain padi ada pun produksi lain yaitu jagung (52 ton), kacang tanah (13 ton), Ubi kayu (328 ton) dan ubi jalar (42 ton).

Intensifikasi budidaya peternakan. Produksi peternakan, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, sehingga produksi peternakan melebihi dari target yaitu realisasi untuk sapi 1.331, selain sapi adapun produksi peternakan lain yaitu kuda 6 ekor, kerbau 15 ekor dan sapi perah 13 ekor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Serangan Hama dan Penyakit Tanaman.	Pengadaan Pestisida dan perangkap hama
2 Bencana (Kekeringan dan banjir)	Perbaikan irigasi dan drainase

BB. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan



Pelaksanaan Urusan Wajib Perdagangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan perdagangan antara lain: meningkatkannya Sarana Perdagangan, sistem distribusi perdagangan, sistem distribusi perdagangan ekspor dan meningkatnya perdagangan dan industri. Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok sebagaimana berikut ini :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui kegiatan fasilitasi tertib ukur, ukur ulang dan tera ulang;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor melalui kegiatan fasilitasi pengembangan SDM bidang perdagangan dan pameran dagang komoditi ekspor;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional, pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan lokal, fasilitasi kegiatan pasar murah, dan peningkatan sarana prasarana pasar;
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui kegiatan pembinaan PKL dan peningkatan fasilitasi dan pembinaan pedagang kaki lima (bantuan keuangan provinsi);
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui kegiatan pengadaan alat penunjang kebersihan pasar, pembangunan pasar loktuan, pembangunan sarana dan prasarana pasar loktuan, dan pembangunan pasar rawa indah.

b) Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 8 kegiatan, dengan alokasi dana untuk tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 44,149,384,494,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43,240,189,999.00 atau 97,94% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2020



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2019	Target	2020
Kontribusi sector industri terhadap PDRB Non Migas	%	68,29	86,05	69,80
Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Non Migas	%	5,9	8,29	5,67
Nilai Ekspor	Milyar \$	2.257	5.781	2.098

Untuk indikator kinerja utama Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Non Migas, dapat memperlihatkan bahwa Sektor industry non migas masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah, terbukti dengan target 8,29% tahun 2020 hanya bisa tercapai 5,67 atau turun dari tahun 2019 sebesar 5,9% yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19.

Indikator kinerja utama nilai ekspor juga masih belum tercapai bahkan memperlihatkan penurunan yang signifikan dimana target 5.781 milyar \$ hanya mampu tercapai 2.098 milyar \$ pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh Penurunan nilai ekspor akibat pandemi covid 19 dapat dilihat dari jumlah permintaan penerbitan SKA dari perusahaan menurun karena beberapa faktor antara lain: Permintaan SKA terbesar yaitu PT. Badak pada tahun 2020 ini turun karena semakin tahun kontrak pembelian gas cair dari Jepang dan Korea banyak yang sudah berakhir, disamping itu sekarang ini yang mengatur penjualan gas harus melalui Pertamina sehingga Pemerintah Kota tidak bisa melakukan intervensi. Sementara itu harapan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha Kecil yang ada di Kota Bontang belum ada yang melakukan ekspor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Semakin menurunnya nilai ekspor dan Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Non Migas akibat dari adanya pandemic covid 19 yang dilihat dari jumlah permintaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penyebab utamanya adalah akan berakhirnya kontrak ekspor PT.Badak dan regulasi yang mengatur penjualan gas harus melalui PT.Pertamina	1.1 Penurunan nilai ekspor ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja karena hanya memfasilitasi penerbitan SKA
	1.2 Naik turunnya nilai ekspor ini tergantung pada perusahaan ekspor yang ada di Kota Bontang.

3.1.4 Urusan Fungsi Penunjang



CC. Perencanaan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis: terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu.

a) Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Review RPJMD, Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi, Koordinasi Multi Stake Holder CSR Perusahaan, Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim.
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang, dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi.
3. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang.
4. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Koordinasi TEPPA Kota Bontang.
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial dan Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah.

6. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum, Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Perencanaan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 6 program pokok dan 5 program penunjang serta 45 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi Perencanaan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 5,694,529,886,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,460,374,678.00 atau 95,89% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Fungsi Perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Fungsi Perencanaan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Presentase keterisian data dan pembangunan dalam SIPD	Persen	94,75	100	100
Presentase akurasi data SIPD	Persen	100	100	100
Presentase penjabaran program RPJMD kedalam program RKPDP	Persen	100	90	100
Presentase Penjabaran Kegiatan RKPDP ke dalam APBD	Persen	98,49	90	99,49
Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPDP	Persen	25	25	25
Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	90	93	95
Persentase Perangkat daerah Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja \geq 76%)	Persen	100	100	100



DD. Keuangan

Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Meningkatnya kepatuhan pajak.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui 7 (tujuh) kegiatan antara lain Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Asosiasi Daerah Penghasil Migas Pemeliharaan SISMIOB PBB, Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan serta Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 30 (tiga puluh) kegiatan antara lain Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.
3. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 11 (sebelas) kegiatan antara lain melalui kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPMBMD).

**b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 5 program penunjang serta 79 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Keuangan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 27,613,323,621,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25,979,190,088,00 atau 94,08% dan realisasi fisik sebesar 99,16%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Keuangan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	*WTP
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	Prosentase	100	100	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp x (000)	218.743.530	187.706.530	199.808.704

Indikator kinerja pada sasaran 1 adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan satuan WTP dengan Target adalah WTP, Realisasi di tahun 2020 adalah *WTP (masih menunggu audit dari BPK) begitu juga capaian di tahun 2019 yang juga WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan ini konsisten mempertahankan Opini BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Indikator Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2019 dan 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan BPKAD selaku Perangkat Daerah konsisten dalam memenuhi kebutuhan asset seluruh Perangkat Daerah di Kota Bontang.



Indikator jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.218.743.530.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.19.260.135.000 dari tahun 2019. Peningkatan PAD ini disebabkan karena Bapenda selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan ini menggali potensi yang ada di Kota Bontang. Selain itu, Kota Bontang juga membuat peraturan atau regulasi terkait Retribusi dan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.

Indikator Persentase Kepatuhan Pajak juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dimana pada tahun 2020 persentase kepatuhan pajak tidak lagi menjadi korbisnis dari Bapenda. Hal ini menjadi hal yang baik untuk Kota Bontang karena masyarakat Kota Bontang semakin sadar dan paham akan pentingnya membayar pajak. Bapenda melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat sadar pajak.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Kurangnya Sumber daya Manusia yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, anggaran, belanja, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan kekayaan/asset milik daerah	Mengikutsertakan pegawai pada Diklat terkait hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi
2 Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait penertiban kekayaan/ asset milik daerah	Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penertiban kekayaan/ asset milik daerah
4 Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak	Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak bagi daerah serta melakukan jemput bola ke masyarakat atau wajib pajak.

d) Prestasi



No	Prestasi/Penghargaan	Prestasi Tahun 2020	Keterangan
1	Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan 2019	Opini WTP dari BPK yang ke-6	
2	Good Archival Governance Awards	Harapan I	
3	Kegiatan Gebyar Pajak Daerah	Pengundian Doorprize Wajib Pajak	1 Tahun sekali

EE. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah. Diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Tersedianya system perencanaan ASN yang tersistem dengan baik serta Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah, Diklat PraTugas, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Diklat Jabatan Fungsional, Diklat Akuntansi Berbasis Akrua, Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Penyerahan Satya LencanaKarya Satya, Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS, Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural,



Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS, Dokumentasi Informasi Kepegawaian, Proses Administrasi Mutasi Pegawai, Pengusulan Kartu Status Pegawai, Pelaksanaan Assesment Pegawai, Rapat Koordinasi Kepegawaian, Pengusulan Pemberhentian PNS, Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online, Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online, Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai, Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), Seleksi Penerimaan Calon ASN dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 3 program penunjang serta 31 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 5,425,689,056,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,330,806,655,00 atau 98,25% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
		2019	Target	2020
Meningkatnya profesionalitas ASN	Persen	39,48%	72,00	72,58%

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan dilakukannya review RENSTRA pada tahun 2020, sehingga data Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM pada tahun 2019 berbeda dengan data IKU BKPSDM pada tahun 2020 ini. Dari Target IKU (Indeks Profesional ASN) sebesar 70.00% pada tahun 2020, yang terealisasi hanya 72,58%.



Indeks Profesionalitas ASN merupakan program nasional yang diharapkan bisa menambah informasi mengenai tingkat pencapaian profesionalitas ASN. Selanjutnya referensi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN. Adapun pedoman tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam hal realisasi yang belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Dalam hal penghitungan dimensi kompetensi terkendala pada data mengenai PNS yang mengikuti diklat masih minim. Data diklat yang diselenggarakan melalui BKPSDM sudah otomatis terupdate pada SAPK. Namun data diklat teknis/seminar/workshop yang dilakukan melalui masing-masing Perangkat Daerah tidak dilaporkan pada BKPSDM.
2. Dalam hal penghitungan dimensi kinerja terkendala pada nilai SKP yang tidak disampaikan ke BKPSDM. Dari 2.816 PNS per Tahun 2020, data SKP yang masuk sebanyak 597 PNS, walaupun sudah disampaikan surat edaran

Meskipun begitu, dari hasil penghitungan melalui aplikasi ip-jasn.bkn.go.id Kota Bontang masuk dalam peringkat ketiga se Kalimantan Timur setelah Kab. Kukar dan Kab. Paser. Upaya dalam mendapatkan data telah dilakukan, dengan bersurat dan menghubungi Perangkat daerah yang belum memenuhi permintaan data. Indeks Profesionalitas ASN merupakan hal yang baru begitupun rumusan penghitungannya akan menyesuaikan dengan Instansi Pusat setiap kali pusat ada perubahan. BKPSDM akan terus berupaya untuk mendapatkan data yang valid sehingga diharapkan kedepannya data tersebut dapat menggambarkan kondisi real terkait dengan profesionalitas ASN Kota Bontang sehingga dapat digunakan referensi dalam hal perbaikan dan perencanaan pengembangan ASN Kota Bontang dan ASN secara nasional pada umumnya.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan	Solusi
Selama tahun 2020 permasalahan terkait ASN nihil dan berjalan sesuai bahkan melebihi target yang di tentukan sebelumnya	Menentukan target sesuai kebutuhan

d) Penghargaan

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Keterangan
1	Instansi yang menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara pada seleksi CPNS 2019	2020	
2	Organisasi Perangkat Daerah dengan pegawai yang menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-filing tercepat se kota Bontang Tahun 2020	2020	

FF. Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan optimalisasi penelitian dan pengembangan.

a) Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (Satu) program pokok yaitu Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Koordinasi Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 3 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 143,773,610 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 115,257,450.00 atau 80,17% dan realisasi fisik sebesar 100%.



Realisasi indikator kinerja utama Fungsi Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Fungsi Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Tingkat Aplikasi Dokumen Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	67,38	67	67,38

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1	Beberapa dokumen kelitbangan belum diaplikasikan karena terdapat perubahan kebijakan	
2	Keterbatasan Anggaran	Rekomendasi kajian yang penerapannya bertahap menyesuaikan kondisi anggaran

d) Prestasi

No	Nama Penghargaan	Keterangan
1	Innovative Government Award (IGA)	Kategori Kota Terinovatif

GG. Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatkan mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang, Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Meningkatkan efektivitas penanganan kasus



pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka responsif, Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang serta Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK).
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
3. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang.
4. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pengawasan pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 3 program penunjang serta 25 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 3,959,847,723,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,790,059,669,00 atau 95,71% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks	3 (skor B)	3 (skor B)	3 (skor B)
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	%	91,08	87,5	93,29



Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	%	45	100	71
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks	3 (skor B)	3 (skor B)	3 (skor B)
Indeks opini BPK atas LKPD	Indeks	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
Indeks RB Kota Bontang	Indeks	B	B	B
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	3,07*	3	3
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	3	3	3

*angka sementara

Pada indikator Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan Inspektorat selaku pelaksana Fungsi Pengawasan telah membentuk Tim Tindaklanjuti yang secara proaktif mendatangi Perangkat Daerah dan melakukan pendampingan secara berkala agar Perangkat Daerah dapat menyelesaikan rekomendasi temuan dari BPK.

Untuk capaian indikator Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan belum optimalnya Fungsi Pengawasan dalam menindaklanjuti temuan APIP karena kurangnya SDM dalam melakukan pengawalan dan belum adanya kesadaran dari Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan APIP.

Capaian indikator Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mengalami penurunan secara nilai dari tahun sebelumnya tetapi masih konsisten berada pada level 3, dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian baru dari BPKP dimana pada tahun sebelumnya hanya pemenuhan data sedangkan pada tahun 2020 BPKP menetapkan penilaian SPIP lebih merinci ke implementasi SPIP.

Untuk Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah selama 5 tahun terakhir konsisten mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan telah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan	Solusi
Peraturan dari Pusat sangat dinamis, namun anggaran peningkatan kapasitas kurang	Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kapasitas SDM : BPKP, KPP Pratama, KPKNL, APH
SDM Pengawasan JFT terbatas	Mengoptimalkan seluruh SDM yang ada
	Melakukan alih jabatan / Inpasing SDM Internal
	Merekrut SDM eksternal kedalam JFT
Pengelolaan sistem pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang belum sepenuhnya berbasis manajemen risiko	Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang berbasis risiko
	Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan
	Menyusun <i>teamate</i> berdasarkan <i>gap competency</i> dan jenis penugasan audit intern
	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas audit intern secara berkala
	Membuat aplikasi SIM Pengawasan terintegrasi

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Penghargaan	Tahun 2020
1	Maturitas SPIP	3,07*
2	TL BPK Meningkat	91,08
3	Prosentase MCP	85%
4	Kapabilitas APIP	Level 3

HH. Pendukung Tugas Kepala Daerah

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatkan Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah, Meningkatkan Harmonisasi Kebijakan Perekonomian Daerah, Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD.

a) Program dan Kegiatan



Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melalui kegiatan Perayaan HUT KORPRI (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
2. Program Kerjasama Pembangunan melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Sekretariat Daerah)
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Rapat Protokol se-Kaltim (Sekretariat Daerah)
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota (Sekretariat Daerah)
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan antara lain Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Bantuan Hukum, Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang serta Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan (Sekretariat Daerah)
6. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah (Sekretariat Daerah)
7. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Safari Ramadhan, Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran, Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang, Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah, Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini, Pembinaan Umat Kristiani, Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam, Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah, Pembinaan Umat Hindu, Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang, Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang, Intensitas Komunikasi Dan Ketertiban Umat Beragama, Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi serta



- Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi). (Sekretariat Daerah)
8. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan melalui kegiatan antara lain Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang, Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan, Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi, Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah serta Sosialisasi dan Bimbingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Sekretariat Daerah)
 9. Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi melalui kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah) serta Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang. (Sekretariat Daerah)
 10. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat, Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang, Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa serta Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat. (Sekretariat Daerah)
 11. Program Penguatan Wawasan Pembangunan melalui kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang, Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah serta Perayaan HUT RI.
 12. Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang serta Pelaksanaan e-Procurement. (Sekretariat Daerah)
 13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat-Rapat Paripurna, Kegiatan reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah,



Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan, Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD, Pelantikan Anggota DPRD, Rapat-Rapat Fraksi, Penyusunan Produk DPRD, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD, Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (Sekretariat DPRD)

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah pada tahun 2020 dilaksanakan melalui 13 program pokok dan 11 program penunjang yang dilaksanakan dalam 126 kegiatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi pendukung pelaksanaan Urusan Pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp. 125.814.974.642,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.522.638.709,00 atau 91,82% dan realisasi fisik sebesar 97,69%.

Realisasi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Fungsi Pendukung Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Nilai	B (67,66)	B (68,25)	B (67,66)*
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kota Bontang	Nilai	BB (70,11)	B (66,00)	BB (77,42)
Nilai LPPD	Skor	ST (3,27)	ST (3,27)	ST (3,43)



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
		2019	2020	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
Persentase Target Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis	Persen	100	100	100
Persentase sanggahan yang tidak menggagalkan tender	persen	94	82	90,9
Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD	Persen	76,64	80	75,79
Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persen	51,28	65	88,89
Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran	Persen	100	100	100

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang pada 2020 angka yang tertera masih angka sementara dikarenakan masih menunggu pengumuman dari Pemerintah Pusat untuk penilaian SAKIP Kota Bontang.

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2019 dan 2020 adalah ST (Sangat Tinggi). LPPD merupakan mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja. Ini menunjukkan peran seluruh Perangkat Daerah yang konsisten dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik. Demi memaksimalkan penyusunan LPPD solusi yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah, melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.

Indikator Persentase Target Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan indikator Persentase Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk menunjang perekonomian masyarakat Kota Bontang dengan memberikan payung hukum yang sesuai dengan kebutuhan.

Indikator Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD, Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah serta Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran merupakan Indikator Kinerja



Utama yang disusun oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2020, dikarenakan adanya penyusunan Dokumen perencanaan yang baru dan dilakukan penyesuaian indikator.

Indikator Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan indikator Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD telah memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian indikator tersebut bernilai 100% yang menunjukkan bahwa peran anggota DPRD sudah maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai fungsi legislatif.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah
Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau dapat dilaksanakan dikarenakan waktu tidak mencukupi	Perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan	Sekretariat DPRD
Terlambatnya data yang diminta untuk ditindaklanjuti	Perlunya Penegasan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD
Ketersediaan SDM kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas	Perlunya penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja	Sekretariat DPRD
	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk pelayanan Sekretariat terhadap DPRD	
Belum maksimalnya penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan : Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya analisa jabatan dan analisa beban kerja dalam manajemen SDM Aparatur	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga pada nantinya dapat diharapkan tersedia analisa jabatan dan analisa beban kerja seluruh perangkat daerah	Sekretariat Daerah



	Telah disusun pedoman penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja, diharapkan perangkat daerah dapat lebih maksimal dalam menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja	Sekretariat Daerah
Masih terdapat pemangku jabatan yang belum sesuai dengan syarat dan kualifikasi jabayan yang diampunya	Sedang dilaksanakan sinkronisasi data nomenklatur jabatan dan pemangku jabatan diharapkan dapat terpenuhi penataan SDM Aparatur yang sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan	Sekretariat Daerah
Masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur jabatan pelaksana yang tercantum dalam SK Jabatan dengan pedoman nomenklatur jabatan pelaksana (permenpan 41/2018)	Telah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang sinkronisasi data nomenklatur jabatan sehingga diharapkan data nomenklatur jabatan pegawai adalah data yang valid dan sesuai pedoman	Sekretariat Daerah
Belum tersedianya Standar kompetensi Jabatan pasca restrukturisasi kelembagaan: 1. Belum dilakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan pasca restrukturisasi kelembagaan	Telah dianggarkan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan yang akan dilaksanakan ditahun 2019 sehingga diharapkan tersedia standar kompetensi jabatan sebagai alat pengukuran kompetensi jabatan seluruh perangkat daerah	Sekretariat Daerah
Tim penyusunan Standar kompetensi Jabatan belum memahami tentang cara	Telah dianggarkan kegiatan bimbingan teknis penyusunan standar kompetensi jabatan sehingga diharapkan terpenuhinya	Sekretariat Daerah



penyusunan standar kompetensi jabatan	kompetensi tim penyusun dalam penyusunan standar kompetensi jabatan	
keterlambatan informasi terkait program organisasi kepada seluruh perangkat daerah sehingga peran perangkat daerah terhadap program organisasi masih rendah	Melakukan perencanaan kegiatan rapat koordinasi organisasi secara rutin dan berkala	Sekretariat Daerah
Belum maksimalnya penataan kelembagaan RSUD dan Puskesmas sebagai UPTD Dinas kesehatan	Menunggu regulasi dan melakukan koordinasi dengan provinsi secara intens	Sekretariat Daerah
Masih terdapat kekurangan pada penyusunan tugas, fungsi dan uraian tugas perangkat daerah (penulisan tidak sesuai sistematika, terdapat tumpang tindih tugas, fungsi dan uraian tugas	Sedang dilaksanakan evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Sekretariat Daerah
Belum semua Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proses bisnis	Sekretariat Daerah
	Melaksanakan evaluasi terhadap dokumen SOP yang telah disusun Perangkat daerah	
Belum semua perangkat daerah menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku pegawai	Telah membuat surat edaran tentang penyusunan kode etik dan kode perilaku pegawai pada perangkat daerah	Sekretariat Daerah
	Telah disampaikan pedoman kode etik dan kode perilaku perangkat daerah	



Belum optimalnya penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas ASN	Membuat surat edaran tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sesuai perwali	Sekretariat Daerah
	Melakukan sosialisasi penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas ASN misalnya pada kegiatan apel pagi dan rapat kerja	
Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menyusun dan menetapkan rencana aksi SPBE terkait kebijakan/regulasi layanan SPBE	Sekretariat Daerah
Kurangnya pemenuhan tingkat kpatuhan standar pelayanan publik pada sebagian unit penyelenggara pelayanan publik	Telah dilakukan sosialisasi, pendampingan, dan monitoring pelayanan publik pada perangkat daerah penyelenggara layanan	Sekretariat Daerah
	Telah menetapkan peraturan walikota tentang Standar pelayanan Publik	
Tingkat penyelenggaraan pelayanan publik masih belum diterapkan secara optimal (masih disposisi kategori B/Baik)	Telah melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terkait pemenuhan aspek pelayanan publik	Sekretariat Daerah
	Mensosialisasikan penyusunan pedoman SKM	
Penyusunan Laporan AKIP sistem yang digunakan masih dianggap belum sempurna demikian pula dengan sistem informasi indikator individu belum dapat dipergunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh program anggaran yang berubah serta kegiatan dan sub kegiatan (menyesuaikan permendagri 90 tahun 2019)	Penyempurnaan sistem E-Sakip pada penyusunan laporan AKIP Pemerintah Kota Bontang dan sistem informasi indikator individu mengacu pada ketentuan permendagri 90 tahun 2019	Sekretariat Daerah



Untuk pelaksanaan penyusunan SK penetapan reformasi birokrasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh peraturan yang tiba-tiba berubah.	Sedang dilaksanakan penyusunan SK Penetapan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
--	---	--------------------

d) Prestasi

No	Nama Kejuaraan/ kegiatan / Penghargaan	Prestasi		Keterangan
		2019	2020	
1	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	-	V	Juara 3 (Good Archival Governance Award)
2	Panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (Sekretariat Daerah)	Juara 1	Juara 1	Panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
3	Keberhasilan atas Pengendalian Inflasi Harga Kota Bontang (Sekretariat Daerah)	,-	Nominasi 1 TPID Berprestasi wilayah Kalimantan Tahun 2019	Keberhasilan atas Pengendalian Inflasi Harga Kota Bontang
4	Penghargaan sebagai kota peduli hak azasi manusia (Sekretariat Daerah)	Kategori Peduli	Kategori Peduli	Penghargaan sebagai kota peduli hak azasi manusia
5	Panji keberhasilan pembangunan bidang pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN) (Sekretariat Daerah)	Juara 3	Juara 1	Panji keberhasilan pembangunan bidang pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN)
6	Lomba Kearsipan Tingkat Kota Bontang (Sekretariat Daerah)	Juara harapan 2	Juara harapan 3	Lomba Kearsipan Tingkat Kota Bontang

II. KEWILAYAHAN

Dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, Meningkatnya partisipasi masyarakat, Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.



a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan, Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan serta Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan.
2. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Kegiatan HUT RI, Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu, Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan, Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT), Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan dan lain-lain.
3. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan (DAU).
4. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh tiga Kecamatan melalui kegiatan antara lain Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman di masing-masing RT.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 14 program pokok dan 14 program penunjang serta 731 kegiatan yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar Rp.100.308.723.809,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.96.890.101.761,00 atau 96,59% dan realisasi fisik sebesar 99,77%.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan	Solusi
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru
Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek atau diklat bagi aparatur
Admin Kelurahan kurang memahami Aplikasi Prodeskel untuk penyusunan profil	Pembinaan dan pelatihan oleh bagian terkait
Belum ada aplikasi pengelolaan surat pertanahan di tingkat kecamatan	Pengadaan aplikasi pertanahan
Tidak ada biaya operasional pengukuran tanah di lapangan	Review Peraturan terkait pungutan biaya operasional Kelurahan dan Kecamatan mengenai Surat Pertanahan. (Kota dan Kabupaten yang lainnya masih memberlakukan pemungutan)
Tidak tersedia kendaraan, perlengkapan dan seragam kegiatan patroli	Pengadaan kendaraan, perlengkapan dan seragam patrol
Tidak adanya biaya operasional bagi lembaga kemasyarakatan seperti Forkohat Kecamatan dan Kelurahan	Mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Forkohat Kecamatan dan Kelurahan
Tidak adanya Gudang Penyimpanan Barang	Segera dibangun Gudang Penyimpanan Barang

d) Prestasi

Terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pada tahun 2020 berbagai penghargaan telah diraih Kota Bontang, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Kejuaraan/ kegiatan / Penghargaan	Prestasi		Keterangan
		2019	2020	
1	Penghargaan e-SAKIP Kota Bontang (BB)	-	V	Kecamatan Bontang Selatan
2	Lomba camat berprestasi juara III	-	V	Kecamatan Bontang Selatan
3	Penghargaan IKM katategori A	-	V	Kecamatan Bontang Selatan
4	Juara 3 lomba defile BCC	V		Kecamatan Bontang Barat
5	Juara 1 lomba administrasi PKK tingkat Bontang	V		Kecamatan Bontang Barat
6	Juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi	V		Kecamatan Bontang Barat



7	Juara 2 lomba sekolah sehat tingkat nasional	V		Kecamatan Bontang Barat
8	Juara 1 lomba sekolah sehat tingkat kota	V		Kecamatan Bontang Barat
9	Juara 1 lomba pola asuh anak remaja (PAAR) Tingkat Provinsi	V		Kecamatan Bontang Barat
10	Juara 3 Lomba Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) Tingkat Nasional	V		Kecamatan Bontang Barat
11	Juara 3 lomba cipta menu/festival Pangan local B2SA Kategori lunchbox	V		Kecamatan Bontang Barat
12	Juara 1 lomba camat berprestasi tingkat Kota	V		Kecamatan Bontang Barat
13	Sertifikat Lomba inovasi teknologi tepat guna dan lomba posyantek tingkat kota Bontang	V		Kecamatan Bontang Barat
	Juara 1 lomba camat berprestasi tingkat kota		V	Kecamatan Bontang Barat

3.2 Kebijakan Strategis

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Bontang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kota Bontang yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum dan teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan keuangan di masing-masing



2. Meningkatkan pengelolaan aset melalui peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap OPD
3. Pembagian seragam (sepatu, Baju, Tas dan buku) kepada seluruh siswa yang ada di kota Bontang sebanyak 38.500 Orang
4. Menaikkan insentif guru swasta menjadi Rp. 1 juta per orang kepada 1.771 orang Guru Swasta dan penggiat agama menjadi Rp. 1 juta per orang
5. Mendukung kebijakan Universal Health Coverage, seluruh masyarakat bontang memiliki jaminan kesehatan serta akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
6. Membangun rumah sakit Umum Tipe D, dalam rangka memperluas akses kesehatan rujukan tingkat pertama.
7. Pembangunan pasar Loktuan dan pasar Rawah Indah, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan mempermudah bagi konsumen mendapatkan kebutuhan.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2019

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tahun berjalan harus disusun berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Memperhatikan hasil rekomendasi DPRD Kota Bontang terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2019, berikut dijabarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan pembangunan tahun 2020.

Tabel 3.33.

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2019

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
1.	Meminta Pemerintah Kota Bontang mulai tahun depan agar tidak lagi membuka penerimaan CPNS secara nasional,	Sejalan dengan kebijakan secara nasional tentang Rekrutmen CPNS, dan memperhatikan juga Rekomendasi DPRD, maka	BKPSDM



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	<p>tetapi perlu menetapkan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan Tenaga Honor yang ada dan telah berpengalaman. Kebijakan dimaksud adalah menaikkan status dari Honor Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019 22 biasa menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), P3K menjadi PNS secara bertahap sampai 5 (lima) tahun kedepan.</p>	<p>pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang tidak melaksanakan penerimaan CPNS. Adapun terhadap kebijakan pengangkatan P3K telah menjadi pertimbangan utama, meskipun proses perekrutannya masih menunggu kebijakan yang jelas dari Pemerintah Pusat.</p>	
2	<p>Pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah Kota Bontang, agar memenuhi semua fasilitas dan kebutuhan perasional sekolah- sekolah negeri, sehingga subsidi atau bantuan bagi sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri agar ada pembatasan yang jelas sebagaimana direkomendasikan oleh BPK bahwa tidak ada batasan tahun sekolah swasta dapat menerima bantuan sekolah, demikian juga peningkatan</p>	<p>Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bontang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan fokus utama pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah- sekolah negeri.</p> <p>Namun demikian Pemerintah Kota Bontang tetap memperhatikan dan membantu penyelenggaraan Pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Yayasan (sekolah swasta). Kebijakan pemberian insentif guru swasta, bantuan peralatan</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan bagi mereka yang berada pada pendidikan menengah keatas yang sekarang telah menjadi kewenangan provinsi harus memiliki payung hukum yang kuat dan pasti.	dan perlengkapan belajar siswa, bantuan operasional sekolah (BOSTK) dan pembinaan dalam bentuk lainnya, adalah bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam tetap memperhatikan peran penting peyelenggaraan Pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Yayasan (sekolah swasta).	
3	Penanganan kesehatan masyarakat, kedepan Pemerintah Daerah wajib membuat program upaya pencegahan dan penularan wabah penyakit menular. Program pencegahan yang bersifat mengutamakan promotif dan preventif dibanding represif, sehingga tidak ada lagi terjadi kekosongan masker, pembersih tangan (handsanitizer), disinfektan, dan obat-obatan penambah imun.	Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan saat ini menjadi prioritas utama, khususnya terkait dengan penanggulangan dan pencegahan penularan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu sejalan dengan Rekomendasi DPRD, upaya-upaya pencegahan terus digencarkan dengan mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat seluas-luasnya. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terkait, juga terus ditingkatkan dengan menggalang partisipasi stakeholder dan perusahaan.	Dinas Kesehatan & RSUD
4	Perusda yang berada di Kota Bontang dan anak perusahaan, harus dimaksimalkan kinerjanya terkait dengan	Optimalisasi Peran Perusahaan Daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu menjadi	Bapenda dan BPKAD



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan harus diperketat. Jangan sampai Perusda membebani keuangan daerah. Pada Tahun 2019 Perusda tidak mendapat support anggaran dari pemerintah daerah. Harapannya ke depan Pemerintah dan DPRD dapat memberikan support yang menjamin berjalannya Perusda dengan baik. Untuk gambaran ke depan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat berupa Perumda atau Perseroda yang orientasinya mencari keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p>	<p>perhatian Pemerintah. Bahwa untuk maksud tersebut Perusahaan Daerah mendapatkan dukungan anggaran, maka hal ini akan dilakukan kajian kebijakan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar didapatkan gambaran utuh potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dari Perusda yang ada dan menjadi bahan pembahasan Bersama dengan DPRD.</p>	
5	<p>Pemerintah Daerah kedepan wajib membuat program yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja alih daya dan menegakkan peraturan perundang-undangan berupa</p>	<p>Pemerintah Kota Botang telah melaksanakan peran perlindungan tenaga kerja melalui program-program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja. Komitmen tersebut telah dibuktikan melalui pelaksanaan Perda</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja</p>



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	pengawasan dan mengenakan sanksi kepada Perusahaan perusahaan yang berusaha di wilayah Bontang. Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya	Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya. Melalui penerapan kedua kebijakan tersebut, patut disyukuri bahwa sejauh ini tidak terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang berarti dan hak-hak Pekerja tetap dipenuhi oleh perusahaan.	
6	Terkait dengan pertanahan diharapkan tim apprasial atau penilai yang menjadi penentu atas nilai jual tanah, agar dapat menetapkan harga NJOP dan PBB yang lebih mendekati pada harga tanah secara riil yang berkembang sesuai dengan harga ekonomi yang berlaku di masyarakat, hal ini terkait dengan seringnya penetapan harga jual menjadi masalah dan menjadi temuan oleh pemeriksa yang berwenang	Nilai Jual Tanah dalam perhitungan PBB secara bertahap telah dilakukan penyesuaian agar lebih mendekati nilai sesungguhnya. Kebijakan ini telah dimulai dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 448 tahun 2018 tentang NJOP. Kebijakan penyesuaian NJOP ini pada tahun 2020 telah mencapai 100%. Selanjutnya penyesuaian dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan terlebih dahulu dilakukan kajian.	Bapenda



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
7	<p>Kedepannya Pemerintah Daerah harus Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya. Karena prediksinya Bontang untuk 20 tahun kedepan potensi migas yang ditambah oleh PT.Pertamina dan PT.Badak NGL berkurang bahkan akan habis. Oleh karena itu program yang perlu dikembangkan adalah obyek wisata dimana saja yang ada di Bontang untuk digali potensinya, dengan tetap fokus pada menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti halnya pengembangan wisata laut atau maritim dan daerah pesisir. Apalagi dengan adanya rencana Pertamina New Gras Root Refinery (NGRR) Bontang ke dua lokasi baru dengan pertimbangan pasar dan potensi penggantian mitra. Hal ini menambah berkurangnya pendapatan dan pasokan BBM</p>	<p>Kebijakan untuk meningkatkan peran sektor pariwisata dalam mendukung perkembangan ekonomi Kota Bontang, khususnya pasca industri pengolahan migas, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan sektor pariwisata melalui penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah. Perda ini akan menjadi panduan arah pengembangan kepariwisataan di Kota Bontang yang diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah dimasa yang akan datang.</p> <p>Namun sebelum Perda yang dimaksud selesai, Pemerintah Kota Bontang telah mengambil Langkah percepatan dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2021 - 2025</p>	Bapenda dan Disporapar



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
8	Diperlukan kedepan untuk merencanakan pemekaran kecamatan yang ada di wilayah Kota Bontang sampai saat ini masih terdiri dari 3 Kecamatan saja yaitu: Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km ² , Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km ² , dan Bontang Barat seluas 17,20 km ² . Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km ² . Perlu dikaji dan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.	Kebijakan Pemekaran, khususnya Pemekaran Kelurahan, hingga saat ini masih tetap berproses. Tahapan yang sedang dilakukan adalah mengupayakan revisi Naskah Akademis sebagai bahan pengusulan Raperda. Ditargetkan pada akhir tahun 2021 pemekaran kelurahan dengan penambahan 8 kelurahan baru dapat ditetapkan dengan Perda.	Sekretariat Daerah
9	Peningkatan peran pemerintah daerah secara langsung yang dapat dirasakan masyarakat, berupa penambahan dan pengadaan alat kebakaran dan beserta kendaraan kebakaran (Damkar), hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi musibah yang menimpa masyarakat seperti kebakaran rumah	Peningkatan kapasitas pencegahan dan penanggulangan Pemadam Kebakaran terus menjadi perhatian Pemerintah. Saat ini dalam rangka meningkatkan Respon Time atau waktu tanggap pemadaman kebakaran telah didirikan 3 pos Pemadam Kebakaran dan akan ditambah satu lagi di Berbas Tengah. Adapun untuk	BPBD & DPKP



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	atau bangunan dan kebakaran hutan	peningkatan kecukupan perlengkapan dan peralatan pemadaman akan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.	
10	Peningkatan kapasitas penyediaan air bersih yang sekarang ini dirasakan masyarakat Bontang belum terpenuhi, apalagi pada musim kemarau ketersediaan air bersih menjadi salah satu pelayanan melalui PDAM yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Bontang	Untuk dapat meningkatkan kapasitas layanan air bersih, Kota Bontang sangat memerlukan tambahan sumber air bersih. Mengingat seluruh pasokan air bersih masih bersumber dari air bawah tanah, maka Pemerintah telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan Bendali Suka Rahmat yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pasokan air baku disamping berperan sebagai pengendali Banjir. Saat ini sedang dikaji juga kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan potensi air baku yang cukup besar pada Kolam Pasca Tambang di area PT Indominco, juga melalui fasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi Kaltim.	DPUPR & PDAM
11	Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Perda Kota Bontang meminta	Seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bontang selalu menjadi bagian rujukan kebijakan	Bapelitbang & BPKAD



No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Penanggung Jawab
	Walikota Bontang untuk menerbitkan Perwali atau mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2019 maksud dan tujuan Perda tersebut.	dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun selanjutnya, sebagaimana poin-poin rekomendasi yang disampaikan di atas yang secara umum telah dilaksanakan tindak lanjutnya.	
12	Meminta kepada Walikota Bontang agar dalam menggunakan anggaran tidak hanya berprinsip efektif dan efisien tapi juga menggunakan konsep tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna.	Pelaksanaan APBD dalam rangka merealisasikan program-program pembangunan pada prinsipnya merupakan hasil kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan DPRD. Kesepakatan tersebut melingkupi keseluruhan program, target kinerja dan anggarannya. Pemerintah seoptimal mungkin memanfaatkan APBD agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan pelayanan pembangunan bagi masyarakat.	Bapelitbang



BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yangmemberi penugasan.



Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.



4.1. TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA DEKONSENTRASI

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bontang memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp.11.071.830.000,-. Dana tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) PD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Ketiga PD penyelenggara kegiatan Tugas Pembantuan tersebut adalah :

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menerima alokasi dana untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah anggaran PKH di Kota Bontang pada tahun 2020 senilai Rp. 8.965.960.000,00 yang cair selama 4 (empat) tahap.
2. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, dengan alokasi dana APBN untuk tugas perbantuan sebesar Rp 57.650.000,- melalui kegiatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan juga terdapat Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan anggaran sebesar Rp 140.850.000 dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.907.370.000,- dalam 2(dua) kegiatan, Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional) dan Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana) yakni Bantuan Langsung dari BKKBN di Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian / Lembaga pada masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

A. KEMENTERIAN SOSIAL

Terdapat beberapa tugas perbantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk wilayah Kota Bontang dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung
Kementerian Sosial Republik Indonesia



2. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Tujuan PKH adalah Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, Mengurangi Kemiskinan, dan Inklusi Keuangan. Jumlah anggaran PKH di Kota Bontang pada tahun 2020 senilai Rp. 8.965.960.000,- yang cair selama 4 (empat) tahap. Tahap pertama 2.413 KK senilai Rp. 2.151.975.000, tahap kedua 2.373 KK senilai Rp. 2.053.275.000, tahap ketiga 2.578 KK senilai Rp. 2.323.450.000, dan tahap keempat 2.478 KK senilai Rp. 2.437.250.000.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako

Program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik setiap bulannya dan digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong). Penerima program ini adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dan telah masuk dalam Daftar Penerima Manfaat Program (DPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan Bantuan pangan Non Tunai / Program Sembako adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Jumlah anggaran BPNT / Program Sembako pada tahun 2020 di Kota Bontang senilai Rp. 11.160.600.000 untuk 4.861 Rumah Tangga



c. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah covid-19. Jumlah anggaran BST pada tahun 2020 di Kota Bontang senilai Rp. 3.567.600.000 untuk 2.830 Rumah Tangga.

B. KEMENTERIAN PERTANIAN

DIPA Nomor : 018.08.169121.3993.002.051/2020

1. Dasar Hukum :

DIPA Nomor : 018.08.169121.3993.002.051/2020

2. Instansi Pemberi Tugas :

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang

4. Program : Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan : Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Anggaran: Rp 57.650.000,-

5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Hal yang melatarbelakangi pelaksanaan Kegiatan sesuai DIPA No. 018.08.169121.3993.002.051/2020 adalah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Kelompok Tani agar penyalurannya tepat sasaran. Memfasilitasi kelompok tani dalam upaya mendukung program pemerintah untuk membantu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai DIPA No. 018.08.169121.3993.002.051/2020 secara fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 57.650.000,- atau sebesar 100%.

C. KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) DANA DEKON PADA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



1. Dasar Hukum :
 - a. DIPA Nomor : SP DIPA-018.11.3. 169000/2020 Revisi ke 03 Tanggal 19 Juni 2020. MAK:1816.109.001.101.K.526312
 - b. SK Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK/264/DISPANTPH/SK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Tentang Penerima manfaat kegiatan pekarangan pangan lestari tahap penumbuhan tahun 2020
2. Instansi Pemberi Tugas : Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang
4. Kegiatan : Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
Anggaran : Rp 140.850.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Dana P2L yang diserahkan kepada kelompok @ RP 60.000.000 x 2 Kelompok
 - b. Dana pendampingan P2L Rp 20.850.000
5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan serta meningkatkan pendapatan. Tahun 2020 di Kota Bontang mendapatkan 2 (dua) kelompok penerima manfaat yaitu kelompok Dasawisma Gunung Wilis 4 di Kelurahan Gn Telihan dan Dasawisma Flora Lestari di Kelurahan Bontang Lestari. Untuk realisasi fisik dan anggaran sudah terlaksana 100%.

D. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Dasar Hukum :
 - UU 33/2004 tentang Pemerintahan Daerah



- PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
 - Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
 - Perpres Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020
 - Nawacita JW-JK Pasal 3 ayat (2) Pepres No. 123/2016
 - PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
2. Instansi Pemberi Tugas :
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
 4. Program Keluarga Berencana
 - Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional)
Anggaran : Rp 887.370.000,-
 - Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)
Anggaran : Rp, 1.020.000.000,-
 5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional

4.2. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di



wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Saat ini pelaksanaan kerja sama daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah diatur lebih spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan. Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun telah dilaksanakan yang ditandai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dengan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator hubungan antar daerah di lingkup Kalimantan Timur, kerja sama dengan daerah yang berbatasan langsung (Kutai Timur dan Kutai Kartanegara) maupun yang sifatnya jaringan lintas perkotaan (Samarinda, Balikpapan dan Bandung). Selain kerja sama antar daerah, Pemerintah Kota Bontang juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik itu instansi vertikal maupun pihak ketiga lainnya dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan yang memiliki interkoneksi dengan pihak lain.

Sebagai contoh guna menjawab permasalahan kesehatan terkait masyarakat yang hidup di perbatasan wilayah maupun pelayanan Rujukan, RSUD Taman Husada Bontang dapat melayani masyarakat Kutai Timur baik lewat Jamkesda, Jampersal maupun BPJS Kesehatan serta bekerja sama dengan RS Atma Husada Samarinda, RS Kanujoso Balikpapan maupun RS Kudungga Sangatta terkait lintas rujukan.

Dalam bidang perkembangan teknologi, Bontang telah bekerja sama Pemerintah Kota Bandung terkait pengembangan aplikasi sistem smart city/command center dan dengan Pemerintah Kota Balikpapan terkait aplikasi pengadaan barang dan jasa.

Kerja Sama dengan berbagai Universitas di Indonesia diharap menjadi pendukung kebutuhan perkembangan Kota Bontang yang memerlukan inovasi, penelitian, pengembangan sumber daya manusia oleh akademisi yang dianggap mumpuni di bidangnya. Kerja sama lainnya dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai prinsip kesetaraan, ketergantungan, interkoneksi maupun pemanfaatan asset sesuai aturan yang berlaku.



Pihak Yang Bekerjasama								
No	Antar Daerah	Pihak Ketiga						Ket
		No	Universitas	No	Kementerian/Instansi Vertikal	No	Lembaga Lainnya	
1	Provinsi Kalimantan Timur	1	Universitas Mulawarman Samarinda	1	Dirjen Migas Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	BPJS Kesehatan	
2	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	2	Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2	BPJS Ketenagakerjaan	
3	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	3	Universitas Brawijaya Malang	3	Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum Dan Ham	3	PERUM BULOG	
4	Pemerintah Kota Samarinda	4	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	4	Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika	4	PT. Pupuk Kaltim	
5	Pemerintah Kota Balikpapan	5	Universitas Hasanuddin Makassar	5	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara	5	PT. Badak NGL	
6	Pemerintah Kota Bandung	6	Universitas Terbuka Kalimantan Timur	6	Kantor Wilayah Dirjen Pajak Kaltim Dan Kaltara	6	PT. PELINDO IV	
		7	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang	7	Kodim 0908/Bontang	7	PT. PLN	



		8	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta	8	Kepolisian Resor Bontang	8	PT. Pertamina Gas	
		9	Universitas Airlangga Surabaya	9	Kejaksaan Negeri Bontang	9	PT. Kaltim Methanol Industri	
		10	Institut Teknologi Bandung	10	Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	10	PT. Kaltim Daya Mandiri	
		11	Universitas Diponegoro Semarang	11	Badan Pusat Statistik	11	PT. Kaltim Industrial Estate	
		12	Institut Pertanian Bogor	12	Kantor Pertanahan Kota Bontang	12	PT. Pama Persada Nusantara	
		13	Politeknik Negeri Samarinda	13	Kantor Kementerian Agama Kota Bontang	13	PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara	
		14	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang	14	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang	14	PT. Bank Negara Indonesia	
		15	Universitas Negeri Makassar	15	Badan Informasi Geospasial	15	PT. Bank Syariah Mandiri	
		16	Universitas Indonesia Timur	16	Bapertarum Pns	16	PT. Pos Indonesia	
				17	Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan	17	PT. Btrav Connection	
				18	Bpkp Provinsi Kaltim	18	PT. Tower Bersama	



				19	Upt Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	19	PT. Selat Mutiara	
						20	PT. Khatulistiwa Media	
						21	PT. Telekomunikas i Indonesia	
						22	Perusda AUJ	
						23	KONI Kota Bontang	
						24	BP Masjid Agung Al Hijrah	
						25	Kamar Dagang Dan Industri Kota Bontang	
						26	Himpunan Mahasiswa Bontang	
						27	Gereja Katolik Santo Yosef	
						28	Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Bontang	
						29	Forum Kerukunan Umat Beragama Bontang	
						30	Badan Komunikasi Pemuda Dan	



							Remaja Masjid Indonesia	
						31	Badan Koordinasi Da'wah Islam Indonesia	

Selain berbentuk Kesepakatan Bersama ataupun Perjanjian Kerja Sama, aktivitas pelaksanaan kerja sama daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bontang juga menggunakan instrument wadah/forum seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun dengan perusahaan-perusahaan lewat Forum *CSR* guna mensinergikan program kegiatan, menciptakan harmonisasi pembangunan maupun meminimalisir konflik yang terjadi akibat benturan kepentingan.

3. Hambatan/Kendala

Dalam meneruskan Kesepakatan Bersama lewat Perjanjian Kerja Sama sering kali menghadapi kendala mengingat masing-masing pihak tentunya memiliki kapabilitas maupun keterbatasan masing-masing sehingga bidang kerjasama yang telah disepakati belum dapat secara maksimal ditindaklanjuti lewat Perjanjian Kerjasama/Kegiatan.

Guna menjawab permasalahan yang sifatnya lintas Daerah seperti penanganan banjir dan sumber air baku lewat pembangunan Bendungan Marangkayu dan Bendali Sukarahmat belum terealisasi. Fasilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi faktor penentu terealisasinya, mengingat skala penggunaan APBD masing-masing Pemkab/kota terbatas.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan



pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- 1) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- 2) Direktur PT. Badak LNG
- 3) Direktur PT. Indominco Mandiri
- 4) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- 5) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- 6) Direktur PT. Black Bear Resources Indonesia
- 7) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- 8) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate
- 9) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- 10) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- 11) Direktur Rumah Sakit PKT
- 12) Direktur PT. Pama Persada Nusantara



- 13) Direktur PT. Chevron
- 14) Direktur PT. Pertamina Gas
- 15) Direktur PT. United Tractor
- 16) Direktur PT IKPT
- 17) Kepala Telkom Bontang
- 18) Kepala PLN Bontang
- 19) Bank Indonesia
- 20) Kepala Cabang Bank Kaltimara Bontang
- 21) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang
- 22) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang
- 23) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- 24) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- 25) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- 26) Kepala Cabang Bank Muamalat Bontang
- 27) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- 28) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- 29) Kepala Cabang Maybank Bontang
- 30) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui



sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan pada tahun 2020 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan antara lain dapat dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KMI

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	BABs (Bebas Buang Air Besar Sembarangan)	Tersedianya sarana BAB untuk masyarakat yg belum memiliki fasilitas BAB yg memadai dan ramah lingkungan	Warga Buffer Zone PT KMI (RT-02 Kelurahan GUNTUNG)	RT-02 Kelurahan Guntung	Forum Komunikasi CSR kota Bontang / KOTAKU.	Rp. 250.000,000
2	GLISERIN (Gerakan Literasi Sekolah Intensif)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Bontang melalui peningkatan kualitas guru pengajar	Guru SD yg tergabung dalam KKG gugus 2	Kecamatan Bontang Utara	Program CSR PT. KMI, hasil diskusi dengan KKG gugus 2	Rp. 617.150.000
3	RUSA JANTAN (Rumah Sayur dan Jahe Instan)	Peningkatan ekonomi Masyarakat	Masyarakat Buffer Zone khususnya Kelompok usaha Mekar Harum di RT 17 Kelurahan GUNTUNG.	RT 17 Kelurahan GUNTUNG	Program CSR PT. KMI, hasil diskusi dengan Kelompok Usaha Mekar Harum	Rp. 105.000.000



4	“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMAN METHANOL”	Pemberdayaan masyarakat disekitar taman methanol melalui Program KEHATI	Masyarakat Sekitar area Taman Methanol di Kelurahan Bontang Lestari	Kel Bontang Lestari	Program CSR PT. KMI dan hasil diskusi dengan pemerintah kota Bontang	Rp. 50.400.000
5	Anggota MITRA Taman Nasional Kutai	Pelestarian KEHATI melalui Mitra TNK dan pemberdayaan masyarakat disekitar taman Nasional Kutai	masyarakat disekitar taman Nasional Kuta	Taman Nasional Kutai	Mitra TNK	Rp. 30.000.000
6	Partisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19	Ikut mendukung tim medis dan tim covid kota bontang dan masyarakat yg terimbas pandemi Covid-19	Covid Center Kota Bontang. Tim Medis dan Masyarakat Terimbas	Covid Center, Kelurahan Guntung dan Lpk Tuan	Program CSR PT. KMI	Rp. 100.000.000
7	Kampung Inggris (TAHAP EDUKASI)	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di bidang bahas inggris sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mas	Masyarakat kelurahan Guntung	Kel Guntung	Program CSR PT. KMI	Rp. 62.500.000
8	CARITY	sumbangan ke beberapa NGO / LSM	NGO / LSM	Bontang	Program CSR PT. KMI	Rp. 38.500.000

**Tabel 4.2**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pertamina Gas

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kampung Batik Ecoprint	Pemberdayaan masyarakat rentan	Kelompok Perempuan Matahari	Kelurahan Guntung	CSR	Rp 61.817.220
2	Penanaman 500 Mangrove Sonneratia Alba	Pelestarian Mangrove	Kelompok Tani Mangrove	Bontang Mangrove Park	CSR	Rp 20.382.000
3	Penataan Area Penanaman Mangrove Bontang Mangrove Park	Pelestarian Mangrove	Balai TNK	Bontang Mangrove Park	CSR	Rp 111.963.000
4	Bantuan Paket Makanan dan Minuman Sehat Tenaga Medis RSUD Taman Husada	Dukungan kesehatan bagi tenaga medis COVID19	Tenaga Medis RSUD Taman Husada	Kelurahan Belimbing	CSR	Rp 18.168.840
5	Bantuan APD Tenaga Medis Bontang	Dukungan bagi tenaga medis COVID19	Tenaga Medis COVID19	Public Safety Center	CSR	Rp 9.516.000
6	Bantuan 10 Unit Wastafel Portable Fasilitas Umum Bontang	Dukungan penerapan new normal di Kota Bontang	Masyarakat Kota Bontang	Fasilitas Umum Kota Bontang	CSR	Rp 25.499.780
7	Bantuan 1000 Masker untuk Masyarakat Kota Bontang	Dukungan penerapan new normal di Kota Bontang	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang	CSR	Rp 20.500.000
8	Sembako 280 Paket untuk Masyarakat Bontang Terdampak Covid-19	Dukungan masyarakat terdampak Covid19	Masyarakat terdampak COVID19	4 Kelurahan Kota Bontang	CSR	Rp 54.479.000
9	Bantuan 40 Paket Makanan Bergizi untuk Panti Asuhan	Dukungan masyarakat terdampak Covid19	Anak Yatim Piatu	Panti Asuhan Al-Haq	CSR	Rp 20.000.000
						Rp 342.325.847



Tabel 4.3
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KNI

No	Kegiatan	Kluster	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Realisasi Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program MAHIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak) - Masjid Asy Syuhada Berbas Pantai & Masjid Al Hijrah Tanjung Laut Kota Bontang	Empowerment	a) Pemanfaatan Masjid utk Pemenuhan Hak Anak. b) Mengoptimalkan fungsi Masjid sebagai wadah kegiatan positif, kreatif, inovatif dan rekreatif yang aman dan nyaman.	Masyarakat (Anak-Anak, Orang Tua & Lingkungan sekitar)	Berbas Pantai & Tanjung Laut	Kolaborasi PT KNI dan Dinas PPKB Kota Bontang, Masyarakat dan Instansi terkait	Rp 135.935.000
2	Program DETEKTIF CEKATAN (Deteksi dan Edukasi Informatif Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak)		a) Mencegah Kekerasan Terhadap Anak. b) Mewujudkan Sekolah Bebas Kekerasan.	Sekolah & Masyarakat (Anak-Anak dan Orang Tua)	Kota Bontang	Kolaborasi PT KNI dan Dinas PPKB Kota Bontang, Sekolah dan Masyarakat	Rp 80.600.000
3	STEM STELR Program		Mendorong Guru dan Pelajar untuk melakukan inovasi dalam menciptakan energi baru terbarukan dan berwawasan lingkungan	Guru/Pendidik dan Pelajar	SMP Kota Bontang	Kolaborasi ORICA Global, PT KNI dan Institusi Pendidikan	Rp 138.585.000
4	Let's Count Smith Family Program		Pengembangan Keterampilan Matematika untuk Anak	Guru/Pendidik dan Anak	PT KNI dan Sekolah	Kolaborasi PT KNI dan IGTK Kota Bontang	Rp 49.600.000
5	Program Perahu Kertas (Perlindungan, Pemenuhan dan Kreatifitas Anak Penyandang Disabilitas)		Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	Kelurahan Loktuan	Kolaborasi PT KNI dan Dinas PPKB Kota Bontang, Masyarakat dan Instansi terkait	Rp 50.000.000
6	Laskar Taman Nasional Kutai		a) Pemberdayaan Kader Konservasi b) Pengembangan Tanaman Nursery c) Inkind Mitra Taman Nasional Kutai d) Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)	Masyarakat (Generasi Muda)	Bontang Mangrove Park dan sekitarnya	Kolaborasi PT KNI dan Balai Taman Nasional Kutai	Rp 90.200.000
7	Program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) a. Stop BABS b. Asa Selambai (PMT)		Mendorong terciptanya Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan Berkelanjutan	Masyarakat Bontang	Kota Bontang	Kolaborasi PT KNI, Pemerintah Kota (Dinkes), Kader Kesehatan dan	Rp 131.760.800



c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat					Masyarakat	
8	Program Daur Ulang Limbah - KSM Anggrek	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Bontang	Kelurahan Guntung	Kolaborasi PT KNI dan Masyarakat di wilayah Bufferzone	Rp 91.460.000
9	Program ORIKKA (Organisasi Istri Karyawan PT Kaltim Nitrate Indonesia)	Memberdayakan Masyarakat melalui kegiatan positif yang berkelanjutan serta melaksanakan kegiatan sosial masyarakat	Masyarakat Bontang	Kota Bontang	Kolaborasi Masyarakat dan Organisasi Istri Karyawan PT KNI	Rp 149.800.500

**Tabel 4.4**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pama Persada

NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
I. EKONOMI PROGRAM								
1	Temu Rutin UKM Kuliner	20	UKM	Jan	Dec	Rp 6.000.000	Sebulan 1x	2 Kali Temu Rutin
2	Kompetisi 5R	20	UKM	Feb	Mar	Rp 2.500.000		Per April 2020 sudah dilakukan pelilaina oleh tim LPB & PAMA
3	Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Sertifikasi Halal	15	UKM	Aug	Sept	Rp 36.000.000		
4	5R	20	UKM	Feb	Feb	Rp 4.400.000		
5	Manajemen Keuangan + (Aplikasi Akuntansi UKM)	20	UKM	Jul	Agus	Rp 3.150.000		Proposal terkirim ke YDBA per tanggal 30 Juli 2020, tinggal menunggu revisi atau koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan
6	5R	3	UKM	Mar	Agust	Rp 3.150.000		Pelaksanaan bulan Agustus 2020
7	Manajemen Keuangan + (Aplikasi Akuntansi UKM)	3	UKM	Ags	Agust	Rp 4.000.000		
8	Temu Rutin UKM Pertanian Padi	1	Paket	Jan	Dec	Rp 6.000.000	Sebulan 1x	2 Kali Temu Rutin
9	Pembuatan media sosial BOSS (Ig, Fb, fanspage)	1	Paket	Feb	Juni	Rp 2.200.000		Sudah Terbuat Medsos Komunitas BOSS (Borneo Organik Sehat Sejahtera) Ig dan Fb
10	Modal Simulasi Bisnis Beras Organik	10	Ton	Feb	Dec	Rp 95.000.000	Beli Gabah & Jual Beras	



LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020

NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
11	ICS (Internal Control System)	20	UKM	Feb	Agust	Rp 23.350.000	Inst. INOFICE	pelatihan dilaksanakan secara on-line via Zoom pada tanggal 4 Agustus 2020
12	Budidaya Padi SRI Organik	20	UKM	Apr	Okt	Rp 8.000.000	Peserta : Santan Ulu/Bontang Lestari/Kandolo	
13	Manajemen PDCA + BMC	20	UKM	Apr	Sept	Rp 6.600.000	Inst. PAMA	
14	Budidaya Padi SRI Organik (Lokal)	20	UKM	Jan	Okt	Rp 12.300.000	4x Visit/bulan, Inst. UKM pilot	
15	ICS (Internal Control System)	15	UKM	Mar	Sept	Rp 15.075.000	2x Visit, Inst. INOFICE	Sudah konfirmasi dengan pihak Inofice yaitu Kang Efan, pendampingan dapat dilakukan secara on-line melalui video virtual secara langsung.
16	Monitoring Pendampingan SRI Padi Organik (Aliksa)	5	UKM	Aug	Sept	Rp 26.925.000	Saat musim tanam ke-2 oleh Aliksa	
17	Kelompok Study Petani/GKM Petani	3	TIM	Jan	Sept	Rp 5.250.000	4x Visit, Inst. PAMA	
18	Manajemen PDCA + BMC	3	UKM	May	Sept	Rp 4.500.000	Inst. PAMA	



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
19	Pembibitan Rumput Laut	8	UKM	Jul	Agust	Rp 6.500.000	Inst. Lokal	- sudah berkoordinasi dengan pendamping (bapak jafar dinas perikanan kota Bontang) jadwal tanggal 30 Agustus 2020
20	Pengadaan Katalog dan Brosur Produk	500	Pax	Mar	Sept	Rp 4.000.000		pendataan UKM yang aktif dalam produksi, sudah di laksanakan pemotretan produk sebagai bahan desain katalog
21	Pengadaan Paper Bag	500	Pax	Mar	Sept	Rp 3.000.000		sudah koordinasi dengan pihak PAMA Site Indo, diarahkan untuk segera membuat desain dan koordinasikan dengan vendor percetakan yang dipilih (Anugerah Terang)
22	Kolaborasi dengan konten creator Bontang / Kutim	5	Video	Apr	Agust	Rp 2.500.000		sudah koordinasi dengan konten kreator (youtube : Ikam Farm) tinggal menentukan jadwal pelaksanaan dan penentuan tema
23	Fasilitas ke Retail Modern	10	UKM	May	Sept	Rp 3.600.000	Alfamidi/Lotte Mart	Per Bulan Juli 2020 UKM yang sudah melakukan pemasaran ke Era Mart sebanyak 43 produk dari 31 UKM, Alfamidi sebanyak 8 produk dari 6 UKM,



LKPJ Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020

NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
24	HKAN 2020 di Bontang Manggrove Park	20	UKM	Oct	Oct	Rp 13.000.000	Kaltim Expo/Bontang Expo	Bulan Agustus
25	Mengundang UKM hadir Kelas Online Pertanian YDBA	20	UKM			Rp -		
26	Mengundang UKM hadir Kelas Online Kuliner YDBA	20	UKM			Rp -		
27	Asesmen kemandirian & rekomendasi calon UKM mandiri	30	UKM			Rp -		Sudah melakukan assesment kemandirian menggunakan Tools PAMA sebanyak 3 UKM, yaitu Zahra Florist, Zalika, dan Bintang
28	Biaya pembelian produk UKM Binaan LPB Pama Bessai Berintai	1	paket			Rp 435.000		Pembelian produk UMKM
29	Biaya pembelian produk UKM Binaan LPB Pama Bessai Berintai	1	paket			Rp 220.000		Pembelian produk UMKM
30	Biaya Pembelian kain Sutra produk Binaan UKM Pama site Indo untuk Customer Head Office	1	paket			Rp 835.000		Pembelian produk UMKM
31	Sharing biaya All Site PAMA dalam rangka Pembangunan Galeri UMKM di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Kalsel untuk pemasaran Produk UKM Binaan PAMA Bontang	1	unit			Rp 12.500.000		Pemasaran produk UMKM Bontang
32	Biaya Fasilitasi Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pelatihan Sistem Jaminan Halal untuk UMKM Binaan LPB PAMA Bessai Berinta	15	UKM			Rp 35.840.000		Sertifikasi halal untuk UMKM Binaan LPB Pama



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
33	Biaya Pengadaan Dus Amplang dan Paket Oleh-oleh Amplang	1	unit			Rp 13.150.000		Upgrade Dus oleh-oleh Kota Bontang
34	Biaya Bantuan Modal Bergilir untuk Pengembangan Ukm dan Persiapan Pembentukan LKM	1	unit			Rp 70.000.000		Pengembangan UKM dan pembentukan LKM dibawah LPB Pama
II. KESEHATAN								
1	Fun Walk anD Fun Bike bersama CSR Forum Kontraktor dan masyarakat	1000	Peserta	Januari	Januari	Rp 34.705.000	Dihadiri Kontraktor PT Indominco, PT Pama dan PT Trust beserta segenap masyarakat	Kegiatan Senam sehat, Sepeda santai, Jalan sehat, pembagian doorprise dan hiburan
2	Donor darah Fun Walk dan Fun bike	70	Peserta	Januari	Januari	Rp 1.200.000		Kegiatan Donor darah
3	Donor darah Kodim 0908 Bontang	100	Peserta	September	September	Rp 1.200.000		Kegiatan Donor darah peserta Kodim Bontang dan segenap lapisan masyarakat
4	Support Donor darah markas PMI Bontang	206	Masker	November	November	Rp 3.000.000		Bantuan masker untuk PMI Kota Bontang
5	Donor darah kerjasama STITEK Bontang	38	Peserta	Februari	Februari	Rp 1.101.000		Kegiatan Donor darah
6	Support PMI souvenir	50	Pcs	Juli	Juli	Rp 4.257.000		Mug untuk souvenir donor darah
7	Bantuan Paket Sembako sebanyak 35 Paket dan Masker Medis untuk Masyarakat tidak mampu di sekitar terminal Bontang sharing dengan IMM	35	Paket			Rp 7.789.500		Masker medis dan paket sembako



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
8	Bantuan konsumsi dalam rangka pengkajian Launching BABS Bontang Lestari	100	Peserta			Rp 3.500.000		konsumsi
9	Bantuan konsumsi dalam rangka kegiatan Launching IVA Tes, Pemeriksaan Terpadu & Penyakit Tidak Menular (PTM) Kelurahan Belimbing	100	Peserta			Rp 1.750.000		konsumsi
10	Bantuan konsumsi pelatihan kepada pengemudi angkutan umum dikota Bontang dengan antisipasi penyebaran Covid (Covid-19) di Aula Polres Bontang	60	Peserta			Rp 1.237.500		konsumsi
11	Bantuan pengadaan Sticker One Way Kampanye / Sosilasi Covid – 19 untuk dipasang di kaca mobil belakang Mobil Dinas Sat Lantas Polres Bontang dan angkutan Umum Bontang sebanyak 17 pcs kerjasama degan Polres Bontang	17	Pcs			Rp 1.878.000		sticker
12	Biaya konsumsi dalam rangka kegiatan Sosialisasi PHBS oleh Dinkes Bontang di Bontang Lestari	60	Peserta			Rp 600.000		konsumsi
13	Bantuan Jamban sehat untuk warga kurang mampu kerjasama dengan Kodim 0908 Bontangdalam rangka HUT ke 62 Kodam Mulawarman	150	penerima			Rp 4.990.000		Jamban sehat



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
14	Bantuan pembelian Masker untuk Lantas & Intelkam Polres Bontang dalam rangka kegiatan program pembagian masker gratis untuk masyarakat	200	penerima			Rp 2.350.000		masker gratis
III. LINGKUNGAN								
1	Biaya konsumsi dalam rangka kegiatan pelatihan budidaya Hortikultura Sistem Organik Kelompok Penggiat Lingkungan Proklam Bontang Lestari	50	Peserta			Rp 375.000	Mendapatkan penghargaan PROKLIM dari Kementrian LH Tahun 2020	Kegiatan Proklam Bontang Lestari
2	Biaya penghijauan dan penanaman mangrove sebanyak 1035 batang pohon mangrove, Paket Souvenir dan Stand Bazar UKIM dalam rangka kegiatan HKAN tahun 2020 di Bontang Mangrove Park TNK	1035	Pohon			Rp 13.339.700		Pohon mangrove 1.035 pohon, paket souvenir dan stand bazar UMKM
3	Biaya pembelian spraye, Pupuk kompos & Kandang untuk kelompok penggiat lingkungan Proklam Bontang Lestari di RT. 18 dan RT. 19	1	paket			Rp 505.000		Kegiatan Proklam Bontang Lestari
4	Bantuan perlengkapan Kelompok Penggiat Lingkungan Proklam Kelurahan Bontang Lestari	1	paket			Rp 729.000		Kegiatan Proklam Bontang Lestari
5	Biaya penanaman Mangrove sebanyak 1.400 pohon @ Rp. 5.000,-	1400	pohon			Rp 7.000.000		penanaman Mangrove 1.400 pohon



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
	di Bontang Mangrove Park Salebba Taman Nasional Kutai							
6	Penanaman pohon di SMPN 06 Bontang Lestari	23	pohon			Rp 1.040.000		Penanaman pohon program Proklamasi Bontang Lestari
7	Bantuan biaya pembuatan tempat sampah dari Bahan bambu Karang Taruna unit 1 RT. 08 Kelurahan Gunung Elai	1	paket			Rp 1.000.000		
IV. PENDIDIKAN								
1	Bantuan turnamen YPK Cup Tahun 2020	1	Sekolah			Rp 1.500.000		
2	Bantuan SMP Negeri 6 Bontang mengikuti OPSI Kemdikbud Dirjen Pendidikan dasar dan menengah	1	Sekolah			Rp 3.000.000		OPSI di Kemdikbud Jakarta
3	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan kejuaraan Bola Voli Liga Pelajar SLTA se Kota Bontang oleh PBVSI Kota Bontang	1	Sekolah			Rp 2.500.000		
4	Bantuan kegiatan PERSAGA DHBS Bontang	1	Sekolah			Rp 2.000.000		
5	Bantuan biaya kegiatan penghijauan MAPALA STITEK Bontang	1	Sekolah			Rp 500.000		
6	kegiatan PAMA Indo Cup V Tahun 2020	1000	peserta			Rp 95.403.552	Diikuti 1 Kota dan 2 Kabupaten	Turnamen Badminton Pama Cup ke-V tahun 2020 Se Kota Bontang, Kukar dan Kutim



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
7	Biaya dalam rangka kegiatan Sosialisasi K3, HIV/AIDS, Narkoba dan Basic Fire Bulan K3 bersama IMM	4	Sekolah			Rp 261.000		
8	Bantuan kejuaraan Bola Voli Liga Pelajar SLTA se Kota Bontang oleh PBVSI Kota Bontang	500	peserta			Rp 2.500.000		
9	Bantuan kegiatan turnamen Futsal "Bahrul Ulum Cup III"	500	peserta			Rp 1.000.000		
10	Bantuan biaya dalam rangka PESTI (Persatuan Soft Tennis Indonesia) Kota Bontang mengikuti Turnamen Internasional di Thailand	500	peserta			Rp 1.000.000		
11	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Bhayangkara Bontang Adventure Trail	500	peserta			Rp 4.000.000		
12	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Bhayangkara Bontang Adventure Trail	200	peserta			Rp 5.000.000		
13	Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Program Beasiswa D3 POLMAN Astra dan biaya lain – lain untuk Sdra. Rafiq Hidayat Periode 2020 / 2021	1	Orang			Rp 45.000.000		Beasiswa Polman Astra
14	Bantuan biaya untuk Karang Taruna Upangga Kelurahan Bontang Lestari	100	peserta			Rp 2.000.000		
15	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Seminar Nasional oleh Universitas Trunajaya Bontang	500	peserta			Rp 750.000		



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
16	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Seminar Nasional oleh Universitas Trunajaya Bontang	100	peserta			Rp 750.000		
17	Biaya pelatihan safety riding dan pembekalan pelopor keselamatan berlalu lintas serta pembuatan SIM A untuk 25 Pemuda angkatan kerja di Desa Ring 1	25	peserta			Rp 12.500.000		
18	Bantuan alat praktikum SMK 3 Bontang	2	paket			Rp 169.000.000		Senilai Rp 169.000.000,-
19	Bantuan Alat praktikum SMK Nusantara Mandiri	1	paket			Rp 130.000.000		Senilai Rp 130.000.000,-
20	Bantuan Alat Praktikum SMK All Truck	2	paket			Rp 80.000.000		Senilai Rp 80.000.000,-
21	Bantuan Alat Praktikum SMK Rigomasi	2	paket			Rp 150.000.000		Senilai Rp 150.000.000,-
V. SOSIAL & BUDAYA								
1	Bantuan dana kegiatan Idul adha 1441 H oleh Yayasan Da'wah center ulul Azmi Kota Bontang	200	peserta			Rp 1.500.000		
2	Bantuan Pembangunan Mushollah di Lingkungan Markas Subdenpom VI/1-2 Bontang	1	unit			Rp 5.000.000		
3	Bantuan kegiatan HUT RI ke 75 untuk : 1. Ponpes Arrahman Segendis Kelurahan Bontang Lestari Bantuan kegiatan HUT RI ke 75 untuk : 1. Ponpes Arrahman Segendis Kelurahan Bontang Lestari	200	peserta			Rp 2.000.000		



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
4	Bantuan sembako untuk Polres Bontang dalam rangka kegiatan pembagian sembako untuk Masyarakat Terdampak di Kota Bontang	100	paket			Rp 5.034.000		Sembako untuk masyarakat terdampak Kota Bontang
5	Bantuan kebakaran rumah di Kampung Terapung, Bontang Kuala, Kota Bontang kerjasama dengan YIMP dan Forum CSR Subcont Pama	5	Rumah			Rp 13.000.000		Bantuan Dana untuk 5 rumah warga yang terbakar habis di Bontang Kuala
6	Bantuan Pengadaan Alat Musik Gereja HKBP Bontang	1	unit			Rp 1.500.000		
7	Bantuan sembako untuk rumah tangga miskin di Kel. Bontang Lestari	100	paket			Rp 10.000.000		Bantuan 100 paket warga miskin program Safari Ramadhan
8	Bantuan Material batu sebanyak 6 ret @ Rp. 700.000,- untuk pengerasan jalan akses masuk pertanian dan masyarakat sekitar Kelompok Tani Karya Maju Sejahtera Nyerakat kiri kelurahan Bontang Lestari	6	Rit			Rp 4.200.000		Material batu pengerasan jalan
9	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Haul Akbar, Santunan, Pemberian Sembako yang diterima oleh Kepatihan Adat Besar Kutai Kota Bontang	500	peserta			Rp 3.500.000		
10	Bantuan biaya dalam rangka HUT Ke 22 Paguyuban Warga Kediri Bontang	100	peserta			Rp 1.500.000		



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
11	Bantuan Sembako Untuk Warga tidak Mampu di Kelurahan Bontang Lestari	100	paket			Rp 15.000.000		Bantuan 100 paket sembako warga terdampak Covid -19
12	Biaya pembelian hewan Qurban Kambing 20 Ekor @ Rp. 2.750.000,- untuk Desa Binaan dan Stakeholder Terkait	20	ekor			Rp 55.000.000		Qurban kambing untuk berbagai lapisan masyarakat
13	Bantuan biaya dalam rangka kegiatan Sosial Kodim 0908 Bontang untuk Menyambut HUT ke 62 Kodam Mulawarman	200	peserta			Rp 5.000.000		
14	Bantuan konsumsi dalam rangka kegiatan Pengajian dan Khotaman Al-Qur'an Masjid al-Ikhlas Segendis	100	peserta	peserta		Rp 1.750.000		
15	Bantuan Konsumsi Pengajian Rutin di Masjid Al Ikhlas Segendis Bontang Lestari	100	peserta			Rp 1.125.000		
16	Bantuan Konsumsi Pengajian Rutin di Masjid Al Ikhlas Segendis Bontang Lestari	100	peserta			Rp 1.750.000		
17	Bantuan Konsumsi snack dalam rangka kegiatan Program Peduli Keselamatan Tahun 2020 Sat Lantas Polres Bontang	50	peserta			Rp 1.125.000		
18	Bantuan konsumsi dalam rangka kegiatan Pengajian rutin bulanan Masjid al-Ikhlas Segendis	100	peserta			Rp 1.750.000		



NO	Nama Program	Target (Jumlah)	Target (Satuan)	Start Date	End Date	Cost	Keterangan	Result
19	Bantuan konsumsi dalam rangka kegiatan Pengajian rutin bulanan Masjid al-Ikhlas Segendis	100	peserta			Rp 600.000		
20	Bantuan konsumsi pengajian Rutin di Masjid Al Ikhlas Segendis Bontang Lestari	100	peserta			Rp 1.750.000		
	TOTAL					Rp 1.364.275.252		Total program CSR yang dilaksanakan di Kota Bontang

**Tabel 4.5**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Budidaya Tanaman Obat Keluarga (BUDIMAN OKE) Kelompok Ma'rifah Herbal	1. Kelompok mampu melaksanakan kegiatan budidaya TOGA 2. Memproduksi produk turunan: minyak herbal, produk kecantikan dan minuman TOGA siap konsumsi 3. Menyediakan jasa edukasi TOGA, katering serta spa dan terapi	Warga RT 11 Kelurahan Loktuan	RT 11, Kelurahan Loktuan	Rencana Kerja Tahunan	Rp 446.000.000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Selambai melalui Produksi Pupuk Kitosan Kelompok Cangkang Salona	Kelompok mampu melaksanakan proses produksi Pupuk Kitosan dari limbah cangkang kepiting	Keluarga Nelayan	Selambai, Kelurahan Loktuan	Rencana Kerja Tahunan	Rp 378.000.000
3	Program Inkubator Bisnis Permata Bunda	1. Meningkatkan <i>capacity building</i> ABK 2. Memberi peluang pekerjaan dan kesempatan berwirausaha pada ABK 3. Meningkatkan jumlah lini usaha 4. Perluasan pemasaran melalui Inbis Store dan Inbis Go	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	RT 22, Kelurahan Api- api	Rencana Kerja Tahunan	Rp 1.584.200.000



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Kampung Aren Berdaya Ramah Disabilitas	1. Meningkatkan inklusifitas warga masyarakat dengan ABK 2. Perbaiki kondisi lingkungan RT 22 lewat kegiatan rumah bibit	Warga Kampung Aren	RT 22, Kelurahan Api- api	Rencana Kerja Tahunan	Rp 981.500.000
5	Program Pemberdayaan Pemuda Loktuan melalui Ternak Integrasi Kelompok IPLB	1. Meningkatkan <i>capacity building</i> bagi pemuda marginal Kelurahan Loktuan 2. Memberikan peluang usaha yang sesuai dengan peluang pasar di Kota Bontang	Kelompok Pemuda IPLB	Kelurahan Loktuan	Rencana Kerja Tahunan	Rp 305.500.000
6	Program Better Living in Malahing	1. Meningkatkan kualitas hidup dasar masyarakat (sanitasi, kebutuhan listrik, air, pendidikan dan peluang usaha) 2. Meningkatkan perekonomian warga melalui pembentukan kelompok usaha yang relevan dengan potensi 3. Pelestarian budaya Suku Mamuju 4. Inisiasi paket ekowisata yang ramah lingkungan	Warga Malahing	RT 30, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Rencana Kerja Tahunan	Rp 1.335.580.000



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Program Guntung Eco Sport Culture Tourism	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga warisan budaya suku Kutai lewat usaha Culture Tourism2. Memanfaatkan peluang kondisi geografis untuk kegiatan Sport tourism3. Menjaga kelestarian alam lewat kegiatan Eco Tourism4. Menciptakan kegiatan Eco Sport Culture Tourism untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Guntung	Warga Kelurahan Guntung	Kelurahan Guntung	Rencana Kerja Tahunan	Rp 542.785.000
8	Program Pengembangan Suvi Training Berbasis Berbasis Masyarakat untuk Penyiapan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan <i>capacity building</i> masyarakat Bontang2. Meningkatkan peluang kerja masyarakat Bontang3. Menjadi lembaga pelatihan dengan sertifikasi keterampilan yang berkredibilitas	Masyarakat Kota Bontang	RT 19, Kelurahan Bontang Utara	Rencana Kerja Tahunan	Rp 600.000.000
9	Program pemberdayaan Masyarakat Pembuatan Media Tembu Karang Buatan, Kelompok Kimasea	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kegiatan pelestarian laut melalui penanaman terumbu karang2. Menciptakan inovasi media terumbu karang yang sesuai	Nelayan Kota Bontang	Selambai, Kelurahan Loktuan	Rencana Kerja Tahunan	Rp 787.685.768



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		dengan kondisi perairan Kota Bontang				
10	Program Konservasi dan Diversifikasi Mangrove Serta Budidaya Kepiting (Server Mang Budi) Kelompok Telok Bangko	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan melalui kegiatan budidaya mangrove 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiasi ekowisata mangrove	Masyarakat Kota Bontang	RT 18, Kelurahan Loktuan	Rencana Kerja Tahunan	Rp 912.500.000
11	Program Bank Sampah TPST Bessai Berinta	1. Membentuk sistem pengolahan sampah terpadu 2. Menjadi spot edukasi pengolahan sampah di Kota Bontang 3. Meningkatkan kesejahteraan kelompok pemilah sampah 4. Menciptakan inovasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan memunculkan nilai ekonomi	Masyarakat Kota Bontang	6 Kelurahan Bontang: Kelurahan Gunung Elai, Api-api, Bontang Kuala, Bontang Utara, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah	Rencana Kerja Tahunan	Rp 221.332.092
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Keramba Jaring Apung	Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui usaha Keramba Jaring Apung	Nelayan Kota Bontang	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Rencana Kerja Tahunan	Rp 1.725.700.000



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
13	Program Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan (PKTPP)	1. Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bontang 2. Meningkatkan kesempatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat Bontang	Warga Kota Bontang	Kota Bontang	Alokasi Tahunan	Rp 2.066.295.750
14	Program PKT Peduli Kesehatan	1. Peningkatan kualitas kesehatan pendidikan di Kota Bontang 2. Meningkatkan kesempatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi masyarakat Bontang	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang	Rencana Kerja Tahunan	Rp 773.130.000
15	Program Kemitraan	Bantuan Pinjaman Modal kerja untuk menciptakan UMK yang tangguh dan mandiri	Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Kota Bontang	Pengajuan Pinjaman dari UMK	Rp9,172,730,250
16	Bina Lingkungan - Bencana Alam	Bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam maupun non alam, seperti : bantuan dana santunan korban kebakaran, pemberian masker untuk masyarakat, bantuan konsumsi untuk korban bencana.	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang	Pengajuan dari masyarakat, pemerintah, pihak ke-3 maupun inisiatif dari perusahaan	Rp148,184,700



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
17	Bina Lingkungan - Pendidikan Masyarakat	Bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan, keahlian dan kemampuan SDM seperti : bantuan pelatihan, bantuan sarana prasarana pendidikan, bantuan dana pendidikan dan sebagainya	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp1,486,918,528
18	Bina Lingkungan - Bantuan Kesehatan Masyarakat	Bantuan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum. Bantuan yang diberikan seperti : Bantuan extrafooding untuk tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan COVID, bantuan biaya berobat, sunatan masal, program bakti sosial operasi bibir sumbing dan lain sebagainya	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp6,516,126,548
19	Bina Lingkungan - Pengembangan Sarpras Umum	Bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan sarana prasarana umum khususnya di Kota Bontang. Bantuan ini direalisasikan dalam bentuk : bantuan perbaikan jalan, bantuan pembangunan toilet umum, bantuan tirai plastik pasar, bantuan CCTV dan lainnya	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp1,217,520,000



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
20	Bina Lingkungan - Sarana Ibadah	Bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan sarana ibadah khususnya di Kota Bontang seperti : pembangunan masjid, bantuan peralatan sarana ibadah, bantuan sapi qurban, bantuan dana pembangunan gereja, bantuan kegiatan keagamaan	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp700,589,000
21	Bina Lingkungan - Pelestarian Alam	Bantuan kepada masyarakat untuk melakukan pelestarian alam. Bantuan seperti penghijauan lingkungan dengan bantuan bibit tanaman dan fasilitas kebersihan	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp90,000,000
22	Bina Lingkungan - Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Kegiatan dalam bentuk : program PKT Berbagi dengan membagikan sembako gratis pada masyarakat dan program lainnya	Masyarakat Kota Bontang	Kota Bontang		Rp4,725,777,974
Jumlah						Rp 12.660.208.610



KDM

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konservasi wilayah mangrove, Budidaya kepiting mangrove di Kawasan Mangrove pulau Gusung, Kelompok nelayan pulau gusung	Peningkatan ekonomi 7 orang anggota nelayan pulau gusung	Kelompok nelayan di pulau gusung	Kawasan mangrove di sekitar pulau gusung	Program 5 tahunan CSR KDM	Rp 69.930.000
2	Konservasi tanaman buah khas Borneo, Praktek pembuatan nutrisi Organic Tanaman (NOT), Kelompok Tani Buah Borneo	Peningkatan ekonomi 10 orang anggota kelompok tani buah Borneo	10 orang anggota kelompok tani buah borneo di Kelurahan Guntung	Kelurahan Guntung	Program 5 tahunan CSR KDM	Rp 27.750.000
3	Konservasi alam, bantuan 300 pohon durian	Penghijauan dan rehabilitasi lahan produktif	Hutan Lindung	Hutan Kota/TNK	Program konservasi lingkungan	Rp 46.500.000
4	Bidang pendidikan, workshop guru-guru PAUD (Inspiratif, Pelatihan pembuatan video ajar dari Rumah Metode KINEMASTER dandan workshop mengajar dengan metode STEAM dan LOOSE part, bekerjasama dengan PAUD terpadu YPK	Peningkatan skill dan kapasitas guru PAUD kawasan Bufferzone Guntung dan Loktuan	20 orang guru dari PAUD Terpadu Nurul Fatah, PAUD terpadu kreatif, PAUD terpadu Madani, KB Kasih Bunda	Sekolah PAUD Terpadu YPK	Program 5 tahunan CSR KDM	Rp 62.561.750
5	Pemberian beasiswa pelajar berprestasi untuk siswa SMP dan SMA, bekerjasama dengan Yayasan Pupuk Kaltim (YPK), Bantuan 4 buah Tab dan pulsa paket data	4 siswa berprestasi	3 siswa tingkat SLTP dan 1 siswa tingkat SLTA	SMP dan SMA YPK	Program 3 tahunan CSR KDM	Rp 64.475.000



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6	PROLANSIA Sehat, pemberian sembako dan makanan bergizi	130 lansia berdaya dan sehat	130 orang lansia di kelurahan Guntung	Kelurahan Guntung	Program 5 tahunan CSR KDM	Rp 55.504.160
7	Program pembinaan wilayah charity program	Mendorong kegiatan kreatif dan produktif masyarakat	Kawasan bufferzone	Kota Bontang	Program kerja tahunan	Rp 400.000.000
8	Program bantuan penanggulangan pandemic covid 19 di Kota Bontang	Menanggulangi penyebaran pandemic covid di Kota Bontang	Rumah sakit PKT, RS Yabis dan public service centre (PSC) Kota Bontan, Kel. Gunung Elai dan Kel. Belimbing	Rumah sakit PKT, RS Yabis dan public service centre (PSC) Kota Bontan, Kel. Gunung Elai dan Kel. Belimbing	Program perusahaan untuk penanggulangan Covid 19	Rp 200.000.000
9	Bantuan pembangunan LAB PCR RS Pupuk Kaltim	Terbangunnya Lab PCR RS PKT	Terakomodasinya kebutuhan pemeriksaan pasien Covid 19	RS PKT	Program perusahaan untuk penanggulangan Covid 19	Rp 125.000.000

**Tabel 4.6**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Program-program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)					2.885.139.129,06
	Saung Pandu (program pertanian terintegrasi)	<ul style="list-style-type: none">- Budidaya ikan lele & patin- Pertanian organik (cabai, terong, tomat, dll)- Akuaponik- Maggot- Mikrohidro- Solar Cell- Pengembangan infrastruktur (pembuatan kolam pembibitan, penataan lahan, pemasangan akuaponik, pembuatan kandang maggot, pemasangan papan informasi, pembuatan gudang)- Pengembangan kapasitas anggota kelompok (Pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan pangan organik)	- Kelompok Saung Pandu	Berbas Tengah	CSR Badak LNG & warga Berbas Tengah	



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Kampung Masdarling (kampung wisata berbasis lingkungan)	<ul style="list-style-type: none">- Kampung Asri (pembibitan sayur, kompos)- Kampung Jajan (kuliner nusantara)- Kampung Oleh-oleh (cemilan)- Kampung Sehat (batu terapi & track sepeda)- Kampung Main (permainan tradisional)- Kampung Narsis (<i>photobooth</i>)- Kampung Kerajinan (kerajinan dari limbah nonB3)- Green House	- Kelompok Masdarling	RT 26 kel. Gunung Telihan	CSR Badak LNG & warga RT 26 Gunung Telihan	
	Selangan City	<ul style="list-style-type: none">- Pojok Wisata & Homestay- Kayak- Keramba Pancing- Kuliner- <i>Snorkeling</i>	- Kelompok Pelangi Pesisir	Kampung Selangan, Bontang Lestari	CSR Badak LNG & warga Selangan	
	Konservasi Mangrove	- Penanaman 3.500 bibit mangrove melibatkan mitra binaan Tani Lestari Indah	Balai Taman Nasional Kutai	Salebba	CSR Badak LNG	



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Magang Laboratorium, Kultur Jaringan, Operator Biodiesel, dan CSR	Program pemagangan di Lab & EC, Nursery, dan Corporate Communication Badak LNG	Siswa/Mahasiswa Bontang	Badak LNG, Bontang	CSR Badak LNG	
	Pengembangan UMKM	- Promosi online produk mitra binaan	Kelompok UMKM Mitra Binaan Badak LNG	Bontang	CSR Badak LNG	
	Promosi UMKM	- Support mitra binaan untuk menjadi narasumber sharing session KBRI Abu Dhabi	WNI di Abu Dhabi	Online via Zoom	CSR Badak LNG	
B	Capacity Building					1.563.213.767,20
	Beasiswa BAFCO (<i>Badak Full Scholarship</i>)	- Beasiswa tingkat SMP - Beasiswa tingkat SMA - Beasiswa tingkat Perguruan Tinggi	Pelajar Bontang	SMP/SMA Vidatra Bontang, Universitas Negeri	CSR Badak LNG	
	COOP (<i>Cooperative Education Program</i>)	Kesempatan belajar bekerja di Badak LNG selama 6 bulan	Mahasiswa Bontang	Badak LNG Bontang	CSR Badak LNG	
	PKL (Praktik Kerja Lapangan)	Kesempatan belajar bekerja di Badak LNG selama 2-3 bulan	Terbuka untuk umum	Badak LNG Bontang	CSR Badak LNG	
	LNG Academy	Program pendidikan setara D3 dengan beasiswa penuh dari Badak LNG	Lulusan SMA IPA se-Indonesia	Badak LNG Bontang	CSR Badak LNG	
	Bantuan kegiatan pendidikan di Bontang	Sponsorship	Sekolah/Perguruan Tinggi di Bontang	Bontang	CSR Badak LNG	



No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan pembuatan sabun & handsanitizer ramah lingkungan	Pelatihan	PKK Berbas Tengah	Bontang	CSR Badak LNG	
C	Charity					1.133.035.431,00
	Mitra Taman Nasional Kutai (TNK)	Dukungan Kegiatan	Balai TNK	Bontang	CSR Badak LNG	
	Dukungan kegiatan bidang keagamaan/sosial/budaya/seni/olahraga/kepemudaan	Dukungan Kegiatan	Masyarakat Bontang	Bontang	CSR Badak LNG	
D	Infrastructure					171.138.500,00
	Motor Roda Tiga	Motor Roda Tiga 4 unit	- Kelurahan Bontang Lestari - Kelurahan Gunung Telihan - Kelurahan Gunung Elai - Kelurahan Kanaan	Bontang	CSR Badak LNG	
	Dukungan pembangunan sarana ibadah dan sarana umum lainnya	Sponsorship	Bontang	Bontang	CSR Badak LNG	



Tabel 4.7
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KPI

No.	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber Usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PEDULI KESEHATAN:					314.232.479
1.1	Intervensi Stunting 1. Up skilling kader posyandu / Refreshment 2. Peran orangtua dalam pola asuh anak yang tepat 3. Launching program 4. Pengadaan sarana prasarana : tempat cuci tangan, Antropometri Kits, faceshield, masker dll 5. Penyuluhan Ketahanan Pangan dan Gizi 6. Pemberian susu formula bagi 12 anak stunting selama 90 hari dan makanan pemulihan bagi 31 anak BB rendah selama 12 hari 7. Assessment dokter spesialis anak dan evaluasi	Stunting adalah "gagal pertumbuhan" akibat kekurangan gizi sejak periode 1000 hari pertama kehidupan, dan KPI berkontribusi dalam penurunan stunting adalah berkontribusi untuk tercapainya Tujuan SDGs, khususnya Tujuan 2.2 (Mengurangi Balita kurang gizi dengan pemberian makanan yang bernutrisi, layanan kesehatan dan perilaku sehat)	membantu menurunkan angka stunting	Posyandu Mekar Sari dan Posyandu Mawar Kelurahan Berbas Pantai		178.517.264
1.2	Bantuan penanganan Covid di Kota Bontang (cairan desinfectan, masker, rubber gloves, hazmat, N95), dari KPI & Giska KPI	Membantu penanganan Pandemi Covid	Tenaga Medis dan Relawan	RSUD, PSC, KELURAHAN		117.115.215
1.3	Pengadaan Bilik Swab Test			Labkesda - PSC Bontang		18.600.000
2	PEDULI PENDIDIKAN					80.840.693
2.1	Kunjungan Industri ke pabrik	Pengenalan dunia industri dalam memotivasi siswa/mahasiswa menambah pengetahuan & wawasan serta mengenal dunia industri	Siswa Sekolah Kejuruan & Mahasiswa	STT Migas		11.010.000
2.2	Beasiswa	Memberi kesempatan siswa mendapat pendidikan berkualitas	Siswa dari keluarga ekonomi lemah	Lhoktuan		20.550.000
2.3	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Pembinaan Ketahanan Remaja sebagai Generasi Muda	Remaja	PIK Remaja Kota Bontang		18.220.000
2.4	Sarana cuci tangan dalam Pandemi Covid 19	Mensosialisasikan selalu Mencuci tangan	Siswa Sekolah	SMP 5 & SMP 9		4.616.000
2.5	Lomba Pend Lingkungan Poster & Video Kreatif serta Webinar Lingkungan	Budaya cinta lingkungan	Meningkatkan wawasan anak didik tentang Lingkungan	SMAN 2		13.850.000
2.6	Webinar Pendidikan Vokasional bagi Tenaga Pendidik/ Guru	Tenaga Pendidik melek tehnologi	Meningkatkan wawasan Tenaga Pendidik dalam era digitalisasi & Revolusi 4.0	475 guru dari berbagai daerah di Indonesia		12.594.693
3	PEDULI LINGKUNGAN					185.289.750
3.1	Pengembangan Hutan sebagai area konservasi (terbuka hijau) dan perlindungan keanekaragaman hayati terpadu yang berkelanjutan	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman sebagai bagian dari keanekaragaman hayati yang perlu dilestarikan	1.Hutan Kota Wana Khatulistiwa 2.Taman Kasih Sayang	1.Hutan Kota Wana Khatulistiwa 2.Taman Kasih Sayang		154.000.000
3.2	Konservasi tanaman aren genjah	Partisipasi dalam meningkatkan perekonomian petani aren, melestarikan tanaman lokal Guntung	Kelompok Tani Aren	Kel. Guntung		
3.3	Kemitraan dengan TNK	Konservasi lingkungan yang ber mitra dengan TNK (Taman Nasional Kutai) antara lain : penanaman mangrove,	Pelestarian TNK	TNK		31.289.750
4	SOSIAL BUDAYA & KEMASYARAKATAN					194.168.000
4.1	Pembinaan UMKM		Amplang Revina, Gula Jahe Aradina	Guntung & Lhoktuan		9.852.000
4.2	Program pengolahan kompos	mengolah limbah ternak dalam ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK	Kel Tani Guntung Mandiri "Kompos Sutara)	Kelurahan Guntung		16.303.000
4.3	Perbaikan sanitasi - jamban biofill di Selambai	Membantu warga yang belum memiliki jamban sehat	RT 01 - Selambai, Lhoktuan	Lhoktuan		13.273.000
4.4	Safari Ramadhan	Berbagi dengan warga dalam Bulan Ramadhan	Panti Jompo, Panti Asuhan	Bontang		47.000.000
4.5	Cash donasi untuk masyarakat	Bantuan tunai bagi masyarakat		Umum		107.740.000
Total Expenditure CSR Tahun 2020						774.530.922

**Tabel 4.8**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri

No.	Nama Kegiatan	Tujuan	Nilai
1	Pembangunan 1 unit Ruang belajar di Ar Rahman Bontang Lestari	Bontang lestari	Rp 90.000.000
2	Bantuan Sembako Covid 100 Paket wilayah Bontang Lestari	Bontang lestari	Rp 74.000.000
3	Donasi Hewan Qurban 2 ekor Sapi	Bontang lestari	Rp 35.000.000
5	Donasi Pembangunan Musholla RT 11 Bontang Lestari	Bontang Lestari	Rp 90.000.000
6	Pengobatan Gratis Bontang lestari	Bontang Lestari	Rp 40.000.000
7	Suport snack PMI 100 box	Bontang	Rp 2.000.000
8	Supor Snack RSUD Nakes	Bontang	Rp 18.000.000
9	Donasi alkes (Masker,Vitamin,Handsanitasi ke RSUD,PSC,Puskesmas bontang Lestari	Bontang	Rp 5.000.000
10	Pelatihan ERT IMM bersama Damkar Bontang (inkind)	Bontang	Rp 16.300.000
11	Perbaikan Gapura & Pembuatan Taman BMP TNK Saleba (inkind)	Bontang	Rp 297.000.000
13	Support kebutuhan Agenda Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2020	Bontang	Rp 5.000.000
14	Support Produk Binaan Untuk Stand Expo Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)	Bontang	Rp 20.000.000
12	Pembagian paket sembako untuk korban kebakaran di Rawa Indah	Bontang	Rp 1.500.000
13	Pembagian paket sembako untuk korban kebakaran di Kel. Bontang Kuala	Bontang	Rp 6.000.000
14	Pembagian Bantuan Covid-19 (Paket Sembako) untuk warga terminal kota Bontang	Bontang	Rp 12.300.000
15	Support nasi kotak dalam rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Bontang	Rp 6.250.000
16	Support nasi kotak untuk Personil Operasi Aman Nusa I di Polres Bontang	Bontang	Rp 1.500.000
Total Anggaran			Rp 719.850.000

**Tabel 4.9**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KIE

No.	Kegiatan	Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Gedung Serba Guna dan Pujasera	Guntung	4,025	80.500.000,00
2	Sekolah Luar Biasa (SLB) Komplek Hotel Equator	Guntung	2,862	57.240.000,00
3	Water Treatment Plan PDAM	Guntung	975	19.500.000,00
4	Penggunaan Budidaya Ikan Tawar	Guntung	800	16.000.000,00
5	Penggunaan Lahan untuk Jalan di Pos 7	Lhoktuan	1,030	20.600.000,00
6	Akses Jalan dari Lhoktuan menuju RT. 51	Lhoktuan	112	2.240.000,00
7	Masjid Green Land Temputu RT. 52	Lhoktuan	3,487	69.740.000,00
8	Pujasera Green Land Temputu RT. 52	Lhoktuan	399	7.980.000,00
9	Penggunaan untuk Gereja	Lhoktuan	13,000	260.000.000,00
10	Masjid di Bukit Sekatup Damai (BSD)	BSD	1,991	39.820.000,00
11	Pengelola Satuan Paud Sejenis Anyelir XII	BSD	134	2.674.600,00
12	Kelompok Hijau Kreatif PKK	BSD	100	2.000.000,00
13	Pengelola Satuan Paud Sejenis Anyelir VII	BSD	170	3.400.000,00
14	Penggunaan untuk SMPN 5	Lhoktuan	185,67	3.713.000,00
15	Kelompok Ternak Bina Tani Belimbing	Lhoktuan	2,272	4.123.000,00
Total Anggaran			31,546,67	589.531.000,00



Tabel 4.10
Rekapitulasi Penerimaan Zakat Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020
Badan, Dinas, Bagian , Instansi, Kantor Dan Badan Swasta Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Bontang

Januari	439.649.254
Pebruari	243.000.188
Maret	657.790.769
April	472.573.854
Mei	526.254.036
Juni	464.491.394
Juli	505.766.092
Agustus	512.676.772
September	464.790.381
Oktober	453.478.601
Nopember	463.091.182
Desember	456.000.918
Jumlah	5.646.313.441



BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan; Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.



Kami memiliki harapan besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Kota Bontang yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

WALIKOTA BONTANG

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

A. URUSAN WAJIB

A.4.1 URUSAN PENDIDIKAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran	100 %	17.423.512.872,00	84,13	15.605.533.047,00	89,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia		3.423.000,00	94,65	3.420.000,00	99,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.093.721.457,00	86,74	948.661.239,00	86,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	38 Unit	21.700.000,00	41,23	8.947.620,00	41,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	19 jenis	153.577.500,00	97,14	149.184.420,00	97,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	288.677.500,00	91,51	264.157.199,00	91,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	18 Jenis	2.717.400.000,00	59,11	1.606.267.113,00	59,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Jenis	16.512.000,00	98,19	16.212.960,00	98,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	16 jenis	46.331.500,00	88,69	39.486.800,00	85,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	18500 kotak	321.564.600,00	78,30	251.797.620,00	78,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	519 kali	561.740.589,00	93,14	523.193.613,00	93,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	193 Orang	12.198.864.726,00	96,68	11.794.204.463,00	96,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	90 %	572.964.228,00	82,08	558.705.800,00	97,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	38 Unit	542.959.500,00	99,32	539.251.300,00	99,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	30.004.728,00	64,84	19.454.500,00	64,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur	100 %	441.900.000,00	0,00	400.545.970,00	90,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang disediakan	100 stel	441.900.000,00	91,00	400.545.970,00	90,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100 %	268.619.582,00	96,19	258.958.327,00	96,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	150 Orang	82.600.000,00	95,64	79.000.000,00	95,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Terlaksananya pelatihan character building	100 Orang	186.019.582,00	96,74	179.958.327,00	96,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Informasi Pembangunan Daerah	90 %	502.978.400,00	99,64	501.166.600,00	99,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	jumlah media publikasi	2 Media	502.978.400,00	99,64	501.166.600,00	99,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya APK PAUD sebesar 95,60%	95.01 %	761.401.400,00	92,44	605.847.909,00	79,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah pagar TK negeri yang terbangun	1 sekolah	517.955.000,00	70,00	362.551.521,00	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD)	Jumlah PAUD yang menerima Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	3 Sekolah	60.000.000,00	99,75	59.849.988,00	99,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD)	Jumlah PAUD yang menerima Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	3 Sekolah	31.350.000,00	100,00	31.350.000,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD Beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD)	Jumlah Ruang Kelas TK Negeri 1 (Pembina) yang Terehabilitasi (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	2 ruang	152.096.400,00	100,00	152.096.400,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Jumlah ketersediaan ruang kelas SD dan SMP sesuai standar SNP	APK SD 109,99% dan APM SD 98,83% %	34.086.229.697,00	90,60	20.808.670.462,00	61,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang terbangun	2 Gedung	300.000,00	0,00	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB Al-Ikhlas	2 Sekolah	5.003.596.162,00	94,18	4.712.346.320,00	94,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	1 sekolah	1.680.000.000,00	94,91	1.594.559.559,00	94,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	650 set	982.300.000,00	86,00	844.318.000,00	85,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	8 Sekolah	1.725.000.000,00	99,07	1.708.892.283,00	99,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Try out, UN/USBN, Bimbel 19-21 dan Prodikau	4 kegiatan	842.500.000,00	50,76	427.616.125,00	50,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	16 kelompok	9.175.000,00	18,81	1.726.000,00	18,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	34 Program	212.506.000,00	0,00	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	4 lomba	114.292.240,00	76,58	87.535.250,00	76,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	10 sekolah	3.290.000.000,00	81,46	2.680.169.029,00	81,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	553 siswa	582.572.788,00	85,20	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah penerima BOS APBN Sekolah Negeri	484 Siswa	454.398.650,00	96,04	73.214.724,00	16,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	619 siswa	568.958.057,00	98,77	307.815.092,00	54,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	534 siswa	564.567.839,00	85,27	78.149.225,00	13,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	583 Siswa	525.518.735,00	99,30	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	359 Siswa	323.122.500,00	99,41	64.007.300,00	19,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	534 siswa	482.190.558,00	100,00	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	554 siswa	525.032.519,00	96,05	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri	418 siswa	393.248.075,00	95,18	32.282.612,00	8,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	417 siswa	476.062.717,00	78,66	172.651.215,00	36,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Penerimaan Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	60 siswa	54.000.000,00	100,00	29.880.850,00	55,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	493 siswa	467.641.023,00	93,90	184.530.523,00	39,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	582 siswa	559.324.416,00	93,05	226.827.022,00	40,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	451 Siswa	406.652.375,00	99,42	194.829.838,00	47,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	376 Siswa	368.342.042,00	92,02	211.568.375,00	57,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	376 siswa	340.521.200,00	99,56	94.950.550,00	27,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri	429 Siswa	396.579.828,00	98,86	239.291.813,00	60,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana Bos APBN Bagi Sekolah Negeri	252 siswa	236.433.050,00	96,27	76.716.825,00	32,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Penerimaan BOSNAS APBN di Sekolah Negeri	523 siswa	485.735.456,00	97,68	221.524.218,00	45,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri	385 Siswa	358.339.668,00	94,76	94.611.975,00	26,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	437 Siswa	385.200.000,00	100,00	115.273.600,00	29,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	394 siswa	459.079.345,00	78,48	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	407 siswa	385.556.085,00	95,01	149.606.445,00	38,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD)	27 Siswa	44.593.594,00	56,31	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	18 siswa	16.840.000,00	99,41	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi sekolah geri	48 Siswa	45.511.550,00	96,70	24.776.900,00	54,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	383 siswa	346.107.084,00	96,00	232.596.135,00	67,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	270 siswa	281.648.500,00	88,00	0	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	381 siswa	346.934.100,00	98,60	58.817.650,00	16,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	669 siswa	626.656.110,00	96,68	219.834.837,00	35,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	640 siswa	787.007.749,00	93,90	167.699.756,00	21,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah penerima dana BOS APBN Sekolah Negeri	781 siswa	1.284.950.342,00	67,44	566.075.578,00	44,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	579 Siswa	712.149.468,00	90,50	614.361.375,00	86,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	522 siswa	658.593.835,00	88,04	570.000.000,00	86,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	601 siswa	713.345.502,00	93,32	229.936.783,00	32,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah Penerima Dana Bos APBN Bagi Sekolah Negeri	246 siswa	289.591.184,00	96,29	118.667.607,00	40,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	392 Siswa	483.089.230,00	90,28	171.572.992,00	35,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	359 siswa	456.873.067,00	87,30	115.459.486,00	25,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	295 siswa	363.409.054,00	90,56	134.855.975,00	37,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	4 Sekolah	1.254.000.000,00	99,22	1.244.251.640,00	99,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang SD dan SMP	Tersedianya Dana Penunjang DAK Fisik Bidang Pendidikan	1 tahun	106.183.000,00	98,86	104.968.980,00	98,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri 004 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah ruang kelas SDN 004 BU yang terehabilitasi (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 ruang	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 003 BU beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Toilet (Jamban) Yang terbangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 ruang	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Sarana Media Pendidikan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah sekolah yang mendapatkan Media Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	10 sekolah	700.000.000,00	99,99	699.900.000,00	99,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 9 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Laboratorium Komputer Yang Terbangun Beserta Perabotnya (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 sekolah	650.000.000,00	100,00	650.000.000,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan Informal	100 %	2.459.082.300,00	94,20	1.964.112.624,00	79,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah peserta Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas	200 orang	393.426.000,00	99,44	391.206.800,00	99,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB	12 bulan	648.277.700,00	84,54	548.036.095,00	84,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB	Jumlah sarana dan prasarana SKB yang terbangun	2 unit	628.000.000,00	59,62	374.388.248,00	59,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Publik) (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Buku Koleksi Perpustakaan (DAK FISIK Bidang Pendidikan)	1 lembaga	50.000.000,00	100,00	49.923.500,00	99,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 lembaga	300.000.000,00	98,45	295.360.540,00	98,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Media pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)	1 Lembaga	50.000.000,00	100,00	49.949.999,00	99,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang PAUD dan Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya Dana Penunjang DAK Bidang pendidikan (Bidang PAUD dan SKB)	1 Tahun	15.932.600,00	100,00	9.280.400,00	58,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan)	Jumlah Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK NON Fisik)	179 siswa	289.600.000,00	100,00	162.171.043,00	56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SKB beserta Sanitasinya (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Toilet (jamban) SKB yang terehabilitasi (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan)	4 ruang	33.846.000,00	100,00	33.846.000,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Peralatan Keterampilan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan)	1 Lembaga	50.000.000,00	99,90	49.949.999,00	99,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	92.16 %	22.487.415.834,00	94,28	19.487.079.741,00	86,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	10 orang	150.602.000,00	0,00	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Peningkatan Mutu Pendidik	250 orang	336.040.000,00	96,57	324.518.612,00	96,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	1900 orang	21.969.288.934,00	87,08	19.131.333.729,00	87,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai	2000 berkas	31.484.900,00	99,18	31.227.400,00	99,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	100 %	3.492.758.250,00	62,24	1.027.287.421,00	29,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	3 kerjasama	112.880.000,00	93,05	105.032.250,00	93,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya System Manajemen yang Terintegrasi Teknologi informasi	3 jenis	2.928.000.000,00	22,91	670.689.996,00	22,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	Jumlah peserta sosialisasi BOS APBN	95 sekolah	245.449.250,00	40,60	99.660.000,00	40,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP-PAUD (Dana APBN)	7693 Siswa	83.980.000,00	97,36	81.759.000,00	97,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN	Terlaksananya sosialisasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar	1 kegiatan	122.449.000,00	57,29	70.146.175,00	57,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	4.383.654.713,00	91,60	3.882.346.880,00	88,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	272 siswa	53.038.750,00	97,41	51.667.615,00	97,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	64 siswa	18.160.900,00	90,45	16.426.227,00	90,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	54 siswa	11.887.500,00	100,00	11.887.500,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	565 siswa	128.510.000,00	95,83	123.152.500,00	95,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	489 siswa	178.866.000,00	99,17	177.387.750,00	99,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	634 Siswa	141.475.903,00	95,49	135.091.458,00	95,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	536 siswa	93.809.500,00	91,80	85.839.700,00	91,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	583 siswa	111.917.000,00	100,00	111.917.000,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	360 Siswa	89.578.500,00	96,14	86.116.960,00	96,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	539 siswa	151.540.000,00	26,83	40.651.500,00	26,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	572 siswa	121.361.250,00	94,65	114.869.050,00	94,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	438 siswa	97.197.363,00	64,79	62.972.363,00	64,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	394 siswa	139.145.000,00	45,21	62.912.500,00	45,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	60 Siswa	55.702.500,00	92,39	51.463.500,00	92,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	493 siswa	74.540.950,00	92,41	68.883.000,00	92,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	582 siswa	96.266.500,00	84,88	81.707.641,00	84,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	453 siswa	84.171.000,00	89,97	75.729.400,00	89,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	383 siswa	79.816.000,00	85,84	68.517.150,00	85,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	376 siswa	153.330.000,00	94,00	144.134.331,00	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	432 siswa	61.710.800,00	99,47	61.386.300,00	99,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	233 Siswa	72.106.500,00	98,54	71.051.150,00	98,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	537 siswa	88.851.500,00	82,78	73.548.600,00	82,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	385 siswa	68.298.650,00	94,00	64.848.050,00	94,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	437 siswa	91.915.000,00	82,01	75.376.400,00	82,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	403 siswa	63.605.000,00	74,29	47.253.800,00	74,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	407 siswa	83.313.475,00	98,01	81.651.800,00	98,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	27 Siswa	27.405.000,00	95,42	26.150.000,00	95,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	18 siswa	25.650.000,00	99,93	25.632.000,00	99,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	51 siswa	31.245.000,00	100,00	31.245.000,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	383 siswa	48.016.750,00	99,93	47.982.790,00	99,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	266 siswa	71.140.000,00	60,35	42.931.000,00	60,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	387 siswa	65.732.465,00	60,43	39.720.465,00	60,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	693 Siswa	159.052.500,00	91,91	146.192.683,00	91,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	639 Siswa	164.291.800,00	95,93	157.612.750,00	95,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	781 Siswa	184.402.075,00	93,11	171.703.050,00	93,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	579 siswa	111.736.882,00	97,14	108.541.750,00	97,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	522 siswa	192.742.500,00	96,28	185.579.200,00	96,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	602 siswa	227.150.000,00	91,32	207.426.222,00	91,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	247 Siswa	100.200.000,00	85,64	85.814.625,00	85,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	392 Siswa	122.857.500,00	98,85	121.450.000,00	98,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	359 Siswa	115.740.000,00	98,93	113.878.579,00	98,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	295 Siswa	92.011.700,00	99,91	91.931.321,00	99,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini	272 siswa	163.200.000,00	99,17	161.852.500,00	99,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	64 siswa	38.400.000,00	100,00	38.400.000,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Jumlah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	54 Siswa	32.565.000,00	100,00	31.859.700,00	97,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Persentase sekolah piloting project pendidikan inklusif	79.13 %	938.521.432,00	95,16	908.716.432,00	96,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Autis Center	4 jenis	656.398.307,00	99,31	651.836.476,00	99,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre	Tersedianya biaya operasional Lembaga Autis Center	12 bulan	282.123.125,00	91,00	256.879.956,00	91,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12 Program; 142 Kegiatan				87.819.038.708,00	86,66	66.008.971.213,00	75,16	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.2 URUSAN KESEHATAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100 %	12.206.737.361,00	99,84	11.558.334.986,00	94,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat terkirim	... surat	3.510.000,00	96,92	3.402.000,00	96,92	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	... unit	55.600.000,00	65,50	36.417.090,00	65,5	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	38 Jenis	66.390.600,00	100,00	66.000.600,00	99,41	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan operasional Kantor	10 Jenis	115.150.000,00	100,00	113.610.000,00	98,66	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan peralatan Listrik Kantor	5 Jenis	2.340.000,00	100,00	2.340.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis	665.690.000,00	100,00	602.093.000,00	90,45	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	50 Buku	236.540.000,00	100,00	236.260.000,00	99,88	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan logistik kantor	12 jenis	36.170.000,00	100,00	29.150.000,00	80,59	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	12 Bulan	46.800.000,00	100,00	44.694.000,00	95,5	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	100 ok	330.107.361,00	100,00	311.918.519,00	94,49	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	249 Pegawai	10.648.439.400,00	100,00	10.112.449.777,00	94,97	Dinas Kesehatan Kota Bontang
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.432.320.000,00	87,87	1.204.967.460,00	84,13	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil Operasional DKKB	1 Unit	197.000.000,00	100,00	196.000.000,00	99,49	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Meubelair	Penyediaan Meubelair Kantor	2 jenis	300.910.000,00	70,00	199.947.000,00	66,45	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	257.960.000,00	73,15	188.709.925,00	73,15	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 4)	28 unit	628.950.000,00	100,00	588.351.035,00	93,54	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	70 unit	47.500.000,00	70,00	31.959.500,00	67,28	Dinas Kesehatan Kota Bontang
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur	100 %	49.350.000,00	95,65	46.670.033,00	94,57	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kontribusi diklat bagi tenaga teknis dan non teknis	50 orang	42.200.000,00	100,00	41.870.033,00	99,22	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan insan kesehatan berbudi luhur	2 kegiatan	7.150.000,00	70,00	4.800.000,00	67,13	Dinas Kesehatan Kota Bontang
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100 %	155.700.000,00	100,00	155.688.000,00	99,99	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	2 Dokumen	250.000,00	100,00	250.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	154.250.000,00	100,00	154.238.000,00	99,99	Dinas Kesehatan Kota Bontang
5	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100 %	4.176.889.000,00	98,82	4.048.604.110,00	96,93	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan kesehatan	668 jenis	2.989.700.000,00	100,00	2.956.016.621,00	98,87	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alkes di puskesmas yang dikalibrasi	350 alkes	80.700.000,00	60,00	47.609.000,00	59	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)	tersedianya obat dan BMHP Puskesmas	1 paket	764.597.000,00	100,00	726.286.018,00	94,99	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Obat Gizi Penurunan Stunting (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB)	Penyediaan Obat Gizi Penurunan Stunting (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB)	1 paket	256.892.000,00	100,00	256.871.471,00	99,99	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	jumlah puskesmas yang alat kesehatannya di kalibrasi	6 puskesmas	85.000.000,00	80,00	61.821.000,00	72,73	Dinas Kesehatan Kota Bontang
6	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	'Persentase sarana kesehatan berizin	100 %	21.209.184.949,00	91,96	19.628.336.894,00	92,55	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah pelayanan luar puskesmas	29 Posbindu 5, Pusling 1, Poslansia 4 dan Posyandu Balita 19, Kunjungan rumah, supervisi sarkes	8.300.000,00	100,00	8.300.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Jumlah pelayanan diluar puskesmas	... kelompok	41.000.000,00	100,00	40.999.400,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Pusling	100 orang	15.215.000,00	85,09	12.947.000,00	85,09	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	6 Kelompok sasaran	63.775.000,00	73,70	47.000.000,00	73,7	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	30.675.000,00	84,28	25.852.850,00	84,28	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	471 bh	22.075.000,00	88,90	19.625.000,00	88,9	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	61000 jiwa	16.700.336.949,00	100,00	16.699.781.398,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat perizinan	44 sarana	15.301.000,00	100,00	15.196.500,00	99,32	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan pendukung capaian SPM	100 %	424.101.500,00	53,37	226.324.700,00	53,37	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan lapangan upaya pencapaian SPM	100 %	531.109.000,00	71,32	378.802.320,00	71,32	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	1 tahun	479.231.500,00	60,00	270.294.888,00	56,4	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	1 tahun	566.520.000,00	75,00	411.644.000,00	72,66	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	1 puskesmas	522.425.000,00	75,00	383.748.800,00	73,46	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	1 puskesmas	569.851.000,00	65,00	357.958.490,00	62,82	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan BOK	95 %	43.068.000,00	100,00	41.547.118,00	96,47	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	persalinan pada faskes	100 %	419.472.000,00		234.287.130,00	55,85	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	distribusi obat ke puskesmas	100 %	72.408.000,00	100,00	69.146.900,00	95,5	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Kesehatan Masyarakat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Kesehatan Masyarakat	1 paket	490.387.000,00	50,00	200.175.000,00	40,82	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kota	1 unit	193.934.000,00	100,00	184.705.400,00	95,24	Dinas Kesehatan Kota Bontang
7	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)	100 %	17.990.000,00	100,00	17.934.900,00	99,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Batra tidak menggunakan bahan berbahaya (%)	1 set	17.990.000,00	100,00	17.934.900,00	99,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	80 %	1.319.351.200,00	99,15	1.260.197.376,00	95,52	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah media promkes	50 orang	311.660.000,00	100,00	293.147.942,00	94,06	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Jumlah Kelurahan siaga aktif dan SBH aktif	15 kelurahan	150.550.000,00	100,00	148.557.500,00	98,68	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan	50 kali	58.313.000,00	100,00	55.463.000,00	95,11	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan PHBS	1 tahun	14.553.200,00	100,00	14.552.900,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (MMD, DOKCIL,KTR, PHBS Sekolah,SMD, Pembinaan Kesehatan Reproduksi,)	680 orang	7.875.000,00	100,00	7.548.534,00	95,85	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 tahun	31.170.000,00	100,00	30.970.000,00	99,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	110 orang	13.390.000,00	100,00	12.077.500,00	90,2	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Kebutuhan Bahan Habis Pakai Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Dokcil, Keluarga Sehat, PHBS)	50 50 bh, 462 ktk	15.290.000,00	50,00	6.840.000,00	44,74	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Keluarga Sehat	Jumlah Kelurahan dengan intervensi KS	15 Kelurahan	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan terbatas merokok	500 orang	14.050.000,00	75,00	9.950.000,00	70,82	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan	1 unit	700.000.000,00	100,00	678.590.000,00	96,94	Dinas Kesehatan Kota Bontang
9	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Menurunkan Angka Balita Gizi Kurang	40 balita	132.118.000,00	95,40	124.668.000,00	94,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	38 balita	68.210.000,00	100,00	68.210.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	120 balita	3.730.000,00	100,00	3.730.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan intervensi gizi	15 anak	3.440.000,00	100,00	3.440.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Surveilans pelacakan gizi buruk, balita 2T, gizi buruk	5 anak	13.500.000,00	55,00	6.900.000,00	51,11	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	terlaksananya distribusi & sweeping vitamin A	34 paket	9.488.000,00	100,00	9.488.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping Vit.A	20 Posyandu	3.600.000,00	100,00	3.350.000,00	93,06	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Souvenir Balita Aktif Ke Posyandu	210 210 pkt, 240 ktk	16.200.000,00	100,00	15.600.000,00	96,3	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pendampingan	... orang	13.950.000,00	100,00	13.950.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Kelurahan melaksanakan STBM	60 %	537.441.000,00	89,04	449.310.475,00	83,6	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	15 kelurahan	256.450.000,00	100,00	236.935.000,00	92,39	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengawasan Sarana Air Bersih	Rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat (%)	25 orang	53.426.000,00	60,00	30.812.000,00	57,67	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	80 orang	21.700.000,00	30,00	5.378.000,00	24,78	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pemeriksaan Sampel Limbah Cair Sarana Kesehatan dan Sampe Usap Alat TTU	59 sampel	76.350.000,00	86,21	65.820.000,00	86,21	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	sosialisasi Keamanan Pangan	100 %	13.355.000,00	100,00	12.615.000,00	94,46	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	1 tahun	8.000.000,00	100,00	7.994.800,00	99,94	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	6 sampel	8.260.000,00	40,00	3.098.400,00	37,51	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan TPM yang Buka Malam Hari	1 Tahun	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	100 %	16.700.000,00	100,00	16.606.875,00	99,44	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Uang Saku dan Transport	1 tahun	17.200.000,00	60,00	8.700.000,00	50,58	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	1 tahun	60.500.000,00	100,00	55.850.400,00	92,31	Dinas Kesehatan Kota Bontang
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insidensi Rate DBD	70 70 per 100.000	3.957.571.600,00	96,55	3.783.076.531,00	95,59	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemisitas tinggi	100 %	224.135.000,00	100,00	223.375.500,00	99,66	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita DBD	40 orang	111.425.000,00	70,00	76.214.160,00	68,4	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	26.300.000,00	100,00	22.150.000,00	84,22	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	2 kali	5.030.000,00	100,00	5.028.500,00	99,97	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	30 orang	2.046.600,00	100,00	1.675.000,00	81,84	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	2.640.000,00	100,00	2.640.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	12.360.000,00	100,00	11.454.000,00	92,67	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Uang Saku dan Transport Pelayanan Program Pencegahan Penyakit	44 44 bh, 48 oj, 493 ktk, 317 ok	23.135.000,00	75,00	17.195.000,00	74,32	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Pencegahan Penyakit (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Operasional Kesehatan UKM Sekunder Bidang Pencegahan Penyakit	100 %	243.000.000,00	60,00	132.695.000,00	54,61	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Insentif Tenaga Kesehatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 (DAK Non Fisik BOK Tambahan Bidang Kesehatan)	Jumlah Tenaga Kesehatan yang menerima Insentif dalam Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Taman Husada	88 Tenaga kesehatan	3.307.500.000,00	100,00	3.290.649.371,00	99,49	Dinas Kesehatan Kota Bontang
12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	85 %	23.683.693.233,00	99,62	21.812.870.299,50	92,1	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembangunan Puskesmas	terbangunnya pusban Guntung	2 gedung	118.000.000,00	100,00	117.232.500,00	99,35	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembangunan Posyandu	Pembangunan Posyandu	1 unit	200.000.000,00	100,00	199.959.500,00	99,98	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	219.978.960,00	80,00	157.186.938,00	71,46	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	303.765.750,00	100,00	261.284.787,00	86,02	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	452.269.900,00	100,00	413.194.607,00	91,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, dsb)	1 Tahun	586.015.984,00	100,00	574.955.662,00	98,11	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	232.995.000,00	80,00	183.064.614,00	78,57	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK)	1 Tahun	232.690.000,00	100,00	214.025.149,00	91,98	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Jumlah peserta BPJS kesehatan yang dilayani	8000 peserta	1.595.006.486,00	100,00	1.291.354.749,00	80,96	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi petugas dan tersedianya operasional pelayanan kesehatan dasar	1 kegiatan	3.076.381.084,00	100,00	2.833.314.625,00	92,1	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas	1 thn	2.332.745.768,00	100,00	2.138.467.775,00	91,67	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	1 Kelurahan	826.560.879,00	100,00	713.744.103,00	86,35	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	jasa pelayanan	100 %	3.554.800.637,00	100,00	3.153.113.847,50	88,7	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional dan Jasa Pelayanan	100 %	2.335.932.742,00	100,00	2.126.694.084,00	91,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Oprasional dan Jasa Pelayanan	100 %	2.103.944.848,00	100,00	2.059.096.556,00	97,87	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Dasar)	tersedianya alat kesehatan di puskesmas	3 paket	938.690.000,00	100,00	821.835.055,00	87,55	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penugasan)	tersedianya alat kesehatan pendukung pengendalian penyakit	8 paket	384.015.195,00	100,00	381.679.997,00	99,39	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	Peningkatan Puskesmas 24 jam	3 gedung	400.800.000,00	100,00	398.627.943,00	99,46	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Bontang Barat	1 unit	3.789.100.000,00	100,00	3.774.037.808,00	99,6	Dinas Kesehatan Kota Bontang
13	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Peningkatan pelayanan kesehatan	80 %	14.232.650.000,00	100,00	11.575.162.191,00	81,33	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Rumah Sakit	Terbangunnya RSUD type D	... unit	14.032.650.000,00	100,00	11.375.494.591,00	81,06	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	Jumlah perlengkapan yg disediakan	7 jenis	200.000.000,00	100,00	199.667.600,00	99,83	Dinas Kesehatan Kota Bontang
14	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase capaian indikator Kota Sehat	87 %	65.557.900,00	100,00	53.721.600,00	81,95	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Sosialisasi HIV dan Pelayanan HIV	1 Tahun	15.906.900,00	100,00	12.231.900,00	76,9	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	3 Kali	35.850.000,00	100,00	28.875.500,00	80,55	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	1 kali	13.801.000,00	100,00	12.614.200,00	91,4	Dinas Kesehatan Kota Bontang
15	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Angka kematian ibu	80 %	364.858.000,00	97,76	350.791.900,00	96,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	jumlah balita sehat	20 balita	49.345.000,00	100,00	47.882.800,00	97,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	Jumlah peserta GERMAS ibu Hamil	500 orang	217.070.000,00	100,00	216.820.850,00	99,89	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Tercapainya cakupan K1,K4,Persalinan nakes, Komplikasi maternal & neonatal yang ditangani, kunjungan nifas & neonatal lengkap, Pelayanan SDDITK anak pra sekolah	90 balita	10.548.000,00	100,00	10.398.000,00	98,58	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	18 TK/PAUD	16.200.000,00	100,00	15.525.000,00	95,83	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	50 ibu	19.350.000,00	70,16	13.575.000,00	70,16	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	pelacakan AMP, DDTKA di TK,PAUD & TPA, DDTKA di posyandu, pembinaan guru paud/TK	4 kali	21.245.000,00	100,00	17.960.000,00	84,54	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	100 %	25.500.000,00	100,00	25.430.250,00	99,73	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas dengan Pemantauan Ibu hamil dan Ibu Nifas Oleh Tenaga Kesehatan	1 web remaja	5.600.000,00	57,14	3.200.000,00	57,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
16	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu	100 %	737.057.500,00	86,42	589.961.500,00	80,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan	Tercapainya perencanaan kesehatan	100 %	6.750.000,00	100,00	6.750.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Regulasi Kesehatan (Puskesmas BLUD)	3 dokumen	200.300.000,00	50,04	100.224.000,00	50,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK dan Upgrade SIK	1 Aplikasi	525.132.500,00	100,00	478.112.500,00	91,05	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	1 dokumen	4.875.000,00	100,00	4.875.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi	1 Unit	2.589.839.400,00	93,43	2.339.483.011,00	90,33	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	10 jenis	676.800.000,00	100,00	675.888.650,00	99,87	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	12 bulan	583.039.400,00	100,00	551.160.611,00	94,53	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Penyediaan Alat Kesehatan Labkesda (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Penyediaan Alat Kesehatan Labkesda	1 paket	680.000.000,00	75,00	468.799.650,00	68,94	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pengadaan IPAL Labkesda (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Penyediaan Alat Kesehatan Labkesda	1 paket	650.000.000,00	100,00	643.634.100,00	99,02	Dinas Kesehatan Kota Bontang
18	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi	22 %	201.250.000,00	100,00	181.399.000,00	90,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	1000 orang	201.250.000,00	100,00	181.399.000,00	90,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Persentase FKTP dan FKTL Swasta Terakreditasi	100 %	400.684.000,00	97,67	301.942.375,00	75,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Jumlah kunjungan pelayanan Puskesmas 24 Jam	21 orang	64.200.000,00	100,00	59.800.000,00	93,15	Dinas Kesehatan Kota Bontang

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Pelayanan P3K	1 Tahun	205.650.000,00	100,00	200.302.875,00	97,40	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Kesehatan Khusus	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	6 Puskesmas	113.634.000,00	100,00	34.189.500,00	30,09	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Pendampingan Akreditasi FKTP Pemerintah	2 FKTP	15.625.000,00	40,00	6.075.000,00	38,88	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah keluarga kelompok rawan yang dilakukan intervensi	100 Sasaran	1.575.000,00	100,00	1.575.000,00	100,00	Dinas Kesehatan Kota Bontang
20	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100 %	7.765.894.600,00	75,05	5.701.792.571,00	73,42	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penangann dan Penanggulangan Bencana	1 kali	15.825.000,00	100,00	14.925.000,00	94,31	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	30 orang	6.350.000,00	100,00	6.350.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi	40 orang	8.975.000,00	100,00	7.325.000,00	81,62	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Surveilans DBD (Pengendalian Vektor)	10 jenis	15.525.000,00	50,00	6.300.000,00	40,58	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pelayanan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	7.719.219.600,00	75,00	5.666.892.571,00	73,41	Dinas Kesehatan Kota Bontang
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	70 %	11.825.000,00	100,00	11.825.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	100 orang	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pemilihan dan pelatihan tenaga kesehatan teladan	9 kategori	7.325.000,00	100,00	7.325.000,00	100	Dinas Kesehatan Kota Bontang
22	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7.056.623.875,00	100,00	6.492.638.444,00	92,01	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 bulan	3.236.400.000,00	100,00	3.030.512.752,00	93,64	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang memiliki surat perizinan 68 Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (52 Unit)) 68 Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (52 Unit))	63 63 Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (45 Unit))	57.800.000,00	100,00	37.388.190,00	64,69	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	2.322.100.000,00	100,00	2.145.620.100,00	92,4	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	5021 kotak	188.673.875,00	100,00	188.672.347,00	100	Rumah Sakit Umum Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	112 kali	294.450.000,00	100,00	290.205.888,00	98,56	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	217 Orang	957.200.000,00	100,00	800.239.167,00	83,6	Rumah Sakit Umum Daerah
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase capaian program peningkatan sarana prasarana RS	100 %	5.880.966.600,00	100,00	5.564.381.101,00	94,62	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang disediakan	3 Unit	1.135.600.000,00	100,00	1.133.100.000,00	99,78	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung yang dipelihara	3 Unit	2.350.000.000,00	100,00	2.307.723.035,00	98,2	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	73 Unit	772.181.600,00	100,00	748.834.900,00	96,98	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	896.310.000,00	100,00	816.612.666,00	91,11	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	7 jenis	726.875.000,00	100,00	558.110.500,00	76,78	Rumah Sakit Umum Daerah
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pendidikan dan pelatihan BTCLS	100 %	1.056.450.000,00	100,00	1.051.533.558,00	99,53	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	52 Orang	538.200.000,00	100,00	535.695.558,00	99,53	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan BTCLS	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan BTCLS	30 Orang	518.250.000,00	100,00	515.838.000,00	99,53	Rumah Sakit Umum Daerah
25	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja RSUD	100 %	1.462.500,00	100,00	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan	20 Buku	975.000,00	100,00	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Akuntabilitas RSUD	10 buku	487.500,00	100,00	0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
26	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase Pencapaian publikasi	100 %	841.000.000,00	100,00	838.146.100,00	99,66	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Dalam Berbagai Media	10 Paket	841.000.000,00	100,00	838.146.100,00	99,66	Rumah Sakit Umum Daerah
27	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	17.787.452.563,00	100,00	17.661.902.642,00	99,29	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pembangunan Rumah Sakit	Penambahan Gedung Klinik Rawat Jalan	3 Lantai	11.548.701.563,00	100,00	11.485.882.851,00	99,46	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	27 Unit	138.600.000,00	100,00	138.600.000,00	100	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Alat Kesehatan rumah Sakit	45 Unit	6.100.151.000,00	100,00	6.037.419.791,00	98,97	Rumah Sakit Umum Daerah
28	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Prosentase pencapaian pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %	1.354.600.000,00	85,00	922.891.516,00	68,13	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah IPAL yang dipelihara	4 jenis	1.354.600.000,00	85,00	922.891.516,00	68,13	Rumah Sakit Umum Daerah
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	... Poin A	68.000.000.000,00	100,00	66.877.180.531,29	98,35	Rumah Sakit Umum Daerah
	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Jumlah Kegiatan RS BLUD	68 Kegiatan	68.000.000.000,00	100,00	66.877.180.531,29	98,35	Rumah Sakit Umum Daerah
30	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Covid-19	100%	1.990.303.900,00	97,19	1.895.956.804,00	95,26	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pelayanan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular di Rumah Sakit (Dana Insentif Daerah Tambahan)	Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Covid-19 di Rumah Sakit	1 Paket	1.990.303.900,00	97,19	1.895.956.804,00	95,26	Rumah Sakit Umum Daerah
30 Program; 161 Kegiatan				199.216.822.181,00	97,62	186.501.368.908,79	93,62	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.177.791.231,00	100,00	2.044.052.191,00	93,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 biaya pengiriman	170 Lbr	1.020.000,00	100,00	1.020.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet	12 Bulan	234.860.946,00	100,00	171.462.394,00	73,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	35 Unit	39.350.000,00	100,00	8.355.960,00	21,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	65 Jenis	95.546.500,00	100,00	94.065.000,00	98,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak, penggandaan, spanduk	16 Jenis	87.415.000,00	100,00	82.408.000,00	94,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan, buku, & peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis	7.368.000,00	100,00	6.920.000,00	93,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan alat kebersihan kantor yang tersedia	16 jenis	10.193.000,00	100,00	10.113.470,00	99,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	12 Bulan	7.200.000,00	100,00	4.200.000,00	58,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	53 kali 25 kali Dinas Dalam Daerah, 28 kali Dinas Luar Daerah	279.141.785,00	100,00	251.363.477,00	90,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	33 orang	1.415.696.000,00	100,00	1.414.143.890,00	99,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1 1 Unit, 12 Paket	883.578.650,00	100,00	853.879.751,00	96,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		301.000.000,00	100,00	286.650.000,00	95,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	30.940.000,00	100,00	23.763.815,00	76,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	5 Jenis	1.520.000,00	100,00	1.520.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Komputer	Laptop dan Desktop yang tersedia	4 Unit	282.295.000,00	100,00	275.650.136,00	97,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2, Roda 4, Truck Tinja ,Alat Berat	34 19 Unit, 13 Unit, dan 2	248.165.650,00	100,00	247.058.300,00	99,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	2 Kegiatan	9.888.000,00	100,00	9.770.000,00	98,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana	3 Jenis	9.770.000,00	100,00	9.467.500,00	96,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	248.870.000,00	100,00	245.964.500,00	98,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pengadaan pakaian beserta perlengkapannya	232 buah	248.870.000,00	100,00	245.964.500,00	98,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	216.865.250,00	100,00	215.871.113,00	99,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	20 SDM	197.090.000,00	100,00	197.090.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	100 peserta	19.775.250,00	100,00	18.781.113,00	94,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		100 %	125.000.000,00	100,00	122.832.500,00	98,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Publikasi Kegiatan Pembangunan		1 Kegiatan	125.000.000,00	100,00	122.832.500,00	98,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	100 %	2.234.018.000,00	100,00	2.149.468.669,00	96,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jalan Satya Lencana	Jalan yang dibangun	600 meter	400.742.000,00	100,00	381.886.796,00	95,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan	jalan yang dibangun	100 meter	450.000.000,00	100,00	440.939.346,00	97,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Asmawarman	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	110.184.000,00	100,00	105.835.000,00	96,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jembatan Jalan Atletik 19 Kelurahan Api-Api	Dokumen Perencanaan Teknis	1 dokumen	110.184.000,00	100,00	107.045.000,00	97,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penggantian Jembatan Jalan Pontianak	Dokumen Pengawasan Teknis	1 Dokumen	62.908.000,00	100,00	55.934.327,00	88,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Gotong Royong Utama	Peningkatan Jalan Gotong Royong Utama	1 paket	1.000.000.000,00	100,00	959.172.200,00	95,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Kelurahan Guntung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Inspeksi Sungai Guntung		100.000.000,00	100,00	98.656.000,00	98,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Panjang Saluran	91,15 %	4.418.461.781,00	100,00	4.355.917.691,00	98,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran Drainase yang Dibangun	400 meter	1.916.454.781,00	100,00	1.906.613.204,00	99,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase yang dibangun	40 meter	190.103.000,00	100,00	188.560.983,00	99,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase Yang dibangun	25 meter	200.000.000,00	100,00	198.104.000,00	99,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Elai	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun	35 meter	1.585.000.000,00	100,00	1.547.354.248,00	97,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Box Culvert Jl. Kemakmuran	Box Culvert yang dibangun	1 Paket	526.904.000,00	100,00	515.285.256,00	97,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
8	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Panjang Sungai	17014 meter	57.595.343.180,00	97,35	53.244.706.360,00	92,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Turap Sheet pile, Jalan Inspeksi, Saluran Drainase	140 meter	655.762.180,00	100,00	653.138.180,00	99,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api	Turap Sungai yang di bangun	350 meter	105.760.000,00	100,00	102.957.500,00	97,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Turap Sungai yang di bangun	430 meter	2.857.518.000,00	100,00	2.769.494.636,00	96,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase yang Ditingkatkan	... meter	1.500.000.000,00	100,00	1.452.949.200,00	96,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Turap Sungai yang di bangun	81 meter	250.000.000,00	100,00	245.657.750,00	98,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta	Panjang turap Jalan yang dibangun	10 meter	1.726.303.000,00	100,00	1.726.303.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai di Kota Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)	Turap Sungai yang terbangun	1076,22 meter	20.000.000.000,00	100,00	19.920.913.968	99,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penurapan Sungai di Kota Bontang (Pengembalian) (Bantuan Keuangan Provinsi)	Turap Sungai yang terbangun		30.500.000.000,00	95,00	26.373.292.126	86,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	91,15 %	23.044.855.679,00	100,00	22.529.088.942,00	97,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Jalan dan jembatan yang dipelihara	1 Dokumen	5.054.473.944,00	100,00	4.999.053.246,00	98,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	500 meter	3.837.941.275,00	100,00	3.787.321.163,00	98,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	50 meter	1.587.518.000,00	100,00	1.549.519.084,00	97,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan	Panjang drainase / trotoar jalan yang dipelihara	100 meter	700.100.000,00	100,00	691.714.690,00	98,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Urip Soemoharjo	Jalan yang dipelihara	600 Meter	215.704.000,00	100,00	207.056.957,00	95,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jl. Letjen Urip Soemoharjo (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	600 Meter	2.149.118.460,00	100,00	2.083.871.162,00	96,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. S. Parman, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Bhayangkara dan Jl. MT. Haryono (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jalan yang dipelihara		9.500.000.000,00	100,00	9.210.552.640,00	96,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
10	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	100 %	345.194.550,00	100,00	332.770.800,00	97,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan	Data sistem informasi manajemen ruas jalan yang diperbaharui	1 Sistem	235.614.400,00	100,00	229.170.800,00	97,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Data Jalan lingkungan	1 Sistem	109.580.150,00	100,00	103.600.000,00	94,54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Luas Wilayah Kebanjiran	34,28 Ha	8.952.360.850,00	100,00	7.974.405.476,00	89,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara	100 meter	1.287.475.750,00	100,00	1.272.806.267,00	98,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara	30 meter	759.699.100,00	100,00	707.156.350,00	93,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Saluran-saluran yang terpelihara	500 meter	1.905.186.000,00	100,00	1.871.553.796,00	98,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Normalisasi Danau Kanaan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Danau yang dinormalisasi		5.000.000.000,00	100,00	4.122.889.063,00	82,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Terbangunnya Gedung/Bangunan Yang Representatif	1 Unit	40.835.755.551,00	99,32	40.280.113.046,00	98,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Terbangunnya Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	1 Unit	8.485.056.348,00	96,74	8.474.347.348,00	99,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Jumlah paket	10 paket	8.467.769.350,00	100,00	8.275.934.080,00	97,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor (Kelurahan, BPBD,SATPOL,BAWASLU,KADIN)	2 Unit	10.001.392.459,00	100,00	9.893.353.618,00	98,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Jumlah gedung yang direhabilitasi ringan/sedang	2 Gedung	13.881.537.394,00	100,00	13.636.478.000,00	98,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Sarana Ibadah yang representatif	100 %	10.300.730.144,00	96,30	9.928.945.659,00	96,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan)	Terbangunnya Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 Unit	1.933.770.000,00	80,30	1.583.398.000,00	81,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ	Sarana Penyelenggaraan MTQ Nasional	1 Unit	8.366.960.144,00	100,00	8.345.547.659,00	99,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
14	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	91,15 %	2.849.004.638,00	100,00	2.680.973.856,00	94,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari	Jalan yang ditingkatkan	1 Dokumen	793.748.200,00	100,00	780.943.257,00	98,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari	Jalan yang ditingkatkan	1100 m	1.202.668.898,00	100,00	1.201.485.835,00	99,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Damai	Jalan yang ditingkatkan	1 Dokumen	110.184.000,00	100,00	106.660.000,00	96,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Otto Inskandarinata	Jalan yang ditingkatkan	100 Meter	430.000.000,00	100,00	418.429.764,00	97,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Peningkatan Jalan Satya Lencana 1 (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan yang ditingkatkan	105 meter	312.403.540,00	100,00	173.455.000,00	55,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah Regulasi/Peraturan Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	2 regulasi	260.950.025,00	100,00	259.965.000,00	99,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036	Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016 - 2036 dan KLHS	1 dokumen	260.950.025,00	100,00	259.965.000,00	99,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
16	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Belanja lingkungan permukiman yang layak	100 %	17.476.572.396,00	100,00	17.042.061.600,00	97,51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	650 meter	1.488.355.800,00	100,00	1.478.816.500,00	99,36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	350 m	325.930.000,00	100,00	320.059.100,00	98,2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750 m	549.129.200,00	100,00	543.928.700,00	99,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	720 m	580.721.750,00	100,00	577.366.000,00	99,42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1770 m	620.055.475,00	100,00	617.518.000,00	99,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	820 m	714.190.000,00	100,00	705.795.000,00	98,82	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	420 m	502.950.000,00	100,00	497.954.500,00	99,01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	530 m	180.260.000,00	100,00	168.527.500,00	93,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970 m	299.500.000,00	100,00	292.460.700,00	97,65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750 m	808.060.000,00	100,00	794.965.300,00	98,38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	850 m	293.747.750,00	100,00	282.542.600,00	96,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970 m	704.240.000,00	100,00	664.695.000,00	94,38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910 m	2.623.700.000,00	100,00	2.555.176.800,00	97,39	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	380 m	251.930.000,00	100,00	246.310.800,00	97,77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1460 m	849.480.000,00	100,00	818.660.900,00	96,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	450 m	472.038.221,00	100,00	467.818.100,00	99,11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	320 m	218.824.000,00	100,00	213.720.600,00	97,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	370 m	443.971.200,00	100,00	437.948.200,00	98,64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	990 m	514.350.000,00	100,00	503.805.000,00	97,95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	980 m	628.774.000,00	100,00	578.617.000,00	92,02	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	840 m	672.694.000,00	100,00	645.143.700,00	95,9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	360 m	47.090.000,00	100,00	37.020.000,00	78,62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	230 m	418.060.000,00	100,00	411.676.100,00	98,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dalam lingkungan	1860 m	661.180.000,00	100,00	658.175.700,00	99,55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	610 m	180.220.000,00	100,00	163.053.500,00	90,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Tanjung Laut	420 m	409.770.000,00	100,00	390.634.400,00	95,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	920 m	39.590.000,00	100,00	31.547.000,00	79,68	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	410 m	486.920.000,00	100,00	479.049.400,00	98,38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910 m	808.772.000,00	100,00	801.599.800,00	99,11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1200 m	456.129.000,00	100,00	449.253.300,00	98,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Turap RT. 21 Jl. Selat Malaka Kelurahan Tanjung Laut	Panjang Turap lingkungan yang dibangun/direhab	35 M	225.940.000,00	100,00	208.222.400,00	92,16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16 Program; 97 Kegiatan				171.965.351.925,00	98,73	164.261.017.154,00	95,52	

A.4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.216.138.213,00	100,00	2.010.888.378,00	90,74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1350 lbr	8.100.000,00	100,00	8.100.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik, internet	1 tahun	24.000.000,00	100,00	18.846.000,00	78,53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	41 unit	39.850.000,00	100,00	17.233.710,00	43,25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 thn	108.879.000,00	100,00	108.855.000,00	99,98	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	1 thn	35.024.500,00	100,00	35.024.246,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	51 unit	406.500.000,00	100,00	232.838.000,00	57,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	18 item	16.138.610,00	100,00	16.112.910,00	99,84	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	4450 kotak	113.992.500,00	100,00	112.402.000,00	98,6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123 kali	459.913.603,00	100,00	458.586.260,00	99,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Perkantoran	23 orang	997.740.000,00	100,00	996.890.252,00	99,91	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	398.629.000,00	100,00	389.522.000,00	97,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas	3 3 unit roda 4	100.000.000,00	100,00	92.800.000,00	92,8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	41 unit	277.604.000,00	100,00	276.202.000,00	99,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 item	21.025.000,00	100,00	20.520.000,00	97,6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %	308.640.000,00	100,00	306.700.000,00	99,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Hari-hari Tertentu	... stell	308.640.000,00	100,00	306.700.000,00	99,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	17.500.000,00	100,00	17.500.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19 kali	17.500.000,00	100,00	17.500.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.500.000,00	83,33	3.750.000,00	83,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	0,00	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Review Renstra SKPD	Dokumen	1 dokumen	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah titik kawasan kumuh	1 titik/lokasi	2.741.857.279,00	100,00	2.555.774.131,00	93,21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Pagar Rusunawa Gantung	100 m	95.540.000,00	100,00	80.664.000,00	84,43	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3 lokasi	2.646.317.279,00	100,00	2.475.110.131,00	93,53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	745 unit	51.880.000,00	100,00	43.822.000,00	84,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	35 rumah	51.880.000,00	100,00	43.822.000,00	84,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Meningkatnya presentase rumah tinggal bersanitasi	100 %	6.673.793.507,00	100,00	6.426.431.554,00	96,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimaisasi Sistem IPAL Bontang Kuala		1 Paket	105.234.141,00	100,00	104.480.776,00	99,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi Sistem IPAL Guntung	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	1 Buah	73.000.000,00	100,00	6.360.000,00	8,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	1 Paket	1.091.021.245,00	100,00	1.055.796.239,00	96,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembuatan Sumur Dalam	Pembuatan sumur dalam di Kota Bontang	2 Dokumen	500.000.000,00	100,00	498.198.772,00	99,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Operasional dan Pemeliharaan Sistem IPAL Domestik Kota Bontang	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah	25 SR	849.480.000,00	100,00	773.823.900,00	91,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)		4 Unit IPAL komunal	2.120.744.000,00	100,00	2.120.744.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)		5 Unit tangki septik komunal	240.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
	Penambahan Jaringan Pipa Air Minum Kota Bontang	Jaringan pipa air minum yang dibangun	4000 meter	1.694.314.121,00	100,00	1.627.027.867,00	96,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
9	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan kumuh (M2)	49,284 m2	229.960.000,00	100,00	227.803.850,00	99,06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Luas penanganan kawasan kumuh	4 Ha	229.960.000,00	100,00	227.803.850,00	99,06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9 Program; 34 Kegiatan				12.642.897.999,00	99,99	11.982.191.913,00	94,77	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan dana SPPD untuk rakor, konsultasi dan orientasi	100 %	3.619.330.465,00	100,00	3.458.572.324,00	95,56	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000	350 Lembar	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, Air, Listrik dan Internet	12 bulan	241.700.000,00	100,00	119.553.690,00	49,46	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perijinan	20 unit	16.010.000,00	100,00	12.668.120,00	79,13	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 jenis	51.609.113,00	100,00	49.398.250,00	95,72	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetak dan Penggandaan	6 jenis	15.600.000,00	100,00	15.444.000,00	99	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Jenis	2.916.650,00	100,00	2.843.500,00	97,49	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Jenis	105.300.000,00	100,00	101.915.000,00	96,79	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor	26 jenis	39.881.000,00	100,00	38.487.570,00	96,51	Satuan Polisi Pamong Praja
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	52 kali	182.077.702,00	100,00	180.646.349,00	99,21	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS dilingkungan Satpol PP	60 orang	2.562.136.000,00	100,00	2.556.565.845,00	99,78	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor	Pembayaran sewa gedung Kantor	1 tahun	400.000.000,00	100,00	378.950.000,00	94,74	Satuan Polisi Pamong Praja
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Memenuhi Sarana dan Prasarana aparatur	1 tahun	947.626.500,00	100,00	867.702.700,00	91,57	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	500.000.000,00	100,00	428.000.000,00	85,6	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang di adakan	5 buah	200.000.000,00	100,00	193.593.400,00	96,8	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	28 unit	230.147.500,00	100,00	229.031.800,00	99,52	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	4 Jenis	17.479.000,00	100,00	17.077.500,00	97,7	Satuan Polisi Pamong Praja
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP	100 stel	180.400.000,00	100,00	169.400.000,00	93,9	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	100 stel	180.400.000,00	100,00	169.400.000,00	93,9	Satuan Polisi Pamong Praja
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15 orang	477.714.000,00	100,00	477.636.500,00	99,98	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 orang	477.714.000,00	100,00	477.636.500,00	99,98	Satuan Polisi Pamong Praja
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah daerah rawan gangguan trantibum	1 tahun	440.590.000,00	91,92	333.884.000,00	75,78	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah kegiatan pengamanan hari-hari penting di kota Bontang	31 Kali	4.025.000,00	100,00	4.025.000,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pelatihan dan Latihan Dasar Satpol PP	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Pelatihan Fisik	100 orang	35.620.000,00	0,00	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengamanan Pemilu	Jumlah personil pengamanan pemilu	1082 orang	400.945.000,00	100,00	329.859.000,00	82,27	Satuan Polisi Pamong Praja
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah daerah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah	100 %	198.000.000,00	100,00	197.109.000,00	99,55	Satuan Polisi Pamong Praja
	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakkan	8 Produk hukum daerah	198.000.000,00	100,00	197.109.000,00	99,55	Satuan Polisi Pamong Praja
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	1.876.242.027,00	100,00	1.781.690.431,00	94,96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	800 lembar	5.100.000,00	100,00	5.100.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,pulsa,air, listrik, tv kabel dan internet	12 bulan	111.482.000,00	100,00	98.138.218,00	88,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan	6 unit	17.390.000,00	100,00	16.067.980,00	92,4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan perlengkapan kebersihan	16 jenis	8.276.000,00	100,00	8.276.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	45 jenis	33.719.000,00	100,00	33.719.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	belanja cetak	6 jens	29.625.000,00	100,00	29.325.000,00	98,99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	6 jenis	8.100.000,00	100,00	8.100.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	handphone	2 unit	218.537.500,00	100,00	185.208.714,00	84,75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	air minum isi ulang	40 kali	38.268.000,00	100,00	37.728.000,00	98,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Kebencanaan	360 kotak	233.968.136,00	100,00	192.510.000,00	82,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	perjalanan dinas dalam daerah	20 kali	166.401.991,00	100,00	165.452.743,00	99,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24 orang	1.005.374.400,00	100,00	1.002.064.776,00	99,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	95 %	579.778.940,00	100,00	546.689.790,00	94,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Meubelair	jumlah rak arsip	3 unit	7.496.940,00	100,00	7.496.940,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor	1 paket	9.900.000,00	100,00	9.900.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	belanja BBM	47 Unit	535.632.000,00	100,00	511.802.850,00	95,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	isi ulang tabung apar	9 unit	26.750.000,00	100,00	17.490.000,00	65,38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	95 %	220.500.000,00	100,00	204.792.000,00	92,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas	42 stel	150.150.000,00	100,00	146.412.000,00	97,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	pakaian batik	42 stel	70.350.000,00	100,00	58.380.000,00	82,99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang	95 %	2.398.313.000,00	100,00	2.177.520.850,00	90,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	200 orang	350.000,00	100,00	350.000,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Baju Kaos	1320 orang	27.912.500,00	100,00	21.507.500,00	77,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	3 Dokumen	213.585.000,00	100,00	212.710.000,00	99,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan SAR	13 Jenis	244.118.500,00	100,00	240.711.000,00	98,6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Belanja BBM	11 unit	337.541.000,00	100,00	215.663.750,00	63,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	pengadaan Mobil	40 buah	1.574.806.000,00	100,00	1.486.578.600,00	94,4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100 %	4.731.346.901,00	100,00	4.621.287.604,00	97,67	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 3000	200 Lembar	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	12 bln	179.820.000,00	100,00	171.041.011,00	95,12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kenadaraan Dinas operasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2 terbayar STNK	30 unit	24.800.000,00	100,00	21.665.680,00	87,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan dan alat kebersihan tersedia	23 Jenis	51.996.671,00	100,00	51.563.200,00	99,17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	82 jenis	51.854.000,00	100,00	51.614.360,00	99,54	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	73.920.000,00	100,00	72.979.100,00	98,73	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Pemeliharaan Instalasi Listrik Gedung Kantor	19 jenis	18.115.350,00	100,00	18.114.750,00	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Papan Tulis dan Papan Informasi	21 Jenis	305.263.000,00	100,00	301.955.000,00	98,92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	2 Jenis	4.111.800,00	100,00	3.996.300,00	97,19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung	10 jenis	113.143.000,00	100,00	113.124.500,00	99,98	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Minuman Tamu dan Kegiatan	1 Jenis	10.750.000,00	100,00	10.736.000,00	99,87	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	47 Kali	246.869.000,00	100,00	241.132.008,00	97,68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	83 orang	3.649.504.080,00	100,00	3.562.165.695,00	97,61	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksanannya Pemeliharaan sarana dan prasarana	100 %	1.545.876.163,00	100,00	1.534.732.672,00	99,28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Sepeda Motor Roda 2	1 unit	27.440.000,00	100,00	26.700.000,00	97,3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara	1 unit	505.657.500,00	100,00	503.214.872,00	99,52	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	38 unit	963.230.063,00	100,00	955.383.800,00	99,19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	5 Jjenis	49.548.600,00	100,00	49.434.000,00	99,77	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	633.040.000,00	100,00	631.914.960,00	99,82	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian harian lapangan (PDL) PNS/Non PNS Pemadam Kebakaran	121 Stel	633.040.000,00	100,00	631.914.960,00	99,82	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pembangunan sektor penggulangan kebakaran	... %	10.000.000,00	100,00	9.900.000,00	99	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	jumlah media publikasi	... media	10.000.000,00	100,00	9.900.000,00	99	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap daerah WMK	100 %	3.025.054.335,00	100,00	2.962.447.027,00	97,93	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan Kasur	4 unit	1.855.405.525,00	100,00	1.843.530.369,00	99,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Latihan Basah/Kering dan Gabungan	5 Jenis	715.754.510,00	100,00	665.611.758,00	92,99	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah Pengadaan Pakaian Petugas Inspeksi	24 gedung	9.022.500,00	100,00	9.022.500,00	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelatihan Pasukan	80 jenis	400.000.000,00	100,00	399.412.200,00	99,85	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Evakuasi dan Penyelamatan	Jumlah Bahan Kimia	20 jenis	44.871.800,00	100,00	44.870.200,00	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelaksanaan Pelayanan administrasi kantor	100 %	1.458.941.716,00	100,00	1.377.567.870,00	94,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000,materai 3000	500 lbr	3.160.860,00	100,00	2.715.000,00	85,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan internet	12 bulan	6.000.000,00	100,00	2.126.500,00	35,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	17 unit	18.242.500,00	100,00	7.853.780,00	43,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	54 jenis	98.953.830,00	100,00	98.953.830,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	117.938.840,00	100,00	114.682.335,00	97,24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	5 unit	120.070.000,00	100,00	116.617.080,00	97,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran yang disediakan	528 eksemplar	3.214.200,00	100,00	1.074.000,00	33,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	18 jenis	18.615.000,00	100,00	18.537.700,00	99,58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makanan dan snack	1970 kotak	117.100.725,00	100,00	111.341.750,00	95,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	157 kali	401.267.500,00	100,00	392.221.947,00	97,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	14 orang	554.378.261,00	100,00	511.443.948,00	92,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan administrasi perkantoran	100 %	336.340.387,00	100,00	329.604.540,00	98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	21.020.000,00	100,00	20.373.400,00	96,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	17 kendaraan	294.645.000,00	100,00	292.248.300,00	99,19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	38 unit	20.675.387,00	100,00	16.982.840,00	82,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	40.219.525,00	100,00	40.219.525,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	37 Pegawai	40.219.525,00	100,00	40.219.525,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		60 %	8.493.750,00	100,00	8.362.150,00	98,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	... Laporan	975.000,00	100,00	975.000,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun	... Laporan	975.000,00	100,00	975.000,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	10 Laporan	5.568.750,00	100,00	5.437.150,00	97,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	... Laporan	975.000,00	100,00	975.000,00	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100 %	24.956.250,00	100,00	23.233.200,00	93,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Jumlah ormas yang dibina	150 ormas	24.956.250,00	100,00	23.233.200,00	93,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		100 %	1.537.939.800,00	100,00	1.487.819.430,00	96,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah kegiatan FKUB yang difasilitasi	3 kegiatan	235.276.250,00	100,00	225.069.800,00	95,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Jumlah monitoring yang dilakukan	12 kali	7.062.500,00	100,00	6.889.500,00	97,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kegiatan FKDM yang difasilitasi	2 kegiatan	373.246.800,00	100,00	363.844.830,00	97,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	14 etnis	507.731.250,00	100,00	493.030.600,00	97,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	3 upacara	30.183.750,00	100,00	22.656.100,00	75,06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini yang difasilitasi	4 rakor	49.875.000,00	100,00	45.552.500,00	91,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta pelatihan bela negara	68 orang	334.564.250,00	100,00	330.776.100,00	98,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)		... %	162.232.625,00	100,00	101.783.700,00	62,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah peserta sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika	200 orang	100.915.750,00	100,00	89.331.200,00	88,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Operasional Badan Narkotika Kota	Jumlah Kegiatan Badan Narkotika Kota yang difasilitasi	1 tahun	61.316.875,00	100,00	12.452.500,00	20,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100 %	1.163.246.377,00	100,00	1.109.558.094,00	91,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah proposal bantuan partai politik yang diverifikasi	16 proposal	17.182.500,00	100,00	10.275.000,00	59,8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Verifikasi Data Orkemas	Jumlah verifikasi data Orkemas	6 kali	5.637.625,00	100,00	5.375.000,00	95,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah kegiatan dukungan pemilukada yang diselenggarakan	20 kegiatan	390.455.752,00	100,00	360.576.786,00	92,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Persiapan Pillkada	1 Kegiatan	268.195.500,00	100,00	260.408.858,00	97,1	Kecamatan Bontang Utara
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Persiapan Pillkada	1 Kegiatan	300.300.000,00	100,00	293.338.000,00	97,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Persiapan Pillkada	1 Kegiatan	181.475.000,00	100,00	179.584.450,00	98,96	Kecamatan Bontang Barat
23 Program; 104 Kegiatan				25.616.182.761,00	99,86	24.453.428.367,00	95,46	

A.4.6 SOSIAL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kinerja Pegawai	100 %	3.228.902.800,00	100,00	3.139.917.357,00	97,24	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia	1525 materai	9.275.000,00	100,00	9.046.820,00	97,54	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	40 12 Unit R4 & 28 Unit R2	21.700.000,00	100,00	11.843.160,00	54,58	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40 jenis	65.913.500,00	100,00	64.030.150,00	97,14	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 jenis	11.860.500,00	100,00	11.860.500,00	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 unit	230.000.000,00	100,00	225.181.881,00	97,91	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan penunjang kantor	6 jenis	22.013.000,00	100,00	21.365.450,00	97,06	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	12 Bulan	84.895.000,00	100,00	81.435.000,00	95,92	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	79 Kali	310.098.000,00	100,00	308.913.546,00	99,62	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	63 Orang	2.473.147.800,00	100,00	2.406.240.850,00	97,29	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	931.446.925,00	100,00	925.856.000,00	99,4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 yang tersedia	2 unit	439.480.000,00	100,00	439.480.000,00	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	3 Jenis	258.570.000,00	100,00	255.472.000,00	98,8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	25 7 Unit Mobil & 18 Unit Motor	221.604.000,00	100,00	219.214.000,00	98,92	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer (PC, Laptop, Printer) dan Alat-alat Studio yang terpelihara3	32 unit	11.792.925,00	100,00	11.690.000,00	99,13	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100 %	433.735.200,00	100,00	424.027.200,00	97,76	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam pegawai DSPM	94 stel	433.735.200,00	100,00	424.027.200,00	97,76	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	23.900.000,00	100,00	23.253.000,00	97,29	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	2 Pegawai	23.900.000,00	100,00	23.253.000,00	97,29	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	175.536.165,00	100,00	175.240.000,00	99,83	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	... media	175.536.165,00	100,00	175.240.000,00	99,83	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	52 %	463.410.600,00	100,00	422.744.577,00	91,22	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani	50 PMKS	49.010.000,00	100,00	43.728.159,00	89,22	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Operasional Rumah Singgah	Penyediaan operasional	35 orang	256.465.600,00	100,00	241.591.418,00	94,2	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %	41.220.000,00	100,00	39.475.500,00	95,77	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %	36.370.000,00	100,00	26.292.500,00	72,29	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rehabilitasi Sosial Anak	Cakupan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	100 %	34.375.000,00	100,00	28.425.000,00	82,69	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100 %	45.970.000,00	100,00	43.232.000,00	94,04	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Optimalnya peran lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	97 %	101.496.500,00	100,00	30.156.000,00	29,71	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	4 4 org (3 TKSK 1 Kordinator TKSK)	20.400.000,00	100,00	20.400.000,00	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna	15 kelompok	70.350.000,00	100,00	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	Jumlah anggota lembaga konsultasi kesejahteraan sosial (LK3)	74 anggota	10.746.500,00	100,00	9.756.000,00	90,78	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	97 %	2.147.462.930,00	100,00	2.145.297.200,00	99,9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang terbina	2568 KPM	23.274.180,00	100,00	23.221.800,00	99,77	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah warga bontang yang menerima santunan kematian	600 Orang	1.980.915.000,00	100,00	1.980.564.400,00	99,98	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Cakupan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan darurat dan pemulihan sosial	100 %	133.923.750,00	100,00	132.211.000,00	98,72	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosial	Dokumen verifikasi, monitoring, dan evaluasi bantuan sosial	24 dokumen	9.350.000,00	100,00	9.300.000,00	99,47	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS	98 %	405.290.000,00	100,00	377.750.800,00	93,21	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KUBE yang dibina	3 KUBE	304.330.000,00	100,00	303.621.800,00	99,77	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang di verifikasi dan validasi	8779 KPM	38.000.000,00	100,00	14.925.000,00	39,28	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima BPNT	5725 KPM	8.840.000,00	100,00	8.665.000,00	98,02	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah veteran/piveri dan pelaksanaan hari pahlawan	10 Veteran/Piveri	54.120.000,00	100,00	50.539.000,00	93,38	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9 Program; 33 Kegiatan				7.911.181.120,00	100,00	7.664.242.134,00	96,88	

A.4.7 TENAGA KERJA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan layanan administrasi kantor	100 %	2.784.671.825,00	100,00	2.689.922.794,00	96,60	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	450 lembar,	2.425.000,00	100,00	2.250.000,00	92,78	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan media televisi	12 bulan	42.400.000,00	100,00	34.584.464,00	81,57	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	9 Unit	11.100.000,00	100,00	4.762.740,00	42,91	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat serta bahan pembersih	1 orang	53.402.600,00	100,00	48.373.005,00	90,58	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	35 item	93.086.900,00	100,00	92.698.100,00	99,58	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 item,	11.896.300,00	100,00	11.297.894,00	94,97	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	9 item	650.598.700,00	100,00	642.277.260,00	98,72	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	11 item	12.793.000,00	100,00	11.791.000,00	92,17	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kegiatan tersedia	1600 kotak	104.092.500,00	100,00	104.055.000,00	99,96	Dinas Ketenagakerjaan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	40 kali	468.548.825,00	100,00	466.447.351,00	99,55	Dinas Ketenagakerjaan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jumlah tenaga non PNS	33 orang	1.334.328.000,00	100,00	1.271.385.980,00	95,28	Dinas Ketenagakerjaan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100 %	1.210.322.000,00	100,00	1.195.813.700,00	98,8	Dinas Ketenagakerjaan
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	226.000.000,00	100,00	225.000.000,00	99,56	Dinas Ketenagakerjaan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	772.335.000,00	100,00	769.941.700,00	99,69	Dinas Ketenagakerjaan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	14 Unit	200.737.000,00	100,00	189.622.000,00	94,46	Dinas Ketenagakerjaan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	12 bulan	11.250.000,00	100,00	11.250.000,00	100	Dinas Ketenagakerjaan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase pemenuhan pakaian aparat	... %	124.955.000,00	100,00	123.368.300,00	98,73	Dinas Ketenagakerjaan
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian yang disediakan		124.955.000,00	100,00	123.368.300,00	98,73	Dinas Ketenagakerjaan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase penyampaian informasi Pembangunan Daerah	100 %	349.539.000,00	100,00	348.644.000,00	99,74	Dinas Ketenagakerjaan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi dan dokumentasi kegiatan	1 kegiatan	349.539.000,00	100,00	348.644.000,00	99,74	Dinas Ketenagakerjaan
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Yang Di Latih	70 %	1.392.611.250,00	100,00	1.359.000.000,00	97,59	Dinas Ketenagakerjaan
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	50 orang	1.392.611.250,00	100,00	1.359.000.000,00	97,59	Dinas Ketenagakerjaan
6	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	22 %	204.625.000,00	100,00	204.625.000,00	100	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Informasi ketenagakerjaan	1 kegiatan	203.125.000,00	100,00	203.125.000,00	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan	Laporan Penempatan Tenaga Kerja	1 laporan	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100	Dinas Ketenagakerjaan
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	75 %	515.076.825,00	100,00	394.156.550,00	76,52	Dinas Ketenagakerjaan
	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang	180.735.000,00	100,00	179.630.000,00	99,39	Dinas Ketenagakerjaan
	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 rekomendasi	210.252.325,00	100,00	117.661.250,00	55,96	Dinas Ketenagakerjaan
	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumlah saran dan pertimbangan pengupahan	2 saran	124.089.500,00	100,00	96.865.300,00	78,06	Dinas Ketenagakerjaan
7 Program; 23 Kegiatan				6.581.800.900,00	100,00	6.315.530.344,00	95,95	

A.4.8 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.524.665.772,00	99,30	2.367.649.838,00	93,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	500 lembar	152.700.000,00	100,00	101.700.000,00	66,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	28 9 unit roda 4, 2 unit roda 6, dan 17 unit roda 2	22.286.000,00	93,72	14.145.180,00	63,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 Jenis	47.498.760,00	100,00	47.178.000,00	99,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 4 ucapan media, 50 lembar map, 10 lembar spanduk, dan 32.500 lembar	54.816.300,00	100,00	54.126.000,00	98,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	508.720.000,00	100,00	506.431.007,00	99,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan perlengkapan kebersihan	22 jenis	18.603.212,00	100,00	18.565.800,00	99,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	1687 762 makan dan 925 snack	54.407.500,00	100,00	53.560.700,00	98,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	63 Kali	457.260.000,00	100,00	455.562.584,00	99,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	22 Orang	1.208.374.000,00	100,00	1.116.380.567,00	92,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	843.686.600,00	100,00	834.099.930,00	98,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	1 paket	280.000.000,00	100,00	273.447.100,00	97,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	... unit	148.000.000,00	100,00	145.389.500,00	98,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	29 15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	395.888.600,00	100,00	395.643.330,00	99,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	17 unit	19.798.000,00	100,00	19.620.000,00	99,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100 %	350.000.000,00	100,00	337.838.300,00	96,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		32 stel	350.000.000,00	100,00	337.838.300,00	96,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	415.967.752,00	100,00	411.467.752,00	98,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	25 orang	415.967.752,00	100,00	411.467.752,00	98,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100 %	2.175.000,00	100,00	2.175.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	5 Dokumen	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	5 Dokumen	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	5 Dokumen	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DPPKB	5 buku	175.000,00	100,00	175.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	5 Dokumen	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100 %	404.720.544,00	100,00	398.665.078,00	98,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta sosialisasi kecamatan dan kelurahan ramah anak	40 orang	217.481.544,00	100,00	212.705.378,00	97,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang pelatihan KHA	1 Paket	187.239.000,00	100,00	185.959.700,00	99,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan angka KDRT dan anak	... %	407.507.100,00	100,00	370.790.431,00	90,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	108 Kasus	396.012.750,00	100,00	359.428.431,00	90,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	11.494.350,00	100,00	11.362.000,00	98,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan	100 %	2.625.000,00	100,00	2.187.500,00	83,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW	65 Organisasi wanita	2.625.000,00	100,00	2.187.500,00	83,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8 Program; 25 Kegiatan				4.951.347.768,00	99,97	4.724.873.829,00	95,43	

A.4.9 URUSAN PANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan pangan	100 %	520.688.025,00	100,00	514.046.341,00	98,72	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya Lomba B2SA dan sosialisasi diversifikasi pangan	1 kelurahan	236.381.000,00	100,00	230.203.000,00	97,39	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	57.088.325,00	100,00	57.080.650,00	99,99	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Data SKPG, Data Survey Panel Harga dan Data Ketersediaan Bahan Pangan Utama	4 dokumen	202.377.700,00	100,00	201.975.731,00	99,8	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah jenis uji sampel pangan segar	2 jenis	24.841.000,00	100,00	24.786.960,00	99,78	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
1 Program; 4 Kegiatan				520.688.025,00	100,00	514.046.341,00	98,72	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.10 URUSAN PERTANAHAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Lahan untuk kepentingan publik	100 %	929.124.224,00	100,00	768.609.612,00	82,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi	10 bidang tanah	427.152.324,00	100,00	267.705.612,00	62,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Inventarisasi Aset Tanah	1 Tahun	430.939.400,00	100,00	430.048.000,00	99,79	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pendampingan Program Verifikasi PTSL	Jumlah tanah bidang yang terdaftar	8000 bidang	71.032.500,00	100,00	70.856.000,00	99,75	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 Program; 3 Kegiatan				929.124.224,00	100,00	768.609.612,00	82,72	

A.4.11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.969.481.453,00	100,00	1.770.034.749,00	89,87	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	665 lembar	3.990.000,00	100,00	3.990.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik	12 bulan	94.100.000,00	100,00	58.731.918,00	62,41	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diurus kelengkapan suratnya	50 unit	49.370.000,00	100,00	12.018.600,00	24,34	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	26 jenis	89.655.000,00	100,00	83.213.700,00	92,82	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penjilidan	1 paket	27.204.100,00	100,00	26.929.800,00	98,99	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	6 jenis	405.243.294,00	100,00	396.272.550,00	97,79	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tanga yang disediakan	5 jenis	14.022.004,00	100,00	9.796.600,00	69,87	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	1 Paket	15.414.000,00	100,00	12.789.625,00	82,97	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah nasi kotak yang disediakan	755 kotak	31.202.500,00	100,00	21.733.600,00	69,65	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88 kali	439.949.951,00	100,00	389.243.246,00	88,47	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS	23 orang	799.330.604,00	100,00	755.315.110,00	94,49	Dinas Lingkungan Hidup
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.944.791.642,00	100,00	2.823.970.082,00	95,9	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	3 jenis	70.967.000,00	100,00	67.991.250,00	95,81	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 tahun	2.727.237.642,00	100,00	2.641.947.472,00	96,87	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	146.587.000,00	100,00	114.031.360,00	77,79	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	118.900.000,00	100,00	114.342.500,00	96,17	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang disediakan	19 setel	118.900.000,00	100,00	114.342.500,00	96,17	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH		75 %	13.136.915.270,00	100,00	12.708.252.080,00	96,74	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dump truck	300 buah	1.366.911.250,00	100,00	1.315.095.205,00	96,21	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah PHL yang tersedia	5 jenis	11.198.842.520,00	100,00	10.861.549.648,00	96,99	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tumbler yang disediakan	1 paket	3.745.000,00	100,00	2.957.500,00	78,97	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sewa dump truck untuk penimbunan di area zone aktif	1560 rate	567.416.500,00	100,00	528.649.727,00	93,17	Dinas Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	34 usaha/kegiatan	781.236.145,00	100,00	704.183.240,00	90,14	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air	73 titik	88.275.000,00	100,00	76.540.500,00	86,71	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Frekuensi pembersihan sungai	10 kali	71.260.000,00	100,00	45.737.500,00	64,18	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Jumlah peringatan lingkungan hidup	4 momen	350.851.895,00	100,00	349.056.940,00	99,49	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	3 buah	270.849.250,00	100,00	232.848.300,00	85,97	Dinas Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah lokasi yang dilakukan audit energi	100 %	327.560.000,00	100,00	304.678.500,00	93,01	Dinas Lingkungan Hidup
	Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur pantau yang dipelihara	1 sumur	126.120.000,00	100,00	125.617.500,00	99,6	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibuat	11 sumur	201.440.000,00	100,00	179.061.000,00	88,89	Dinas Lingkungan Hidup
7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Luas terumbu karang dalam kondisi baik	256,63 Ha	260.971.950,00	100,00	255.797.775,00	98,02	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Jumlah alat yang diadakan	4000 unit	260.971.950,00	100,00	255.797.775,00	98,02	Dinas Lingkungan Hidup
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100 %	93.449.900,00	100,00	61.735.550,00	66,06	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	3 sekolah	47.923.000,00	100,00	47.885.250,00	99,92	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen laporan SLHD	1 dokumen	1.855.000,00	100,00	1.807.300,00	97,43	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Kasus lingkungan yang ditangani	100 %	43.671.900,00	100,00	12.043.000,00	27,58	Dinas Lingkungan Hidup
9	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	21,5 %	18.873.221.754,00	71,57	12.968.731.882,00	68,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota	2 lokasi	4.077.873.720,00	100,00	4.061.454.427,00	99,6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan RTH	Taman Kota yang dirawat	6 lokasi	9.594.961.034,00	98,28	8.907.277.455,00	92,83	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Lahan RTH	Lahan RTH	1 tahun	5.200.387.000,00	0,00	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana PJU	36,47 %	12.912.677.626,00	99,80	12.211.423.275,00	94,57	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	1903 titik lampu PJU	5.726.118.001,00	99,56	5.112.458.975,00	89,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum	1 tahun	7.186.559.625,00	100,00	7.098.964.300,00	98,78	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum	100 %	1.224.045.544,00	98,53	1.158.987.659,00	94,69	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Pagar TPU Bontang Lestari	1 tahun	430.330.000,00	100,00	426.019.948,00	99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9 TPU	793.715.544,00	97,73	732.967.711,00	92,35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11 Program; 36 Kegiatan				52.643.251.284,00	89,73	45.082.137.292,00	85,64	

A.4.12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tesedianya administrasi Perkantoran	100 %	1.542.327.419,00	100,00	1.382.961.576,00	89,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biaya pengiriman surat	1 tahun	48.896.012,00	100,00	12.756.000,00	26,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	257.000.000,00	100,00	164.850.875,00	64,14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	7 7 Mobil dan 12 motor	10.900.000,00	100,00	8.926.480,00	81,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3 Gedung	124.993.000,00	100,00	120.517.631,00	96,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis	28 Jenis	57.502.500,00	100,00	57.502.500,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis	4 jenis	52.804.950,00	100,00	51.715.803,00	97,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	6 jenis	2.825.000,00	100,00	1.602.000,00	56,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	5 jenis	181.939.000,00	100,00	178.640.000,00	98,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak	1 1 media (2112.00 Eks)	4.918.000,00	100,00	4.918.000,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	6.949.500,00	100,00	6.262.000,00	90,11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi	41 Kali	112.884.257,00	100,00	94.638.127,00	83,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kerja non PNS	17 Orang	680.715.200,00	100,00	680.632.160,00	99,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	435.266.000,00	100,00	402.801.720,00	92,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	4 gedung	15.000.000,00	100,00	14.999.270,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	19 7 unit roda 4 dan 12 unit roda 2	246.516.000,00	100,00	244.523.950,00	99,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	18.000.000,00	100,00	11.654.500,00	64,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	110.000.000,00	100,00	87.803.000,00	79,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor	5 Jenis	45.750.000,00	100,00	43.821.000,00	95,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	100 %	35.392.500,00	100,00	35.392.500,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian	110 Stel	35.392.500,00	100,00	35.392.500,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	160.000.000,00	100,00	159.145.000,00	99,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah media	1 media	160.000.000,00	100,00	159.145.000,00	99,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %	769.530.000,00	100,00	701.666.350,00	91,18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	15 lokasi	20.531.250,00	100,00	20.515.250,00	99,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	3 Kecamatan	306.983.555,00	100,00	240.985.455,00	78,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	100 %	412.135.945,00	100,00	412.135.945,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	25 kali	28.679.250,00	100,00	26.829.700,00	93,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 Program; 24 Kegiatan				2.942.515.919,00	100,00	2.681.967.146,00	91,15	

A.4.13 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Keberdayaan MAsyarakat Melalui PKK	100 %	202.020.125,00	100,00	172.677.100,00	85,48	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan	6 kegiatan	202.020.125,00	100,00	172.677.100,00	85,48	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100 %	72.410.000,00	100,00	72.410.000,00	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	499 RT	72.410.000,00	100,00	72.410.000,00	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Tersedianya SDM Pemanfaat TTG	100 %	125.882.572,00	100,00	124.879.987,00	99,2	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat TTG yang Berhasil	3 Kegiatan	125.882.572,00	100,00	124.879.987,00	99,2	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	87 %	3.150.000,00	100,00	3.030.000,00	96,19	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pembinaan dan Pelatihan LPM	Jumlah LPM	19 LPM	3.150.000,00	100,00	3.030.000,00	96,19	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4 Program; 4 Kegiatan				403.462.697,00	100,00	372.997.087,00	92,45	

A.4.14 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KIE	2,41 %	2.087.712.500,00	100,00	1.900.296.651,00	91,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	Jumlah Peserta lomba	50 peserta	60.807.500,00	100,00	59.997.500,00	98,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta	1000 orang	107.625.000,00	100,00	105.939.500,00	98,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan, pertemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS	40 orang	11.910.000,00	100,00	11.875.000,00	99,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)	Terlaksananya kegiatan BOKB	1 Tahun	887.370.000,00	100,00	855.229.480,00	96,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Jumlah sarana dan prasarana program KKBPK	39 Jenis	1.020.000.000,00	100,00	867.255.171,00	85,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100 %	94.892.000,00	100,00	91.460.726,00	96,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Konseling KB	Jumlah Peserta Pelatihan Konseling KB	25 orang	10.739.500,00	100,00	10.365.000,00	96,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jenis alat dan bahan yang disediakan	3 jenis	10.000.000,00	100,00	9.909.900,00	99,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani	10 orang	35.970.000,00	100,00	33.144.826,00	92,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile	90 orang	24.472.500,00	100,00	24.331.000,00	99,42	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	Jumlah faskes dan bidan yang mengikuti lomba	39 faskes	13.710.000,00	100,00	13.710.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1	2,2 anak	766.975.884,00	100,00	723.332.550,00	94,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah peserta sosialisasi	43 orang	114.421.750,00	100,00	111.550.550,00	97,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Jumlah peserta rakerda	75 Orang	249.705.384,00	100,00	221.387.500,00	88,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru dan KB Aktif	12 database	15.112.500,00	100,00	13.150.000,00	87,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyampaian Informasi Program KB & PP	meningkatnya pengetahuan WUS dan PUS tentang program PP dan KB	200 Orang	28.537.500,00	100,00	28.169.500,00	98,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pendataan KB dan fasilitasi Pelaporan Pelayanan KB	100 orang	126.691.250,00	100,00	117.810.000,00	92,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Program SIDUGA	jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB	2000 KK	232.507.500,00	100,00	231.265.000,00	99,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100	24.125.000,00	100,00	24.125.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100 orang	24.125.000,00	100,00	24.125.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR	Meningkatnya Kualitas kelompok PIK Remaja	28 kelompok	105.207.000,00	100,00	99.763.800,00	94,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	Tersebar nya program Generasi Berencana	40 orang	300.000,00	100,00	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	2 kelompok	21.300.000,00	100,00	21.300.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	Terpilih nya Duta GenRe tingkat Kota	6 orang	83.607.000,00	100,00	78.463.800,00	93,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Terlaksananya pembinaan saka kencana	6 6 kelompok dari 34 kelompok	25.750.000,00	100,00	25.750.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Saka Kencana	Pembinaan saka kencana	1 tahun	25.750.000,00	100,00	25.750.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6 Program; 21 Kegiatan				3.104.662.384,00	100,00	2.864.728.727,00	92,27	

A.4.15 URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100 %	4.113.257.039,00	100,00	3.968.114.857,00	96,47	Dinas Perhubungan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	978 100 surat yang terkirim dan 878 lembar materai	4.085.900,00	100,00	2.703.000,00	66,15	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, penerangan, air dan internet	5 jenis	220.900.000,00	100,00	205.737.930,00	93,14	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa KIR	29 unit	29.475.000,00	100,00	28.296.940,00	96,00	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	52 jenis	67.925.520,00	100,00	67.876.050,00	99,93	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	28 jenis	102.432.400,00	100,00	94.837.350,00	92,59	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 jenis	196.240.000,00	100,00	186.566.900,00	95,07	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar dan buku perpustakaan	1848 eks	3.731.000,00	100,00	3.478.200,00	93,22	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat dapur	25 jenis	40.106.100,00	100,00	33.687.450,00	84,00	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	6900 4470 nasi kotak & 2430 snack	142.587.500,00	100,00	98.821.800,00	69,31	Dinas Perhubungan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	59 kali	493.537.619,00	100,00	493.224.062,00	99,94	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jasa administrasi perkantoran	69 50 orang non pns dan 19 jasa harian lepas	2.812.236.000,00	100,00	2.752.885.175,00	97,89	Dinas Perhubungan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	100 %	757.960.600,00	100,00	688.350.660,00	90,82	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	20.150.000,00	100,00	18.671.400,00	92,66	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan bahan bakar minyak kendaraan operasional	27 unit	632.813.000,00	100,00	566.277.060,00	89,49	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 jenis	9.250.000,00	100,00	9.044.200,00	97,78	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	8 jenis	95.747.600,00	100,00	94.358.000,00	98,55	Dinas Perhubungan
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	100 %	848.358.871,00	100,00	845.598.871,00	99,67	Dinas Perhubungan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	41 Org	848.358.871,00	100,00	845.598.871,00	99,67	Dinas Perhubungan
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	4.194.000,00	100,00	4.194.000,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan keuangan	1 Dokumen	796.800,00	100,00	796.800,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan	1 dokumen	796.800,00	100,00	796.800,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	Laporan keuangan	1 dokumen	796.800,00	100,00	796.800,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Renja SKPD	laporan keuangan	2 Document	901.800,00	100,00	901.800,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	laporan keuangan	3 dokumen	901.800,00	100,00	901.800,00	100,00	Dinas Perhubungan
5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	87,5 %	205.868.350,00	100,00	201.256.410,00	97,76	Dinas Perhubungan
	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se Kalimantan Timur	Jumlah peserta Rakornis Perhubungan se-Kaltim	150 peserta	205.868.350,00	100,00	201.256.410,00	97,76	Dinas Perhubungan
6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Berfungsinya APILL dengan baik	100 %	593.560.000,00	100,00	587.934.500,00	99,05	Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor dan alat pendukung	100 %	98.080.000,00	100,00	96.580.000,00	98,47	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Lintas	Jumlah rambu yang dipelihara	83 unit	37.880.000,00	100,00	36.980.000,00	97,62	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	Terpeliharanya Marka Jalan & Zebra Cros untuk masyarakat umum	500 buah	401.080.000,00	100,00	398.867.500,00	99,45	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Jumlah traffic light yang terpelihara	2 unit	56.520.000,00	100,00	55.507.000,00	98,21	Dinas Perhubungan
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		100 %	12.900.000,00	100,00	12.270.000,00	95,12	Dinas Perhubungan
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rapat koordinasi Forum LLAJ	1 kegiatan	12.900.000,00	100,00	12.270.000,00	95,12	Dinas Perhubungan
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		100 %	751.080.000,00	100,00	746.127.252,00	99,34	Dinas Perhubungan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Tersedianya ZoSS (Zona Selamat Sekolah) bagi anak sekolah	1 dokumen	150.000.000,00	100,00	149.276.752,00	99,52	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Rambu RPPJ	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	8 Unit	200.000.000,00	100,00	198.530.000,00	99,27	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Peralatan Penunjang Pengendalian Lalu Lintas	Trafic Portable dan Speed Bumb	1 1 unit dan 200 meter	401.080.000,00	100,00	398.320.500,00	99,31	Dinas Perhubungan
9	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100 %	799.955.000,00	100,00	729.657.593,00	91,21	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Gedung Pengujian	799.955.000,00	100,00	729.657.593,00	91,21	Dinas Perhubungan
9 Program; 31 Kegiatan				8.087.133.860,00	100,00	7.783.504.143,00	96,25	

A.4.16 URUSAN KOMUNIKASI

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan untuk Administrasi Perkantoran	100 %	2.528.968.814,00	100,00	2.519.701.256,00	99,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	700 lembar	4.050.000,00	100,00	4.050.000,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet/Chanel TV untuk kantor	12 bulan	4.000.000,00	100,00	2.560.442,00	64,01	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16 kendaraan	9.150.000,00	100,00	6.724.640,00	73,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	25 jenis	74.912.002,00	100,00	74.902.485,00	99,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	31.735.637,00	100,00	31.708.050,00	99,91	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	6 item	10.299.097,00	100,00	10.296.990,00	99,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	24 item	1.170.526.956,00	100,00	1.167.575.400,00	99,75	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	2 2 Media Lokal dan 1 Media Nasional	3.050.000,00	100,00	3.012.000,00	98,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	6 item	36.915.840,00	100,00	36.880.275,00	99,9	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	1 tahun	14.647.300,00	100,00	14.647.300,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	20 kali	232.373.182,00	100,00	232.373.182,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji	23 orang	937.308.800,00	100,00	934.970.492,00	99,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100 %	714.199.275,00	100,00	713.344.550,00	99,88	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan R2	2 unit	398.280.000,00	100,00	398.280.000,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional secara Rutin/ Berkala	16 unit	201.694.275,00	100,00	200.880.050,00	99,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor	24 pot	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 item	109.725.000,00	100,00	109.684.500,00	99,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian Dinas	100 %	299.933.400,00	100,00	299.521.500,00	99,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian, Non PNS dan Korpri	5 Jenis	299.933.400,00	100,00	299.521.500,00	99,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sesuai Aturan dan Tepat Waktu)	100 %	4.297.500,00	100,00	4.177.000,00	97,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	1.150.000,00	100,00	1.133.000,00	98,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang disusun	2 dokumen	1.550.000,00	100,00	1.550.000,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 dokumen	947.500,00	100,00	850.000,00	89,71	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di susun	1 laporan	650.000,00	100,00	644.000,00	99,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Pemantik	3,45 %	729.117.895,00	100,00	716.779.764,00	98,31	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan e-Government	Terlaksananya Inisiatif e-Government dan Penguatan Sistem Informasi Kota Bontang	1 kali	529.117.895,00	100,00	516.916.064,00	97,69	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Yang Di Adakan	... Unit	200.000.000,00	100,00	199.863.700,00	99,93	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informatika Publik	89,7 %	1.413.557.900,00	100,00	1.389.138.622,00	98,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Buku Pedoman PPID yang dicetak	1 Unit	214.512.000,00	100,00	213.711.172,00	99,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Media Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana Media Center	1 unit	217.189.200,00	100,00	216.906.000,00	99,87	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Media Massa	12 Bulan	827.000.000,00	100,00	803.892.050,00	97,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi (KIP)	1 Kali	100.680.000,00	100,00	100.570.000,00	99,89	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penguatan Kapasitas Pengelola PPID	Jumlah Aparat Masing-masing OPD yang Memahami UU KIP	100 orang	54.176.700,00	100,00	54.059.400,00	99,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Pemantik	3,45 %	2.560.105.860,00	100,00	2.543.884.362,00	99,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Koneksi Internet Yang Tersambung	9 Bulan	1.434.112.660,00	100,00	1.434.102.660,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah Jaringan Infrastruktur yang Terpelihara	1 item	780.526.950,00	100,00	772.980.152,00	99,03	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Domain dan Sub Domain Bontangkota.go.id yang Dikelola	1 Domain (bontangkota.go.id)	17.120.000,00	100,00	11.056.950,00	64,58	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan Data Center	Jumlah Peralatan Data Center yang terpelihara	2 tower	328.346.250,00	100,00	325.744.600,00	99,21	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	89,7 %	278.500.000,00	100,00	264.926.500,00	95,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Terpublikasinya Informasi/ Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	6 Informasi	278.500.000,00	100,00	264.926.500,00	95,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	723.218.950,00	100,00	708.708.639,00	97,99	Sekretariat Daerah
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	26 media	723.218.950,00	100,00	708.708.639,00	97,99	Sekretariat Daerah
9 Program; 34 Kegiatan				9.251.899.594,00	100,00	9.160.182.193,00	99,01	

A.4.17 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	7.558.304.556,00	99,80	7.399.170.972,00	97,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	550 lembar	3.900.000,00	100,00	3.900.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	82.800.000,00	100,00	48.680.766,00	58,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Memiliki Izin	42 unit	23.900.000,00	35,71	10.396.400,00	43,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	45 jenis	201.816.856,00	100,00	199.966.340,00	99,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	147.328.800,00	100,00	143.734.150,00	97,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	517.675.000,00	100,00	500.685.800,00	96,72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 jenis	600.000,00	100,00	600.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	17 jenis	34.096.000,00	100,00	34.096.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 bulan	91.920.000,00	100,00	91.920.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Konsultasi dan Konsultasi Dinas Yang Dilakukakn Aparatur	12 bulan	178.234.300,00	100,00	178.234.300,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	156 org	6.276.033.600,00	100,00	6.186.957.216,00	98,58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	386.970.800,00	100,00	383.744.800,00	99,17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	331.770.800,00	100,00	328.544.800,00	99,03	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	55.200.000,00	100,00	55.200.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan OPD (Sesuai Aturan dan Tepat Waktu)	100 %	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 buku	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah Laporan Akuntabilitas	10 buku	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi Dikalangan Siswa SLTP dan SMA/ SMK	50 %	428.158.000,00	100,00	404.711.300,00	94,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Kegiatan Study Komparatif	Jumlah Pengurus Dekopinda Yang Mengikuti Studi Lapangan	20 pengurus	10.800.000,00	100,00	10.800.000,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Koperasi dan UMK	124 60 koperasi dan 64 UMK	417.358.000,00	100,00	393.911.300,00	94,38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4 Program; 17 Kegiatan				8.374.433.356,00	99,82	8.188.627.072,00	97,78	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.18 URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.508.664.084,00	100,00	2.404.970.556,00	95,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	720 lembar,	3.570.000,00	100,00	3.570.000,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	341.237.000,00	100,00	298.344.045,00	87,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	27 unit	14.200.000,00	100,00	7.893.010,00	55,58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	3 orang	73.659.600,00	100,00	73.492.780,00	99,77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	40 item	50.995.578,00	100,00	50.915.360,00	99,84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	90000 lbr dan 9 item	255.954.100,00	100,00	253.516.515,00	99,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	18 unit	557.903.600,00	100,00	549.909.800,00	98,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	11 item	13.024.250,00	100,00	13.003.957,00	99,84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	2100 kotak	40.865.000,00	100,00	40.847.500,00	99,96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dibekali	54 kali	260.170.956,00	100,00	260.148.170,00	99,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	17 orang	897.084.000,00	100,00	853.329.419,00	95,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	220.880.600,00	100,00	219.332.315,00	99,3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	1 paket	3.900.000,00	100,00	3.899.995,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	27 unit	198.940.600,00	100,00	197.394.300,00	99,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	12.040.000,00	100,00	12.039.500,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	1 paket	6.000.000,00	100,00	5.998.520,00	99,98	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Keseragaman aparatur DPM&PTSP	100 %	201.237.500,00	100,00	200.541.500,00	99,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah akaian dinas yang tersedia beserta perlengkapannya	224 stel	201.237.500,00	100,00	200.541.500,00	99,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	546.135.300,00	100,00	546.135.300,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat aparatur	7 orang	546.135.300,00	100,00	546.135.300,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
5	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya investor PMDN/PMA	3 hari	306.281.000,00	100,00	304.469.900,00	99,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	6.000.000,00	100,00	5.582.500,00	93,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Elektronik		1 aplikasi	300.281.000,00	100,00	298.887.400,00	99,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
6	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya investor PMDN /PMA	100 %	520.842.000,00	100,00	518.908.571,00	99,63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengembangan Promosi Potensi Daerah	Jumlah event promosi potensi daerah yang diikuti	2 event	520.002.000,00	100,00	518.068.571,00	99,63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	840.000,00	100,00	840.000,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
6 Program; 21 Kegiatan				4.304.040.484,00	100,00	4.194.358.142,00	97,45	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.19 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	3.237.494.117,00	100,00	3.154.472.629,00	97,44	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman	1400 Lembar,	7.950.000,00	100,00	7.940.000,00	99,87	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Yang Terbayar	1 Tahun	529.502.500,00	100,00	524.524.966,00	99,06	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Dan Perizinan	23 Unit	16.300.000,00	100,00	11.811.700,00	72,46	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Diadakan	38 jenis	33.716.675,00	100,00	32.903.750,00	97,59	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan yang di Adakan	10 Jenis	30.932.900,00	100,00	28.926.400,00	93,51	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Informasi	3 Jenis	10.750.000,00	100,00	10.360.000,00	96,37	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	23 jenis	31.452.200,00	100,00	31.410.070,00	99,87	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makan dan minum untuk pegawai, tamu, rapat dan	3600 kotak,	52.625.000,00	100,00	52.500.000,00	99,76	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	130 kali	396.367.442,00	100,00	385.946.154,00	97,37	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS Yang Dipekerjakan	53 orang	2.127.897.400,00	100,00	2.068.149.589,00	97,19	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	77 %	1.583.125.400,00	100,00	1.562.321.950,00	98,69	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dina yg diadakan	1 mobil	230.000.000,00	100,00	227.000.000,00	98,7	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	16 jenis	593.577.000,00	100,00	590.570.900,00	99,49	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 Gedung	355.360.000,00	100,00	343.569.500,00	96,68	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di Pelihara	21 Unit	287.708.400,00	100,00	287.168.750,00	99,81	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	6 Jenis	116.480.000,00	100,00	114.012.800,00	97,88	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pegawai	100%	298.960.900,00	100,00	296.734.500,00	99,26	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Seragam Yang Diadakan	80 stell	298.960.900,00	100,00	296.734.500,00	99,26	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	77 %	99.991.900,00	100,00	99.598.000,00	99,61	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi Informasi Pelayanan dan Kegiatan SKPD Selama Setahun	5 Media	99.991.900,00	100,00	99.598.000,00	99,61	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Peran Serta Kepemudaan	5 OKP	469.156.400,00	100,00	438.590.430,00	93,48	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka Kota Bontang yang dibina	45 orang	13.720.000,00	100,00	13.720.000,00	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta Yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah	5 Orang	257.772.025,00	100,00	251.032.730,00	97,39	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka	500 Orang	197.664.375,00	100,00	173.837.700,00	87,95	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatkannya Prestasi Olahraga	70 medali	1.444.545.750,00	100,00	1.403.586.480,00	97,95	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah kontingen	80 orang	151.180.000,00	100,00	150.670.000,00	99,66	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga masyarakat (Bontang Maraton)	900 Orang	380.545.000,00	100,00	354.445.300,00	96,12	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Kompetisi Olahraga Kemasayarakatan	Jumlah Olahraga kemasayarakatan	1 Kegiatan	673.807.500,00	100,00	665.175.200,00	98,72	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Kompetisi sepak bola usia dini U12 dan U14 Tingkat kota Bontang	2 Turnamen	117.752.000,00	100,00	116.400.980,00	98,85	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pembinaan Atlit Prestasi Anggota KORPRI	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan	7 Cabor	121.261.250,00	100,00	116.895.000,00	96,4	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Sarana Dan Prasarana Olahraga terpelihara/terbangun	6 sarpras	1.375.960.300,00	100,00	1.365.403.413,00	99,23	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Jumlah Pemeliharaan yang Dilakukan di Taman Prestasi	1 Stadion	212.832.000,00	100,00	212.333.540,00	99,77	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Jumlah Pemeliharaan yang Dilakukan di Stadion Bessai Berinta	1 sarpras	680.893.300,00	100,00	674.070.274,00	99	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah Pemeliharaan Yang Dilakukan di GOR Taman Lestari	1 sarpras	67.798.000,00	100,00	67.536.413,00	99,61	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Jumlah Pemeliharaan Yang Dilakukan di Sport Center	1 sarpras	410.181.000,00	100,00	407.207.186,00	99,27	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan di Lapangan Tennis Bessai Berinta	1 sarpras	4.256.000,00	100,00	4.256.000,00	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
7 Program; 30 Kegiatan				8.509.234.767,00	100,00	8.320.707.402,00	97,78	

A.4.20 URUSAN STATISTIK

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informatika Publik	89,7 %	70.817.150,00	100,00	70.758.851,00	99,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	1 Sistem	70.817.150,00	100,00	70.758.851,00	99,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Program; 1 Kegiatan				70.817.150,00	100,00	70.758.851,00	99,92	

A.4.21 URUSAN PERSANDIAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN	Indeks Pemantik	3,45 %	95.792.125,00	100,00	95.269.900,00	99,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan	4 jenis	95.792.125,00	100,00	95.269.900,00	99,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGAMANAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH	Indeks Pemantik	3,45 %	538.883.172,00	64,16	339.369.795,00	62,98	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi	Tersedianya Sarana Sistem Keamanan Informasi	1 set	495.154.190,00	61,00	298.680.600,00	60,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Jumlah Aplikasi yang Dilakukan Pengujian	1 kali	43.728.982,00	100,00	40.689.195,00	93,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 Program; 3 Kegiatan				634.675.297,00	69,57	434.639.695,00	68,48	

A.4.22 URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	100 %	343.000.000,00	88,78	265.498.183,00	77,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	3 kegiatan	125.000.000,00	39,60	49.500.000,00	39,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan yang di renovasi	1 unit	218.000.000,00	100,00	215.998.183,00	99,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	100 %	31.250.000,00	20,64	6.450.000,00	20,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah peserta pembinaan kesenian tari	300 orang	31.250.000,00	20,64	6.450.000,00	20,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Program; 3 Kegiatan				374.250.000,00	73,20	271.948.183,00	72,66	

A.4.23 URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.115.598.519,00	100,00	2.985.993.631,00	95,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang bermaterai	350 lembar	3.540.000,00	100,00	2.700.000,00	76,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	6 item	280.756.000,00	100,00	247.626.879,00	88,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 item	561.294.000,00	100,00	508.555.712,00	90,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	14 1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 5 unit roda 2	23.000.000,00	100,00	9.161.470,00	39,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan yang Terbayarkan	9 6 orang petugas kebersihan, 3 orang petugas keamanan	247.920.000,00	100,00	237.976.736,00	95,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	4 jenis	10.126.109,00	100,00	9.988.000,00	98,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	84 jenis	61.799.410,00	100,00	61.505.600,00	99,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	18 item	19.566.400,00	100,00	14.547.550,00	74,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang disediakan	11 jenis	7.175.000,00	100,00	7.054.000,00	98,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 item	30.639.000,00	100,00	30.437.300,00	99,34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	2 2 Paket (makan minum rapat dan makan minum tamu)	38.325.000,00	100,00	37.852.500,00	98,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 16 kali DD, 11 kali LD	189.168.000,00	100,00	185.219.896,00	97,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi perkantoran yang terbayarkan	39 orang	1.642.289.600,00	100,00	1.633.367.988,00	99,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	586.517.458,00	100,00	583.181.439,00	99,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	7 item	427.260.710,00	100,00	424.761.939,00	99,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	14 6 unit mobil, 8 unit motor	137.903.748,00	100,00	137.250.000,00	99,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang disediakan	5 jenis	21.353.000,00	100,00	21.169.500,00	99,14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur	100 %	70.453.000,00	100,00	69.082.500,00	98,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang disediakan	66 1 jenis seragam (66 Set Seragam untuk PNS dan Non PNS)	70.453.000,00	100,00	69.082.500,00	98,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	222.264 Kunjungan	476.742.000,00	100,00	435.505.950,00	91,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu minggu	2500 pengunjung	18.300.000,00	100,00	16.100.000,00	87,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah lomba yang diadakan	1 jenis	56.305.700,00	100,00	38.204.700,00	67,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Jumlah jenis layanan perpustakaan keliling	1 jenis	2.240.000,00	100,00	2.240.000,00	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah media publikasi	4 media	156.000.000,00	100,00	154.000.000,00	98,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah buku digital yang diadakan	10 paket	77.559.300,00	100,00	58.687.050,00	75,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan	9 jenis	166.337.000,00	100,00	166.274.200,00	99,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 Program; 23 Kegiatan				4.249.310.977,00	100,00	4.073.763.520,00	95,87	

A.4.24 URUSAN KEARSIPAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah data arsip	100 %	37.587.000,00	100,00	37.060.000,00	98,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengumpulan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi	10 OPD	37.587.000,00	100,00	37.060.000,00	98,6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Keamanan Dokumen /arsip daerah	100 %	543.249.000,00	100,00	523.739.430,00	96,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah jenis sarana prasarana kearsipan	1 jenis	335.710.000,00	100,00	328.144.800,00	97,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penataan arsip	2 OPD	5.514.000,00	100,00	5.377.130,00	97,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang diduplikasi dalam bentuk elektromatika	300 judul	202.025.000,00	100,00	190.217.500,00	94,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Data perbaikan administrasi kearsipan di Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring	100 %	186.000.000,00	100,00	183.770.000,00	98,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah Area Pelaksanaan Fumigasi	632 m3	185.000.000,00	100,00	182.770.000,00	98,79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah sasaran monitoring arsip	16 PD	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Layanan Informasi Arsip Yang tersedia	100 %	385.398.450,00	100,00	365.074.900,00	94,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah Jenis Layanan Informasi Arsip	11 Jenis	193.030.000,00	100,00	181.299.000,00	93,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan kearsipan	6 PD	192.368.450,00	100,00	183.775.900,00	95,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 Program; 8 Kegiatan				1.152.234.450,00	100,00	1.109.644.330,00	96,30	

B. URUSAN PILIHAN

A.4.25 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100 %	3.578.851.541,00	100,00	3.556.868.845,00	99,39	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman	500 lembar	12.737.183,00	100,00	12.736.630,00	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air dan listrik	3 jenis	34.200.000,00	100,00	27.617.625,00	80,75	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional	59 kendaraan	31.200.000,00	100,00	21.590.390,00	69,2	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	5 jenis	74.999.866,00	100,00	74.998.660,00	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	3 jenis	54.797.075,00	100,00	54.736.000,00	99,89	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan Kantor	5 jenis	9.997.885,00	100,00	9.992.950,00	99,95	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	21 unit	182.300.000,00	100,00	181.213.340,00	99,4	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 jenis	2.671.200,00	100,00	2.664.000,00	99,73	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan logistik	3 jenis	33.951.480,00	100,00	33.828.450,00	99,64	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum	2 kegiatan	27.452.875,00	100,00	27.439.500,00	99,95	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam maupun Luar Daerah	1 Tahun	319.151.977,00	100,00	318.047.235,00	99,65	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	71 orang	2.795.392.000,00	100,00	2.792.004.065,00	99,88	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	1 tahun	719.892.800,00	100,00	711.256.950,00	98,8	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	61 kendaraan	657.648.000,00	100,00	649.068.450,00	98,7	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3 unit	35.712.000,00	100,00	35.695.000,00	99,95	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	105 unit	26.532.800,00	100,00	26.493.500,00	99,85	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100 %	260.078.650,00	100,00	258.965.300,00	99,57	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		135 steel	260.078.650,00	100,00	258.965.300,00	99,57	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terdapatnya Publikasi ke media online	1 Tahun	399.000.000,00	100,00	391.657.200,00	98,16	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi kegiatan ke media online	5 media	399.000.000,00	100,00	391.657.200,00	98,16	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	16.482 ton	5.138.081.065,00	100,00	5.117.431.792,00	99,6	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi, penerima bantuan pakan dan benih ikan	35 30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar	110.390.000,00	100,00	109.468.000,00	99,16	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	3 jenis	3.541.679.315,00	100,00	3.526.030.242,00	99,56	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	1 dokumen	18.751.250,00	100,00	18.620.000,00	99,3	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumah keompok neayan budidaya yang menerima bantuan	20 kelompok	1.467.260.500,00	100,00	1.463.313.550,00	99,73	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		... unit	11.899.143.128,00	88,59	10.437.582.935,00	87,72	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah OPD yang mengikuti Rakor perikanan	50 OPD	1.266.933.100,00	100,00	1.258.893.200,00	99,37	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian PPI/TPI	Operasional PPI/TPI	18 jenis	1.332.987.237,00	100,00	1.328.935.698,00	99,7	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan Fasilitas PPI/TPI	Tempat Pendaratan Ikan	1 unit	3.188.000.000,00	100,00	3.124.589.133,00	98,01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Laporan data statistik	1 dokumen	17.565.500,00	100,00	16.920.000,00	96,33	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap	60 orang	720.910.000,00	100,00	719.272.263,00	99,77	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	Tersedianya Bantuan Bagi Nelayan Tangkap	30 kelompok	1.533.008.000,00	11,47	174.075.000,00	11,36	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Bantuan kepada nelayan tangkap	6 kali	3.839.739.291,00	100,00	3.814.897.641,00	99,35	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6 Program; 28 Kegiatan				21.995.047.184,00	93,83	20.473.763.022,00	93,08	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.26 URUSAN PARIWISATA

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Pemasaran Industri Pariwisata Melalui Promosi Pariwisata Daerah	432.586 kunjungan	282.045.000,00	100,00	259.772.140,00	92,1	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang diikuti	3 event	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	100	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	10 kelompok	12.175.000,00	100,00	12.129.140,00	99,62	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataaan)	Jumlah SDM Pemandu Wisata Dan Pengelola Wisata	6 Kegiatan	255.870.000,00	100,00	233.643.000,00	91,31	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Memadai	35	522.671.500,00	100,00	516.349.275,00	98,79	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)	3 Dokumen	115.000.000,00	100,00	113.397.000,00	98,61	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	7 fasilitas	407.671.500,00	100,00	402.952.275,00	98,84	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2 Program; 5 Kegiatan				804.716.500,00	100,00	776.121.415,00	96,45	

A.4.27 URUSAN PERTANIAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya ketrampilan petani	... %	570.277.325,00	87,55	473.045.517,00	82,95	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pendampingan petani	307 petani	473.337.425,00	85,00	384.663.200,00	81,27	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Jumlah Jenis layanan yang digunakan	8 jenis	96.939.900,00	100,00	88.382.317,00	91,17	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna	100 %	18.296.250,00	100,00	17.655.000,00	96,5	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	1 unit	18.296.250,00	100,00	17.655.000,00	96,5	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan	25 Petani	489.833.800,00	100,00	485.755.880,00	99,17	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan	25 petani	10.952.500,00	100,00	10.952.500,00	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan obat-obatan dan pupuk pertanian	30 keompok	38.589.600,00	100,00	38.279.000,00	99,2	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	6 jenis	410.641.700,00	100,00	406.874.380,00	99,08	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian hama terpadu	30 petani	29.650.000,00	100,00	29.650.000,00	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	100 %	465.300.250,00	100,00	462.493.454,00	99,4	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan kesehatan ternak	2300 ternak	465.300.250,00	100,00	462.493.454,00	99,4	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya ketersediaan ternak	100 %	1.112.665.200,00	100,00	1.111.201.697,00	99,87	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	5 ekor sapi	847.985.000,00	100,00	847.632.000,00	99,96	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya pakan ternak dan bibit unggas	670 270 sak, 200 botol, 200 bungkus	264.680.200,00	100,00	263.569.697,00	99,58	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya produksi peternakan	1 tahun	469.111.950,00	100,00	466.446.325,00	99,43	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya pagar RPH, drainase RPH dan kanopi Puskesmas	... meter	209.890.600,00	100,00	209.597.053,00	99,86	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produk hewan yang aman, Sehat, Utuh dan Halal	20 orang	17.993.750,00	100,00	17.989.500,00	99,98	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
	Operasional Rumah Potong Hewan	Tersedianya operasional RPH	12 bulan	241.227.600,00	100,00	238.859.772,00	99,02	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6 Program; 17 Kegiatan				3.125.484.775,00	97,73	3.016.597.873,00	96,52	

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A.4.28 URUSAN PERDAGANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan pengawasan UTTP	100 %	532.681.663,00	100,00	518.259.663,00	97,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pelaksanaan Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	21 orang	532.681.663,00	100,00	518.259.663,00	97,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Nilai Ekspor 0,1% Tahun	100 %	742.141.500,00	100,00	742.141.500,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Pameran Dagang	6 pameran	742.141.500,00	100,00	742.141.500,00	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Banyaknya Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Di Tingkat Provinsi dan Nasional	1 paket bangunan	13.424.557.725,00	100,00	12.748.675.930,00	94,97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Terlatihnya Tenaga Lapangan UPTD Pasar	166 133 apartur dan 134 pedagang	891.437.725,00	100,00	889.119.725,00	99,74	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah	Jumlah Kelurahan Yang Dilakukan Pasar Murah	15 kelurahan,	438.420.000,00	100,00	421.254.400,00	96,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	1 paket	12.094.700.000,00	100,00	11.438.301.805,00	94,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Terbinanya Pedagang Kreatif Lapangan	214 pedagang	1.178.840.000,00	100,00	970.119.000,00	82,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembinaan PKL	Jenis Sarana Untuk PKL	214 PKL	1.178.840.000,00	100,00	970.119.000,00	82,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	100 %	28.271.163.606,00	100,00	28.260.993.906,00	99,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan & Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Jumlah Jenis Alat Penunjang Kebersihan Pasar	15 jenis	224.795.000,00	100,00	223.817.300,00	99,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Pasar Rawa Indah	2000 m3	28.046.368.606,00	100,00	28.037.176.606,00	99,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
5 Program; 8 Kegiatan				44.149.384.494,00	100,00	43.240.189.999,00	97,94	

C. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN

A.4.29 URUSAN PERENCANAAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.224.709.709,00	100,00	2.171.581.394,00	97,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1050 surat	6.335.500,00	100,00	6.335.000,00	99,99	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perizinan	27 unit	17.380.000,00	100,00	12.504.140,00	71,95	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan kelengkapan printer	61 35 jenis dan 26 jenis	150.375.482,00	100,00	149.344.825,00	99,31	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	55.705.825,00	100,00	51.956.500,00	93,27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat listrik	7 jenis	4.175.000,00	100,00	4.175.000,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	731.779.490,00	100,00	715.834.990,00	97,82	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6 6 jenis sembako; 75 porsi makan tamu; 1500 kotak snack; 1500 kotak makan	149.816.000,00	100,00	144.109.000,00	96,19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	97 perjalanan	540.319.012,00	100,00	532.811.287,00	98,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	14 non PNS	568.823.400,00	100,00	554.510.652,00	97,48	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100 %	932.482.240,00	100,00	892.447.682,00	95,71	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit mobil	270.007.440,00	100,00	250.000.000,00	92,59	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 10 roda empat dan 18 10 roda dua	442.874.800,00	100,00	426.929.582,00	96,4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	19.600.000,00	100,00	16.450.000,00	83,93	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan yang diadakan		200.000.000,00	100,00	199.068.100,00	99,53	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur	100 %	156.940.200,00	100,00	156.940.200,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah set pakaian yang diadakan	5 Jenis	156.940.200,00	100,00	156.940.200,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	50 %	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	13 orang	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase informasi/produk perencanaan Bapelitbang yang dipublikasikan	100 %	3.800.000,00	100,00	200.000,00	5,26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan dalam Bontang City Carnival (BCC)	1 kegiatan	3.800.000,00	100,00	200.000,00	5,26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD	1;1;1 dokumen	473.003.600,00	100,00	395.787.500,00	83,68	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	1 dokumen	92.682.500,00	100,00	92.255.000,00	99,54	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penetapan RKPd	Dokumen Rancangan Awal RKPd; Dokumen Rancangan RKPd; Dokumen Perwali RKPd	3 dokumen	9.835.000,00	100,00	6.097.500,00	62	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Forum CSR	1 dokumen	5.250.000,00	100,00	2.362.500,00	45	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan dan Penetapan RKPd Perubahan	Jumlah dokumen RKPd Perubahan	2 dokumen	14.497.500,00	100,00	8.760.000,00	60,42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Sistem informasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	7.875.000,00	100,00	0	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sumber dana Banku Provinsi dan DAK	1 dokumen	23.600.000,00	100,00	6.812.500,00	28,87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Rancangan Tenokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Tenokratik RPJMD	1 dokumen	319.263.600,00	100,00	279.500.000,00	87,55	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100 %	40.293.125,00	100,00	40.268.250,00	99,94	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	6 laporan	24.543.125,00	100,00	24.518.250,00	99,9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi	4 laporan	15.750.000,00	100,00	15.750.000,00	100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	100 %	155.891.375,00	100,00	151.110.062,00	96,93	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	7 Tatanan	87.950.625,00	100,00	85.659.812,00	97,4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	1 Aplikasi	13.125.000,00	100,00	12.862.500,00	98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	4 laporan	18.375.000,00	100,00	17.325.000,00	94,29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	4 dokumen	18.065.750,00	100,00	17.465.250,00	96,68	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDM	4 dokumen	13.125.000,00	100,00	12.600.000,00	96	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 dokumen	5.250.000,00	100,00	5.197.500,00	99	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
9	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah	100 %	135.774.150,00	100,00	123.206.500,00	90,74	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen	72.465.400,00	100,00	71.974.000,00	99,32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	2 dokumen	37.101.250,00	100,00	26.032.500,00	70,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	26.207.500,00	100,00	25.200.000,00	96,16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
10	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan pranata tata ruang kota dan wilayah	25 %	138.841.787,00	100,00	136.266.040,00	98,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Rapat Pokja JIGD	4 kali	62.362.500,00	100,00	62.312.500,00	99,92	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Rapat pemantauan dan evaluasi penataan ruang dan pertanahan	300 orang	66.479.287,00	100,00	66.366.790,00	99,83	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 dokumen	10.000.000,00	100,00	7.586.750,00	75,87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100 %	1.422.793.700,00	100,00	1.382.567.050,00	97,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	26.598.125,00	100,00	8.568.750,00	32,22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum; Kick Off Meeting Program AMPL Tahun 2019 Provinsi Kaltim	1 dokumen	301.957.125,00	100,00	301.478.500,00	99,84	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Dokumen memorandum program pembangunan kota berkelanjutan	1 dokumen	257.219.975,00	100,00	255.009.000,00	99,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	Dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	1 dokumen	13.512.500,00	100,00	5.375.000,00	39,78	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	50 orang	279.207.700,00	100,00	278.910.800,00	99,89	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi	1 dokumen	14.319.275,00	100,00	7.000.000,00	48,89	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Master Plan Drainase	Dokumen Master Plan Drainase	1 dokumen	122.217.500,00	100,00	120.275.000,00	98,41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Review RISPAM	Dokumen Review RISPAM	1 dokumen	407.761.500,00	100,00	405.950.000,00	99,56	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11 Program; 45 Kegiatan				5.694.529.886,00	100,00	5.460.374.678,00	95,89	

A.4.30 URUSAN KEUANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	4.528.455.118,00	100,00	4.355.883.734,00	96,19	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 Bulan	6.350.000,00	100,00	6.000.000,00	94,49	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	185.820.000,00	100,00	102.734.306,00	55,29	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	47 Unit	25.700.000,00	100,00	14.504.000,00	56,44	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	273.909.500,00	100,00	259.104.038,00	94,59	Badan Pendapatan Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	30 Item	148.469.000,00	100,00	147.036.600,00	99,04	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetak	20 jenis	326.317.400,00	100,00	321.472.640,00	98,52	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	11 item	18.898.000,00	100,00	18.898.000,00	100	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 item	479.820.000,00	100,00	469.497.648,00	97,85	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	1584 eks	20.600.000,00	100,00	18.491.600,00	89,77	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	23 Item	147.174.000,00	100,00	146.093.350,00	99,27	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	6800 kotak	227.790.000,00	100,00	227.762.500,00	99,99	Badan Pendapatan Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	125 kali	1.087.808.018,00	100,00	1.069.370.280,00	98,31	Badan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	41 orang	1.471.659.200,00	100,00	1.448.278.772,00	98,41	Badan Pendapatan Daerah
	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	1 aplikasi	108.140.000,00	100,00	106.640.000,00	98,61	Badan Pendapatan Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.139.219.000,00	100,00	1.050.049.709,00	92,17	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	1 unit	471.300.000,00	100,00	447.300.000,00	94,91	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan Meubelair	Telaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair	50 buah	25.720.000,00	100,00	25.195.000,00	97,96	Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	50.720.000,00	100,00	49.780.000,00	98,15	Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	31 12 mobil dan 21 motor	491.539.000,00	100,00	461.896.100,00	93,97	Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	8 jenis	99.940.000,00	100,00	65.878.609,00	65,92	Badan Pendapatan Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	272.540.000,00	100,00	270.590.000,00	99,28	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian kegiatan hari hari tertentu	246 stell	272.540.000,00	100,00	270.590.000,00	99,28	Badan Pendapatan Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	187.500.000,00	100,00	131.411.378,00	70,09	Badan Pendapatan Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	37.500.000,00	100,00	15.000.000,00	40	Badan Pendapatan Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Praperda	Tersusunnya Naskah Akademik Raperda	1 naskah akademik	150.000.000,00	100,00	116.411.378,00	77,61	Badan Pendapatan Daerah
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	1.097.300.000,00	100,00	1.051.659.283,00	95,84	Badan Pendapatan Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	1.097.300.000,00	100,00	1.051.659.283,00	95,84	Badan Pendapatan Daerah
6	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,59 %	2.979.288.500,00	100,00	2.643.128.811,00	88,72	Badan Pendapatan Daerah
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	49,93 %	1.573.451.000,00	100,00	1.433.750.220,00	91,12	Badan Pendapatan Daerah
	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SP PDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	38000 lbr	302.330.000,00	100,00	187.620.000,00	62,06	Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	291.015.000,00	100,00	289.055.000,00	99,33	Badan Pendapatan Daerah
	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 Tahun	136.770.000,00	100,00	119.499.591,00	87,37	Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan SISMIO P PBB	Terawatnya SISMIO P PBB	1 Aplikasi	35.000.000,00	100,00	34.925.000,00	99,79	Badan Pendapatan Daerah
	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	1 tahun	264.940.000,00	100,00	259.340.000,00	97,89	Badan Pendapatan Daerah
	Sosialisasi PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Jumlah peserta sosialisai Pajak Daerrah Dan Retribusi Daerah	200 orang	54.477.500,00	100,00	49.734.000,00	91,29	Badan Pendapatan Daerah
	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	... Objek	238.640.000,00	100,00	199.140.000,00	83,45	Badan Pendapatan Daerah
	Penghapusan Pajak Daerah	Tersedianya data tentang penghapusan piutang pajak	134 WP	82.665.000,00	100,00	70.065.000,00	84,76	Badan Pendapatan Daerah
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7.109.503.359,00	100,00	6.902.103.954,00	97,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	10.779.300,00	100,00	9.942.500,00	92,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Air, telepon, Listrik dan internet	12 Bulan	396.540.000,00	100,00	378.598.512,00	95,48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	47 unit	40.792.500,00	100,00	14.197.350,00	34,8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	459.340.000,00	100,00	455.535.770,00	99,17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 Item	330.903.055,00	100,00	328.520.360,00	99,28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengandaan dan Cetakan	3 jenis	556.064.730,00	100,00	548.780.991,00	98,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	16 Item	125.556.600,00	100,00	124.886.000,00	99,47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Item	1.326.320.000,00	100,00	1.314.293.800,00	99,09	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	4 jenis	94.437.000,00	100,00	94.072.500,00	99,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	2 Item	342.570.069,00	100,00	340.111.950,00	99,28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Snack dan Makan	3 item	626.195.750,00	100,00	625.570.750,00	99,9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	210 kali	918.663.063,00	100,00	875.168.876,00	95,27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah non PNS	44 orang	1.777.984.292,00	100,00	1.689.921.895,00	95,05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penataan Kearsipan Kantor	Jumlah jenis pengarsipan	7 item	103.357.000,00	100,00	102.502.700,00	99,17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.526.096.400,00	100,00	2.509.525.150,00	99,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	716.000.000,00	100,00	706.000.000,00	98,6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Gedung	822.642.900,00	100,00	818.461.600,00	99,49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	59 Unit	559.813.500,00	100,00	559.610.550,00	99,96	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	427.640.000,00	100,00	425.453.000,00	99,49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100 %	205.696.000,00	100,00	205.273.500,00	99,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	80 stel	205.696.000,00	100,00	205.273.500,00	99,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		100 %	325.150.714,00	92,26	297.394.741,00	91,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi Kegiatan	12 bulan	325.150.714,00	92,26	297.394.741,00	91,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	6.585.530.780,00	98,96	6.092.925.628,00	92,52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	51.060.000,00	99,10	49.839.090,00	97,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen kebijakan Umum APBD (KUA)	2 Dokumen	215.300.000,00	100,00	215.262.500,00	99,98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 dokumen	193.550.000,00	100,00	193.550.000,00	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	2 dokumen	202.810.500,00	100,00	202.810.000,00	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	2 Dokumen	203.020.000,00	100,00	198.020.000,00	97,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	20 orang	1.452.219.655,00	100,00	1.201.024.283,00	82,7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2 buku	472.050.000,00	100,00	442.443.000,00	93,73	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	5 Buku	880.938.900,00	93,98	782.793.400,00	88,86	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Buku	550.600.000,00	97,28	526.577.500,00	95,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7 Dokumen	275.700.000,00	100,00	275.166.330,00	99,81	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	153.900.000,00	100,00	153.855.445,00	99,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	2 buku	174.000.000,00	100,00	162.900.000,00	93,62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	1 Dokumen	117.470.000,00	100,00	116.426.640,00	99,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	17.950.000,00	100,00	17.950.000,00	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Jumlah Dokumen Tanah dibawah jalan yang tercatat/bernilai	1 Dokumen	60.568.125,00	100,00	8.267.500,00	13,65	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah perangkat daerah yg didampingi	29 OPD	258.800.000,00	100,00	256.800.000,00	99,23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat	125 orang	407.550.000,00	100,00	406.606.600,00	99,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29 OPD	156.200.000,00	100,00	150.737.500,00	96,5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	31 berita acara	264.542.500,00	100,00	262.788.000,00	99,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	15 8 BA OPD dan 7 BA PUSKESMAS	274.467.500,00	100,00	266.274.240,00	97,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29 OPD	202.833.600,00	100,00	202.833.600,00	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Ketersediaan data aset yang akurat	100 %	657.043.750,00	79,07	469.244.200,00	71,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	39.680.000,00	74,24	28.553.200,00	71,96	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	2 Dokumen	171.940.000,00	100,00	171.566.000,00	99,78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD	1 Dokumen	125.346.250,00	45,81	42.654.800,00	34,03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Jumlah OPD yang menghimpun Data Barang Milik Daerah	29 OPD	25.620.000,00	97,19	24.760.200,00	96,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	1 Dokumen	113.187.500,00	48,19	20.740.000,00	18,32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	181.270.000,00	100,00	180.970.000,00	99,83	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12 Program; 79 Kegiatan				27.613.323.621,00	99,16	25.979.190.088,00	94,08	

A.4.31 URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan kebutuhan perkantoran yang terpenuhi	100 %	1.168.174.816,00	100,00	1.156.063.208,00	98,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1400 150 Surat;1250 lbr	10.750.000,00	100,00	9.698.300,00	90,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 bulan	108.300.000,00	100,00	108.300.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	16 11 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	9.820.000,00	100,00	5.649.070,00	57,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor yang dibutuhkan	14 jenis	42.460.050,00	100,00	42.460.050,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	13 jenis	107.998.959,00	100,00	105.456.022,00	97,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan	7 jenis	23.674.300,00	100,00	23.240.300,00	98,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Makan	2000 kotak	69.100.000,00	100,00	68.892.310,00	99,7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	71 kali	515.512.307,00	100,00	515.179.971,00	99,94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibutuhkan	7 orang	280.559.200,00	100,00	277.187.185,00	98,8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase aset Perangkat Daerah yang layak pakai	100 %	753.018.200,00	100,00	733.703.600,00	97,44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	1 1 unit kendaraan dinas roda dua	24.620.000,00	100,00	24.620.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	17 12 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	245.143.200,00	100,00	244.033.900,00	99,55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	9 jenis	135.196.000,00	100,00	129.513.800,00	95,8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis barang inventaris yang diadakan	11 jenis	348.059.000,00	100,00	335.535.900,00	96,4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kelulusan peserta diklat	100 %	2.280.000,00	100,00	2.280.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek	10 kali	2.280.000,00	100,00	2.280.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kelulusan peserta diklat	100 %	1.650.143.894,00	100,00	1.638.442.094,00	99,29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta Diklat Pra Jabatan	55 Org	916.560.000,00	100,00	913.310.000,00	99,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	9 orang	150.520.000,00	100,00	142.168.200,00	94,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional	3 orang	62.500.000,00	100,00	62.400.000,00	99,84	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS daerah	25 orang	520.563.894,00	100,00	520.563.894,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai	25 %	1.852.072.146,00	100,00	1.800.317.753,00	97,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta Seleksi Penerimaan CPNS	2000 orang	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari perangkat daerah	5 kali	6.500.000,00	100,00	6.500.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	2 laporan	3.250.000,00	100,00	3.250.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	300 PNS	3.250.000,00	100,00	3.250.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat 600	600 berkas	269.132.600,00	100,00	242.950.455,00	90,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	1 dokumen	20.540.000,00	100,00	20.530.120,00	99,95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai formasi	80 orang	307.120.701,00	100,00	294.365.295,00	95,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian dalam bentuk cetak	1 jenis	317.502.000,00	100,00	314.066.856,00	98,92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	20 pegawai	3.250.000,00	100,00	3.250.000,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	75 orang	390.668.385,00	100,00	384.404.347,00	98,4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	138.468.460,00	100,00	138.381.880,00	99,94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	25 berkas	25.650.000,00	100,00	23.240.000,00	90,6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	1 dokumen	364.740.000,00	100,00	364.128.800,00	99,83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 Program; 31 Kegiatan				5.425.689.056,00	100,00	5.330.806.655,00	98,25	

A.4.32 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	96 %	143.773.610,00	100,00	115.257.450,00	80,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kelompok data informasi pembangunan daerah	3 kelompok	14.175.000,00	100,00	13.650.000,00	96,3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 kegiatan	8.060.000,00	100,00	7.850.000,00	97,39	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Dukungan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan fasilitasi inovasi dan penelitian yang dilaksanakan	2 kegiatan	121.538.610,00	100,00	93.757.450,00	77,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1 Program; 3 Kegiatan				143.773.610,00	100,00	115.257.450,00	80,17	

A.4.33 URUSAN PENGAWASAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.003.033.744,00	100,00	951.781.381,00	94,89	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	50 Surat	4.750.000,00	100,00	2.882.500,00	60,68	Inspektorat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet yang dibayarkan	12 bulan	750.000,00	100,00	446.520,00	59,54	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	21 Unit	16.050.000,00	100,00	11.958.190,00	74,51	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	48 jenis	29.916.500,00	100,00	21.993.340,00	73,52	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan penggandaan	13 jenis	44.112.200,00	100,00	39.069.825,00	88,57	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan	4 Jenis	492.240.093,00	100,00	469.160.150,00	95,31	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah tangga	3 jenis	11.100.000,00	100,00	10.891.500,00	98,12	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	1320 eksemplar	10.144.764,00	100,00	10.140.000,00	99,95	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	6 jenis	26.319.500,00	100,00	26.305.700,00	99,95	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makan dan snack	1120 kotak	49.370.000,00	100,00	47.411.500,00	96,03	Inspektorat Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	39 Kali	229.572.687,00	100,00	223.666.072,00	97,43	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah non PNS	2 orang	88.708.000,00	100,00	87.856.084,00	99,04	Inspektorat Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan sarana prasarana aparatur	100 %	772.492.783,00	100,00	760.792.440,00	98,49	Inspektorat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	4 unit	496.620.000,00	100,00	488.220.000,00	98,31	Inspektorat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21 unit	257.012.550,00	100,00	255.039.700,00	99,23	Inspektorat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	5 jenis	18.860.233,00	100,00	17.532.740,00	92,96	Inspektorat Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah	100 %	67.080.000,00	100,00	63.800.000,00	95,11	Inspektorat Daerah
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Seragam Yang Diadakan	43 stell	67.080.000,00	100,00	63.800.000,00	95,11	Inspektorat Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Skor B	1.115.922.699,00	100,00	1.070.287.227,00	95,91	Inspektorat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan umum dan pengawasan teknis Perangkat Daerah yang diselesaikan	362 OP	748.218.849,00	100,00	742.704.645,00	99,26	Inspektorat Daerah
	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	12 laporan	113.158.950,00	100,00	86.682.800,00	76,6	Inspektorat Daerah
	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Jumlah laporan hasil pemantauan RAD PPK Terintegrasi Kota Bontang	4 Laporan	16.744.900,00	100,00	16.630.500,00	99,32	Inspektorat Daerah
	Penilaian Angka Kredit Fungsional	Pelaksanaan penilaian JFT	22 JFT	37.800.000,00	100,00	28.800.000,00	76,19	Inspektorat Daerah
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah pengawasan umum dan pengawasan teknis Perangkat Daerah yang diselesaikan	362 OP	200.000.000,00	100,00	195.469.282,00	97,73	Inspektorat Daerah
5	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan	100 %	300.080.000,00	100,00	276.254.929,00	92,06	Inspektorat Daerah
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan	42 orang	300.080.000,00	100,00	276.254.929,00	92,06	Inspektorat Daerah
6	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap sistem yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan daerah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	80 %	100.000.000,00	100,00	99.330.000,00	99,33	Inspektorat Daerah
	Implementasi SIMWASDA	Jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga	1 aplikasi	100.000.000,00	100,00	99.330.000,00	99,33	Inspektorat Daerah
7	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100 %	351.823.497,00	100,00	342.063.692,00	97,23	Inspektorat Daerah
	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	5 kasus	351.823.497,00	100,00	342.063.692,00	97,23	Inspektorat Daerah
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	level 3	249.415.000,00	100,00	225.750.000,00	90,51	Inspektorat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat daerah Kota Bontang yang diselesaikan	10 PD	249.415.000,00	100,00	225.750.000,00	90,51	Inspektorat Daerah
8 Program; 25 Kegiatan				3.959.847.723,00	100,00	3.790.059.669,00	95,71	

A,4,34 URUSAN PENDUKUNG

No,	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	31.326.370.159,00	99,93	29.702.309.151,00	94,82	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1500 lembar	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan air, listrik, telepon internet, TV Kabel dan Frekuensi Radio	12 Bulan	4.459.425.000,00	100,00	4.365.110.341,00	97,89	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	155 Unit	147.500.000,00	97,97	123.397.280,00	83,66	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	88 Orang	7.008.289.000,00	100,00	6.696.782.900,00	95,56	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	38 Jenis	359.017.155,00	100,00	355.893.500,00	99,13	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	10 Jenis	274.462.800,00	97,45	249.322.500,00	90,84	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	152.905.000,00	100,00	152.350.850,00	99,64	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	23 Jenis	2.963.443.492,00	99,63	2.542.676.362,00	85,8	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar harian yang disediakan	2 jenis	33.750.000,00	100,00	32.422.800,00	96,07	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan	1 Jenis	294.111.500,00	100,00	205.729.700,00	69,95	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Snack dan Makanan yang disediakan	84921 Kotak	2.004.499.110,00	100,00	1.956.490.030,00	97,6	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	353 kali	1.569.680.122,00	100,00	1.499.111.494,00	95,5	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ tekhnis perkantoran	124 orang	5.039.489.930,00	100,00	4.840.944.394,00	96,06	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Jumlah tamu Pemerintah Kota Bontang yang di fasilitasi	50 orang	315.290.050,00	100,00	314.542.500,00	99,76	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	64 orang	6.695.507.000,00	100,00	6.358.534.500,00	94,97	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	13.794.882.681,00	99,48	12.544.222.385,00	90,93	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	6 Unit	1.194.020.000,00	100,00	1.096.300.000,00	91,82	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	7 Jenis	696.883.293,00	100,00	602.906.100,00	86,51	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang disewa	1 unit	371.230.000,00	99,81	370.510.000,00	99,81	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	1.478.579.149,00	97,02	1.094.618.569,00	74,03	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6 gedung	2.225.150.270,00	99,95	2.205.091.543,00	99,1	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	7 Unit	632.904.000,00	100,00	587.866.000,00	92,88	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan	155 Unit	1.009.948.500,00	99,64	917.052.000,00	90,8	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara	20 jenis	664.005.200,00	99,23	565.988.500,00	85,24	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlenkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6 Jenis	103.080.000,00	99,59	99.795.850,00	96,81	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3 Jenis	185.000.000,00	100,00	159.668.300,00	86,31	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	17 jenis	1.257.400.000,00	99,50	1.094.399.971,00	87,04	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disewa	9 Jenis	130.500.000,00	96,17	118.550.000,00	90,84	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Jumlah Sarana Umum yang dipelihara	6 Unit	1.177.138.000,00	99,66	1.126.976.009,00	95,74	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	17 jenis	2.428.400.195,00	99,97	2.279.261.050,00	93,86	Sekretariat Daerah
	Dukungan Operasional Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta	1 mess	240.644.074,00	99,97	225.238.493,00	93,6	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	100 %	230.000.000,00	100,00	191.400.000,00	83,22	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	243 stel	230.000.000,00	100,00	191.400.000,00	83,22	Sekretariat Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	76.139.316,00	100,00	73.386.996,00	96,39	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	10 orang	70.639.316,00	100,00	67.886.996,00	96,1	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Jabatan	Laporan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota	1 dokumen	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00	100	Sekretariat Daerah
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100 %	772.745.120,00	98,46	741.513.200,00	95,96	Sekretariat Daerah
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah jenis media pesan layanan masyarakat	11 jenis	605.056.120,00	98,03	583.692.500,00	96,47	Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Jumlah laporan hibah dan bansos	17 Dokumen	12.245.000,00	100,00	12.089.000,00	98,73	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	40 PD	136.600.000,00	100,00	126.976.000,00	92,95	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen SPM Kota Bontang	1 Dokumen	18.844.000,00	100,00	18.755.700,00	99,53	Sekretariat Daerah
6	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kerjasama pembangunan	100 %	24.465.000,00	100,00	24.140.000,00	98,67	Sekretariat Daerah
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Pemkot/Swasta/Kementerian/Lemba ga dan Pihak ketiga	10 MoU/KPS	24.465.000,00	100,00	24.140.000,00	98,67	Sekretariat Daerah
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terlayannya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/daerah/tokoh masyarakat	100 %	1.066.261.886,00	100,00	1.043.068.549,00	97,82	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan,Anggota Organisasi Sosial	1 Kali	9.750.000,00	100,00	9.652.500,00	99,00	Sekretariat Daerah
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan unsur masyarakat yang dapat dihadiri	243 kali	985.139.386,00	100,00	962.103.049,00	97,66	Sekretariat Daerah
	Rapat Protokol se-Kaltim	Pertemuan Koordinasi Protokol se Kaltim	10 Kab/Kota	71.372.500,00	100,00	71.313.000,00	99,92	Sekretariat Daerah
8	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Mingkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	100 %	127.750.000,00	100,00	127.607.180,00	99,89	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Jumlah keikutsertaan dalam rapat kerja APEKSI	4 kali	127.750.000,00	100,00	127.607.180,00	99,89	Sekretariat Daerah
9	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundan-undangan	100 %	904.919.000,00	100,00	850.385.400,00	93,97	Sekretariat Daerah
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk Hukum yang dibukukan	64 buku	42.850.000,00	100,00	42.465.500,00	99,1	Sekretariat Daerah
	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang bersifat Pengatur	27 7 Raperda dan 20 Raperwali	151.129.000,00	100,00	150.715.400,00	99,73	Sekretariat Daerah
	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	4 perkara	679.475.000,00	100,00	629.764.500,00	92,68	Sekretariat Daerah
	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperda dan Raperkada Restrukturisasi Perangkat Daerah	4 Raperwali	10.500.000,00	100,00	6.500.000,00	61,9	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah pedoman ketatalaksanaan	1 dokumen	20.965.000,00	100,00	20.940.000,00	99,88	Sekretariat Daerah
10	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD	100 %	151.687.000,00	100,00	148.372.100,00	97,81	Sekretariat Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD 2019	1 dokumen dan 175 orang	76.687.000,00	100,00	76.367.000,00	99,58	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Program Pembangunan Daerah	Evaluasi Program Pembangunan Daerah	1 tahun	75.000.000,00	100,00	72.005.100,00	96,01	Sekretariat Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Persentase keikutsertaan ASN dalam kegiatan HUT Korpri	100 %	4.000.000,00	100,00	3.960.000,00	99,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan HUT KORPRI	1 kali	4.000.000,00	100,00	3.960.000,00	99,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100 %	26.278.465.134,00	89,66	22.788.266.110,00	86,72	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	8 masjid	9.975.000,00	100,00	9.718.500,00	97,43	Sekretariat Daerah
	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran	52 orang	384.254.304,00	81,45	282.578.600,00	73,54	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	144 jamaah haji	71.060.153,00	100,00	0	0	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh difasilitasi	227 orang	3.053.059.600,00	100,00	3.008.550.902,00	98,54	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ustad/ustadzah yang difasilitasi	980 orang	11.771.977.500,00	99,99	11.664.206.600,00	99,08	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumsisi	641 64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	2.719.028.750,00	95,76	2.487.024.610,00	91,47	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338 orang	4.212.612.500,00	99,99	3.999.815.570,00	94,95	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1 kegiatan	438.887.627,00	97,01	391.914.000,00	89,30	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	230.042.500,00	98,91	212.813.000,00	92,51	Sekretariat Daerah
	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2 kegiatan	123.352.500,00	0,00	0	0	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7 kegiatan	381.821.250,00	98,09	369.716.000,00	96,83	Sekretariat Daerah
	Intensitas Komunikasi Dan Ketertiban Umat Beragama	Fasilitasi kegiatan MUI	12 Bulan	197.143.450,00	75,60	92.416.548,00	46,88	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah peserta MTQ tingkat kota dan provinsi	345 orang	185.250.000,00	100,00	106.201.000,00	57,33	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah peserta MTQ tingkat provinsi	10 Kafilah	2.500.000.000,00	6,66	163.310.780,00	6,53	Sekretariat Daerah
13	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100 %	233.158.450,00	100,00	221.679.320,00	95,08	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Dokumen profil rupa bumi Kota Bontang	1 dokumen	15.548.330,00	100,00	14.813.300,00	95,27	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1 dokumen	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdesahan dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	742.500,00	100,00	735.000,00	98,99	Sekretariat Daerah
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	8.860.000,00	100,00	8.812.000,00	99,46	Sekretariat Daerah
	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3 Kecamatan	15.065.000,00	100,00	15.010.850,00	99,64	Sekretariat Daerah
	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Laporan pelaksanaan penentuan batas wilayah kota bontang dengan kab,kutai timur	1 Dokumen	107.738.950,00	100,00	101.604.500,00	94,31	Sekretariat Daerah
	Sosialisasi dan Bimbingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Peserta	31 Perangkat daerah	47.703.670,00	100,00	43.203.670,00	90,57	Sekretariat Daerah
14	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM	100 %	311.843.437,00	100,00	308.390.800,00	98,89	Sekretariat Daerah
	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	12 kali	73.378.437,00	100,00	72.763.675,00	99,16	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	4 kali	238.465.000,00	100,00	235.627.125,00	98,81	Sekretariat Daerah
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat	100 %	3.144.813.050,00	100,00	3.014.078.927,00	95,84	Sekretariat Daerah
	Dukungan Kelembagaan Amil Zakat	Jumlah tenaga administrasi dan komisioner	6 orang	215.594.400,00	100,00	215.529.600,00	99,97	Sekretariat Daerah
	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah proposal hibah/bansos yang diverifikasi	27 dokumen	6.362.250,00	100,00	6.201.850,00	97,48	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah asrama mahasiswa yang difasilitasi	11 asrama	1.246.525.000,00	100,00	1.209.923.577,00	97,06	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	400 orang	1.511.200.000,00	100,00	1.432.065.900,00	94,76	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kali	165.131.400,00	100,00	150.358.000,00	91,05	Sekretariat Daerah

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	PROGRAM Penguatan Wawasan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	100 %	568.351.250,00	100,00	535.601.250,00	94,24	Sekretariat Daerah
	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	Pelaksanaan HUT Kota Bontang	1 kegiatan	272.550.000,00	100,00	253.183.000,00	92,89	Sekretariat Daerah
	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim dan Hari Otda	2 Kegiatan	37.011.250,00	100,00	37.011.250,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 75 kemerdekaan republik Indonesia	1 kegiatan	258.790.000,00	100,00	245.407.000,00	94,83	Sekretariat Daerah
17	PROGRAM Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitas pengadaan barang dan jasa	100 %	1.675.659.646,00	100,00	1.593.456.750,00	95,09	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Jumlah bimtek pengadaan barang dan jasa	3 kali	358.777.046,00	100,00	352.614.546,00	98,28	Sekretariat Daerah
	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Jumlah monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa	2 kali	4.950.000,00	100,00	4.950.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Dukungan Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	fasilitasi unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	12 bulan	852.002.600,00	100,00	786.379.104,00	92,30	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan e-Procurement	,,,	,,,	459.930.000,00	100,00	449.513.100,00	97,74	Sekretariat Daerah
18	PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	17.269.646.432,00	100,00	15.961.693.677,00	92,43	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	6120000 Lembar	17.640.000,00	100,00	9.000.000,00	51,02	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air, Telepon dan internet	12 Bulan	1.314.600.000,00	100,00	1.149.144.911,00	87,41	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	46 unit	94.100.000,00	100,00	43.112.720,00	45,82	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	32 orang	2.555.113.600,00	100,00	2.216.146.735,00	86,73	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	80 Jenis	360.536.013,00	100,00	354.540.475,00	98,34	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan	22 jenis	1.459.333.419,00	100,00	1.255.202.440,00	86,01	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Jenis	4.084.910.500,00	100,00	3.926.798.944,00	96,13	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Jenis	2.835.000,00	100,00	2.806.650,00	99,00	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	4 Media	139.410.000,00	100,00	132.910.000,00	95,34	Sekretariat DPRD

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	25 jenis	535.400.500,00	100,00	509.053.490,00	95,08	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Jenis	549.620.000,00	100,00	228.492.500,00	41,57	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD	693 564 Kali Dalam Daerah, 129 Kali Luar Daerah	3.015.165.000,00	100,00	3.010.179.656,00	99,83	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	104 orang	3.140.982.400,00	100,00	3.124.305.156,00	99,47	Sekretariat DPRD
19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	3.145.949.775,00	100,00	2.838.576.034,00	90,23	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	279.640.000,00	100,00	240.497.500,00	86,00	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	46 Unit	667.860.000,00	100,00	639.750.400,00	95,79	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis	544.547.175,00	100,00	356.576.960,00	65,48	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah fasilitas rumah jabatan yang dibangun	4 Jenis	321.040.000,00	100,00	307.717.040,00	95,85	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 jenis	1.129.955.000,00	100,00	1.095.113.414,00	96,92	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 jenis	202.907.600,00	100,00	198.920.720,00	98,04	Sekretariat DPRD
20	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	1.055.680.406,00	100,00	1.025.852.250,00	97,17	Sekretariat DPRD
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Putih Hitam PNS dan Non PNS	9 Paket	1.055.680.406,00	100,00	1.025.852.250,00	97,17	Sekretariat DPRD
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	801.030.000,00	100,00	636.020.000,00	79,40	Sekretariat DPRD
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	99 orang	717.530.000,00	100,00	576.120.000,00	80,29	Sekretariat DPRD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi	20 kali	83.500.000,00	100,00	59.900.000,00	71,74	Sekretariat DPRD
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		100 %	100.300.000,00	15,00	0	0	Sekretariat DPRD
	Pengukuran Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Laporan hasil pengukuran kinerja	1 Dokumen	100.300.000,00	15,00	0	0	Sekretariat DPRD

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah	100 %	4.232.841.900,00	100,00	4.085.812.350,00	96,53	Sekretariat DPRD
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Advertorial	22 media	4.232.841.900,00	100,00	4.085.812.350,00	96,53	Sekretariat DPRD
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	100 %	18.518.015.000,00	100,00	17.062.846.280,00	92,14	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan peraturan daerah	13 Raperda	659.600.000,00	100,00	461.811.000,00	70,01	Sekretariat DPRD
	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Rapat dengar pendapat dan koordinasi	140 rapat	264.540.000,00	100,00	154.365.000,00	58,35	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat alat kelengkapan dewan	120 rapat	720.490.000,00	100,00	645.152.500,00	89,54	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat paripurna	25 rapat	252.040.000,00	100,00	250.890.000,00	99,54	Sekretariat DPRD
	Kegiatan Reses	Jumlah Reses	2 kali	1.123.675.000,00	100,00	770.415.850,00	68,56	Sekretariat DPRD
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah (sidak)	51 kali	76.950.000,00	100,00	60.675.000,00	78,85	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal DPRD	4 Diklat	287.980.000,00	100,00	267.980.000,00	93,06	Sekretariat DPRD
	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	6 Raperda	609.417.500,00	100,00	608.105.000,00	99,78	Sekretariat DPRD
	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	2 2 dokumen dan 1 Kajian Akademik	525.000,00	100,00	0	0	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	25 Orang	75.300.000,00	100,00	18.865.000,00	25,05	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Jumlah pakaian Anggota DPRD yang disediakan	155 Stel	330.790.000,00	100,00	232.625.000,00	70,32	Sekretariat DPRD
	Pelantikan Anggota DPRD	Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	71.682.500,00	100,00	63.870.000,00	89,10	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Fraksi	Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi	60 Laporan	403.020.000,00	100,00	400.395.000,00	99,35	Sekretariat DPRD
	Penyusunan Produk DPRD	Jumlah Jenis produk DPRD	11 Jenis	46.850.000,00	100,00	19.500.000,00	41,62	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	797 529 kali Dalam Daerah, 268 kali Luar Daerah	13.490.905.000,00	100,00	13.037.371.930,00	96,64	Sekretariat DPRD

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Dokumen Rekomendasi Perda P2APBD	1 Dokumen	25.200.000,00	100,00	12.775.000,00	50,69	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen risalah pembahasan RAPBD (Perubahan dan Murni)	2 dokumen	79.050.000,00	100,00	58.050.000,00	73,43	Sekretariat DPRD
24 Program; 126 Kegiatan				125.814.974.642,00	97,69	115.522.638.709,00	91,82	

A.4.35 URUSAN KEWILAYAHAN

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	13.856.371.844,00	100,00	13.620.524.841,00	98,3	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang diadakan	850 lembar	5.100.000,00	100,00	5.100.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan internet	12 Bulan	226.800.000,00	100,00	216.808.322,00	95,59	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perizinan	16 14 surat mobi dan 12 surat motor	6.700.000,00	100,00	4.151.730,00	61,97	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	35 jenis	60.200.000,00	100,00	59.440.700,00	98,74	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	9 9 Jenis Cetak, 100.000 lembar fotocopy	80.928.850,00	100,00	79.996.500,00	98,85	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang diadakan	5 jenis	7.600.000,00	100,00	7.600.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Pemberitaan Advertorial	2 Media	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Sembako dan Alat Kebersihan	10 10 Jenis Sembako, 14 Alat kebersihan	27.242.000,00	100,00	27.242.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Snack dan Makan	2035 kotak	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	39 22 DD, 17 LD	245.802.800,00	100,00	241.794.400,00	98,37	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Aparatur Non ASN yang Digaji	86 Non ASN	4.273.802.800,00	100,00	4.225.577.172,00	98,87	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42 RT	1.130.162.232,00	100,00	1.082.592.946,00	95,79	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang dilayani	20 RT	1.230.098.800,00	100,00	1.221.408.885,00	99,29	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang dilayani	28 RT	1.583.267.958,00	100,00	1.555.734.302,00	98,26	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dilayani	18 RT	1.549.521.190,00	100,00	1.488.418.957,00	96,06	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52 RT	2.100.041.664,00	100,00	2.093.279.069,00	99,68	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang dilayani	45 RT	1.313.303.550,00	99,98	1.295.579.858,00	98,65	Kecamatan Bontang Utara
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 persen	3.077.847.800,00	99,96	3.024.906.900,00	98,28	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	185.600.000,00	100,00	185.600.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan yang diadakan	17 jenis	902.378.500,00	100,00	895.326.500,00	99,22	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Meubelair	jumlah jenis meubelair yang diadakan	6 jenis	191.491.000,00	100,00	189.437.000,00	98,93	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Komputer	Jenis Komputer dan Alat komputer yang diadakan	6 jenis	278.723.900,00	100,00	266.438.000,00	95,59	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	3 unit	1.323.700.000,00	100,00	1.293.491.000,00	97,72	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang dipelihara	15 3 unit mobil, 12 unit Motor	175.954.400,00	100,00	174.754.400,00	99,32	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan perlengkapan yang dipelihara	3 jenis	20.000.000,00	94,48	19.860.000,00	99,3	Kecamatan Bontang Utara
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur	100 %	181.280.000,00	100,00	181.280.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	206 stel	181.280.000,00	100,00	181.280.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100 %	133.935.000,00	100,00	133.796.416,00	99,9	Kecamatan Bontang Utara
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kali Pelatihan	13 kali	133.935.000,00	100,00	133.796.416,00	99,9	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100 %	4.680.000,00	88,39	4.680.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	7 buku	980.000,00	100,00	980.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	375.000,00	91,61	375.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	1.000.000,00	48,83	1.000.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Renja SKPD	jumlah laporan yang disusun	1 laporan	625.000,00	100,00	625.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	jumlah laporan yang memenuhi standar	1 buku	950.000,00	100,00	950.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Review Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	7 Buku	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 persen	935.000.000,00	100,00	926.600.000,00	99,1	Kecamatan Bontang Utara
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kerjasama media	6 media	935.000.000,00	100,00	926.600.000,00	99,1	Kecamatan Bontang Utara
7	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan kecamatan kelurahan	85 persen	308.736.000,00	98,90	308.530.000,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur masyarakat yang mewakili	7 unsur	35.446.000,00	100,00	35.446.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi	6 kelurahan	10.860.000,00	100,00	10.860.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Patroli yang dilakukan	12 kali	173.480.000,00	100,00	173.384.000,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	8.705.000,00	100,00	8.705.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah layanan yang memiliki SOP	28 layanan	13.115.000,00	100,00	13.005.000,00	99,16	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 Unsur	12.672.500,00	73,43	12.672.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	10.312.500,00	100,00	10.312.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	9.062.500,00	100,00	9.062.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	3 unsur	9.700.000,00	100,00	9.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	12.725.000,00	100,00	12.725.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	jumlah unsur masyarakat yang hadir	5 unsur	12.657.500,00	100,00	12.657.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
8	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	80 persen	9.094.109.775,00	99,00	8.929.533.508,00	98,19	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	1 kali kegiatan	3.150.000,00	100,00	3.150.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	lomba dan sosialisasi	2 kegiatan	12.987.500,00	100,00	12.987.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba PKK yang dilaksanakan	5 kegiatan	46.750.000,00	100,00	46.350.000,00	99,14	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah kelurahan yang dilakukan pendampingan	6 Kelurahan	3.649.492.000,00	99,13	3.567.499.200,00	97,75	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	817.536.150,00	100,00	810.034.600,00	99,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kegiatan	19.863.000,00	92,45	18.363.000,00	92,45	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	625.567.500,00	100,00	621.211.300,00	99,3	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kegiatan	432.625.000,00	100,00	432.615.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	45.536.875,00	98,82	44.980.000,00	98,78	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	549.664.000,00	97,68	539.897.100,00	98,22	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	24.405.000,00	100,00	24.405.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	74.640.000,00	100,00	74.266.600,00	99,5	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	18.477.750,00	87,74	18.477.750,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	174.680.000,00	100,00	174.673.400,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	4 lembaga	114.587.500,00	95,22	113.876.000,00	99,38	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Api-Api	Jumlah kader diberdayakan	137 kader	306.200.000,00	99,35	304.200.000,00	99,35	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kader yang diberdayakan	92 orang	254.600.000,00	99,21	246.840.000,00	96,95	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah kader yang diberdayakan	64 orang	144.200.000,00	98,61	142.200.000,00	98,61	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Guntung	Jumlah kader yang diberdayakan	64 orang	145.400.000,00	100,00	143.400.000,00	98,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Loktuan	Jumlah kader yang diberdayakan	133 orang	290.600.000,00	99,31	288.600.000,00	99,31	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kader yang diberdayakan	106 orang	230.000.000,00	99,13	228.000.000,00	99,13	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	186.580.000,00	100,00	185.170.000,00	99,24	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	20 RT	66.040.000,00	100,00	65.590.000,00	99,32	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Api-Api (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	212.610.000,00	100,00	211.631.930,00	99,54	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	45 RT	151.656.000,00	87,00	130.623.223,00	86,13	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	238.035.000,00	100,00	237.770.300,00	99,89	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	119.287.500,00	100,00	118.053.350,00	98,97	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Bontang Baru (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	20.156.500,00	87,04	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Bontang Kuala (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	19.977.055,00	86,27	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Api-Api (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.156.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Gunung Elai (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	71,93	15.072.700,00	65,09	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Loktuan (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.156.500,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Guntung (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.149.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
9	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	75 persen	1.125.791.500,00	100,00	912.604.280,00	81,06	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	163.420.000,00	100,00	160.793.800,00	98,39	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Kuala (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	20 RT	283.960.000,00	100,00	276.606.780,00	97,41	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Api-Api (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	137.390.000,00	100,00	135.301.700,00	98,48	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Elai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	198.344.000,00	100,00	0	0	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	111.965.000,00	100,00	111.915.300,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	230.712.500,00	100,00	227.986.700,00	98,82	Kecamatan Bontang Utara
10	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meingkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100 %	12.676.737.466,00	99,49	12.289.274.595,00	96,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.776.850,00	99,9	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.813.300,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.795.000,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.634.000,00	99,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.518.000,00	96,3	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.161.000,00	98,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT Yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.825.800,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT Yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.041.727,00	98,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.620.804,00	99,65	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.500.000,00	96,28	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.630.000,00	99,67	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.838.600,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.825.000,00	98,38	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.750.600,00	99,86	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.750.000,00	98,27	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.659.300,00	99,71	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.695.000,00	98,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.695.600,00	99,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.563.320,00	96,38	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.329.300,00	99,19	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.740.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.853.000,00	98,43	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.322.000,00	99,18	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.723.100,00	99,81	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.555.200,00	99,55	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.705.214,00	99,79	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.647.600,00	99,69	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.173.100,00	98,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	57.691.000,00	91,81	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	76,37	61.292.000,00	97,54	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.190.000,00	98,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.788.000,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.748.800,00	99,85	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.723.322,00	96,63	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.564.000,00	99,56	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.914.072,00	98,53	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	58.769.000,00	93,52	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.504.200,00	99,47	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.506.800,00	99,47	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.792.290,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	1 Rt	62.840.000,00	100,00	62.734.500,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.170.000,00	95,75	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.462.200,00	99,4	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.534.500,00	99,51	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.906.700,00	98,51	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.514.529,00	99,48	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.522.700,00	99,5	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.591.700,00	99,6	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.511.700,00	99,48	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.569.700,00	99,57	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.544.700,00	99,53	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.624.700,00	99,66	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.517.200,00	99,49	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.716.000,00	99,8	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.548.078,00	99,54	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.227.700,00	97,43	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.576.600,00	99,58	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.036.200,00	98,72	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.167.813,00	98,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.727.021,00	99,82	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.439.383,00	99,36	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.535.600,00	99,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	33.450.000,00	100,00	33.345.600,00	99,69	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	162.929.300,00	100,00	162.253.850,00	99,59	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	162.930.000,00	100,00	162.610.653,00	99,8	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	162.930.000,00	100,00	116.696.072,00	71,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.930.000,00	100,00	62.354.525,00	99,09	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	127.930.000,00	100,00	127.676.477,00	99,8	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	1.320.000,00	100,00	1.320.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.860.000,00	100,00	62.506.730,00	99,44	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.660.000,00	100,00	56.536.280,00	99,78	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	30.220.000,00	100,00	29.703.100,00	98,29	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	71.200.000,00	100,00	71.094.575,00	99,85	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	62.540.000,00	100,00	62.297.400,00	99,61	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang deberdayakan	1 RT	85.520.000,00	100,00	85.293.140,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1.645.000,00	100,00	1.645.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1.645.000,00	100,00	1.645.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	124.270.000,00	100,00	123.932.180,00	99,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1.645.000,00	100,00	1.645.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1.825.000,00	100,00	1.825.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	80.430.000,00	100,00	80.172.600,00	99,68	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	162.930.000,00	100,00	162.540.945,00	99,76	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	90.450.000,00	100,00	90.156.673,00	99,68	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	144.340.000,00	100,00	143.905.925,00	99,7	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	83.530.000,00	100,00	83.405.720,00	99,85	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	27.380.000,00	100,00	27.264.950,00	99,58	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	124.390.000,00	100,00	124.242.010,00	99,88	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1.610.000,00	100,00	1.610.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	133.000.000,00	100,00	132.730.948,00	99,8	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang Diberdayakan	1 RT	1.610.000,00	100,00	1.610.000,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	53.313.166,00	100,00	52.773.600,00	98,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	44.120.000,00	100,00	42.994.200,00	97,45	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	66.100.000,00	100,00	65.834.400,00	99,6	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	80.620.000,00	100,00	80.054.500,00	99,3	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	50.590.000,00	100,00	49.602.700,00	98,05	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	51.120.000,00	100,00	41.435.527,00	81,06	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	39.410.000,00	100,00	35.731.976,00	90,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	50.745.000,00	100,00	47.482.735,00	93,57	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	51.410.000,00	100,00	48.375.336,00	94,1	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	49.120.000,00	100,00	48.361.898,00	98,46	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	54.100.000,00	100,00	52.418.400,00	96,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	54.120.000,00	100,00	53.123.988,00	98,16	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	54.410.000,00	100,00	54.283.839,00	99,77	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	51.120.000,00	100,00	50.731.216,00	99,24	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	49.410.000,00	100,00	48.180.958,00	97,51	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	49.620.000,00	100,00	49.489.434,00	99,74	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	52.290.000,00	100,00	47.364.085,00	90,58	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	49.300.000,00	100,00	47.857.982,00	97,08	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.216.100,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diperdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.191.470,00	99,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.183.300,00	99,9	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.203.350,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.177.210,00	99,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Loktuan	JUmlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.199.595,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.204.790,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.197.200,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.188.550,00	99,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.201.700,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.189.450,00	99,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.237.570,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.207.560,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.201.900,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.190.640,00	99,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.202.250,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.238.490,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.234.040,00	99,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.233.690,00	99,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.222.430,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	55.977.350,00	99,53	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.228.430,00	99,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.236.900,00	99,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.205.100,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.823.160,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.176.400,00	99,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.237.820,00	100	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.196.430,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.161.400,00	99,86	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	55.643.900,00	98,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.178.360,00	99,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.203.590,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	43,98	55.674.170,00	98,99	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.200.940,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.217.950,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.206.500,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	54.882.500,00	97,59	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.216.180,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.194.650,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.194.230,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	55.626.280,00	98,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	56.240.000,00	100,00	54.335.840,00	96,61	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.162.760,00	99,86	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	56.240.000,00	100,00	56.220.280,00	99,96	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.205.950,00	99,94	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	56.240.000,00	100,00	55.764.100,00	99,15	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	56.240.000,00	100,00	56.040.640,00	99,65	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 Rt	56.240.000,00	100,00	55.612.200,00	98,88	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 rt	56.240.000,00	100,00	56.193.400,00	99,92	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	54.822.440,00	97,48	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	56.240.000,00	100,00	56.056.340,00	99,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.836.450,00	99,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.661.015,00	98,12	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.626.274,00	99,66	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.255.073,00	99,07	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	46.162.331,00	73,46	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.323.400,00	97,59	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.207.000,00	98,99	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	99,97	62.650.000,00	99,7	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	57.783.788,00	91,95	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Elai	jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.875.000,00	96,82	60.121.000,00	95,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai	jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	49.102.700,00	78,14	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.508.345,00	99,47	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT Yang Diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.608.504,00	99,63	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.887.800,00	96,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.707.637,00	99,79	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	74,00	45.201.800,00	71,93	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	46.446.200,00	73,91	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	60.250.900,00	95,88	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.430.187,00	99,35	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.632.690,00	99,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.910.000,00	100,00	62.180.656,00	98,84	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	49.030.395,00	78,02	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	32.273.033,00	51,36	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.510.300,00	99,48	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	40.852.521,00	65,01	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.089.000,00	98,8	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.732.800,00	99,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	56.802.392,00	90,39	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	45.089.392,00	71,75	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.875.000,00	100,00	62.774.200,00	99,84	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	57.934.021,00	92,19	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.168.548,00	97,34	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	59.463.600,00	94,63	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	42.446.871,00	67,55	Kecamatan Bontang Utara

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	61.643.800,00	98,1	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	49.751.563,00	79,17	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.242.682,00	99,05	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.092.300,00	98,81	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.705.587,00	99,79	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.113.200,00	98,84	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.411.853,00	99,32	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	50.969.562,00	81,11	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	53.589.512,00	85,28	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.421.756,00	99,33	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	62.456.332,00	99,39	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	62.840.000,00	100,00	58.985.900,00	93,87	Kecamatan Bontang Utara
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 %	10.141.000.718,00	100,00	9.786.713.073,00	96,51	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	700 lbr	5.700.000,00	100,00	5.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan air, listrik, telepon dan internet	12 Bulan	220.800.000,00	100,00	108.219.134,00	49,01	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	14 unit	8.600.000,00	100,00	2.580.610,00	30,01	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	11 org	270.575.660,00	100,00	256.660.220,00	94,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	46 jenis	49.993.750,00	100,00	49.928.750,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3 jenis	57.458.750,00	100,00	56.791.250,00	98,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	6 Jenis	5.312.500,00	100,00	5.260.000,00	99,01	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan	21 Jenis	37.429.700,00	100,00	37.026.100,00	98,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Disesuaikan	6 Kelurahan	45.917.650,00	100,00	45.432.500,00	98,94	Kecamatan Bontang Selatan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	47 kali	262.705.536,00	100,00	261.648.395,00	99,6	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Non PNS	78 orang	3.134.893.200,00	100,00	3.078.038.043,00	98,19	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah RT	24 RT	857.519.025,00	100,00	830.343.855,00	96,83	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	62 RT	1.291.956.660,00	100,00	1.264.056.746,00	97,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	19 RT	765.175.900,00	100,00	746.773.047,00	97,59	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Jumlah RT	25 RT	1.208.359.250,00	100,00	1.163.263.752,00	96,27	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	38 RT	1.252.459.568,00	100,00	1.234.553.444,00	98,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	33 RT	666.143.569,00	100,00	640.437.227,00	96,14	Kecamatan Bontang Selatan
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	100 %	2.051.625.963,00	99,88	1.946.680.060,00	94,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	638.952.000,00	100,00	638.280.200,00	99,89	Kecamatan Bontang Selatan
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 unit	251.187.813,00	100,00	243.300.000,00	96,86	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	2 jenis	310.000.000,00	100,00	309.320.000,00	99,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Pengadaan Komputer	Jumlah jenis komputer dan printer	2 jenis	91.895.000,00	100,00	90.328.000,00	98,29	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gdg	396.747.500,00	100,00	386.490.000,00	97,41	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	14 unit	122.986.150,00	100,00	119.906.400,00	97,5	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20 kali	30.552.500,00	100,00	30.454.000,00	99,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	32 kali	22.305.000,00	100,00	22.259.960,00	99,8	Kecamatan Bontang Selatan
	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Kantor dan Sarana Publik Lainnya	Jumlah lahan yang diadakan	2 lokasi	187.000.000,00	98,56	106.341.500,00	56,87	Kecamatan Bontang Selatan
13	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85 %	309.097.800,00	100,00	295.172.000,00	95,49	Kecamatan Bontang Selatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	196 stel	309.097.800,00	100,00	295.172.000,00	95,49	Kecamatan Bontang Selatan
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 %	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	34 org	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
15	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	67 (B)	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Renja SKPD	Renja SKPD	1 dok	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	LKIP SKPD	1 dok	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
16	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Penyampaian informasi Pembangunan	80 %	791.700.000,00	100,00	779.050.000,00	98,4	Kecamatan Bontang Selatan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan	12 kali	791.700.000,00	100,00	779.050.000,00	98,4	Kecamatan Bontang Selatan
17	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	80 %	140.472.500,00	100,00	138.404.000,00	98,53	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan	100 org,	23.350.000,00	100,00	23.350.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	6 kel	4.800.000,00	100,00	4.725.000,00	98,44	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas	60 org,	13.675.000,00	100,00	13.675.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen administrasi pertanaha	4 dok	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan monografi Kecamatan	2 dok	600.000,00	100,00	600.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah laporan pelaksanaan pengurusan e-KTP	4 Dokumen	5.475.000,00	100,00	5.475.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan patroli wilayah	6 kali	29.400.000,00	100,00	27.950.000,00	95,07	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.002.500,00	100,00	10.002.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	12.475.000,00	100,00	12.324.000,00	98,79	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00	100,00	9.607.500,00	96,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	9.945.000,00	100,00	9.945.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
18	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat	80 %	8.929.131.845,00	99,94	8.604.506.016,00	96,36	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM	50 org	5.725.000,00	0,00	0	0	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70 org,	17.012.500,00	100,00	17.012.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK	6 kel	156.022.000,00	100,00	143.587.000,00	92,03	Kecamatan Bontang Selatan
	Dukungan Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	60 org,	25.384.000,00	100,00	25.382.000,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan	50 org	59.925.000,00	100,00	59.925.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	201 RT	3.549.922.500,00	100,00	3.538.570.900,00	99,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	115.967.500,00	100,00	28.247.852,00	24,36	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	113.810.000,00	100,00	112.571.200,00	98,91	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	120.687.500,00	100,00	118.952.600,00	98,56	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	30.400.000,00	100,00	29.146.944,00	95,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	17.150.000,00	100,00	15.450.000,00	90,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	15.410.000,00	100,00	10.450.000,00	67,81	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	400.515.000,00	100,00	356.271.600,00	88,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	50.437.500,00	100,00	48.000.000,00	95,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	139.649.000,00	100,00	138.721.000,00	99,34	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	209.195.000,00	100,00	204.733.000,00	97,87	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	191.917.500,00	100,00	185.841.500,00	96,83	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	603.810.095,00	100,00	580.047.345,00	96,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	85 orang	258.682.500,00	100,00	231.082.200,00	89,33	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	134 orang	305.800.000,00	100,00	301.400.000,00	98,56	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	70 orang	171.200.000,00	100,00	171.200.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Satimpo	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	52 orang	117.200.000,00	100,00	115.200.000,00	98,29	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	92 orang	257.600.000,00	100,00	255.600.000,00	99,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	75 orang	208.400.000,00	100,00	206.400.000,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	38 RT	350.000.000,00	100,00	347.900.565,00	99,4	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	214.820.000,00	100,00	213.430.500,00	99,35	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	24 RT	350.000.000,00	100,00	328.221.425,00	93,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	19 RT	284.900.250,00	100,00	279.635.550,00	98,15	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	25 RT	275.000.000,00	100,00	243.877.400,00	88,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	33 RT	173.650.000,00	100,00	165.672.750,00	95,41	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Tanjung Laut (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.156.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Berbas Pantai (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.156.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Berbas Tengah (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.156.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Bontang Lestari (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	23.031.500,00	99,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Satimpo (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	17.223.400,00	74,38	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Tanjung Laut Indah Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	22.250.785,00	96,09	Kecamatan Bontang Selatan
19	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan	75 %	454.079.750,00	99,62	449.740.259,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan monev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	4 dok	2.450.000,00	30,45	700.000,00	28,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	135.180.000,00	100,00	134.073.260,00	99,18	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	19 RT	65.099.750,00	100,00	64.953.100,00	99,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	25 RT	75.000.000,00	100,00	74.612.000,00	99,48	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan		176.350.000,00	100,00	175.401.899,00	99,46	Kecamatan Bontang Selatan
20	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100 %	15.528.712.663,00	100,00	14.649.676.782,00	94,34	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	37.355.000,00	100,00	37.005.000,00	99,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	13.725.000,00	100,00	13.545.000,00	98,69	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	60.355.000,00	100,00	59.969.000,00	99,36	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	99.225.000,00	100,00	96.485.000,00	97,24	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	82.901.000,00	100,00	82.315.000,00	99,29	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	77.825.000,00	100,00	77.060.400,00	99,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	106.225.000,00	100,00	104.625.000,00	98,49	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	109.855.000,00	100,00	108.477.500,00	98,75	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	66.155.000,00	100,00	60.762.800,00	91,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	105.725.000,00	100,00	104.735.000,00	99,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	136.530.000,00	100,00	135.270.000,00	99,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	44.225.000,00	100,00	43.850.000,00	99,15	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	134.225.000,00	100,00	133.460.400,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	46.225.000,00	100,00	46.050.000,00	99,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	127.913.000,00	100,00	126.405.000,00	98,82	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	68.400.000,00	100,00	66.235.000,00	96,83	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	13.725.000,00	100,00	11.785.000,00	85,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	55.855.000,00	100,00	54.852.500,00	98,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	63.955.000,00	100,00	63.630.500,00	99,49	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	87.825.000,00	100,00	84.385.000,00	96,08	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	13.155.000,00	100,00	13.155.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	126.341.000,00	100,00	125.355.000,00	99,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	60.355.000,00	100,00	59.855.000,00	99,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	29.225.000,00	100,00	29.225.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	72.770.000,00	100,00	70.141.500,00	96,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	50.512.250,00	82,71	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	42.993.500,00	70,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	86.770.000,00	100,00	86.133.000,00	99,27	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	139.770.000,00	100,00	139.484.400,00	99,8	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	68.770.000,00	100,00	68.321.800,00	99,35	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	139.770.000,00	100,00	138.561.500,00	99,14	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	37.896.900,00	62,05	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	98.770.000,00	100,00	98.231.100,00	99,45	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.070.000,00	100,00	1.070.000,00	1,72	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	116.770.000,00	100,00	116.275.500,00	99,58	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.770.000,00	100,00	61.449.000,00	97,9	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	70.770.000,00	100,00	70.240.500,00	99,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	99.770.000,00	100,00	98.596.550,00	98,82	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	120.770.000,00	100,00	119.399.500,00	98,87	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	10.180.200,00	16,67	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	75.770.000,00	100,00	75.598.600,00	99,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	60.913.300,00	99,74	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	95.770.000,00	100,00	95.392.000,00	99,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	58.143.500,00	95,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	97.200.000,00	100,00	96.209.850,00	98,98	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	83.770.000,00	100,00	59.735.750,00	71,31	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	17.111.600,00	27,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	33.052.500,00	54,12	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.700.000,00	100,00	76.276.200,00	99,45	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket'	126.770.000,00	100,00	104.016.800,00	82,05	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	114.270.000,00	100,00	113.630.000,00	99,44	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	114.770.000,00	100,00	106.871.300,00	93,12	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	103.770.000,00	100,00	102.466.100,00	98,74	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	82.770.000,00	100,00	61.069.500,00	73,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	68.770.000,00	100,00	64.619.500,00	93,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.770.000,00	100,00	76.015.200,00	99,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	68.770.000,00	100,00	67.768.800,00	98,54	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	129.770.000,00	100,00	128.908.700,00	99,34	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	6.182.000,00	10,1	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	92.770.000,00	100,00	91.655.000,00	98,8	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	84.770.000,00	100,00	84.311.150,00	99,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	70.770.000,00	100,00	63.072.050,00	89,12	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	104.770.000,00	100,00	103.992.900,00	99,26	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	127.770.000,00	100,00	126.714.750,00	99,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	88.770.000,00	100,00	88.327.800,00	99,5	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	137.770.000,00	100,00	119.095.600,00	86,45	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	85.770.000,00	100,00	85.108.100,00	99,23	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	95.770.000,00	100,00	94.428.100,00	98,6	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	27.115.000,00	44,31	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	84.770.000,00	100,00	83.887.900,00	98,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	41.061.900,00	67,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	69.770.000,00	100,00	68.755.200,00	98,55	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	44.060.500,00	71,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	82.770.000,00	100,00	82.125.700,00	99,22	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.770.000,00	100,00	1.790.000,00	2,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	44.344.000,00	72,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 53 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	99.770.000,00	100,00	97.548.000,00	97,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 54 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	63.570.000,00	100,00	63.023.100,00	99,14	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 55 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	71.770.000,00	100,00	71.571.500,00	99,72	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 56 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	42.244.100,00	69,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 57 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	24.807.200,00	40,53	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 58 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	61.070.000,00	100,00	22.723.500,00	37,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 59 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	61.200.000,00	100,00	48.890.600,00	79,89	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 60 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	86.770.000,00	100,00	86.279.300,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 61 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.577.600,00	97,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 62 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	114.770.000,00	100,00	114.700.000,00	99,94	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.171.000,00	99,1	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.292.800,00	99,3	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.340.500,00	99,37	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.364.285,00	99,41	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	61.377.609,00	97,84	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.482.000,00	99,6	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.204.000,00	99,15	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.268.100,00	99,26	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	62.735.000,00	100,00	62.613.800,00	99,81	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.527.130,00	99,67	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.269.121,00	99,26	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.020.000,00	98,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.704.157,00	99,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.644.000,00	99,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.500.351,00	99,63	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	61.390.000,00	97,86	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.501.172,00	99,63	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.412.421,00	99,49	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.444.000,00	99,54	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	97.655.000,00	100,00	97.654.700,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1.110.000,00	100,00	810.000,00	72,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	2.240.000,00	100,00	1.940.000,00	86,61	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	147.025.000,00	100,00	146.928.800,00	99,93	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1.940.000,00	100,00	1.940.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	810.000,00	100,00	810.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1.940.000,00	100,00	1.940.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	86.861.500,00	100,00	86.861.200,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	115.385.700,00	100,00	115.385.500,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	106.507.500,00	100,00	106.507.200,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1.940.000,00	100,00	1.940.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	810.000,00	100,00	810.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	110.584.200,00	100,00	110.584.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	114.659.000,00	100,00	114.058.700,00	99,48	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	151.081.500,00	100,00	146.703.694,00	97,1	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	37.296.578,00	100,00	37.296.378,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	89.728.000,00	100,00	89.637.800,00	99,9	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	162.812.420,00	100,00	162.602.986,00	99,87	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	58.255.000,00	100,00	58.254.800,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	123.899.506,00	100,00	123.089.306,00	99,35	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	74.315.000,00	100,00	74.314.800,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	810.000,00	100,00	810.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	97.909.635,00	100,00	79.622.278,00	81,32	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	88.465.000,00	100,00	88.419.800,00	99,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	145.312.124,00	100,00	145.311.924,00	100	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	62.385.000,00	100,00	62.249.000,00	99,78	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Prasarana dan sarana Lingkungan	1 Paket	62.385.000,00	100,00	61.567.587,00	98,69	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.535.000,00	98,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.116.400,00	99,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.288.303,00	99,84	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.977.742,00	99,35	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.363.000,00	99,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.867.000,00	99,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.522.000,00	98,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.473.400,00	98,54	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.242.400,00	98,17	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.225.246,00	99,74	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.314.578,00	99,89	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.327.000,00	99,91	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.094.258,00	99,53	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.002.000,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.364.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.352.940,00	99,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	60.041.969,00	96,24	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.060.801,00	99,48	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	60.574.700,00	97,1	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	67.355.000,00	100,00	66.873.000,00	99,28	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.115.000,00	99,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.970.000,00	99,33	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	59.964.000,00	96,12	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.377.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.271.000,00	99,82	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	60.197.400,00	96,49	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	60.044.500,00	96,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.373.000,00	99,98	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.831.676,00	99,11	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	61.331.000,00	98,31	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.385.000,00	100,00	62.376.000,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	27.305.000,00	100,00	15.135.000,00	55,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	68.735.000,00	100,00	67.987.500,00	98,91	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	162.735.000,00	100,00	162.145.300,00	99,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	65.135.000,00	100,00	64.495.000,00	99,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.122.300,00	99,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	52.175.000,00	100,00	51.675.000,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	89.735.000,00	100,00	88.915.000,00	99,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	113.635.000,00	100,00	112.785.000,00	99,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	92.735.000,00	100,00	91.665.000,00	98,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	57.135.000,00	100,00	54.815.000,00	95,94	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	82.735.000,00	100,00	81.465.000,00	98,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	125.735.000,00	100,00	125.068.920,00	99,47	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.735.000,00	100	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	81.735.000,00	100,00	79.928.000,00	97,79	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	112.735.000,00	100,00	111.630.000,00	99,02	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	123.735.000,00	100,00	122.550.000,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	88.735.000,00	100,00	87.870.000,00	99,03	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.135.000,00	100,00	61.965.000,00	99,73	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.135.000,00	100,00	27.381.000,00	44,07	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	112.735.000,00	100,00	111.135.000,00	98,58	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	144.735.000,00	100,00	143.230.000,00	98,96	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	119.735.000,00	100,00	118.835.000,00	99,25	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	120.735.000,00	100,00	120.045.000,00	99,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	154.735.000,00	100,00	153.320.000,00	99,09	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	101.735.000,00	100,00	100.465.000,00	98,75	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	53.855.000,00	85,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.581.000,00	99,75	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	86.735.000,00	100,00	86.275.000,00	99,47	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.570.000,00	99,74	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	110.735.000,00	100,00	109.375.000,00	98,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	107.735.000,00	100,00	107.535.000,00	99,81	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	136.735.000,00	100,00	136.490.000,00	99,82	Kecamatan Bontang Selatan

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	62.240.000,00	99,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	136.735.000,00	100,00	135.885.000,00	99,38	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	110.735.000,00	100,00	110.002.000,00	99,34	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	80.735.000,00	100,00	80.475.000,00	99,68	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	70.735.000,00	100,00	70.050.000,00	99,03	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.735.000,00	100,00	37.765.000,00	60,2	Kecamatan Bontang Selatan
21	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.375.337.348,00	100,00	9.059.893.613,00	96,64	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	803 lembar	4.590.000,00	100,00	4.590.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	136.440.000,00	100,00	132.655.581,00	97,23	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang memenuhi ketentuan Perijinan	20 unit	9.700.000,00	100,00	8.531.980,00	87,96	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	21 org	1.022.065.000,00	100,00	869.404.489,00	85,06	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	35 Jenis	57.488.420,00	100,00	57.199.200,00	99,5	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	29.649.291,00	100,00	29.235.350,00	98,6	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik	13 Jenis	41.286.736,00	100,00	41.131.530,00	99,62	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	98.785.860,00	100,00	97.455.200,00	98,65	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Surat Kabar	1095 eksemplar	4.105.000,00	100,00	4.032.000,00	98,22	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	23 Jenis	93.721.971,00	100,00	93.323.007,00	99,57	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak snack dan makan	1500 kotak Snack 886 kotak; Makan 65595 kotak	53.480.000,00	100,00	51.887.500,00	97,02	Kecamatan Bontang Barat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	51 kali	43.200.000,00	100,00	38.233.229,00	88,5	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	60 orang	2.501.400.000,00	100,00	2.483.302.420,00	99,28	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Dokumen Survey IKM Kecamatan	1 dokumen	1.059.700,00	100,00	850.000,00	80,21	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah RT yang dilayani	51 RT	1.742.571.460,00	100,00	1.703.583.645,00	97,76	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dilayani	12 RT	1.512.793.950,00	100,00	1.442.744.462,00	95,37	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah RT yang dilayani	30 RT	2.022.999.960,00	100,00	2.001.734.020,00	98,95	Kecamatan Bontang Barat
22	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	919.944.854,00	100,00	910.410.046,00	98,96	Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang diadakan	... unit	261.300.000,00	100,00	257.300.000,00	98,47	Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubeulair	3 Jenis	168.340.000,00	100,00	168.039.000,00	99,82	Kecamatan Bontang Barat
	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer, Printer dan Scanner yang diadakan	3 item	56.380.000,00	100,00	55.880.000,00	99,11	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	1 Kantor	282.736.654,00	100,00	282.145.435,00	99,79	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang ada di pemeliharaan rutin	13 Unit	119.043.200,00	100,00	118.853.800,00	99,84	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC dan Mesin Fotocopy dalam pemeliharaan rutin	15 unit	14.745.000,00	100,00	10.901.811,00	73,94	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 Unit	17.400.000,00	100,00	17.290.000,00	99,37	Kecamatan Bontang Barat
23	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100 %	9.485.000,00	100,00	9.485.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	1 Laporan	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	500.000,00	100,00	500.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	1 Laporan	750.000,00	100,00	750.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	350.000,00	100,00	350.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra	1 Dokumen	6.385.000,00	100,00	6.385.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
24	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	53.500.000,00	100,00	49.474.700,00	92,48	Kecamatan Bontang Barat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Informasi Pembangunan	1 Paket	53.500.000,00	100,00	49.474.700,00	92,48	Kecamatan Bontang Barat
25	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %	206.636.156,00	100,00	105.521.125,00	51,07	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang hadir	100 orang	24.462.500,00	100,00	24.462.500,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Kelurahan	Lomba Kelurahan	3 Kelurahan	10.742.500,00	100,00	10.427.500,00	97,07	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah dan pengamanan pemilu	3 Kegiatan	29.794.000,00	100,00	29.793.500,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Dokumen profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	2 Dokumen	800.000,00	100,00	800.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	1 Kegiatan	106.742.500,00	100,00	6.742.500,00	6,32	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	13 unsur	9.955.000,00	100,00	9.955.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	75 orang	14.161.656,00	100,00	13.756.125,00	97,14	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Unsur Masyarakat yang hadir	100 orang	9.978.000,00	100,00	9.584.000,00	96,05	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	100 %	3.894.652.327,00	100,00	3.762.301.990,00	96,6	Kecamatan Bontang Barat
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi	1 kegiatan	14.912.500,00	100,00	14.907.400,00	99,97	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Lomba pembinaan keterampilan dan peran perempuan	4 Lomba	33.927.500,00	100,00	32.667.500,00	96,29	Kecamatan Bontang Barat
	Dukungan Kegiatan Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	1 Kegiatan	8.750.000,00	100,00	8.750.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produta	93 RT	1.650.533.000,00	100,00	1.623.118.600,00	98,34	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	3 lembaga	30.840.000,00	100,00	28.011.000,00	90,83	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dibina	12 RT	207.087.500,00	100,00	194.862.800,00	94,1	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	4 lembaga	52.062.577,00	100,00	46.320.000,00	88,97	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	44.722.250,00	100,00	41.750.000,00	93,35	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	33.875.000,00	100,00	33.875.000,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 Lembaga	280.612.500,00	100,00	273.102.900,00	97,32	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	171 orang	382.400.000,00	100,00	380.400.000,00	99,48	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	33 orang	74.600.000,00	100,00	72.600.000,00	97,32	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	90 orang	201.800.000,00	100,00	198.500.000,00	98,36	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	51 RT	350.000.000,00	100,00	347.430.670,00	99,27	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	169.060.000,00	100,00	167.328.700,00	98,98	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	30 RT	290.000.000,00	100,00	234.116.900,00	80,73	Kecamatan Bontang Barat
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Belimbing (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	19.355.730,00	83,59	Kecamatan Bontang Barat
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Kanaan (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	22.271.000,00	96,18	Kecamatan Bontang Barat
	Pelayanan Fasilitas Bantuan bagi Pemilik Usaha Mikro (BUPM) Kelurahan Gunung Telihan (Dana Insentif Daerah Tambahan)	#N/A	#N/A	23.156.500,00	100,00	22.933.790,00	99,04	Kecamatan Bontang Barat
27	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	100 %	245.227.500,00	100,00	244.696.100,00	99,78	Kecamatan Bontang Barat
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 Laporan	4.287.500,00	100,00	4.287.500,00	100	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	180.940.000,00	100,00	180.458.600,00	99,73	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	30 RT	60.000.000,00	100,00	59.950.000,00	99,92	Kecamatan Bontang Barat
28	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100 %	5.850.630.000,00	100,00	5.753.646.457,00	98,34	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.249.970,00	98,95	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbing	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.657.230,00	99,6	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.233.470,00	98,92	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.366.250,00	99,14	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.088.530,00	98,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.156.510,00	98,8	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.660.710,00	99,6	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.606.490,00	99,52	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.717.390,00	99,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.716.130,00	99,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.699.870,00	99,67	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.723.200,00	99,7	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.629.930,00	97,97	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	62.910.000,00	100,00	62.668.780,00	99,62	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.629.690,00	99,55	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.589.990,00	99,49	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.604.090,00	99,51	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.692.430,00	99,65	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.702.620,00	99,67	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.737.060,00	99,73	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.683.730,00	99,64	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.682.310,00	99,64	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.645.750,00	99,58	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.743.660,00	99,74	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.715.080,00	99,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.743.580,00	99,74	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.626.720,00	99,55	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.600.880,00	99,51	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.583.080,00	99,48	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.787.240,00	98,22	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.582.390,00	99,48	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.634.760,00	99,56	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.676.470,00	99,63	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.457.250,00	99,28	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.076.720,00	98,68	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.672.710,00	99,62	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.598.590,00	99,5	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	100 %	62.910.000,00	100,00	62.672.960,00	99,62	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.554.810,00	99,44	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.685.580,00	99,64	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.448.110,00	99,27	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.612.680,00	99,53	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.659.940,00	99,6	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.723.420,00	99,7	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.635.110,00	99,56	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.617.080,00	99,53	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.185.400,00	98,85	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.614.410,00	99,53	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.575.270,00	99,47	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	100 %	62.910.000,00	100,00	62.705.850,00	99,68	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	100 %	62.910.000,00	100,00	62.046.200,00	98,63	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.316.000,00	97,47	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.208.125,00	98,88	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.471.400,00	97,71	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	60.398.000,00	96,01	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.715.592,00	99,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	48.601.535,00	77,26	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	52.956.700,00	84,18	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.644.504,00	97,99	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.071.135,00	98,67	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.650.236,00	99,59	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.702.175,00	98,08	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	59.483.659,00	94,55	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	60.966.000,00	96,91	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.185.815,00	98,85	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.590.000,00	97,9	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	60.930.100,00	96,85	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.257.500,00	97,37	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.211.048,00	98,89	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	60.422.952,00	96,05	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	60.973.000,00	96,92	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.752.500,00	98,16	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.142.386,00	97,19	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.194.000,00	97,27	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.371.200,00	97,55	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	62.049.638,00	98,63	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.795.478,00	98,23	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.174.337,00	97,24	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.933.518,00	98,45	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	60.614.000,00	96,35	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.395.000,00	99,18	Kecamatan Bontang Barat

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			Perangkat Daerah
					Fisik (%)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.119.517,00	98,74	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.113.223,00	98,73	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.881.200,00	98,36	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.850.190,00	98,32	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkunga	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.800.401,00	98,24	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.995.053,00	98,55	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	62.286.945,00	99,01	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.456.997,00	97,69	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	60.991.032,00	96,95	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan LingJumlah Prasarana dan Sarana Lingkunganungan Permukiman RT	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.085.200,00	97,1	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	62.910.000,00	100,00	61.725.000,00	98,12	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	62.910.000,00	100,00	61.786.086,00	98,21	Kecamatan Bontang Barat
28 Program; 731 Kegiatan				100.308.723.809,00	99,77	96.890.101.761,00	96,59	